

Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag, dkk

Dinamika Politik Pendidikan Islam: Pengalaman Indonesia

Ia mengenal politik dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sejarah manusia. Politik membutuhkan pendidikan dan pendidikan memerlukan strategi politik untuk menerapkannya. Meskipun demikian, secara akademis terdapat ketebelahan pandangan mengenai hubungan formal antara politik dan pendidikan. Pandangan yang menginginkan tegaknya sisi-sisi otonomi profesional pendidikan justru melihat ancaman dalam kedekatan politik dan pendidikan. Kepentingan para politikus justru akan lebih cepat merusak ide-ide dan tujuan-tujuan universal pendidikan. Para pendukung pandangan non-political school ini kebanyakan berasal dari kalangan akademisi dan tradisi pendidikan yang meyakini bahwa sistem dan lembaga pendidikan harus dikeluarkan dari politik. Infiltrasi politik dalam pendidikan banyak menimbulkan bahaya bagi tegaknya marwah pendidikan. Di lain pihak, kalangan yang optimis dengan hubungan dekat politik dan pendidikan. Menurut mereka di manapun selalu terjadi proses yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Politik dan pendidikan adalah dua aktivitas yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, sehingga mustahil untuk dipisahkan. (Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag)

Dinamika Politik
Pendidikan Islam: Pengalaman Indonesia

Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag, dkk

Penerbit dan Percetakan

NoorFauzi

Jl. Imam Hidayatno, No. 12
Tlp. Fax: (011) 2664622
Email: noorfa@noorfa.com
Pekalongan-11000



Dinamika Politik

Pendidikan Islam: Pengalaman Indonesia



DINAMIKA POLITIK PENDIDIKAN ISLAM: Pengalaman Indonesia

Dr. ABDURRAHMANSYAH, M.Ag, dkk

Penerbit



Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
Ketentuan pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

DINAMIKA POLITIK PENDIDIKAN

ISLAM: Pengalaman Indonesia

Penulis : Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag, dkk
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Haryono

Hak Penerbit pada **Noerfikri**, Palembang
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
CV. AMANAH
Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142
Telp/Fax : 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Februari 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN: 978-602-447-379-2

Tim Penulis:

Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag.

Apriadi & Abbas

M. Pahrurroji & M. Sutikno

Evi Erianti & Femi Asmiyanti

M. Latief Efendi & M. Rizal Anshori

M. Sunadi & Dodi Irawan

Lady Nanda & Ita Pramita

M. Saiful Amin & Triyono

Naili Fauziah, Elma Fuadah

& Nurul Haibah Maghfuroh

Pengantar:

Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag.

Editor dan Desain Sampul:

Apriadi

KATA PENGANTAR

Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag

**Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Fatah
Palembang**

Alhamdulillah, akhirnya buku ini sampai juga di tangan para pembaca budiman setelah mengalami proses yang cukup panjang. Ide penulisan dan penerbitan buku ini berawal dari diskusi yang bersifat kontinyu dan terkadang berlangsung cukup keras di dalam kelas program magister pada setiap pertemuan mata kuliah *Politik Pendidikan Islam Kontemporer*. Para mahasiswa diwajibkan untuk banyak membaca dan menelaah wacana pendidikan Islam dilihat dari perspektif politik. Cakupan wilayah umat Islam yang dianalisis tidak hanya terbatas pada konteks Indonesia tetapi sangat meluas pada negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim atau negara-negara yang secara konstitusi memang menetapkan diri sebagai negara Islam.

Indonesia dalam konteks ini dijadikan pijakan awal sekaligus proyeksi akhir dari sebuah diskusi dan pergumulan pemikiran ide-ide untuk membentuk, mengembangkan, serta membangun supremasi pendidikan umat Islam. Sebagai sebuah lapangan studi (*field of study*) politik pendidikan secara umum memang belum menjadi populer di kalangan mahasiswa dan ilmuwan di Indonesia, sehingga sangat sulit untuk menemukan karya tulis yang baik tentang tema ini. Beberapa literatur yang tersedia berupa buku-buku kebanyakan tidak melihat politik pendidikan Islam secara komprehensif. Keterbatasan referensi ini lalu memunculkan ide agar mahasiswa pada program pascasarjana UIN Raden Fatah untuk menulis secara lebih

tajam mengenai tema-tema dalam mata kuliah ini untuk selanjutnya dapat dipublikasikan.

Isu mengenai politik dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sejarah manusia. Politik membutuhkan pendidikan dan pendidikan memerlukan strategi politik untuk menerapkannya. Meskipun demikian, secara akademis terdapat keterbelahan pandangan mengenai hubungan formal antara politik dan pendidikan. Pandangan yang menginginkan tegaknya sisi-sisi otonomi profesional pendidikan justru melihat ancaman dalam kedekatan politik dan pendidikan. Kepentingan para politikus justru akan lebih cepat merusak ide-ide dan tujuan-tujuan universal pendidikan. Para pendukung pandangan *non-political school* ini kebanyakan berasal dari kalangan akademisi dan praktisi pendidikan yang meyakini bahwa sistem dan lembaga pendidikan harus dikeluarkan dari politik. Infiltrasi politik dalam pendidikan banyak menimbulkan bahaya bagi tegaknya marwah pendidikan. Di lain pihak, kalangan yang optimis dengan hubungan dekat politik dan pendidikan. Menurut mereka di manapun selalu terjadi proses yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Politik dan pendidikan adalah dua aktivitas yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, sehingga mustahil untuk dipisahkan.

Di Australia dan Amerika justru pandangan pemisahan pendidikan dan politik sangat menguat dan cukup mengganggu. Menurut M.Sirozi (2005: 23) istilah "*education is outside of politics*" dan "*education should be taken out of politics together*" menjadi sangat populer di negara-negara tersebut. Lanjut M. Sirozi, setidaknya terdapat empat faktor utama yang mendukung ide pemisahan pendidikan dan politik. *Pertama*, dampak dari konflik yang tajam antara gereja dan

sekolah pada abad ke-19 di Eropa Barat. *Kedua*, anggapan traumatis bahwa politik sektarian tidak boleh mengganggu pendidikan. *Ketiga*, akibat berhasilnya sistem sentralistik pendidikan sehingga semakin memperkuat internal sekolah dan berkembangnya profesionalisme pendidikan. *Keempat*, adanya pandangan sebagian kalangan yang menganggap politik itu penuh tipu muslihat dan kotor sehingga sekolah dan pendidikan tidak bisa didekatkan dengan karakter politik yang semacam itu.

Untuk konteks di Indonesia, pendidikan dan politik telah terjadi pergumulan yang sangat intens sejak era kolonialisme sampai saat ini. Dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, lembaga dan praktik tidak mendapat tempat dalam sistem pendidikan kolonial Belanda. Tokoh-tokoh Islam tidak diberi akses untuk mengembangkan pendidikan Islam dalam konstelasi yang lebih luas. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dikembangkan secara mandiri dan apa adanya tanpa dukungan pemerintah dan penguasa. Pada era kemerdekaan baru mulai muncul ide-ide untuk mengajarkan Islam dan meningkatkan kualitas bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Pada perkembangan berikutnya, para tokoh Islam banyak yang harus terlibat dalam pergumulan politik. Organisasi agama bermuculan dan berubah menjadi partai politik. Meskipun dengan penjelasan yang berbeda menurut saya justru fenomena itu masih terjadi sampai sekarang. Partai-partai berbasis agama Islam yang saat ini ada merupakan lanjutan dari episode sebelumnya dengan tujuan abadi yaitu untuk menjaga kepentingan-kepentingan umat Islam dalam berbagai aspeknya, termasuk aspek pendidikan.

Politik anggaran pendidikan di Indonesia terus menerus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dilihat dari

arus distribusi untuk umat Islam. Perkembangan madrasah dari tahun ke tahun ditingkatkan kualitas layanan dan mutu sistem pendidikan secara keseluruhan. Sumber daya pendidikan umat Islam didorong oleh kebijakan pemerintah untuk terus berbenah sehingga dapat bersaing dengan sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. Akses umat Islam terhadap sumber pendidikan semakin luas dan beragam. Perkembangan pendidikan ini semakin menarik diperhatikan seiring dengan perkembangan fenomena politik yang terjadi sampai saat ini. Naiknya pamor atau setidaknya makin tingginya semangat berpolitik umat Islam melalui parta-partai politik dengan pencalonan tokoh-tokoh agama (Islam) sebagai eksekutif menjadi daya tarik tersendiri untuk menganalisisnya melalui perspektif politik pendidikan.

Politik nilai tinggi (*high values politics*) harus menjadi isu penting untuk dikedepankan dalam konteks upaya penguatan pendidikan Islam. Apapun problem dan kendala internal di kalangan antar partai politik umat Islam, tujuannya tidak mematikan akses umat terhadap layanan pendidikan bermutu. Perbedaan internal dalam hal visi, tujuan, dan proses pendidikan yang dipahami dan didesain masing-masing kelompok harus diorientasikan pada kualitas pendidikan umat secara lebih luas.

Pengalaman negara Islam dalam pergumulan politik dan pendidikan mereka menunjukkan gejala variasi dalam hal pengelolaannya. Bahkan dalam beberapa kasus tidak jarang negara menjadi gagal mengorganisasikan kekuatan-kekuatan politik yang ada untuk kemudian berdampak pada runtuhnya supremasi pendidikan umat. Negara-negara Islam dari sisi penguasaan sains dan teknologi masih dikesankan inferior,

termasuk Indonesia. Karena itu, ke depan orientasi pendidikan umat Islam harus diproyeksikan pada keunggulan dalam sains dan teknologi. Tantangan besar ini harus disadari oleh semua kelompok Islam dengan berbagai bentuk organisasi yang mereka dirikan.

Langkah transformatif untuk merubah status perguruan tinggi Islam menjadi universitas juga harus dilihat dalam kerangka perkembangan politik pendidikan Islam di Indonesia. Cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai model ideal dari pengembangan peradaban Islam masa depan patut diapresiasi. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar (87 persen) menjadi modal demografi untuk menjadikan Indonesia sebagai lokomotif dunia Islam dalam membangun *civilization* masa depan dengan fundamental budaya dan kultur yang kuat dan unik. Keunikan masyarakat Islam harus dijaga dan dipelihara karena justru inilah fundamental dan esensi budaya Islam yang dapat merekatkan berbagai perbedaan yang ada. Posisi Indonesia yang cukup jauh dari pusat tradisi Islam awal (timur tengah) justru menjadi daya tarik untuk melihat perkembangan masyarakat Islam yang kuat dengan tetap perpegang pada tradisi kulturalnya yang *genuine* dan *authentic*.

Otentisitas Islam Indonesia perlu dilanggengkan melalui pendidikan Islam yang didesain berdasarkan nilai-nilai budaya tersebut. Istilah “Islam Nusantara” yang kontroversial harus dipahami dalam konteks ini sehingga lebih produktif menawarkan wajah baru Islam modern yang berakar pada aspek kultural universal. Dalam pada itu, energi politik pendidikan Islam perlu dikerahkan untuk memperkuat konsep Islam Indonesia yang unik dan berkemajuan. Prestasi politik pendidikan yang sejauh ini telah dibangun perlu dipikirkan untuk pertahankan dalam kerangka membangun supremasi

keunggulan umat. Seiring dengan itu, penguatan sisi-sisi moral politik Islam harus terus ditingkatkan. Citra Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam raya harus benar-benar diwujudkan.

Akhirnya, semoga buku kecil ini dapat memberi manfaat sebagai setitik kontribusi pemikiran dalam mendiskusikan wacana politik pendidikan Islam. Saya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada para mahasiswa magister di UIN Raden Fatah ini atas kesadarannya terhadap pentingnya wacana politik pendidikan Islam dalam konstelasi pergumulan kepentingan internasional, transnasional, dan nasional dalam membangun kualitas pendidikan umat Islam di Indonesia khususnya. Semoga buku kecil ini bermanfaat untuk dijadikan bahan diskusi dan dikembangkan pada konteks yang lebih luas.

Palembang, 6 September 2018
Wakil Direktur PPs UIN Raden Fatah,

Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag.

Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul	i
Tim Penulis	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	x
BAB 1	1
Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Trend dan Tantangan Masa Depan)	2
<i>(Abdurrahmansyah)</i>	
BAB 2	66
Wacana Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Pengertian, Ruang Lingkup, dan Arah Pengembangan)	67
<i>(Apriadi & Abbas)</i>	
Politik Pendidikan Islam (Dinamika dan Tuntutan Mutu Pendidikan)	106
<i>(Fahrurroji dan M. Sutikno)</i>	
Politik Kependidikan (Konsep dan Praktek)	175
<i>(Evi Erianti & Femi Asmiyanti)</i>	

Bab 3	208
Paradigma Baru Pendidikan Sebagai Respon Tuntutan dan Kebutuhan Masyarakat Milenial	209
(<i>M. Latief Efendi & M. Rizal Anshori</i>)	
Paradigma Baru Sistem Pendidikan Modern	243
(<i>M. Sunadi & Dodi Irawan</i>)	
Bab 4	284
Pendidikan di Indonesia (Tantangan dan Solusi)	285
(<i>Lady nanda dan Ita Pramita</i>)	
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam (Fakta Tantangan dan Arah Baru)	326
(<i>M. Saiful Amin & Triyono</i>)	
Bab 5	386
Pendidikan Multikultural: Solusi Keberagaman di Indonesia	387
(<i>Naili Fauziah, Elma Fuadah & Nurul Haibah Maghfuroh</i>)	
Biodata Penulis	449

Bab 1



**POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI
INDONESIA**

(Trend dan Tantangan Masa Depan)

Oleh: Abdurrahmansyah

Pendahuluan

Setiap negara memiliki konsep dan pengalaman yang berbeda-beda mengenai praktik implementatif pendidikan masing-masing. Ideologi, dasar negara, filosofis, dan nilai-nilai kultural yang mengkristal sebagai *values* bagi bangsa tersebut merupakan motivasi utama untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai itu melalui berbagai kebijakan formal yang menjadi “program politis” dari negara yang bersangkutan. Bagi negara-negara yang memiliki dasar negara dan filosofis demokratis sekuler misalnya, akan menjaga dan memelihara nilai-nilai itu melalui usaha-usaha edukatif yang diprogramkan secara nasional. Demikian juga halnya bagi negara-negara yang memiliki dasar filosofis nasionalis-religius, akan cenderung menjaga identitas tersebut melalui kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterapkannya. Bahkan negara dengan ideologi komunis juga akan mengupayakan penanaman dan pengembangan nilai-nilai komunisme bagi warga negaranya melalui kebijakan-kebijakan pendidikan. Begitulah

sejatinya realitas kaitan antara pendidikan dengan politik pendidikan.

Politik dan pendidikan adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik negara. Keduanya secara salah sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah (*separated*) satu dengan yang lain dan tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal keduanya saling menopang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk prilaku politik masyarakat dalam sebuah negara (Sirozi, 2005: 1). Istilah pendidikan mengacu pada aktivitas yang terorganisir untuk membentuk tradisi belajar atau yang terlibat pada membangun situasi belajar dari sebuah masyarakat.

Dalam konteks sejarah sosial pendidikan Islam (*social history of Islamic education*) banyak evidensi yang menunjukkan bahwa para *ulama* (ilmuwan) dan *umara* (eksekutif-pemerintahan) memiliki komitmen yang sangat kuat dalam memperhatikan aspek pendidikan untuk mendukung dan melanggengkan posisi politik kelompok tertentu. Politik *patron client* seperti ini terus menerus berlangsung bahkan sampai saat ini. Kasus madrasah Nizamiyah dengan posisinya untuk memperkuat kekuasaan politik Bani Saljuk sesungguhnya dapat dijelaskan melalui analisis politik pendidikan ini. Berdirinya Universitas al-Azhar di Mesir yang legendaris itu

awalnya merupakan lembaga pendidikan yang dibangun untuk memelihara ideologi keagamaan Syi'ah pada zaman Dinasti Fatimiyah dan sekaligus untuk melanggengkan kekuasaan politik Fatimiyah.

Pada masa modern fenomena relasi kekuasaan dan pendidikan menjadi sebuah lapangan kajian (*field of study*) yang salah satunya untuk memahami kompleksitas relasi antara kekuasaan politik terhadap pelaksanaan pendidikan pada sebuah wilayah tertentu. Secara akademik sebagai suatu lapangan kajian, studi politik dalam pendidikan (*politics in education*) memiliki dua akar utama. Akar pertama didasarkan pada teori-teori dari khazanah sains politik (*political science*) dan akar kedua didasarkan pada teori-teori keorganisasian (*organizational theory*). Sains politik berusaha untuk menjelaskan bagaimana masyarakat dan organisasi sosial menggunakan kekuatan (*power*) untuk membangun regulasi dan mengalokasikan sumber daya. Sedangkan teori organisasi menggunakan teori-teori ilmiah dari ilmu manajemen yang secara mendalam mengembangkan pemahaman menuju keberfungsian organisasi. Selanjutnya, para peneliti menggambarkan perbedaan antara dua tipe politik dalam persekolahan. Pertama, terma *micropolitics* mengacu pada penggunaan kekuatan formal dan informal oleh para individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi mereka.

Proses kerjasama dan konflik adalah komponen yang terpadu dari *micropolitics*. Kedua, terma *macropolitics* mengacu pada bagaimana kekuasaan digunakan dan pengambilan keputusan dilakukan di tingkat distrik, provinsi, dan tingkat daerah yang lebih kecil. *Macropolitics* umumnya dianggap ada di luar sekolah, tetapi para peneliti telah mencatat bahwa mikro dan makropolitik mungkin ada di setiap tingkat sistem sekolah tergantung pada keadaan dan pola struktur organisasi yang berlaku pada sistem ketatanegaraan negara tertentu. Ada perbedaan yang signifikan antara "Politik Pendidikan" dan "Politik dalam Pendidikan".

Dalam beberapa literatur yang bersifat umum politik didefinisikan sebagai suatu proses di mana kelompok orang membuat keputusan-keputusan (*politics as a process by which groups of people make decisions*). Ini melibatkan relasi sosial yang melibatkan otoritas atau kekuasaan, dengan berbagai metode atau taktik untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan. Jadi, dalam kenyataannya, politik merembes sebagian besar—jika tidak semua—dari kehidupan sehari-hari kita, termasuk dan tentu saja sistem pendidikan kita. Tidak ada keraguan bahwa di bawah politik, orang mengangkat isu-isu seperti hak, imigrasi, tunawisma, serikat pekerja, kemiskinan, inklusi, pendanaan, keadilan sosial, aktivisme, dan seterusnya. Intinya adalah bahwa semua tindakan pengambilan keputusan

dari suatu kelompok dalam sistem pendidikan selalu bersifat politis. Owen (2006) mengingatkan kita bahwa pada akhir 1960-an, terdapat suatu istilah *micropolitics* pendidikan diperkenalkan oleh Laurence Iannoccone, dan didefinisikan sebagai 'politik yang terjadi di dalam dan di sekitar sekolah' (*politic in schools*)

Owen (2006: 7) mencatat bahwa "politik pendidikan", seperti politik pada umumnya, berputar di sekitar tiga entitas: orang, nilai dan sumber daya. Sedangkan sumber daya memerlukan pengetahuan. Hubungan antara pendidikan dan politik bukan sekedar hubungan saling memengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional. Lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang signifikan. Mungkin yang terpenting dari fungsi-fungsi tersebut bahwa sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menjadi agen-agen sosialisasi politik. Lembaga-lembaga pendidikan menjadi tempat di mana individu-individu, terutama anak-anak dan generasi muda, mempelajari sikap-sikap dan perasaan tentang sistem politik, dan sejenis peran politik yang diharapkan dari mereka.

Berbagai institusi pendidikan yang ada dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikehendaki. Berbagai aspek pembelajaran terutama kurikulum

dan bahan-bahan bacaan, sering kali diarahkan pada kepentingan politik tertentu. Dibanyak negara totaliter dan negara berkembang, pemimpin politik sangat menyadari fungsi pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Mereka melakukan berbagai cara untuk mengontrol sistem pendidikan dan menitipkan pesan-pesan politik melalui metode dan bahan ajar (*curriculum content*) pendidikan. Di negara-negara komunis misalnya, metode cuci otak (*brain washing*) digunakan secara luas untuk membentuk pola pikir kaum muda, agar sejalan dengan doktrin komunisme. Di Indonesia, hal serupa terjadi pada masa rezim Soeharto, beberapa kebijakan yang dikeluarkan juga untuk menunjang daya tahan rezim tersebut sehingga bisa bertahan selama 32 tahun.

Lene Pedersen (2016) menggambarkan kondisi Indonesia dengan keunikan yang menurutnya cukup “aneh” dengan berbagai pluralitas yang ada di dalam masyarakat, justru pemerintah berkuasa mampu “menyatukan” bangsa ini dengan berbagai kebijakan nasional. Secara eksplisit dan tanpa tedeng aling-aling, Lene menulis:

Religion has been highly politicised from the earliest nation-building days: Indonesia is the world's most populous Muslim nation, yet remains constitutionally secular. Embracing civil rather than Islamic law, an odd

compromise among the negotiating parties to nationhood emphasised that they would be a nation of monotheistic believers, with citizens formally obliged to adhere to one of six official world religions. Implementing this amid thousands of animist and syncretist communities involved coercion and conflict. Later, in the 1960s, at the first post-Independence regime shift, the emphasis on religious belief seriously impacted the nation's most notorious incidents of mass violence, when President Sukarno fell from power and then-General Suharto launched a campaign to eradicate communists. The crusade led to the torture and murder of a million people. The fear and anger that fuelled this violence was often instigated by the perceived sacrilege of those accused of being communist.

Pada perkembangan selanjutnya pemerintahan Soeharto membangun sistem politik yang permanen dan kuat sehingga bertahan puluhan tahun. Komunitas muslim Indonesia secara bertahap merasakan angin segar dari kebijakan pendidikan di era Soeharto dan mendapatkan tempat untuk berkembang dan diakui sebagai sub sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Era reformasi yang ditandai dengan kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 telah membawa perubahan mendasar

pada beberapa aspek pengelolaan sistem pendidikan nasional. Salah satu aspek perubahan yang cukup mendasar adalah bergesernya paradigma pengelolaan sistem pendidikan nasional dari paradigma sentralisasi ke desentralisasi. Institusi-institusi pendidikan, walaupun pada awalnya didesain untuk menjalankan fungsi-fungsi pendidikan semata, dalam perkembangannya bisa saja menjalankan fungsi-fungsi politik tertentu, baik disadari maupun tidak disadari oleh para pengelolanya. Ada tiga alasan utama dalam hal ini: Pertama, karena keberadaan dan perkembangan institusi pendidikan tidak terlepas dari dinamika sosial politik masyarakat lingkungannya. Kedua, karena kuatnya kecenderungan para politisi untuk mengeksploitasi peran institusi pendidikan untuk kepentingan politik mereka. Ketiga, karena para pengelola sekolah pada dasarnya juga adalah para politisi yang senantiasa dihadapkan pada dinamika internal maupun eksternal.

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian yang terpisahkan, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-Lembaga dan proses pendidikan

berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik pada suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di negara yang bersangkutan. Dalam ungkapan Abernethy dan Coombe (1965:287) dikatakan bahwa pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan (*education and politics are inextricably linked*).

Politik pendidikan atau *the politics of education* adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara penyampaiannya. Kajian ini lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta kemana perangkat tersebut akan diarahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan Negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan asumsi dan maksud dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik. Kajian politik pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik Negara dengan isu-isu praktis sehari-hari di sekolah; tentang kesadaran kelas; tentang berbagai bentuk dominasi dan sub-ordinasi yang sedang dibangun melalui jalur pendidikan.

Isi pendidikan dalam masyarakat manapun selalu dan pasti dipengaruhi secara politis. Pengaruh politik ini beroperasi

pada kedua tingkat yaitu untuk menerima apa yang merupakan "pengetahuan sejati" (*true knowledge*) (misalnya, model perencanaan versus teori pasar) dan untuk memilih "pengetahuan berharga" (*worthwhile knowledge*) yang biasanya menemukan tempatnya di dalam kurikulum dari seperangkat pengetahuan universal. Intervensi politik menentukan isi pendidikan. Sangat lumrah dipahami betapa isu-isu akademik sekalipun pada bidang-bidang seperti konten isi sejarah dan sosiologi selalu kental dan dekat kepentingan politik kekuasaan tertentu. Inilah sesungguhnya kekuatan dari politik terhadap pendidikan.

Politik pendidikan secara kritis mengkaji isu-isu politik yang dapat teramati dengan jelas melalui fenomena praktik pendidikan maupun yang tersembunyi sehingga tidak menjadi isu di tengah-tengah publik mengenai pendidikan. Mengacu pada pengalaman Amerika dalam menata dan mengembangkan kebijakan politik pendidikannya, setidaknya terdapat beberapa pertanyaan inti yang harus dijawab sebagai implementasi dari kebijakan politik pendidikan, yaitu: *who should go to school?*, *what should be the purpose of schooling?*, *what should children be taught ?*, *who decide issues of school direction and policy?*, *who should pay the schooling?*. (Stout, Tallericco, Skibner, 1994). Politik pendidikan senantiasa memastikan bahwa anak-anak bangsa mendapatkan akses terhadap

pendidikan berkualitas. Sasaran anak-anak bangsa sebagai subjek pendidikan adalah suatu tujuan politik pendidikan yang sangat primer. Kepentingan masyarakat sebagai aspek yang diutamakan dalam kebijakan pendidikan bermakna membuka akses yang luas bagi peserta didik untuk bersekolah. Tujuan yang akan dicapai oleh sekolah merupakan pencabaran dari tujuan nasional yang ditetapkan pemerintah melalui otoritas pendidikan. Pemangku kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa tujuan sekolah selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Demikian juga dengan isu kurikulum yang salah satunya berisi seperangkat materi ajar harus dipastikan memenuhi standar nasional yang ditetapkan. Pemerintah perlu memantai dan mengevaluasi kurikulum nasional dari sisi rencana, implementasi, dan sistem evaluasi pendidikan dalam rangka memastikan kualitas dan ketercapaian hasil belajar secara optimal. Kebijakan di tingkat lokal dan daerah harus dirancang dan dirumuskan dalam konteks memastikan para peserta didik diajarkan melalui suatu proses dan evaluasi yang berstandar mutu. Dalam pada itu, kebijakan pemerintah dalam hal pembiayaan pendidikan termasuk hal ihwal pembayaran *school fee* perlu menjadi perhatian dalam wacana politik pendidikan.

Isu penting dalam politik pendidikan yang mengemuka saat ini adalah diskursus mengenai desentralisasi yang terkait

dengan sistem pengelolaan aset pendidikan di daerah. Seberapa besar kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur berbagai hal mengenai pendidikan di daerah atau provinsi. Seberapa efektif jika daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengatur kebijakan pendidikan di wilayahnya sehingga tujuan-tujuan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal (*lokal wisdom*) dapat secara efektif dilaksanakan dengan cepat dan efisien.

Dalam laporan Sweinstani (2016) isu desentralisasi cukup aktual dan menjadi wacana penting yang banyak didiskusikan di negara-negara berkembang dalam rangka mengefektifkan proses pengelolaan pendidikan. Untuk kasus di Thailand dan Indonesia proses implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan telah berjalan dan menjadi pilihan solusi manajemen kebijakan pendidikan negara yang lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan desentralisasi di kedua negara ini, menurut Sweinstani telah menunjukkan gejala menuju efektivitas pengelolaan pendidikan meskipun masih menemukan banyak kendala dan problem regulatif dan implementatif. Indonesia dan Thailand sejauh ini telah menyediakan beberapa kebijakan untuk mendapatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang terdiri dari empat utama aspek yaitu kurikulum, pendidik, fasilitas, dan kepemimpinan dalam satuan pendidikan. Sayangnya, tidak semua tujuan reformasi

pendidikan melalui kebijakan desentralisasi ini telah berhasil secara komprehensif, tetapi justru implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia menyebabkan beberapa masalah dalam pendidikan, terutama di tingkat sekolah dasar.

Di tingkat pendidikan tinggi dalam konteks Indonesia, politik pendidikan memainkan peran penting untuk memastikan bahwa ideologi asing dan filsafat liberal yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional dan falsafah negara Pancasila tetap terjaga. Penerapan ekonomi pendidikan yang membiarkan persaingan asing dalam dunia pendidikan tinggi harus diatur dengan baik sehingga akses anak bangsa terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas tetap terjamin. Menurut kajian Andrew Rosser (2016) dalam artikel berjudul *Neo-Liberalism and the Politics of Higher Education Policy in Indonesia*, sejauh ini terdapat indikasi penetrasi kekuatan asing untuk memengaruhi arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Neo-Liberalisme menjadi pandangan baru yang banyak diminati berbagai kalangan akademisi dan pemangku kebijakan yang sangat memungkinkan pandangan ini menjadi arus utama dalam wacana kebijakan pendidikan. Rosser (2016) menegaskan reformasi neo-liberal telah berkembang di Indonesia di mana agenda neo-liberal telah selaras dengan kekuatan populer dan hanya ada sedikit perlawanan dari unsur-unsur predator (militer, birokrasi, dan politik dominan) yang

tidak sehaluan. Keadaan ini cukup rumit dan berada pada diskursus yang terus diperdebatkan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu membangun model pendidikan tinggi yang secara bersamaan sesuai dengan penyelesaian politik yang berkuasa dan menghasilkan hasil penelitian dan pengajaran yang lebih baik daripada model saat ini.

Politik pendidikan selalu diwarnai dengan tarik menarik kepentingan sesuai dengan tujuan-tujuan ideologi dan falsafah tertentu. Di Indonesia agaknya cukup relevan jika kajian demografi politik pendidikan didekatkan dengan wacana dan analisis politik pendidikan Islam. Secara populatif mayoritas penduduk Indonesia teridentifikasi sebagai *moslem majority* atau sekitar 87,2 persen. Kontribusi umat Islam terhadap perjalanan bangsa Indonesia telah berlangsung sejak lama pada zaman kekuasaan raja-raja Melayu sebelum masa penjajahan sampai awal masa kemerdekaan dan sampai sekarang. Dominasi dan representasi politik juga didominasi kalangan muslim. Pergulatan politik pendidikan kaum muslim di Indonesia telah berjalan sejak lama dan terus bergulir dengan berbagai sisi perubahannya.

Politik Pendidikan Islam di Indonesia: Sebuah Analisis Wacana

Kajian terbaru mengenai kiprah sekolah Islam di Indonesia sebagai penunjukkan komitmen politik pendidikan Islam di Indonesia seperti yang dilaporkan Kathleen E. Woodward (2016) dalam “*Indonesian Schools: Shaping the Future of Islam and Democracy in a Democratic Muslim Country*”, bahwa peran politik Islam cukup signifikan dalam kaitannya dengan upaya membangun sistem pendidikan Islam modern di Indonesia melalui sekolah-sekolah Islam. Melalui kebijakan pendidikan dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah telah memungkinkan dimulainya “*mainstreaming*” Islam terutama pada era tahun 1975-an. Sekolah-sekolah Islam semakin populer dan menjamur serta menunjukkan kualitas dan daya saing tinggi dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Para lulusan sekolah-sekolah dan madrasah dapat melanjutkan pendidikan tinggi ke universitas umum secara bebas. Dalam pada itu, Pemerintah baru-baru ini telah meningkatkan peran universitas Islam yang dikelola negara (*State Islamic University*) dengan memperluas penawaran gelar mereka untuk memasukkan banyak bidang disiplin ilmu non-agama. Kebijakan pembiayaan sekolah gratis sampai pada tingkat madrasah dan bahkan perguruan tinggi Islam.

Studi politik dikaitkan upaya reformasi sistem dan penyelenggaraan pendidikan diberbagai negara telah banyak dilakukan dan menunjukkan trend tingginya peminat atas kajian politik pendidikan ini. Berbagai studi perbandingan fenomena politik pendidikan diberbagai negara dihimpun secara sistematis oleh Zajda, Joseph, Geo-Jaja, dan Macleans A (2010) dalam buku *The Politics of Education Reforms*, menunjukkan semakin mengglobalnya gejala reformasi pendidikan dengan mengadopsi berbagai model dan pola-pola kebijakan dari berbagai sumber. Studi-studi kasus diambil dari tempat-tempat yang sangat beragam seperti Rusia, di mana reformasi pendidikan telah mencoba remodeling besar-besaran terhadap sistem bergaya Soviet yang dicirikan oleh uniformisme top-down, ke Delta Niger, di mana ia berpendapat bahwa hanya pendekatan-pendekatan non-pasar yang dapat memerangi pengucilan sosial yang endemik, kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Universitas Jepang yang sedang berkembang, sekolah swadaya Israel, dan pengajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi Tiongkok juga ada. Selain penelitian khusus situs, para kontributor menawarkan sejumlah analisis mendalam yang mengeksplorasi isu-isu di antarmuka teori pendidikan dan filsafat politik. Ini termasuk pemeriksaan paradigma dominan yang digunakan dalam mengkritisi reformasi pendidikan dan diskusi tentang hubungan antara

neoliberalisme dan perubahan kebijakan dalam pendidikan tinggi, di mana ia berpendapat bahwa keberlangsungan keberadaan dan kepentingan politik negara bangsa membuat universitas mereka jauh dari situasi netral.

Globalisasi dan kekuatan pasar yang kompetitif telah menghasilkan kenaikan dalam industri pengetahuan yang memiliki efek diferensial yang mendalam pada lembaga-lembaga pendidikan, sebuah analisis yang diakui oleh beberapa analisis. Sebagai organisasi pendidikan yang dipaksa untuk merangkul etos perusahaan efisiensi, akuntabilitas dan manajerialisme yang digerakkan oleh keuntungan, potensi diciptakan untuk polarisasi lebih lanjut dan divisi sosial-ekonomi dalam masyarakat yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Gejala ini terus akan berlangsung termasuk dalam konteks konstelasi perkembangan politik pendidikan Islam di Indonesia.

Ketidakpuasan publik dan konflik sosial biasa terjadi sebagai akibat adanya benturan idealisme yang didasarkan pada pemahaman ideologi tertentu. Indonesia berdasarkan sejarah pernah mengalami pertarungan politik yang sangat ketat dan bahkan berakhir dengan munculnya ketegangan politik serius. Kelompok yang mengusung ideologi agama, sosialisme, dan nasionalisme telah mewarnai konflik internal bangsa Indonesia yang menyisakan trauma mendalam sejak

orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno. Sampai saat ini sesungguhnya akar pergolakan itu masih ada dan terpendam pada tataran laten. Beberapa regulasi yang membatasi ruang gerak berkembangnya ideologi sosialisme-komunis misalnya cukup efektif untuk menahan laju perkembangan dan persemaian paham marxisme di Indonesia, meskipun pada tataran akademis di kalangan perguruan tinggi masih menarik untuk diperbincangkan.

Sebaliknya ideologi agama, terutama kelompok Islam secara efektif mendapat dukungan dan peluang untuk berkembang sampai saat ini. Partai politik yang berasaskan Islam secara formal diakui dan dengan leluasa mengembangkan pengaruh politiknya. Hal yang sama juga dirasakan oleh kelompok nasionalis yang masih mendapatkan peluang dan dukungan sejarah untuk berkembang dengan baik. Dapat dipastikan, sebenarnya dalam konteks pergulatan politik praktis kelompok agama dan nasionalis saling berebut pengaruh untuk mengendalikan kebijakan politik pemerintahan dengan berbagai aspek di dalamnya. Meskipun demikian, dapat dilihat pula ada jalan tengah yang menarik dipelajari dari pergulatan dua kelompok kekuatan politik ideologi ini (agama dan nasionalis) yaitu munculnya kecenderungan baru untuk merebut simpati baru dari kalangan agama yang berwawasan kebangsaan (nasionalisme) yang lebih khas Indonesia.

Gejala munculnya penampilan kalangan kelompok agama baru yang lebih mencirikan pola pikir yang dianggap lebih murni dan menggunakan jargon serta perilaku hidup sehari-hari yang lebih kental dengan sisi tradisi keagamaan. Ciri-ciri dalam cara berpakaian, pengelompokan, dan bahkan secara formal berkembang dalam konteks mengupayakan pola-pola pendidikan dengan membangun sebuah institusi pendidikan dengan ciri-ciri khas nuansa agama yang sangat kuat. Mungkin munculnya sekolah-sekolah Islam Terpadu dapat dipahami dalam konteks munculnya gejala ini. Dengan demikian, penampilan kelompok agama (Islam) tidak lagi tunggal tetapi justru memiliki varian dan boleh jadi secara “ideologis” cukup memiliki visi dan tujuan-tujuan yang berbeda. Penelitian lebih mendalam untuk memetakan pola-pola perjuangan ideologis dari kelompok-kelompok Islam ini menjadi penting termasuk melihat kiprah kelompok-kelompok agama ini dalam membangun kekuatan politik melalui jalur partai politik. Arah perjuangan kelompok Islam melalui partai politik bisa jadi justru memiliki dampak yang kurang efektif dalam membangun kekuatan Islam secara massif.

Dalam sebuah laporan singkatnya Karen Bryner (2011) menulis mengenai perkembangan sekolah Islam terpadu sebagai berikut:

Integrated Islamic schools are one of the fastest growing trends in Islamic education in post-Suharto Indonesia. As a result of expanded religious freedoms and lokal fervour for the global revival of Islam, a new market for Islamic schooling—largely among the middle and upper-middle classes – has emerged. It is estimated that there are now over 1000 of these primary and secondary integrated Islamic schools in Indonesia and nearly as many integrated preschools and kindergartens. The majority of these schools have been established in the last fifteen years.

Meskipun gerakan pendidikan baru dan inovatif ini masih relatif kecil, ini adalah kehadiran yang signifikan di sekolah-sekolah Islam perkotaan Indonesia, di mana pertumbuhannya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Meskipun ada perbedaan yang jelas dalam budaya sekolah kelompok-kelompok yang berbeda, pendekatan "Islam universal" mereka terhadap agama tidak menanamkan kesetiaan kepada Nahdatul Ulama, Muhammadiyah atau organisasi keagamaan utama lainnya.

Mengingat klien kelas menengah dan menengah atas dari mayoritas sekolah yang terintegrasi, lulusan mereka sangat mungkin menjadi beberapa pemimpin politik masa depan

Indonesia, aktivis sosial, akademisi dan pebisnis. Dilatih dalam "Islam universal" dan pemahaman yang terintegrasi dari pengetahuan sekuler dan agama, tokoh-tokoh tersebut memiliki potensi untuk membentuk kembali budaya agama, politik, dan sosial Indonesia saat ini yang tenggelam dalam dekade pengaruh dari Islam arus utama. Kehadiran sekolah Islam Terpadu nampaknya memberikan nuansa baru bagi perkembangan sistem persekolahan Islam di Indonesia. Nuansa baru ini boleh jadi sebagai konsekuensi dari paradigma dan ideologi yang berbeda dari mainstream sekolah Islam selama ini.

Menurut Suyatno (2014) dalam sebuah tulisannya berjudul "Sekolah Islam Terpadu; Filsafat, Ideologi, dan Tren Baru Pendidikan Islam di Indonesia", menjelaskan akar ideologis munculnya Sekolah Islam Terpadu (SDIT) di Indonesia, sebagai berikut:

Pada dekade akhir tahun 1980-an, Sekolah Islam Terpadu mulai bermunculan. Diawali oleh para aktivis dakwah kampus yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan beberapa universitas ternama lainnya yang tergabung dalam komunitas Jamaah Tarbiyah yang memiliki keprihatinan

terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Mereka adalah para aktivis Islam kampus yang berperan penting dalam menyebarkan ideologi Islam kepada para mahasiswa. Kalangan pemuda menjadi target utama dari gerakan ini karena mereka percaya bahwa para pemuda akan menjadi agen perubahan sosial yang sangat penting dalam melakukan Islamisasi seluruh masyarakat Indonesia. Tugas untuk menyiapkan generasi muda Muslim yang punya komitmen dakwah diyakini akan lebih efisien jika melalui pendidikan. Dalam konteks ini, mereka mendirikan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Nurul Fikri dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah menginspirasi berdirinya Sekolah-Sekolah Islam Terpadu di seluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini, ada sekitar 1.000 Sekolah Islam Terpadu yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) yang kepengurusannya telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan ada sekitar 10.000 Sekolah Islam Terpadu yang secara struktural tidak bergabung di bawah JSIT”.

Selanjutnya Suyatno menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Islam Terpadu telah memberi warna baru terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia dengan

memperkenalkan model alternatif untuk memadukan antara pendidikan agama yang menjadi ciri khas pesantren dan pendidikan modern yang menjadi ciri khas sekolah umum. Perbedaannya dengan madrasah, meskipun sama-sama memadukan antara pelajaran umum dan pelajaran agama, adalah Sekolah Islam Terpadu tidak hanya memadukan kedua jenis mata pelajaran tersebut dalam kurikulum formalnya saja, namun keduanya menyatu dalam satu kepribadian anak didik. Perlu diketahui bahwa sekolah ini juga mampu menampilkan corak baru mengenai reIslamisasi masyarakat muslim Indonesia. ReIslamisasi pada masa sebelumnya dilakukan di masjid-masjid dan melalui pengajian akbar, saat ini proses tersebut dilakukan melalui pembelajaran agama Islam di sekolah-sekolah.

Isu reIslamisasi ala SIT menarik dicermati dengan pola-pola pengajaran Islam yang cukup berbeda dengan model pengajaran Islam *mainstream* selama ini. Anak-anak didik pada SIT lebih dididik untuk dekat pada kebiasaan Islami untuk perilaku hidup sehari-hari. Menghafal do'a-do'a dan menunjukkan sikap sopan dan santun kepada orang tua dan guru menjadi penekanan pembelajaran budi pekerti pada SIT. Anak-anak didik secara perlahan-lahan dilatih dan dibiasakan untuk memiliki sikap dan perilaku hidup Islami sesuai dengan tuntunan Islam yang termaktub dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan

hadits. Sikap dan tradisi sehari-sehari yang selama ini dilihat dan dibiasakan namun tidak mencerminkan tradisi Islam berdasarkan dalil dianggap kurang baik dan lebih *afdhal* (utama) untuk ditinggalkan. Upaya-upaya seperti inilah mungkin yang disebut dengan reIslamisasi itu.

Lalu, bagaimana posisi perkembangan SIT ini dalam sistem persekolahan di Indonesia. Sejauh ini pemerintah cukup merespon positif tumbuh dan berkembangnya SIT di tengah-tengah masyarakat. Izin pendirian lembaga pendidikan SIT berjalan dengan baik sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Masyarakat juga menganggap eksistensi SIT menjadi alternatif baru bagi pola dan model persekolahan berbasis agama, yang selama ini lebih banyak diperankan oleh madrasah. Hamlan (2013) menegaskan bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan dalam peta politik pendidikan nasional. Perubahan dan perkembangan pendidikan Islam tersebut dipengaruhi oleh kepentingan ideologi politik dan kepentingan lainnya dalam pengambilan kebijakan negara ini tercermin dengan lahirnya berbagai kebijakan negara tentang pendidikan nasional yang memposisikan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional sejak masa pemerintahan Soekarno sampai pada masa pemerintahan orde reformasi sekarang ini.

Menurut Supriadin (2014) kelahiran madrasah merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan pola pendidikan Islam ala pesantren dengan pola pendidikan modern (ala Barat). Intervensi kebijakan/politik berpengaruh terhadap eksistensi pesantren dan madrasah. Pesantren dan madrasah diniyah sebagai sumber pendidikan dan pencerdasan masyarakat Indonesia yang sudah berurat-akar sejak sebelum kemerdekaan baru mendapatkan pengakuan secara yuridis pada era reformasi. Namun secara kebijakan sebenarnya upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan agama sudah dimulai sejak masa Mukti Ali sebagai Menteri Agama RI di masa Orde Baru. Mukti Ali disinyalir sebagai tokoh penting dalam memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum lembaga pendidikan agama (Abudin Nata, 2008).

Menurut penelitian Fendi Teguh Cahyono (2014) pada masa Orde Baru telah banyak kebijakan pendidikan nasional yang mampu meletakkan sistem pengembangan pendidikan Islam dalam berbagai levelnya mulai dari sistem persekolahan sampai perguruan tinggi. Setidaknya terdapat empat hal penting yang telah diletakkan sebagai fondasi perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Pertama, kebijakan tentang pembenahan lembaga pendidikan Islam. Upaya ini antara lain dilakukan dengan mengambil inisiatif dengan merembuk berbagai rencana itu dengan departemen lain,

khususnya departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah melalui proses panjang dan hati-hati, lahirlah surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri P&K dan Menteri Dalam Negeri, atau yang dikenal SKB tiga menteri, No.6 Tahun 1975, dan No. 037/U/a975. Dalam SKB tiga menteri tersebut ditegaskan: (1) agar ijazah madrasah dalam semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum; (2) agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih di atas; (3) agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% pelajaran umum, dan 30% pelajaran agama.

Melalui kebijakan SKB ini paling kurang ada dua hal penting bagi masa depan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu: 1). Dalam rangka integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. 2). Dengan memasukkan kurikulum pelajaran umum dalam jumlah jam yang besar, diharapkan pembenahan madrasah untuk di transformasikan menjadi lembaga pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia Muslim akan dapat diwujudkan. Pada awalnya terdapat pro dan kontra dikalangan umat Islam, termasuk para ulama, ustad dan pengelola pendidikan Islam yang menolak dengan menganggap dapat mematikan pendidikan Islam dikarenakan porsi kurikulum mata pelajaran

umum itu terlalu besar. Sehingga dikawatirkan akan menghilangkan misi lembaga pendidikan Islam sebagai tempat untuk menuntut ilmu agama.

Kedua, kebijakan tentang modernisasi lembaga pesantren. Melalui SKB Menteri Agama dengan Menteri Pertanian No. 34 A Tahun 1972, mengadakan program bersama dengan Departemen Pertanian untuk mengadakan pembinaan pondok pesantren dalam bidang pertanian dan perikanan. Kerja sama itu juga dilakukan dengan departemen-departemen lain, yang intinya ditujukan untuk memberi pembinaan-pembinaan manajerial bagi pengelolaan lembaga pendidikan Islam.

Ketiga, kebijakan tentang pembenahan IAIN. Segera setelah Departemen Agama mencanangkan perluasan pendidikan tinggi bagi umat Islam, sebagaimana

tercantum dalam Repelita I Tahun 1969-1973, umat Islam secara beramai-ramai entah atas nama yayasan agama, organisasi, pesantren atau pribadi, mendirikan IAIN. Menurut laporan Departemen Agama, disebutkan bahwa pada pertengahan tahun 1973, jumlah lembaga pendidikan tinggi Islam se Indonesia ada sekitar IAIN tersebar di seluruh pelosok tanah air. Ada yang di kota besar, dan ada juga yang di kota kecamatan, bahkan di pedesaan. Mempertimbangkan perkembangan ini, A. Mukti Ali kemudian meneliti kelayakan

IAIN yang berjumlah besar itu. Hasilnya berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama (Bimperta) No. 32 Tahun 1975, dari 112 IAIN itu hanya 13, semuanya terdapat di kota provinsi. Terhadap IAIN, A. Mukti Ali menanam kesadaran bersama bahwa IAIN memiliki tugas yang sama dengan perguruan tinggi lainnya. Artinya, IAIN harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi usaha pengajaran dan pendidikan, penelitian serta pengabdian masyarakat. Saat ini perkembangan IAIN sudah sangat pesat dan telah meningkatkan fungsi dan peranannya sebagai Universitas Islam Negeri (UIN) bagi IAIN yang telah memenuhi syarat.

Keempat, kebijakan peningkatan mutu IAIN. Kebijakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan mutu tenaga pengajar di IAIN. Dalam kaitan ini, Departemen Agama mulai mengirimkan dosen-dosen untuk belajar ke luar negeri, antara lain Timur Tengah, Amerika Serikat, Belanda, dan Kanada. Menurut catatan Departemen Agama, hingga 1972 jumlah dosen IAIN dan pejabat Departemen Agama yang dikirim ke Barat ada sekitar 55 orang. Dalam lingkungan di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, pada periode 1973-1978 tercatat sebanyak 32 orang dosen dikirim untuk melanjutkan studi antara lain ke Australia 6 orang, Inggris 2 orang, Mesir 7 orang, Sudan 2 orang, Kanada 9 orang dan ke

Belanda 8 orang. Di lain pihak, IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta semenjak tahun 1973 telah dikirim sejumlah orang dosen untuk melanjutkan pendidikan juga untuk studi banding meninjau pusat-pusat studi di Amerika, Kanada, Eropa dan Asia.

Berbagai kebijakan politik pendidikan yang diterapkan di Indonesia sangat berkaitan dengan ideologi politik para pembuat kebijakan. Beberapa Menteri Agama yang melakukan perubahan besar atas institusi pendidikan Islam di Indonesia seperti A. Mukti Ali dengan wawasan keilmuan Islam yang sangat luas dan lintas batas dengan penguasaan berbagai pendekatan ilmiah tentu melahirkan corak perkembangan lembaga pendidikan Islam yang modern dan terbuka. Pandangan sempit, rigid dan tertutup sesungguhnya menjadi semangat (*spirit*) perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia sejak awal.

Secara akademik kaitan antara kebijakan pendidikan dengan politik pendidikan dapat dilihat konstelasinya dengan menggunakan pendekatan teori politik *valuational*. Teori yang dikembangkan Thomas P. Jenkin ini bersifat ideologi politik. Teori ini dapat digunakan untuk melihat perkembangan kebijakan-kebijakan negara yang berkenaan dengan pendidikan yang selalu dikaitkan dengan moral dan nilai terhadap produk kebijakan negara dalam bidang pendidikan sesuai dengan corak

dan aliran ideologi yang dominan dalam mengambil kebijakan negara. Apabila aliran ideologi yang nasionalis dominan dalam mengambil kebijakan negara maka corak dan substansi dari kebijakan itu akan relevan dan berpengaruh terhadap corak ideologi yang dianutnya. Demikian pula jika aliran ideologi politik yang religius menjadi faktor yang dominan dalam mengambil kebijakan negara maka corak dan substansi dari kebijakan itu pun akan sesuai dan relevan dengan aliran ideologi yang bercorak religius. Merujuk atas teori politik tersebut menunjukkan hubungan antara pendidikan dan politik adalah seperti dua sisi mata uang yang antara satu dengan lainnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara pendidikan dan politik secara fungsional saling membutuhkan dan menunjang dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia (Hamlan, 2013).

Pendidikan Islam di Indonesia secara substantif dan sistemik sesungguhnya mampu berkembang dengan baik sejalan dengan perkembangan regulasi pendidikan nasional. Pendidikan Islam dapat berperan aktif untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut dengan membangun paradigma baru dalam mengembangkan keilmuan Islam di lembaga pendidikan atau sistem persekolahan Islam termasuk madrasah dan sekolah Islam terpadu. Paradigma penting yang perlu diselesaikan oleh pengelola pendidikan Islam adalah isu

mengenai wacana integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Lembaga pendidikan Islam dapat memerankan fungsi sebagai ujung tombak untuk merealisasikan paradigma integrasi ilmu sehingga keterbelahan pemahaman antara ilmu agama dan ilmu umum dapat diatasi.

Sekolah Islam di Indonesia ke depan harus mampu dan senantiasa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh nilai moral dan agama. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menjadi keharusan untuk kemaslahatan dan kemajuan umat Islam di masa kini dan masa datang. Masyarakat muslim Indonesia akan mengalami kesulitan yang cukup berat jika *gap* antara agama dan teknologi belum selesai dipahami secara utuh dan tuntas, dan bahan dipahami sebagai sesuatu yang saling bertentangan. Ke depan tantangan sekolah Islam di Indonesia masih berkisar pada upaya mengejar ketertinggalan pelajar muslim di lembaga pendidikan Islam (madrasah, SIT) dalam penguasaan sains dan teknologi.

Harus diakui bahwa persoalan kesenjangan penguasaan sains teknologi dan ilmu agama di sekolah Islam di Indonesia masih menyisakan persoalan yang perlu terus menerus dieliminasi jarak antara keduanya sehingga tidak menjadi jurang pemisah yang justru tidak produktif bagi perkembangan pendidikan Islam di masa depan. Menurut analisis Muhtarom

(2016) lembaga pendidikan Islam telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, namun keberadaan dan kontribusinya kurang signifikan terutama di Indonesia. Padahal, pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam membangun karakter. Problem dikotomi dalam konteks adanya kesenjangan sains dan agama dalam porsi penekanan penguasaannya harus disadari oleh para pemikir pendidikan Islam di Indonesia. Secara lugas Mukhtarom menulis bahwa:

The result shows that Islamic Religion Education development in National Education System attempted to eliminate dycothom between general education and religion education independently. Otherwise, it must have a collaboration with other education. In sum, Islamic Religion Education is not only legitimized in a whole as a part of National Education System but also it requires a curriculum change that collaborate Islamic Religion Education System with other subjects.

Bahwa perkembangan pendidikan Islam pada tataran sistem pendidikan nasional berupaya untuk menghilangkan dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama secara mandiri. Persoalannya strategi untuk menjembatani *gap* ini perlu

diformulasikan secara sistematis dan paradigmatik khususnya dalam hal pengembangan kurikulum pendidikan Islam.

A. Mahsun (2013) menegaskan bahwa untuk menjawab tantangan modernisasi dan globalisasi saat ini dan masa yang akan datang Islam di Indonesia membutuhkan jiwa besar dan semangat dari para pemikir dan tokoh Islam di negeri ini untuk melakukan reorientasi pemikiran pendidikan Islam. Isu mengenai ajakan untuk melakukan reorientasi ini sesungguhnya telah muncul sejak lama dan akan tetap relevan dilakukan saat ini. Para tokoh dan ilmuwan muslim dituntut untuk mampu memformulasikan kembali (*reformulation*) tujuan-tujuan penting pendidikan Islam dikaitkan dengan kebutuhan bangsa Indonesia ke depan. Proses pendidikan dan modernisasi pendidikan menjadi kata kunci untuk merubah wajah buram pendidikan Islam di Indonesia. Untuk ke depan menurut Mahsun tidak boleh lagi ada ketakutan untuk merumuskan kembali pemikiran keIslaman sebagai solusi terhadap berbagai problem keumatan dan keIndonesiaan. Beberapa buah pemikiran Islam yang selama ini dikonsumsi kaum muslim dan dipegang sebagai dasar kehidupan bisa jadi sudah ketinggalan zaman yang oleh karena itu perlu dilakukan reorientasi dan *rethinking Islam*. Perangkat pemikiran baru sangat dibutuhkan untuk mengeluarkan umat Islam dari apa

yang sebut oleh kalangan psikologi abnormal sebagai *syndrom of inferiority complex*.

Berbagai upaya sistematis perlu dilakukan umat Islam Indonesia untuk mengatasi problem psikologis dan konseptual mengenai pendidikan Islam. Upaya ini akan semakin cepat terealisasi jika semua komponen dari seluruh kelompok kaum muslim menyadari dan secara serentak melakukan perubahan secara cepat. Potensi politik kaum muslim di Indonesia saat ini cukup mendukung untuk melakukan perubahan ini. Kekuatan politik kepartaian dan sistem birokrasi pemerintahan dapat diorientasikan untuk mengembangkan seluruh potensi umat Islam melalui pendidikan. Tujuan akhir dari upaya ini adalah tercapainya *learning society* atau *educated people* dari umat Islam. Pendidikan harus menjadi prioritas siapa pun yang membidik pembangunan berkelanjutan. Segala bentuk kemajuan tergantung pada upaya yang diambil untuk meningkatkan generasi masa depan. Pendidikan merupakan faktor yang jelas dalam pengukuran pemerintahan yang baik. Banyak kajian dan diskusi telah dilakukan mengenai seberapa banyak dan jenis intervensi apa yang oleh pemerintah harus didorong dengan mempertimbangkan kemajuan pada masa yang telah lalu dan sekaligus menganalisis tantangan masa depan.

Dalam sebuah laporannya, Tannishtha Bhattacharjee (2017) menulis menulis dalam artikel berjudul *Politics and*

Education: Impact, Interventions and Interactions, secara tegas mengidentifikasi beberapa aspek yang sering menjadi wilayah intervensi politik dalam pendidikan. Dalam hal ini Bhattacharjee menulis:

If I had to list a few of those aspects of education that politics can directly affect, then these would be it: 1. Curriculum and Syllabi. 2. Assessment models and structures. 3. Temporal Structure of courses and degrees. 4. Meanings and Values attached to grades and marks. 5. Content (Textbooks). 6. Organisation of subjects. 7. Quality of education dispensed.

Keputusan politik sebagai kebijakan pendidikan mengenai beberapa aspek di atas sangat bergantung pada konsep dan bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang dipilih. Muatan ideologi kolektif, dan tekanan ideologis, kurangnya pemahaman yang bernuansa psikologi atau sosiologi pendidikan pada pembuat keputusan pendidikan ini adalah beberapa faktor yang dapat membuat potret pendidikan itu sendiri. Tidak semua keputusan politik terhadap pendidikan akan berakhir dengan baik, bahkan banyak keputusan politik yang diambil mengenai pendidikan, dan pelaksanaannya telah mencerminkan kurangnya pengalaman, perspektif, keahlian

dan eksposur mereka sebagai pembuat keputusan tentang fungsi pendidikan.

C. D. Rowley (1971) dalam sebuah bukunya yang sudah menjadi klasik berjudul *The Politics of Educational Planning in Developing Countries* dengan tegas mengatakan bahwa:

The decisions in an education plan are political in their nature and in their effects. They are decisions about who shall get how much of a limited resource, and when. They affect people in a 'soft' area in human relations-the future of their children. The educationist generally holds to the values of equal educational opportunity, and of the function of education in developing human potential and personality. This brings him to a dilemma. For if he adheres strictly to these ideals, he becomes politically ineffective. He has to realise the existence of power, and how it must be wielded. Otherwise his plan tends to be a statement of what ought to be done in a political system as he thinks it ought to be done. To be effective he must produce an action plan which can be modified without losing all that he aims for. Otherwise his plan will resemble many of the national constitutions proclaimed with high hopes in the last two decades or so. It will be

mainly an assertion of respectability. On the other hand, the planner without ideals can find himself used mainly as a propagandist and technician by the government of the day. The difficult task is to balance what is best with what is possible.

Melalui penelusuran akademiknya C.D. Rowley sesungguhnya ingin menegaskan bahwa apapun kebijakan dan keputusan pemerintah mengenai pendidikan adalah bersifat politik secara asas dan dampaknya. Pembuat kebijakan politik terhadap pendidikan selalu berada pada situasi dilematik antara mengutarakan idealita dan realita sebagai potensi dan cita-cita pendidikan kebangsaan. Tidak jarang para pemegang kekuasaan politik justru menuai kontradiksi dari sebagian kekuatan di masyarakat tentang sebuah kebijakan pendidikannya, sehingga apa yang direncanakan hanya tinggal menjadi cita-cita saja tanpa dapat direalisasikan karena sangat lemah daya dukung. Agar efektif dia harus menghasilkan rencana aksi yang dapat dimodifikasi tanpa kehilangan semua yang ia inginkan. Sangat sulit untuk menyeimbangkan dua sisi ini yakni apa yang terbaik dan apa yang mungkin dilakukan.

Indonesia dengan keragaman dari berbagai aspek tentu menjadi tantangan tersendiri untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih mengutamakan satu komunitas tertentu.

Pertimbangan dan alasan yang tepat menjadi ukuran untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan pendidikan dapat diterima sebagai sebuah bangsa dengan tingkat pluralitas yang sangat tinggi. Faktor mayoritas penduduk muslim selama ini menjadi faktor yang mendukung adanya berbagai kebijakan pendidikan nasional yang lebih mengatur persoalan kepentingan umat Islam dari sisi penyelenggaraan pendidikan.

Teori partisipasi yang banyak dikembangkan dalam kajian sosio-politik agaknya relevan untuk melihat kontribusi umat Islam di Indonesia dalam aktivitas politik. Dalam teori ini banyak varian model partisipasi politik yang ditunjukkan masyarakat dalam mengekspresikan tuntutan dan keinginan politik mereka terhadap jalannya sistem pemerintahan. Peluang ini selanjutnya dimainkan oleh kalangan partai politik dalam menyalurkan aspirasi politik umat Islam. Di Indonesia partisipasi politik umat Islam terdistribusi ke dalam berbagai partai politik. Partai yang berazaskan ideologi Islam dan nasional malah diperankan oleh hampir oleh umat Islam juga. Sehingga tidak ada partai politik yang mengklaim sebagai partai yang menyalurkan kepentingan Islam secara sepihak, karena semua partai juga peduli terhadap kesejahteraan dan kebaikan umat Islam.

Dalam konteks pemahaman umat Islam saat ini, terdapat isu menarik untuk diperbincangkan yaitu terkait

dengan istilah *the radical Islam*. Secara substantif hampir semua umat Islam setuju bahwa Islam mengajarkan kedamaian dan anti kekerasan. Namun tidak menutup kemungkinan tanpa disadari metodologi memahami Islam atau cara memahami Islam yang ditunjukkan oleh sebagian kalangan umat Islam cenderung mengarah pada pembentukan karakter *radical*. Karena ini wilayah pembelajaran dan metodologi memahami yang dilakukan secara eksklusif maka sulit terdeteksi. Namun demikian, menurut Syamsul Arifin (2016) dalam tulisannya *Islamic Religious Education and Radicalism in Indonesia: Deradicalization through Strengthening the Living values Education* mengakui adanya ancaman dari kalangan tertentu untuk menyebarkan paham radikal dan sempit ini, sehingga model, strategi dan pendekatan pengajaran Islam dari sisi tujuan, konten, dan prosesnya perlu dikontrol oleh seluruh umat Islam termasuk pemerintah agar tidak merusak identitas keragaman Indonesia.

Dengan menawarkan model pendidikan yang disebutnya dengan *Islamic education based LVE*, para pelajar mampu memahami arti terdalam dari semangat keberagaman. Dengan nada mengkritik model pendekatan pembelajaran agama selama ini cenderung formalistik, Syamsul menegaskan perlunya mengembangkan model pembelajaran sisi afeksi dari pembelajaran Islam. Dalam konteks ini Syamsul menulis:

At practical level, the implementation of Islamic religious education is still needs to be closer to the frame of view. Because so far run formalistic religious education, activities merely to fulfill the will of the construction indeed requires that Islamic religious education matter that must be given at all levels of education. In additions, Islamic religious educations was also criticized because it still insist on studies that are too normative, less illustration of the social-cultur context, and less directed to how change the religious knowledge that cognitive “meaning” and “values” that need to be internalized within the participant learning (Syamsul, 2016:116).

Nuansa pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang lebih mendekatkan siswa dengan konteks sosial kultur lebih mampu menolak paham radikalisme yang sesungguhnya bertengger pada tataran normatif Islam. Para penganjur paham radikal biasanya selalu bertolak dari teks yang tidak dimaknai dan dipahami secara kontekstual. Oleh karena itu, salah satu upaya menyelamatkan para pelajar dari paham radikal adalah dengan mengembangkan konten dan proses pembelajaran yang lebih terbuka dengan mengedepankan analisis dan argumentasi ilmiah berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan.

Sesungguhnya posisi pemerintah dapat melakukan peran sebagai pihak yang mengontrol dan mengawasi konten dan proses pembelajaran agama di sekolah. Pemerintah bisa saja mengeluarkan maklumat untuk melarang sekolah mengajarkan suatu materi tertentu yang dianggap dapat merugikan kepentingan bangsa. Di Indonesia, paham komunisme dan berbagai pandangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila serta nilai-nilai kultur bangsa dapat dilarang untuk diajarkan di kelas. Dan inilah salah satu bentuk nyata dari politik pendidikan itu, yakni mengatur dan mengorganisasikan pendidikan untuk kepentingan bangsa. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memisahkan politik dengan pendidikan (M. Sirozi, 2016).

Di Australia ada isu untuk mengeluarkan politik dari kelas. Partai Buruh telah berjanji untuk menciptakan sebuah lembaga penelitian senilai A \$ 280 juta untuk “membawa politik keluar dari kelas” dan “mengakhiri peperangan ideologi selama bertahun-tahun tentang pendidikan sekolah”, jika memenangkan pemilihan federal berikutnya. Shadow Menteri Pendidikan Tanya Plibersek mengatakan bahwa, “Politisi tidak boleh memberi tahu guru cara melakukan pekerjaan mereka, atau menggunakan sekolah sebagai medan pertempuran ideologis” (*Politicians shouldn't tell teachers how to do their*

jobs, or be using schools as ideological battlegrounds (Jennifer Charteris, 2018).

Isu untuk memisahkan politik dari sekolah seperti yang menjadi wacana politik di Australia, tentu saja cukup mengherankan bagi para peneliti politik pendidikan mengingat sangat dekat dan berkelindannya aspek politis dalam pendidikan. Dalam konteks bahwa sekolah, guru, dan ruang kelas memiliki standar sistem operasionalnya sendiri yang secara akademik berdasarkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran harus dihormati dengan baik. Namun dari sisi kebijakan untuk menentukan paradigma dan filosofi pendidikan, tentu saja pandangan politik negara harus terlihat. Kebijakan-kebijakan pendidikan negara yang diberlakukan harus menggambarkan atau merupakan pengejawantahan dari tujuan nasional pendidikan.

Politik Pendidikan di Indonesia: Peluang dan Tantangan

Pada era reformasi pergerakan bandul politik pendidikan Islam di Indonesia secara umum mengalami perkembangan menuju harapan terbangunnya sistem pendidikan Islam yang lebih modern dan berdaya saing. Setidaknya sejak Orde Reformasi perubahan kebijakan pendidikan nasional sangat mendukung upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang bertumpu pada fondasi

pembangunan pendidikan nasional yang lebih aspiratif, demokratis, dan partisipatif. Sebagai agenda perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan nasional di masa depan terdapat isu penting yang perlu direkonstruksi dalam kerangka memperkuat sistem otonomi daerah, yaitu: 1). Isu mengenai mutu pendidikan yang masih relatif rendah di bandingkan negara-negara tetangga. 2). Isu mengenai efesiensi pengelolaan pendidikan. 3). Relevansi pendidikan. 4). Pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh warga bangsa di berbagai daerah khususnya di luar Jawa (Khalilah Harahap, 2017)

Dengan melihat perkembangan regulasi dan implementasi pendidikan di Indonesia yang secara bertahap terus ditingkatkan kualitasnya, harapan dan peluang untuk melihat masa depan pendidikan berkualitas akan semakin optimis. Optimisme terhadap perkembangan pendidikan Indonesia khususnya pada sistem persekolahan setidaknya digambarkan oleh Firman dan Tola (2008) melalui tulisannya berjudul *The Future of Schooling in Indonesia* dengan mencermati kebijakan desentralisasi pendidikan yang kian berkembang. Dalam konteks ini Firman & Tola menulis:

On the basis of the new Education Law enacted in the Year 2003, which conveys the spirit of educational decentralization, the Government of Indonesia has

implemented a number of reforms to change education practices at the school level. The reforms include among other things the implementation of school-based management, a school-level curriculum, school-based teacher professional development, teacher certification, international benchmarking, and national examinations. The reforms are expected to synergically cause an on-going continuous school restructuring to become more autonomous in making lokal decisions, strong community participations, and effective in delivering quality education services.

Sebagai sebuah pilihan kebijakan yang modern, sistem desentralisasi memang lebih memungkinkan percepatan dan efektivitas pengelolaan pendidikan secara efisien dan efektif. Sistem penganggaran dan koordinasi di daerah akan semakin cepat. Dengan semangat desentralisasi pendidikan, pemerintah Indonesia melalui otoritas pendidikan telah melaksanakan sejumlah reformasi untuk mengubah praktik pendidikan di tingkat sekolah. Penerapan manajemen berbasis sekolah, kurikulum tingkat sekolah, pengembangan profesi guru berbasis sekolah, guru sertifikasi, pembandingan internasional, dan ujian nasional merupakan konsekuensi logis dari implementasi desentralisasi. Reformasi diharapkan secara

sinergis menyebabkan restrukturisasi sekolah berkelanjutan terus menerus menjadi lebih otonom dalam membuat keputusan lokal, partisipasi masyarakat yang kuat, dan efektif dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas.

Secara politik bisa jadi keputusan untuk merestrukturisasi sekolah dalam sistem desentralisasi belum menguntungkan jika dilihat dari kepentingan politik nasional. Namun pijakan yang kuat untuk menapaki masa depan yang penuh tantangan dan menghadapi ancaman global keputusan politik pendidikan ini justru sangat bermakna. Sekolah di Indonesia dalam satu atau dua dekade akan memiliki fitur-fitur umum berikut: 1) memiliki kapasitas untuk mengelola program pendidikan dan keuangan otonom bertanggung jawab; (2) untuk memulai sistem demokratis dan terbuka, dicirikan oleh yang langsung keterlibatan orang dalam komunitas dalam pembuatan keputusan dan penutupan hubungan antara sekolah dan para pemangku kepentingan; (3) untuk menciptakan organisasi pembelajaran itu dapat menghasilkan inovasi dalam pemecahan masalah praktis; (4) untuk merujuk pada suatu standar internasional dalam proses pendidikan, termasuk kurikulum, bahan ajar dan penilaian pembelajaran, sehingga hasil pendidikan sekolah lebih kompetitif secara global; dan (5) untuk menerapkan kualitas manajemen secara efektif untuk mengembangkan budaya kualitas di Indonesia komunitas

sekolah yang dapat menjamin kualitas yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Melalui fitur sekolah yang dijelaskan di atas, diharapkan bahwa sekolah masa depan di Indonesia bisa menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung semua sektor pembangunan, terutama pengembangan sektor ekonomi (Firman & Tola, 2008).

Salah satu tantangan yang dihadapi sekolah Islam di Indonesia, menurut Charlene Tan (2014) adalah penerapan prinsip Islam dan nilai-nilainya ke dalam pembelajaran pelajaran umum (*many Islamic schools in Indonesia face a perennial challenge in infusing Islamic principles and values into the teaching of modern 'secular' subjects*). Pandangan Tan ini tentu saja menjadi benar jika umat Islam masih mempertentangkan metodologi pembelajaran modern dengan metodologi tradisional dalam tradisi pendidikan Islam. Namun untuk saat ini agaknya kedua pendekatan dalam memahami tradisi pendidikan umat Islam di Indonesia mulai mencair. Madrasah dan pesantren banyak yang telah membuka diri dan menggunakan berbagai pendekatan modern dalam pembelajaran. Demikian juga dengan penggunaan teknologi pembelajaran, media berbasis komputer atau ICT (*Information Communication Technology*) telah banyak digunakan pada sekolah Islam.

Isu keragaman dan perbedaan (*diversity*) juga cenderung tidak menjadi problem bagi umat beragama di Indonesia. Beberapa konflik yang secara komunal melibatkan umat beragama sesungguhnya lebih disebabkan faktor kemiskinan, korupsi, kekerasan, dan ketidakpedulian (Elihami, 2016). Namun demikian, pendidikan dianggap sangat urgen untuk memupuk kerukunan beragama melalui pilihan konten, metodologi, dan proses pembelajaran di sekolah. Berbagai model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan di Indonesia untuk menghadapi tantangan multikulturalisme cukup mampu membantu peserta didik untuk menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan agama.

Tantangan pendidikan Islam di Indonesia agaknya masih berkisar pada isu memperkuat identitas ke-Indonesiaan dalam menghadapi penetrasi pandangan yang *out of context*. Menurut Suriana (2014) pendidikan Islam ke depan tidak hanya diorientasikan pada penguasaan *general sciencies* semata, namun juga harus diarahkan untuk membentuk *personality* yang sesuai dengan *genre* budaya bangsa. Oleh karena itu, posisi ideal pengembangan politik pendidikan Islam adalah meneguhkan upaya mempertahankan sikap selektif, kritis, dan terbuka terhadap munculnya arus globalisasi. Di samping itu juga, harus tetap konsisten terhadap sumber utama agama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits sambil memperluas

wawasan dan pemahaman terhadap kemajuan zaman, modernitas, temuan sains dan teknologi. Identitas Islam yang sejak lama berkembang di Indonesia penting untuk dikuatkan dalam rangka membingkai identitas kebangsaan dan keIslaman yang unik dan bermakna.

Dalam konteks kualitas manajemen lembaga pendidikan Islam, harus diakui institusi pendidikan Islam masih banyak menyimpan persoalan serius sehingga membelenggu gerak laju menuju sistem layanan pendidikan Islam yang modern yang berbasis sistem penjaminan mutu layanan pendidikan. Menurut Hakim (2014) saat ini setidaknya terdapat beberapa isu krusial yang menjadi problem internal lembaga pendidikan Islam di antaranya lembaga pendidikan pesantren di Indonesia masih banyak bercorak tradisional dan para pengelola pendidikan Islam masih memiliki kualifikasi pendidikan yang belum tinggi. Kondisi ini tentu saja mempersulit umat Islam untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Menurut Madjid (1997: 5), memang dunia pendidikan pesantren (tradisional) terjadi kesenjangan waktu atau *time lage* yaitu, suatu bentuk ketertinggalan oleh zaman modern. Untuk itu, menurut beliau perlu diadakan rekontruksi pada pendidikan pesantren berupa merumuskan kembali visi dan tujuan pendidikan pesantren. Visi dan tujuan pendidikan

pesantren di masa yang akan datang menurut Nurcholish Madjid mempunyai *double missions* sekaligus, yaitu; sebagai lembaga pendidikan keagamaan, bagaimana pesantren menyuguhkan kembali isi pesan moral agar tetap relevan sehingga tetap mempunyai daya tarik, dan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan (*center of excellence*) (Madjid,1993: 228). Dengan demikian Nurcholish Madjid menjadikan pesantren sebagai agen perubahan sosial (*agen of social change*). Untuk menjalankan kedua misi ini, pesantren harus terbuka terhadap perubahan dan mengikuti perkembangan di luar, mampu menerima dan menyeleksi budaya luar. Dengan demikian, diharapkan pesantren menjadi alternatif bagi pembangunan yang berpusat pada masyarakat sendiri (*people-centered development*) dan pusat pengembangan pembangunan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented development*) (Ramli & Abdussamad, 2016).

Dalam konteks kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di institusi pendidikan Islam sebenarnya telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program peningkatan wawasan dan kompetensi para pengelola lembaga pendidikan Islam. Pemerintah melalui Kementerian Agama RI misalnya telah memberikan kesempatan bagi para pimpinan pondok pesantren untuk melakukan studi banding di luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir mulai 2014

Kementerian Agama RI melaksanakan kebijakan pemberian beasiswa penuh bagi para dosen dan pengajar di lembaga pendidikan tinggi agama baik negeri maupun swasta untuk mengikuti program 5000 doktor yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Demikian juga untuk level madrasah, siswa-siswa berprestasi didorong untuk mendapatkan kesempatan yang luas dalam menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dengan pemberian beasiswa dari pemerintah.

Peluang dan kesempatan bagi para pelajar muslim baik di sekolah Islam atau madrasah semakin terbuka lebar dengan adanya kebijakan pemerintah dalam memberi akses kepada lulusan ini untuk berkompetisi dan masuk ke universitas ternama di Indonesia. Beberapa alumni madrasah Aliyah banyak yang lulus dan diterima di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan seterusnya. Selain itu, beberapa instansi telah membuat kebijakan untuk menerima peserta seleksi untuk menjadi karyawan dan pegawai bagi para lulusan SLTA dan madrasah yang mampu menghafal Al-Qur'an (hafidz/hafidzah) dan mereka dinyatakan sebagai peserta seleksi yang diprioritaskan. Anggapan bahwa para penghafal Al-Qur'an akan cenderung lebih mampu bekerja dengan baik dan tidak memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan pelanggaran

disiplin dan hal-hal negatif lainnya. Anggapan seperti ini sebagai respon terhadap banyaknya kasus-kasus pelanggaran moral yang sebagian besar dilakukan oleh mereka yang sejak awal tidak mendapatkan didikan agama secara lebih baik. Meskipun demikian sulit juga untuk memastikan bahwa lulusan lembaga pendidikan agama sudah menjadi jaminan untuk senantiasa berperilaku baik.

Kualitas pembelajaran agama di Indonesia sesungguhnya masih membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk terus ditingkatkan dari sisi mutu proses pembelajaran dan evaluasi belajar. Sampai saat ini masih cukup sering pandangan para pakar dan peneliti pendidikan yang mensinyalir rendahnya kualitas pembelajaran agama (Pendidikan Agama Islam) di sekolah dan termasuk juga di madrasah. Dalam sebuah penelitiannya, Zalik Nuryana (2017) mengungkapkan fakta bahwa kemampuan profesionalitas guru PAI di Indonesia masih cukup rendah khususnya dalam konteks kemampuan mengimplementasikan kurikulum. Setidaknya terdapat beberapa temuan penting dalam penelitian ini untuk menggambarkan kualitas proses pembelajaran PAI, yaitu: 1) Kurikulum 2013 yang harus dipahami oleh guru PAI sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran belum sepenuhnya dipahami. 2) Referensi pelaksanaan perencanaan, implementasi dan evaluasi K13 pada pembelajaran PAI belum sepenuhnya

dilaksanakan. 3) Pendekatan ilmiah dan penilaian otentik belum dipahami dan dilaksanakan oleh guru PAI. Penelitian ini sekaligus memberikan peringatan kepada kalangan lembaga pendidikan agama untuk selalu meningkatkan standar kualitas mengingat masa depan pendidikan Islam di Indonesia sangat ditentukan oleh kinerja dan profesionalitas para pendidik.

Selain tantangan dan problem internal yang bersifat teknis yang berkaitan dengan aspek penyelenggaraan dan sistem manajemen dan *human resources* yang masih cukup lemah, menurut Haikal Poetra (2016) secara ideologis lembaga pendidikan Islam masih harus berhadapan dengan tantangan besar. Pertama, masih kuatnya persepsi negatif sebagian besar masyarakat bahwa gerakan ekstrimis dan radikal datang dari lembaga pendidikan Islam. Kedua, menurunnya esensi dan kualitas pendidikan Islam. Esensi ini berkurang ketika kita tidak lagi menjadikan Al-Qur'an dan *Hadis* sebagai pedoman hidup, kita lebih memilih sumber dari para Orientalis yang 'kurang mengenal' psikologi dan kepribadian Islam secara keseluruhan. Secara kualitas, Orientalis zaman kontemporer ini wajib kita teladani, berkat kegigihan mereka mempelajari Islam, banyak karya dan literatur yang dihasilkan oleh mereka. Namun, perlu diingat, kebanyakan para orientalis atau Islamolog mempelajari Islam sebagai fenomena sosial saja, bukan sebuah perpaduan antara keyakinan teologis dengan

segala aspek kehidupan sebagai pedoman namun lebih sebagai objek riset. Ketiga, tercampurnya sistem dan standarisasi pendidikan Islam dengan sekuler. Solusi dari tantangan besar pendidikan Islam di atas adalah, *Pertama*, persepsi negatif terhadap Islam harus dihilangkan dengan cara memperbanyak dialog antar agama supaya menghilangkan miskonsepsi terhadap Islam. *Kedua*, meningkatkan kualitas dan memperbaiki sistem pendidikan dengan cara meletakkan Al-Qur'an dan *Hadis* dalam menjalankan seluruh aktivitas dan manajemen pendidikan Islam khususnya di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam mesti meletakkan fondasi dialogis untuk memahami problem kemanusiaan dalam kerangka universal untuk selanjutnya merumuskan agenda kebijakan dalam aspek kurikulum dan proses pendidikan dalam nuansa yang lebih terbuka (*open minded*).

Isu mengenai politisasi pendidikan Islam juga menjadi problem tersendiri yang penting diwaspadai untuk membangun pendidikan Islam ke depan. Tudingan terhadap adanya ancaman radikalisme, korupsi, kemiskinan, hingga terorisme merupakan sasaran empuk memojokkan umat Islam dan proses pendidikannya (Mahfud, 2016). Dalam pada itu, pendidikan Islam penting mencermati isu-isu di atas yang dilekatkan dengan umat Islam untuk dihindari dan secara tegas menolak

paham-paham yang anti kemajuan dan merendahkan umat Islam.

Harus diakui bahwa ancaman terhadap pemahaman universalitas Islam di Indonesia cukup mengawatirkan. Beberapa analisis telah dikemukakan betapa pemahaman “Islam baru” telah masuk dan cukup massif berkembang di masyarakat muslim. Seperti disinyalir Utaminingsih, Utomo, dan Zamroni (2017) bahwa:

“Gejala intoleran yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan bahwa arus globalisasi telah membawa paham-paham baru yang justru mengikis jati diri Islam Indonesia yang sangat akomodatif dan toleran terhadap kekayaan budaya setempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan, serta emansipatif pada peran serta wanita dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga pendidikan Islam harus berperan dalam rekonstruksi gejala intoleransi yang muncul akhir-akhir ini. Melalui manajemen pendidikan Islam berbasis *soft skills* diharapkan dapat mengembalikan Islam Indonesia pada jati dirinya yang terkenal kental dengan budaya lokal dan menjunjung tinggi nilai kebhinekaan. Manajemen pendidikan Islam

berbasis *soft skills* mampu mengembalikan Islam Indonesia kembali ke jati dirinya”.

Problem pengelolaan pendidikan (*manajemen of education*) menjadi isu penting untuk memformulasikan sistem penataan berbagai elemen pendidikan mulai dari tujuan pendidikan, materi, proses, evaluasi, sarana dan prasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia pendidikan Islam perlu dikembangkan menuju modernisasi manajemen pendidikan Islam. Paradigma manajemen pendidikan Islam tidak bisa hanya dihayatkan untuk semata meningkatkan sisi-sisi keilmuan semata, namun aspek moralitas yang bersumber dari tata nilai kultur bangsa Indonesia juga penting dikembangkan sejalan dengan nilai-nilai Islam universal.

Dengan demikian, tantangan pengembangan pendidikan Islam saat ini dan masa depan adalah pada seluruh aspek dan elemen pendidikan di bawah payung pengelolaan pendidikan yang berakar pada paradigma pendidikan Islam universal yang berbasis nilai-nilai kebangsaan. Problem pendidikan yang terkait dengan kebijakan pemerintah, regulasi, sistem dan konsep pendidikan Islam, kualitas input, fasilitas pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pengawasan, sampai pada pendanaan harus menjadi perhatian besar para pemangku

kebijakan dan seluruh elemen yang terkait dengan ranah pendidikan.

Politik pendidikan di Indonesia yang sejauh ini telah mengalami perkembangan signifikan dan telah memberikan harapan besar bagi peningkatan kualitas pendidikan Islam perlu dipertahankan dan dikembangkan. Regulasi pendidikan nasional serta pengakuan terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam perlu lebih difungsikan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dalam pada itu, nilai-nilai kebangsaan dan semangat multikulturalisme juga tidak bisa dinafikan dan diabaikan dalam kerangka peningkatan kualitas pendidikan Islam ini. Justru semangat multikulturalisme menjadi *core spirit* umat Islam dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia.

Penutup

Pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut dan dinamika perkembangannya yang sangat aktif sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Meskipun berbagai tantangan dan ujian untuk berkembang secara optimal sering dialami umat Islam namun tokoh-tokoh Islam secara terus menerus berupaya untuk menjaga eksistensi pendidikan Islam. Berbagai trik dan strategi politik diambil dengan berbagai

resikonya untuk mendekatkan Islam terhadap akses-akses kebijakan pendidikan yang lebih menguntungkan umat Islam.

Sebagai negara yang tidak berdasarkan salah satu agama tertentu sebagai ideologi negara, Indonesia memungkinkan semua warga negara sekaligus umat beragama untuk berkompetisi menunjukkan potensi terbaik dan kualitas pendidikan serta mengembangkan berbagai potensi itu melalui pendidikan. Politik pendidikan di Indonesia selalu terlihat dinamis dengan berbagai kebijakan pendidikan yang secara positif dapat dirasakan oleh semua pemeluk agama. Dalam konteks politik pendidikan Islam di Indonesia, sangat terasa peran dan upaya para pemangku kebijakan dan politikus muslim untuk memberikan ruang dan waktu bagi berkembangnya pendidikan Islam. Regulasi dan peraturan yang terkait dengan pendidikan sejauh ini dipandang cukup memberikan peluang bagi pendidikan Islam untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanannya.

Sebagai negara yang multikultural sebenarnya cukup rumit untuk memperjuangkan eksistensi pendidikan Islam di Indonesia jika tidak didekati dengan berbagai pendekatan yang lebih arif. Sentimen agama yang setiap saat bisa saja muncul perlu diantisipasi dengan cermat. Kecemburuan pemeluk agama harus menjadi pertimbangan penting dalam menegakkan supremasi pendidikan Islam melalui politik pendidikan. Belum

lagi keragaman dan tidak tunggalnya pemahaman agama dalam komunitas Islam menjadi persoalan internal yang agak rumit diselesaikan. Tarik menarik kepentingan yang berakar dari keyakinan dan pandangan keagamaan tertentu dirasakan menjadi problem internal dapat menguras energi umat Islam. Namun dalam pada itu, kompetisi internal juga menjadi dampak pengiring dari perbedaan ini, sehingga masing-masing berupaya secara maksimal menunjukkan kualitas dan keunggulannya.

Fenomena munculnya lembaga pendidikan Islam dengan berbagai coraknya harus dilihat sebagai sisi positif dari adanya perbedaan-perbedaan internal ini. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan pada akhirnya dituntut untuk mempertimbangkan kepentingan umat yang lebih besar dan memberikan perhatian yang memadai bagi berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. Pendidikan Islam di Indonesia ke depan memiliki peluang besar untuk menjadi superior sepanjang mampu menjaga komitmen umat dan menerapkan politik pendidikan proporsional, bersifat universal, dan kontributif dalam menjaga identitas keIndonesiaan.

Referensi:

Arifin, Syamsul. 2016. "Islamic Religious Education and Radicalism in Indonesia: De-radicalization through Strengthening the Living Values Education", dalam *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol.6, Number 1, Juni 2016. Salatiga: IAIN Salatiga.

Bhattacharjee, Tannishtha . 2017. "Politics and Education: Impact, Interventions and Interactions", tersedia pada laman: <http://inpra.in/2017/04/27/interventions-and-interactions-between-politics-and-education/>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2018.

Bryner, Karen. 2011. "Secular Subjects within a Religious Framework", tersedia pada laman: <https://en.qantara.de/content/integrated-islamic-schools-in-indonesia-secular-subjects-within-a-religious-framework>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2018. Cahyono, Fendi Teguh. 2015. "Politik Pendidikan Islam di Indonesia: Studi Tentang Kebijakan Departemen Agama Pada Masa A. Mukti Ali". Tersedia pada laman: <http://digilib.uinsby.ac.id/4245/9/Ringkasan.pdf>. diakses pada tanggal 13 Juli 2018.

Charteris, Jennifer . 2018. "An education research institute won't take politics out of the classroom". <http://theconversation.com/an-education-research-institute-wont-take-politics-out-of-the-classroom-92037>, Diakses pada tanggal 19 Juli 2018.

Elihami. 2016. "The Challenge of Religious Education in Indonesia Multiculturalism", dalam *Journal of Education and Human Development*, December 2016,

Vol. 5, No. 4. Published by American Research Institute for Policy Development.

- Firman, Harry dan Burhanuddin Tola. 2008. "The Future of Schooling in Indonesia", *Journal of International Cooperation in Education*, Vol.11 No.1, CICE Hiroshima University. Tersedia pada laman: <https://home.hiroshima-u.ac.jp/cice/wp-content/uploads/2014/03/11-1-6.pdf>, Diakses pada tanggal 22 juli 2018.
- Hakim, M. Fathoni. 2014. "Asean Community 2015 dan Tantangannya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia". *Jurnal Review Politik* Vol.4 No, 2 edisi Desember 2014. Tersedia pada laman: jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/download/49/49/. Diakses pada tanggal 26 Juli 2018.
- Hamlan. 2013. "Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan di Indonesia", tersedia pada laman: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=153663&val=5919&title=POLITIK%20PENDIDIKAN%20ISLAM%20DALAM%20KONFIGURASI%20SISTEM%20PENDIDIKAN%20DI%20INDONESIA>. Diakases pada tanggal 13 Juli 2018.
- Harahap, Emi Kholilah. 2017. "Negara, Politik, dan Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal STAIN Ma'arif Jambi*, Tersedia pada laman: <https://journal.staimaarif-jambi.ac.id/index.php/alashlahjournal/>. *Diakses pada tanggal 26 Juli 2018.*
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina.

- Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan
- Mahfud, Chaoirul. 2016. “The Global and Local Challenges of Islamic Education in Contemporary Indonesia”, *Scientific Journal of PPI-UKM*, Tersedia pada laman: <http://www.kemalapublisher.com/index.php/ppi-ukm/article/view/169>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2018.
- Mahsun, Ali, 2013. “Pendidikan Islam dalam Arus Globalisasi: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis”, *Jurnal Episteme ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/46/42*. Diakses pada tanggal 17 Juli 2018.
- Muhtarom, 2016, “Islamic Education in The Context of Indonesia National Education”, tersedia pada laman: https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpi/article/viewFile/551/pdf_48., diakses pada tanggal 16 Juli 2018.
- Nuryana,Zalik.2017. “Kurikulum 2013 dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia”, . Tersedia pada laman: https://www.researchgate.net/publication/319490352_CURRICULUM_2013_AND_THE_FUTURE_OF_ISLAMIC_EDUCATION_IN_INDONESIA,Diakses pada tanggal 16 Juli 2018.
- Owen, J.C. (with the assistance of T. Burris) (2006). *The Impact of Politics in Local Education: Navigating White Water*.Toronto: Rowman and Littlefield Education.
- Pedersen, Lene. 2016. “Religious Pluralism in Indonesia”, Published online: 20 Oct 2016. Dalam *JournalThe Asia Pacific Journal of Anthropology*, Vol.17, 2016-Issue 5:

Special Issue: Communal Peace and Conflict in Indonesia: Navigating Inter-religious Boundaries. Tersedia pada laman: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14442213.2016.1218534>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

Poetra, Haikal. 2016. “Tantangan Lembaga Pendidikan Islam Indonesia di Zaman Kontemporer”, Tersedia pada laman: <https://haekalminds.wordpress.com/2016/03/15/tantangan-lembaga-pendidikan-islam-indonesia-di-zaman-kontemporer/>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2018.

Ramli, Muhamad, dan Abdussamad. “Lembaga Pendidikan Pesantren dan Tantangan Modernitas”, tersedia pada laman: <http://www.staialfalahbjb.ac.id/index.php/tulisan/article-s-4/95-lembaga-pendidikan-pesantren-dan-tantangan-modernitas-kajian-kritis-tentang-pemikiran-nurcholish-madjid>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2018.

Rosser, Andrew. 2016. “Neo-liberalism and the Politics of Higher Education Policy in Indonesia”, tersedia pada laman: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050068.2015.1112566?journalCode=cced20>, Diakses pada tanggal 7 Juli 2018.

Rowley, C.D., 1971, *The Politics of Educational Planning in Developing Countries*, Paris: Unesco: International Institute for Educational Planning.

Sirozi, Muhammad. 2005. *Politik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press.

- Sri Utaminingsih, Slamet Utomo dan Edris Zamron, 2017. "Strengthening of Indonesian Islamic character through Islamic education management Based of Soft Skills". *Journal ADDIN*, Volume 11, Number 1, February 2017. Tersedia pada laman: <https://media.neliti.com/media/publications/53973-EN-strengthening-of-indonesian-islamic-char.pdf>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2018.
- Stout, Robert T., Marilyn Tallerico, Kent Parades Skibner. 1994. "Values: The 'What' of The Politic of Education", *Journal of Education Policy*, Vol. 4, Issues 5, tersedia pada laman: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0268093940090505?journalCode=tedp20>, Diakses pada tanggal 6 Juli 2018.
- Suriana, Suriana. 2014. "Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Menggapai Peluang, Menuai Tantangan". *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. Tersedia pada laman: jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/294. Diakses pada tanggal 27 Juli 2018.
- Suyatno. 2014. "Sekolah Islam Terpadu; Filsafat, Ideologi, dan Tren Baru Pendidikan Islam di Indonesia". Available from: https://www.researchgate.net/publication/271729532_Sekolah_Islam_Terpadu_Filsafat_Ideologi_dan_Tren_Baru_Pendidikan_Islam_di_Indonesia [accessed Jul 06 2018].

- Sweinstani, Mouliza Kristhopher Donna. 2016. "The Politics of Education in South East Asia: A Comparative Study on Decentralization Policy in Primary Education in Indonesia and Thailand", *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 6, No. 11, November 2016, Tersedia pada laman: <http://www.ijssh.org/vol6/757-HS0009.pdf>, Diakses pada tanggal 7 Juli 2018.
- Tan, Charlene. 2014. "Educative Tradition and Islamic Schools in Indonesia", *Journal of Arabic and Islamic Studies*.
- Woodward, Kathleen E. 2016. "Indonesian Schools: Shaping the Future of Islam and Democracy in a Democratic Muslim Country, tersedia pada laman: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1135591.pdf>, Diakses pada tanggal 7 Juli 2018.
- Zajda, Joseph, Geo-JaJa, Macleans A. (Eds.) 2010. "The Politics of Education Reforms", Tersedia pada laman: <https://www.springer.com/la/book/9789048132171>, Diakses pada tanggal 8 Juli 2018.

Bab 2

Pendahuluan

Tak bisa dipungkiri bahwa pendidikan begitu penting bagi setiap diri manusia, apakah itu pendidikan formal ataupun non formal semuanya sangat urgen untuk membekali manusia dengan ilmu pengetahuan, sehingga nantinya diharapkan manusia menjadi cerdas, berwawasan luas yang pada akhirnya dapat menciptakan peradaban manusia yang hebat.

Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat tentunya memiliki aturan-aturan dalam menjalankan dan mempertahankan pemerintahannya agar tetap dan terus berdiri tegak di atas semua golongan manusia (masyarakat). Hal ini suatu tanda bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain. Agar negara terus maju dan bertahan, maka perlu adanya regenerasi dalam pemerintahan. Di sinilah pentingnya peran pendidikan. Pendidikan berperan aktif dalam membentuk karakter manusia-manusia pemangku kekuasaan di masa-masa yang akan datang. Namun, selaku pemangku kekuasaan dan kepentingan, pemerintah akan sangat

mendominasi doktrin-doktrin melalui kebijakan-kebijakan yang akan sangat memengaruhi pendidikan baik dalam sistem pendidikan, proses pendidikan ataupun segala yang berhubungan dengan pendidikan.

Berbicara soal negara dan masyarakat, maka tidak akan lepas dari membicarakan politik. Semua manusia yang berkecimpung dalam sebuah negara maka semua manusia tersebut terlibat dalam politik.

A. Pengertian Politik Pendidikan

1. Politik

Politik menurut Miriam Budiardjo yang dikutip oleh Ahmad Zain Sarnoto dalam artikelnya “*Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia*”, menjelaskan bahwa politik (*politices*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.¹ Sedangkan menurut Mini dalam bukunya *Ensiklopedia Indonesia* yang dikutip Yahya dalam artikelnya *Peranan Pendidikan Formal Terhadap Aspek Kehidupan Politik*, politik adalah segala yang bersangkutan dengan cara serta

¹ Ahmad Zain Sarnoto, 2012. *Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia*, (Jurnal Educhild. Vol.01 No. 1), hal. 31

kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur negara atau masyarakat suatu negara.²

Jadi dapat dikatakan politik adalah segala kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses kebijakan pemerintah, baik itu dalam penentuan tujuan-tujuan maupun kebijakan lainnya dalam mengatur negara atau masyarakat suatu negara.

2. Pendidikan

Banyak pakar mendefinisikan tentang pendidikan, yang intinya pendidikan adalah upaya sadar yang diberikan oleh si pendidik dalam rangka membawa si terdidik kepada manusia ideal yang dicita-citakan.³ Manusia ideal yang di cita-citakan perlu perumusan oleh suatu bangsa maupun komunitas yang ini nantinya akan berpengaruh pada peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan.

Memperbincangkan pendidikan, ada dua pemaknaan yang selalu didengungkan oleh pakar. *Pertama*, pendidikan adalah memanusiaikan manusia, dan *kedua*, pendidikan adalah transfer budaya. Dilihat dari sudut pendidikan sebagai alat

² Yahya (Dosen Fakultas Tarbiyah STAIN Samarinda), *Artikel: Peranan Pendidikan Formal Terhadap Aspek Kehidupan Politik*. Hal. 2

³ Haidar Putra Daulay, 2012. *Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, cet. 3 edisi revisi), hal. 166

untuk memanusiakan manusia, maka pendidikan pada dasarnya berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia semaksimal mungkin, sehingga pada saatnya manusia akan tumbuh sebagai manusia seutuhnya.⁴

Pengertian pendidikan disebutkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 1 No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Pengertian pendidikan di atas menyiratkan bahwa pendidikan sangatlah urgen bagi setiap diri manusia, untuk itu sangatlah penting mengelola pendidikan dengan baik. Dalam pengelolaan pendidikan tentunya perlu peran yang besar dan sesuai, baik oleh pemangku kebijakan maupun lapisan masyarakat yang terlibat dalam pendidikan.

3. Politik Pendidikan

Politik pendidikan merupakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan

⁴ *Ibid.*, hal. 167

⁵ UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

perundangan dan keputusan-keputusan pemangku kebijakan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara.⁶ Artinya segala peraturan yang merepresentasikan pendidikan serta implementasinya, merupakan kebijakan politik yang didasarkan pada tujuan dan harapan penyelenggara negara.

Menurut Archer (1985), yang dikutip M. Sirozi dalam buku *Politik Pendidikan* menjelaskan bahwa ada pemaknaan mengenai Politik Pendidikan. Pertama, *The Politics of Education* adalah membicarakan aspek-aspek politik dari sudut pandang pendidikan.⁷ Agak berbeda pengertian *The Politics of education* menurut Dale (1989) adalah “*the relationship between the production of goals and the form of their achievement*” (relasi antara produksi tujuan-tujuan dan bentuk pencapaiannya). Dale memfokuskan pada kekuatan yang menggerakkan *machinary* (perangkat kerja) dan bagaimana serta di mana *machinary* diarahkan. Senada dengan Dele Kimbrogh (1964), menerangkan *The Politics of education* (Politik Pendidikan), merupakan: “*The process of making basic educational decisions of lokal district-wide, state-wide, or*

⁶ Ahmad Zain Sarnoto, 2012. *Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia*, (mengutip Husni Rahim. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*). Hal. 32

⁷ M. Sirozi, 2005. *Politik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 80

nation-wide significance” (proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan di tingkat lokal maupun nasional).⁸

Kedua, *educational politics* adalah upaya-upaya sadar dan terorganisir untuk memengaruhi input, proses, dan output pendidikan, baik melalui legislasi, kelompok penekan atau aksi kelompok, eksperimentasi, investasi pribadi, transaksi lokal, inovasi internal atau propaganda. Pengertian *educational politics* menurut Archer adalah politik pendidikan luas (*broad educational politics*). Archer mengemukakan *broad educational politics* diperlukan untuk menjelaskan: (a) praktik pendidikan pada waktu tertentu dan (b) dinamika perubahan kependidikan dalam jangka waktu tertentu pada pada tingkat sistemik. Kedua hal tersebut sentral dan esensial karena melibatkan berbagai pengaruh dari struktur sosial lainnya terhadap pendidikan. Keduanya adalah mekanisme utama yang mengartikulasikan pendidikan dan masyarakat.⁹

Dele menambahkan istilah politik pendidikan dengan *education politics* adalah studi terhadap efektivitas sistem pendidikan dan bentuk-bentuk pengelolaan pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan yang dibebankan pada mereka. Studi ini memiliki ciri utama, yaitu: (1) mempertanyakan proses

⁸ *Ibid.*, hal. 84

⁹ *Ibid.*, hal. 80

pembuatan keputusan, (2) mereduksi politik menjadi administrasi, dan (3) terfokus pada *machinary* (perangkat kerja).¹⁰

Dari pengertian di atas M. Sirozi sendiri dalam bukunya Politik Pendidikan mengartikan Politik Pendidikan dengan istilah *The Politics of Education*. Menurut M. Sirozi Politik Pendidikan atau *the politics of education* adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara tercapainya. Kajian lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta ke mana perangkat tersebut di artikan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan pola, kebijakan, dan proses pendidikan serta berbagai asumsi, maksud, dan *outcome* dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik.¹¹ Politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hal. 83

¹¹ *Ibid.*, hal. ix

¹² Ahmad Zain Sarnoto, 2012. *Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia*, (mengutip Husni Rahim. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*). Hal. 32

Mengingat definisi klasik tentang politik yang dikemukakan oleh Lasswels (1958) yang dikutip Slamet PH pada artikelnya *Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21*, yaitu: *politics is who gets what, when, and how* (politik itu adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana). Maka pada era desentralisasi pendidikan seperti sekarang ini, sangat banyak pihak-pihak berkepentingan terhadap pendidikan, terdapat kelompok-kelompok eksekutif, legislatif, yudikatif, asosiasi profesi, pakar, lembaga swadaya masyarakat, media masa, semuanya memiliki kepentingan untuk mewarnai penguasa dalam pengambilan keputusan pendidikan.¹³

Maka dari penjelasan di atas politik pendidikan dapat juga diartikan sebagai suatu proses pemilihan nilai-nilai dan pengalokasian sumber daya terbatas dalam proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam rangka memengaruhi pengambilan keputusan sehingga nilai-nilai dan alokasi sumber daya terbatas yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu masuk dalam pengambilan keputusan.¹⁴

Dari pengertian-pengertian di atas maka, politik pendidikan dapat diartikan sebagai usaha untuk memengaruhi,

¹³ Slamet PH, *Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21*, (Jurnal Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Thal. XXXIII, No. 3), hal. 326

¹⁴ *Ibid.*, hal. 326

mewarnai segala yang berkenaan dengan kebijakan, implementasi, pengawasan serta pengajaran baik di tingkat pusat, daerah maupun di tingkat operasionalnya, dengan tujuan pengontrolan atau pengendalian pendidikan.

B. Ruang Lingkup Politik Pendidikan

1. Negara

Secara umum negara diartikan sebagai organisasi teritorial suatu bangsa yang memiliki kedaulatan. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara merupakan organisasi utama dari kekuasaan politik. Negara disebut juga alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus dalam suasana antagonistic dan penuh pertentangan. Negara sebagai organisasi dapat memaksakan kekuasaannya secara legal terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.¹⁵ Senada dengan Rahayu bahwa negara didefinisikan sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk

¹⁵ Kasful Anwar Us, *Dimensi Hubungan Negara, Politik dan Pendidikan*, (Jurnal Ta'dib, Vol. XV. No. 02. Edisi, November 2010), hal. 299

mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹⁶

Berdasarkan kutipan di atas, negara dapat dikatakan sebagai organisasi yang berfungsi sebagai *agency* (alat) dari masyarakat yang berkuasa penuh dan dapat memaksakan kekuasaannya secara sah untuk mengatur, menetapkan dan menertipkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.

Negara sebagai sebuah organisasi memiliki unsur-unsur yang dikelompokkan dalam dua macam: pertama, unsur konstitusional meliputi rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, sedangkan; kedua, unsur deklaratif meliputi pengakuan dari negara lain.¹⁷ Menurut Dahl yang dikutip Dede Rosyada dkk (2000) setidaknya ada tiga sifat yang harus dimiliki oleh negara yaitu:¹⁸

1. Sifat memaksa, artinya negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan secara legal, agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah anarki.
2. Sifat monopoli, artinya mempunyai hak kuasa tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat.

¹⁶ Ani Sri Rahayu, 2017. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 53

¹⁷ *Ibid.*, hal. 58

¹⁸ Kasful Anwar Us, *Dimensi Hubungan Negara, Politik dan Pendidikan*, hal. 299-300

3. Sifat keadilan, artinya aturan hukum yang disepakati harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi yang hidup dan bekerjasama dan mengejar beberapa tujuan negara. Dapat dikatakan tujuan terakhir setiap negara ialah “*bonum publicum, common good, common weal*” menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

2. Hubungan negara, politik dan pendidikan

Politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hidup itu sendiri merupakan bagian dari suatu politik. Dalam kehidupan politik, pemerintah berperan mengendalikan negara.¹⁹ Pemerintahan terbentuk karena proses politik untuk menguasai, mengurus, serta mengatur sebuah negara dengan kebijakan-kebijakan politik. Tanpa pemerintahan dan kebijakan sebagai pengendali sangat sulit bagi sebuah negara berdiri kokoh dan terus eksis.

Politik dan pendidikan adalah komponen yang penting dalam sistem sosial politik suatu negara, pada umumnya kedua komponen ini selalu dipisahkan, sehingga seakan-akan tidak berhubungan satu dengan lain. Padahal keduanya sangatlah berkaitan. Apabila di suatu negara tidak ada pendidikan, maka

¹⁹ Tabrani. ZA, 2017, *Artikel: Antara Politik dan Pendidikan*, Education Zone, hal. 1

tidak akan ada orang-orang yang mampu menjalankan dan mengelola dunia pemerintahan ataupun dunia politik, begitu juga apabila sebaliknya jika tidak ada politik di suatu negara, maka pendidikan tidak akan mampu berjalan dengan baik karena kekurangan aspek-aspek pendukung seperti sarana dan prasarana pendidikan yang disebabkan tidak adanya pengelolaan uang negara maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan.²⁰

Agar politik dan pendidikan berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan, maka setiap warga negara harus mulai menyadari secara utuh dan khusus bahwa politik dan pendidikan merupakan perpaduan komponen yang harus seiring dan sejalan demi kepentingan serta kemajuan berjama. Dengan demikian akan tercipta suasana yang elok.

Legitimasi dan dukungan dari segenap lapisan masyarakat sangat diperlukan dalam perpaduan politik dan pendidikan. Karena itu interaksi antara pengambil keputusan dengan kelompok lain di masyarakat harus dilakukan. Politik mengandung aspek-aspek dari sekian banyak pranata-pranata sosial yang meliputi ekonomi, pertahanan dan keamanan, hukum (*rule of law*), sosial budaya, agama dan pendidikan.²¹

²⁰ *Ibid.*, hal. 1

²¹ Kasful Anwar Us, *Dimensi Hubungan Negara, Politik dan Pendidikan*, hal. 303

Bagian dari negara seperti wilayah, rakyat, pemerintahan dan kedaulatan terkandung banyak potensi yang bisa dikembangkan. Pengembangan potensi ini butuh proses yang tidak asal-asalan akan tetapi memerlukan perencanaan dan strategi yang efektif. Karena itu, diperlukan langkah-langkah keputusan politik yang tepat. Tujuan akan tercapai apabila ada sistem politik lain yang saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya.²²

Menanggapi kedua kutipan di atas, dalam mengembangkan potensi-potensi negara antara pengambil kebijakan dan masyarakat harus berinteraksi aktif serta peka terhadap persoalan-persoalan yang ada, sehingga perencanaan dan strategi pengembangan lebih efektif.

Arah dan tujuan lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh sebuah ideologi negara, maksudnya pendidikan diarahkan untuk mendidik mental manusia mencapai paham ideologi yang disepakati dan dianut oleh sebuah negara.²³

Pendidikan sangat berarti bagi suatu negara. Hal ini menjadi alasan penting mengapa suatu negara akan melakukan berbagai upaya untuk mengontrol sistem atau praktik kependidikan yang ada di negara tersebut.²⁴ Menurut Dale

²² *Ibid.*, hal. 303

²³ *Ibid.*, hal. 304

²⁴ M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, hal. 63

yang dikutip M. Sirozi, kontrol negara terhadap pendidikan umumnya dilakukan melalui empat cara. *Pertama*, pendidikan diatur secara legal. *Kedua*, sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan objektivitas. *Ketiga*, penerapan wajib pendidikan (*compulsory education*). *Keempat*, reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung di sekolah berlangsung dalam konteks politik tertentu.²⁵

Jadi dapat disimpulkan hubungan negara, politik dan pendidikan, yaitu:

1. Negara mengontrol pendidikan
2. Politik sangat menentukan ideologi suatu bangsa dan negara
3. Politik ikut berperan dalam menentukan warna pendidikan
4. Pendidikan berperan sebagai agen pembaharuan dan perubahan, transliter budaya dan sentra demokratisasi yang dapat merubah konstelasi politik menjadi lebih sehat, transparan, dan kompetitif.

Negara akan maju jika memiliki sistem politik yang benar dan tidak mempolitisasi pendidikan. Pendidikan harus independen, dan berjalan sesuai dengan perannya. Hal ini

²⁵ *Ibid.*, hal. 63-64

sangat penting karena dari pendidikanlah akan lahir elit politik yang bermoral/berkarakter, berimtak dan berimtek.

3. Kebijakan Pendidikan

Kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* dalam bahasa Inggris, yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah.²⁶ *Policy* diartikan juga hal-hal mengenai kebijakan pemerintah, atau sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Secara umum kebijakan dapat dikatakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang di dalamnya terdapat tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan.²⁷

Selanjutnya, istilah kebijakan pendidikan merupakan terjemahan dari *educational policy*, yang mengandung arti kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.²⁸ Menurut Carter V. Good (1959) yang dikutip oleh Ali Imran (1996) dalam M. Hasbullah, memberikan pengertian *educational*

²⁶ M. Hasbullah, 2015. *Kebijakan Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 37

²⁷ *Ibid.*, hal. 37-38

²⁸ *Ibid.*, hal. 38

policy sebagai pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional; pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga; pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.²⁹

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah seperangkat peraturan yang mengupayakan pembangunan sistem pendidikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama.

Menurut Suryadi (2002) yang dikutip R. Ibrahim dkk dalam buku *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, menjelaskan bahwa dilihat dari sisi politik, kebijakan pendidikan terdiri atas tiga tingkatan:³⁰

- a. Pada tingkat makro (*macro level*), pendidikan nasional akan menyangkut kepentingan seluruh rakyat. Dengan demikian, suatu kebijakan harus mendapat persetujuan atau kesepakatan dari seluruh rakyat melalui wakil-wakilnya pada lembaga perwakilan rakyat sebelum ditetapkan menjadi kebijakan.

²⁹ *Ibid.*, hal. 41

³⁰ R. Ibrahim dkk., 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Jakarta: IMTIMA), hal. 317-318

- b. Pada tingkat teknis (*technical level*), pelaksanaan kebijakan pendidikan harus dijabarkan menjadi strategi dan kebijakan teknis pengelolaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Tingkat kebijakan teknis ini menyangkut pengembangan, penyusunan dan menerapkan model yang lebih teknis agar kebijakan pendidikan nasional dapat diwujudkan.
- c. Pada tingkat operasional (*operational level*), penerapan program-program pendidikan pada tingkat operasional harus merupakan pengejawantahan dari kebijakan makro dan teknis

Kebijakan Pendidikan, menurut Tilaar yang dikutip Rohman dalam Maskuri *Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik dalam Sistem Politik di Indonesia*, dibentuk dalam rangka mencapai tujuan bernegara, yaitu; mencerdaskan kehidupan bangsa. Aktor pembuat kebijakan dituntut memiliki pandangan terhadap kesejahteraan rakyat, dengan kepekaan aktor kebijakan akan membawa dampak terhadap produk perundang-undangan yang dibentuk. Produk kebijakan tersebut harus berimplikasi terhadap kemajuan bangsa. Sebagai upaya memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, kebijakan

politik terhadap penyelenggaraan pendidikan harus sejalan dengan dinamika masyarakat pendidikan.³¹

Di antara kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang kita ketahui, yaitu:

1) Kebijakan UN, USBN, UNBK

Kebijakan UN, USBN, UNBK terbaru termuat dalam Permendikbud Nomor 5 tahun 2015, Kerriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat dan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 0031/P/BNSP/III/2015 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun pelajaran 2014/2015. Rogers Pakpahan mengutip BSNP 2015 bahwa dalam sistem pendidikan nasional, ujian akhir sudah ada sejak masa kemerdekaan (bahkan di masa penjajahan) hingga kini dengan sebutan yang berbeda-beda. Dewasa ini, ujian akhir oleh pemerintah disebut Ujian Nasional sebagai bagian dari evaluasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ujian nasional

³¹ Maskuri, 2017, *Artikel: Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik dalam Sistem Politik di Indonesia*, (JPII, Volume 2, No. 1, Oktober), hal. 87

adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan jenjang SMP dan SMA yang sederajat pada mata pelajaran tertentu.³² Silverius dalam Hadiana menyatakan ujian nasional merupakan jenis penilaian yang dilakukan pemerintah untuk mengukur keberhasilan peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional. Oleh karena itu ujian, ujian nasional diselenggarakan pada akhir pembelajaran di satuan pendidikan untuk menentukan pencapaian pembelajaran peserta didik di SMP dan SMA sederajat. Penilaian hasil belajar yang dilakukan pemerintah merupakan upaya penguatan hasil penilaian internal oleh pendidik maupun satuan pendidikan.³³

UNBK merupakan ujian yang relatif setara dengan ujian tertulis seperti selama ini dilakukan. Perbedaannya terletak pada soal yang tersedia dalam *file* komputer.³⁴

2) Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan

Kehadiran UU Otonomi Daerah (UU No. 2 Tahun 1989 dan UU No. 32 Tahun 2003) tentang pemerintahan

³² Rogers Pakpahan, 2016, *Model Ujian Berbasis Komputer: Manfaat dan Tantangan*, (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 1, Nomor 1, April), hal. 24

³³ *Ibid.*, hal. 24

³⁴ *Ibid.*, hal. 25

Daerah, telah membawa sejumlah perubahan dalam tatanan pemerintahan. Namun, otonomi di bidang Pendidikan berbeda dengan otonomi di bidang pemerintahan lainnya yang berhenti pada tingkat kabupaten/kota. Otonomi di bidang pendidikan tidak hanya berhenti pada tingkat kabupaten/kota, tetapi sampai pada ujung tombak pelaksana pendidikan di lapangan, yaitu lembaga pendidikan sekolah.³⁵

3) Kebijakan Sertifikasi Guru

Pada tahun 2007, Pemerintah RI melalui Kementerian Pendidikan Nasional, mulai menyelenggarakan program sertifikasi guru. Program sertifikasi ini merupakan konsekuensi dari disahkannya produk hukum tentang pendidikan, yaitu: (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) uu No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.³⁶

Berdasarkan UU tersebut dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional, maka guru harus memenuhi sejumlah persyaratan baik kualifikasi akademik maupun kompetensi. Program

³⁵ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, hal. 158

³⁶ *Ibid.*, hal. 161

sertifikasi merupakan program pemberian sertifikat bagi guru yang telah memenuhi sejumlah persyaratan menuju guru profesional. Guru yang telah memperoleh sertifikat profesi akan mendapatkan sejumlah hak yang antara lain berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru tersebut.³⁷

4) Kebijakan Kurikulum 2013

Kebijakan pemberlakuan Kurikulum 2013 tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, baik menyangkut penyelenggaraan maupun *output*-nya. Pengembangan Kurikulum 2013 dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.³⁸

5) Kebijakan *Full day School*

Istilah *full day school* merupakan saduran dari B. Inggris, dalam Kamus Inggris Indonesia, di mana *full* artinya

³⁷ *Ibid.*, hal. 162

³⁸ *Ibid.*, hal. 169

penuh, *day* artinya hari dan *school* artinya sekolah.³⁹ Secara terminologi *full day school* artinya belajar sehari penuh. Jam belajar diberlakukan dari pagi sampai sore, mulai pukul 06.45-15.30 WIB, dengan durasi istirahat setiap dua jam sekali. Dengan demikian sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan leluasa, disesuaikan dengan bobot mata pelajaran dan ditambah dengan pendalaman materi. Hal yang diutamakan dalam *full day school* adalah pengaturan jadwal pelajaran dan pendalaman.⁴⁰

Kebijakan *full day school* (FDS) tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tertanggal 9 Juni 2017. Inti dari Permendikbud adalah mulai tahun ajaran 2017/2018 sekolah berlangsung Senin s.d Jumat (Lima Hari Sekolah-LHS), dengan jam sekolah menjadi delapan jam belajar setiap harinya.⁴¹

4. Praktisi Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktisi adalah “pelaksana”. Yaitu orang yang ahli tentang sesuatu hal dalam

³⁹ Lis Yulianti, 2017, *Full Day School sebagai Penguatan Pendidikan Karakter*, (Fikrotuna: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, Vol. 05, No. 02 Juli), hal. 309

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 309-310

⁴¹ Yulia Indahri, 2017, *Kebijakan Lima Hari Sekolah*, (Info Singkat, Vol. IX, No. 13/I/Publis/Juli), hal. 1

praktik. Sedangkan pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani ke arah kedewasaan.⁴² Dari pengertian ini dapat diartikan praktisi pendidikan adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk memimpin serta mengembangkan jasmani dan rohani anak didik.

Adapun praktisi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu *pertama*, praktisi pendidikan yang bersentuhan langsung dengan pendidikan, yaitu dosen, pengawas, kepala sekolah dan guru; *kedua*, praktisi pendidikan yang ahli dalam suatu bidang tertentu namun di luar profesi tenaga pendidik dan kependidikan, seperti psikologi pendidikan dan lain-lain. Akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Guru

Guru adalah orang yang memberikan ilmu kepada peserta didik, serta membimbing jiwa mereka sekaligus pula mengarahkan tingkah laku mereka kepada yang baik.⁴³

Guru adalah suatu sebutan jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang

⁴² M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, hal. xvii

⁴³ Haidar Putra Daulay, 2016. *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*, (Jakarta: Prenadamedia), hal. 103

pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpol, formal, dan sistematis.⁴⁴

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.⁴⁵

b. Kepala Sekolah

Menurut Wahjosumidjo (2011) yang dikutip Bustan S, dkk. Dalam artikel *Tugas Kepala Sekolah sebagai Pendidik dan Pemimpin di Sekolah Dasar*, Kepala Sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi pembelajaran antara guru dan murid.⁴⁶

Tugas kepala sekolah di antaranya adalah sebagai pendidik dan pemimpin. Dalam melakukan fungsinya sebagai edukator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga

⁴⁴ Fitri Oviyanti, 2013. *Tantangan Pengembangan Pendidikan Keguruan di Era Global*, (Jurnal Pendidikan Islam Nadwa, vol. 7, No. 2), hal. 268

⁴⁵ UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

⁴⁶ Bustan S, dkk., *Artikel: Tugas Kepala Sekolah Sebagai Pendidik dan Pemimpin di Sekolah Dasar*, hal. 3

kependidikan di sekolahnya. Sedangkan peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai posisi sentral dan strategis, khususnya dalam menjadikan tujuan pendidikan nasional sebagai prioritas utama yang harus dijangkau secara optimal.

c. Pengawas

Pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sedangkan sebagai supervisor manajerial, pengawas berkewajiban membantu kepala sekolah agar mencapai sekolah yang efektif.⁴⁷

d. Dosen

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.⁴⁸

⁴⁷ Slameto, 2016. *Supervisi Pendidikan Oleh Pengawas Sekolah*, (Jurnal Kelola, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember), hal. 193

⁴⁸ Mimin Emi Suhaerni, *Manajemen Pengembangan Kompetensi Dosen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pengajaran*, hal. 21

e. Pakar/ahli di luar profesi sebagai PTK

Pakar yang dimaksudkan di sini adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, misalnya sosiolog (ahli dalam bidang sosial): memandang suatu persoalan atau kebijakan mengenai pendidikan dari sudut sosial.

5. Sistem Pendidikan

Dalam Bab I Pasal 1 UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa Sistem pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional. Berangkat dari bunyi pasal ini Soetarno yang dikutip Munirah dalam Artikelnya *Sistem Pendidikan di Indonesia: antara keinginan dan realita*, menyimpulkan bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersama menuju kepada tercapainya tujuan.⁴⁹

Tujuan pendidikan Nasional yang dirumuskan dalam UU SISDIKNAS adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

⁴⁹ Munirah, 2015. *Sistem Pendidikan di Indonesia: antara keinginan dan realita*, (Jurnal Auladuna, Vol. 2 No. 2 Desember), hal. 234

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sistem pendidikan Nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu: semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara; menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan; dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dan seluruh usaha pembangunan nasional.⁵⁰

Adapun gambaran umum sistem pendidikan di Indonesia yang menganut Sistem Pendidikan Nasional secara makro dapat dilihat dalam berbagai aspek antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan, Sistem Pendidikan dikelola secara sentralistik, berlaku di seluruh tanah air. Di selenggarakan secara diskriminatif, dalam artian kualitas lembaga pendidikan negeri dan swasta masih jauh levelnya.⁵¹
2. Peran Pemerintah dan Masyarakat, Pemerintah adalah pihak yang mengendalikan dan mengelola sistem pendidikan secara nasional. Meskipun dalam UU SISDIKNAS dikatakan bahwa masyarakat adalah mitra

⁵⁰ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, hal. 10

⁵¹ Munirah, *Sistem Pendidikan di Indonesia: antara keinginan dan realita*, hal. 235

pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan memiliki kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam menyelenggarakan atau mengelola unit pendidikan, dan tetap pada ciri-ciri identitasnya. Namun dalam praktiknya, semua ditentukan oleh pemerintah, lengkap dengan rambu-rambu dan ukuran-ukuran dalam penilainnya.⁵²

Adapun kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional, yang dibagi kepada tiga hal: *Pertama*, Pendidikan Islam sebagai lembaga; *kedua*, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran; dan *ketiga*, pendidikan Islam sebagai nilai (*Value*).⁵³

Pendidikan Islam sebagai lembaga diakuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Berikutnya pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan nasional.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, hal. 237

⁵³ Haidar Putra Daulai, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, hal. 9-10

⁵⁴ *Ibid.*, 10

C. Wacana Politik Pendidikan Islam di Indonesia

Sejak di keluarkannya UU No. 20 tahun 2003, pendidikan Islam di Indonesia mulai bergeliat memperbaiki mutu pendidikan, hanya saja lembaga-lembaga pendidikan Islam masih belum siap dalam menghadapi persaingan kualitas pendidikan. Pendidikan Islam sampai saat ini, mayoritas masih tersandera oleh kultur proses pendidikan yang kaku. Ditambah lagi, masih maraknya praktik-praktik tata kelola informal seperti feodalism, hedonism, primordialism/nepotisme, pragmatism dan oligarki. Seharusnya untuk meningkatkan mutu pendidikan praktik-praktik tersebut harus dihindari karena merupakan penghambat pembangunan pendidikan.

Kebijakan di bidang pendidikan nasional tersebut diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga agar memiliki daya saing menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan

manajemen berbasis sekolah dan pembaruan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.⁵⁵

Selaras dengan tujuan pendidikan Islam, maka pendidikan Islam harus berperan aktif untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional, dalam membangun dan mengembangkan keilmuan Islam di lembaga pendidikan, yaitu dengan mengembangkan integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Sudah seharusnya pendidikan Islam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh nilai moral dan agama. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi sangat penting untuk kemaslahatan dan kemajuan umat Islam di masa kini dan masa yang akan datang.

D. Arah Pengembangan

Pengembangan Pendidikan Islam terkadang terkendala oleh hal-hal yang sebenarnya bisa dengan mudah di atasi, hanya saja masih terdapat banyaknya oknum-oknum watak perusak di dalam birokrasi pendidikan merupakan kendala terbesar. Terlepas dari permasalahan itu, menurut Muhaimin terdapat proplem-problem pokok yang senantiasa menggandrungi pendidikan Islam di Indonesia, yaitu:

⁵⁵ PERMENDIKNAS nomor 22 tahun 2006 tentang *Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*, hal. 73

1. *Foundational problems*, yang terdiri dari *religious foundation and philosophic foundational problem, empiric foundational problems* (masalah dasar, fondasi agama dan masalah landasan filosofis-empiris) yang di dalamnya menyangkut dimensi-dimensi dan kajian tentang konsep pendidikan yang bersifat universal, seperti hakikat manusia, masyarakat, akhlak, hidup, ilmu pengetahuan, iman, ull albab dan lain sebagainya. Semuanya bersumber dari kajian fenomena *qauliyah* dan fenomena *kauniyah* yang membutuhkan pendekatan filosofis.
2. *Structural problems* (masalah struktur). Ditinjau dari struktur demografis dan geografis bisa dikategorikan ke dalam kota, pinggiran kota, desa dan desa terpencil. Dari struktur perkembangan jiwa manusia bisa dikategorikan ke dalam masa kanak-kanak remaja, dewasa dan manula. Dari struktur ekonomi dikategorikan ke dalam masyarakat kaya, menengah dan miskin. Dari struktur rumah tangga, terdapat rumah tangga karier dan non karier. Dari struktur jenjang pendidikan bisa dikategorikan ke dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan perndidikan tinggi.
3. *Operational problem* (masalah operasional). Secara mikro akan berhubungan dengan berbagai komponen pendidikan Islam, misalnya hubungan interaktif lima faktor

pendidikan yaitu tujuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan alat-alat pendidikan Islam (kurikulum, metodologi, manajemen, administrasi, saarana dan prasarana, media, sumber dan evaluasi) dan lingkungan atau konteks pendidikan. Atau bisa bertolak dari hubungan input, proses dan output. Sedangkan seara makro, menyangkut keterkaitan pendidikan Islam dengan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama baik yang bersifat Nasional dan Internasional.⁵⁶

Begitu banyaknya dan besarnya problem yang adalah pada pendidikan Islam tentunya akan meyebabkan pendidikan Islam setengah hati dalam berkembang dan maju. Dengan dualisme kementerian yang masih mengurus pendidikan Islam, membuat problem-problem pendidikan Islam akan sangat lambat dalam berkembang.

Adapun arah pengembangan dalam mengatasi problem-problem pendidikan Islam untuk kemajuan pendidikan Islam yang lebih baik, karena apabila dilihat dari problem-problem yang ada, maka dapat dikatakan bahwa manusia yang terlibat dalam pendidikan Islam saat ini kurang mencintai Islam pada khusus dan umumnya, hal ini menyiratkan perlu adanya model dalam pendidikan baik dalam hal pembuat kebijakan atau pun

⁵⁶ Muhaimin, 2011. *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 45

dalam operasional pendidikan agar lebih baik lagi, maka ada arah pengembangan yang ditawarkan, yaitu: EnviroIslamisme.

ENVIROISLAMISME (Wujud Pendidikan Islam Konstruktivisme)

Model enviroIslamisme penulis kembangkan dari model environasionalisme dalam buku yang ditulis oleh Ridwan Bachtra dan Achmad Fedyani Saifuddin. Dalam buku tersebut di jelaskan bahwa kata environasionalisme ini berasal dari gabungan kata *environment* dan *nationalism*. Konsep baru ini menggabungkan *environmental education* (pendidikan lingkungan) dan pendidikan nasionalisme. Environasionalisme adalah suatu gabungan ilmu pengetahuan lingkungan hidup dengan ilmu pengetahuan sejarah, filsafat, dan budi pekerti Indonesia sehingga menjadi suatu konsep pendidikan yang menerjemahkan konsep-konsep yang bersifat abstrak menjadi konsep yang konkret mengenai nasionalisme.⁵⁷

Konsep environasionalisme dimulai dengan peningkatan pengertian tentang kelebihan kompetitif dan kelebihan absolut sumber daya alam dan social Indonesia di kalangan generasi muda Indonesia. Pengenalan akan

⁵⁷ Ridwan Bachtra dan Achmad Fedyani, 2015. *Environasionalisme: Suatu WUjud Pendidikan Konstruktivisme*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hal. 53

lingkungan hidup dapat dijelaskan melalui ilmu lingkungan. Peserta didik harus mengetahui aset bangsanya baik dalam sumber daya alam maupun sumber daya sosial.⁵⁸

Model ini mengikuti prinsip pemikiran konstruktivisme yang percaya bahwa pengembangan pengetahuan kognitif manusia adalah suatu proses akumulasi pengalaman. Pengetahuan tersebut terdiri dari persepsi, ingatan, dan bentuk pengetahuan lainnya. Metode pengajaran dilakukan secara teori dan praktik. Pengajaran teori digunakan untuk sebagai arahan agar peserta didik mengerti tujuan dari pendidikan yang akan dialami.⁵⁹

Model environasionalisme merupakan model yang menciptakan manusia cinta akan lingkungan dan cinta tanah airnya. Maka apabila diambil dari pemaknaan maka enviroIslamisme berasal dari dua kata yaitu *environment* dan *Islamisme*. Konsep ini menggabungkan *environmental education* (pendidikan lingkungan) dan pendidikan Islamisme. EnviroIslamisme adalah suatu gabungan ilmu pengetahuan lingkungan hidup dengan ilmu pengetahuan Islam (akidah, fiqih, qur'an hadits dan sejarah Islam).

Model ini penulis maksudkan agar dapat menciptakan pendidikan Islam yang kompetitif dengan menghasilkan mutu,

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 54

⁵⁹ *Ibid.*, 71

kualitas pendidikan dan output pendidikan yang *rahmatan lil 'alamin*.

Penutup

Politik Pendidikan atau *The Politics of Education* merupakan kajian tentang hubungan antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara tercapainya. Negara sebagai pengontrol pendidikan disokong oleh politik sebagai penentu ideologi suatu bangsa dan negara. Di sini politik sebagai berperan penting dalam mewarnai pendidikan. Politik dan pendidikan tak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pendidikan sebagai tempat tempat pendoktrinan pengetahuan yang berperan sebagai agen perubahan, adanya transliter budaya dalam politik dan sentra demokrasi dapat merubah konstelasi politik menjadi lebih sejuk dan sehat, transparan serta kompetitif.

Seperti apa pendidikan berjalan sangat bergantung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebijakan yang berfungsi sebagai peraturan yang ditujukan untuk mengupayakan pembangunan sistem pendidikan sebagaimana yang diharapkan bersama. Namun demikian, kebijakan secantik apapun tak akan berjalan dengan baik apabila unsur-unsur di dalam pendidikan di tingkat pelaksana kebijakan tidak memahami kebijakan dengan benar. Maka penting bagi praktisi

pendidikan baik praktisi yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran maupun yang secara profesi tidak berhubungan langsung, untuk serta-merta menterjemahkan dan mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan secara profesional sebagaimana tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pengembangan pendidikan Islam di Indonesia sangatlah penting, tentunya pendidikan dituntut tidak hanya mengisi pengetahuan dan pemahaman praktek atas pengetahuan agama yang anak didik pahami namun lebih dari itu, bahwa pendidikan sangat dituntut untuk bisa membuat anak didik menjadikan pengetahuan dan pemahaman agamanya sebagai prinsip, kebiasaan dan perilaku hidup sehari-hari. Maka dalam pada itu penulis mengusulkan sebuah model pendidikan EnviroIslamisme untuk diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Meskipun dalam penerapannya perlu kajian yang lebih lanjut terhadap konsep ini.

Referensi:

Anwar Us, Kasful. *Dimensi Hubungan Negara, Politik dan Pendidikan*, Jurnal Ta'dib, Vol. XV. No. 02. Edisi, November 2010.

Bachtra, Ridwan dan Achmad Fedyani, 2015, *Environasionalisme: Suatu WUjud Pendidikan Konstruktivisme*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Emi Suhaerni, Mimin. *Manajemen Pengembangan Kompetensi Dosen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pengajaran*

Hasbullah, M. 2015. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, R. dkk., 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Jakarta: IMTIMA.

Indahri, Yulia. 2017, *Kebijakan Lima Hari Sekolah*, (Info Singkat, Vol. IX, No. 13/I/Publis/Juli

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Maskuri, 2017, *Artikel: Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik dalam Sistem Politik di Indonesia*, JPII, Volume 2, No. 1, Oktober

Muhaimin, 2011, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.


Munirah, 2015. *Sistem Pendidikan di Indonesia: antara keinginan dan realita*, Jurnal Auladuna, Vol. 2 No. 2 Desember.

- Oviyanti, Fitri. 2013. *Tantangan Pengembangan Pendidikan Keguruan di Era Global*, Jurnal Pendidikan Islam Nadwa, vol. 7, No. 2.
- Pakpahan, Rogers, 2016, *Model Ujian Berbasis Komputer: Manfaat dan Tantangan*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 1, Nomor 1, April
- PH, Slamet. *Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21*, Jurnal Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Th. XXXIII, No. 3
- Putra Daulay, Haidar. 2012. *Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, cet. 3 edisi revisi.
- . 2016. *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*, Jakarta: Prenadamedia.
- S, Bustan dkk., *Artikel: Tugas Kepala Sekolah Sebagai Pendidik dan Pemimpin di Sekolah Dasar*.
- Sirozi, M. 2005. *Politik Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Yahya (Dosen Fakultas Tarbiyah STAIN Samarinda), *Artikel: Peranan Pendidikan Formal Terhadap Aspek Kehidupan Politik*.
- Sri Rahayu, Ani, 2017. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Tabrani. ZA, 2017, *Artikel: Antara Politik dan Pendidikan*, Education Zone
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Slameto, 2016. *Supervisi Pendidikan Oleh Pengawas Sekolah*, Jurnal Kelola, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember.

Yahya (Dosen Fakultas Tarbiyah STAIN Samarinda), *Artikel: Peranan Pendidikan Formal Terhadap Aspek Kehidupan Politik.*

Yulianti, Lis. 2017, *Full Day School sebagai Penguatan Pendidikan Karakter*, Fikrotuna: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, Vol. 05, No. 02 Juli

Zain Sarnoto, Ahmad. 2012. *Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Educhild. Vol.01 No. 1.



**POLITIK PENDIDIKAN ISLAM
(DINAMIKA DAN TUNTUTAN MUTU
PENDIDIKAN)**

Oleh: Fahrurroji dan Muhammad Sutikno

Pendahuluan

Visi dan misi pendidikan Islam adalah *Rahmatan Lil 'Alamiin*, yaitu menjadikan pendidikan Islam sebagai pencetus, penggerak, perubah, dan pembentukan manusia menjadi makhluk yang memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta beserta isinya. Adanya perkembangan pendidikan Islam di era globalisasi itu berarti melihat dinamika perkembangan pendidikan Islam di masa lampau. Perkembangan tersebut terwujud tentu tidak semudah membalikkan kedua belah tangan. Perkembangan bisa ditinjau dari segi politik pendidikan Islam dan bisa juga ditinjau dari hubungan politik dengan pendidikan. Perkembangan politik pendidikan tersebut juga tidak lepas dari prinsip-prinsip pendidikan Islam itu sendiri. Indonesia di era reformasi, politik pendidikan telah melahirkan beberapa terobosan penting seperti menetapkan minimal 20% APBN dan APBD untuk sektor pendidikan, adanya undang-undang tentang guru dan dosen, peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan, peraturan pemerintah tentang

tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor, peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan peraturan menteri pendidikan nasional tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan tersebut merupakan upaya perkembangan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia menjadi prioritas tujuan pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah (PP.) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Standar Pendidikan Nasional mencakup delapan (8) komponen yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Adapun upaya-upaya pencapaian standar tersebut, dapat berupa; peningkatan kualitas guru, peningkatan materi, peningkatan dalam pemakaian metode, peningkatan sarana, dan peningkatan kualitas belajar.

Pendidikan merupakan bagian kebutuhan primer/pokok manusia (*al-hâjat al-asasiyyah*) yang harus dipenuhi oleh setiap manusia seperti halnya sandang pangan dan papang. Sedangkan, pendidikan Islam, M Yusuf al-Qardawhi memberikan pengertian; *“Pendidikan Islam adalah pendidikan manusiawi seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia hidup dalam keadaan damai maupun perang, dan*

menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya”.

Sementara itu, Hasan Langgulung merumuskan “pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal didunia dan memetik hasilnya diakhirat”.⁶⁰

Menelaah dua devinisi tersebut, penulis dapat mengambil pengertian bahwa pendidikan Islam sesungguhnya adalah menjadikan manusia sempurna baik fisik maupun psikis (lahir dan batin) yang dalam Islam disebut dengan istilah “*insan kamil*” yang berarti manusia sempurna.

Dalam prespektif pendidikan Islam, tujuan hidup seorang muslim pada hakekatnya adalah mengabdikan kepada Allah. Pengabdian kepada Allah sebagai realisasi dari keimanan yang diwujudkan dalam amal, tidak lain untuk mencapai derajat yang *taqwa* disisinya. Beriman dan beramal soleh merupakan dua aspek kepribadian yang dicita-citakan dalam pendidikan Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya *insan* yang memiliki dimensi religius dan berkemampuan ilmiah.⁶¹

⁶⁰ Azyumardi Azra, 2001. *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru*, (Jakarta: Kalimah), hal. 5

⁶¹ Ramayulis dan Samsul Nizar, 2009. *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia), hal. 137

Pendidikan juga merupakan bagian dari masalah politik (*siyâsah*) yang diartikan sebagai *ri'âyah asy-syu'ûn al-ummah* (pengelolaan urusan rakyat) berdasarkan ideologi yang diemban negara. Berdasarkan pemahaman mendasar ini, politik pendidikan (*siyâsah at-ta'lim*) suatu negara sangat ditentukan oleh ideologi (pandangan hidup) yang diemban negara tersebut. Faktor inilah yang menentukan karakter dan tipologi masyarakat yang dibentuknya. Dengan demikian, politik pendidikan dapat dipahami sebagai strategi pendidikan yang dirancang negara dalam upaya menciptakan kualitas *human resources* (sumberdaya manusia) yang dicita-citakan.

Pendidikan dalam masyarakat modern dewasa ini, seperti di Indonesia telah menjadi wacana publik. Mulai berkembangnya pengkajian tentang kebijakan pendidikan ke ranah publik, dapat kita cermati mengenai pelaksanaan amandemen-amandemen keempat Undang Undang Dasar yang mengatakan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperuntukkan bagi pengembangan pendidikan nasional.⁶²

Era globalisasi saat ini setidaknya telah membuka wawasan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik masyarakat

⁶² HAL.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, 2012. *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) Hal. 2.

modern atau masyarakat tradisional terkait pentingnya dua domain publik yaitu politik dan pendidikan yang satu sama lain selalu saling memandang, saling membutuhkan, bersinergi dan saling memengaruhi satu sama lain bahkan tidak pernah berpisah dan tidak dapat terpisahkan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk membuka wawasan masyarakat. Oleh karenanya proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Begitu pula sebaliknya, bahwa proses politik masyarakat akan membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan.

Masyarakat harus paham betul pentingnya politik pendidikan, karena muara politik pendidikan menuju kepada kebijakan pendidikan bukan semata-mata politisasi pendidikan. Hal ini perlu dipertegas karena bagi masyarakat kecil atau tradisional beranggapan bahwa politik adalah kotor dan lain sebagainya. Sehingga masih menjadi perdebatan apakah dalam dunia pendidikan ada yang menggunakan politik atau tidak.

Politik Pendidikan Islam

Politik pendidikan dapat dipahami sebagai strategi pendidikan yang dirancang negara dalam upaya menciptakan kualitas *human resources* (sumberdaya manusia) yang dicita-citakan. Jika politik dipahami sebagai “ praktik kekuatan atau kekuasaan maka kekuasaan ” memiliki dua sifat yaitu mengatur

masyarakat secara keseluruhan dan menggunakan kekerasan fisik secara sah disebut kekuasaan politik. Menurut Yaya Suryana dan Rusdiana dalam bukunya “*Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep, Prinsip Dan Implementasi (2015)*” bahwa orang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan politik disebut penguasa politik, sementara keputusan yang dihasilkan oleh penguasa politik dalam usaha untuk mengatur masyarakat disebut kebijakan politik.⁶³

Pendidikan dalam Islam harus kita pahami sebagai upaya mengubah manusia dengan pengetahuan tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan kerangka nilai atau ideologi Islam. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam merupakan proses mendekatkan manusia pada tingkat kesempurnaannya dan mengembangkan kemampuannya yang dipandu oleh ideologi atau akidah Islam.

Secara pasti, tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan SDM yang berkepribadian Islami. Dalam arti, cara berpikirnya harus didasarkan pada nilai-nilai Islam serta berjiwa sesuai dengan ruh dan nafas Islam. Metode pendidikan dan pengajarannya juga harus dirancang untuk mencapai tujuan

⁶³ Yaya Suryana dan Rusdiana, 2015. *Pendidikan Multikultural suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep, Prinsip dan Implementasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia) hal. 165.

tersebut. Setiap metodologi yang tidak berorientasi pada tercapainya tujuan tersebut tentu akan dihindarkan. Jadi, pendidikan Islam bukan semata-mata melakukan *transfer of knowledge*, tetapi memperhatikan apakah ilmu pengetahuan yang diberikan itu dapat mengubah sikap atau tidak. Walaupun demikian, fakta sejarah mengatakan terdapat dinamika politik pendidikan Islam di dunia ini, baik pada Negara-negara maju maupun Negara berkembang seperti Indonesia.

Dinamika Hubungan Politik Pendidikan Islam

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Meskipun pendidikan dan politik berposisi sebagai dua elemen penting dalam sistem sosial politik, namun sering dikaji sebagai bagian-bagian yang terpisah. Tentu saja hal demikian tidak tepat karena pendidikan dan politik bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat sehingga membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di suatu negara.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di

setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.

Menurut M. Sirozi dalam bukunya mengatakan bahwa gambaran jelas tentang keterkaitan antara pendidikan dan politik dapat kita telusuri di dunia Islam, di mana sejarah peradaban Islam banyak ditandai oleh kesungguhan para *ulama* dan *umara* dalam memperhatikan persoalan pendidikan sebagai upaya untuk memperkuat posisi sosial politik kelompok dan pengikutnya.⁶⁴

Dalam Islam yang dalam waktu lebih kurang 20 tahun nabi muhammad beserta para sahabatnya mampu mentransformasi *jazirah arab* dari wilayah *jahiliyah* menjadi wilayah *madani* ber peradaban tinggi. Mereka mendorong perubahan kehidupan sosial politik dengan mewajibkan bagi kaum muslimin untuk mencari ilmu. Seperti yang tertuang dalam haditsnya :

طلب العلم فريضة على كل مسلم

Artinya : Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. (H.R ibnu adi dan baihaqi).

Mereka yakin sepenuhnya dengan janji Allah bahwa iman dan ilmu adalah dua kekuatan fundamental yang

⁶⁴ Muhammad Sirozi, *Politik Pendidikan.....*, hal.1

dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Allah berfirman :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. (Q.S almujudalah :11)

Rosulullah dan para sahabatnya tidak pernah surut dan berhenti mendorong para pengikutnya untuk menuntut ilmu, mentransfer dan mengembangkannya, karena mereka juga yakin sepenuhnya bahwa aktivitas menuntut ilmu merupakan aktivitas yang sangat mulia. Beliau bersabda :

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة

Artinya : Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga (H.R muslim dan at-turmudzi).

Mereka menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah aktivitas tanpa henti yang hanya bisa diakhiri oleh kematian: “*tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat*”. Nabi muhammad dan para sahabatnya juga menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk memfasilitasi berbagai

kegiatan pendidikan dan mendukung aktivitas para ilmuwan. Walaupun berkuasa penuh, namun mereka tidak menggunakan aset publik untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarga, tetapi menggunakannya untuk memfasilitasi aktivitas kependidikan. Aset yang terkumpul di *baitul mal* digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas kependidikan. Mereka memberikan tempat dan apresiasi yang layak bagi pendidik. Mereka menghimpun dan menyediakan dana secara tidak terbatas untuk pengadaan berbagai fasilitas kependidikan, seperti membangun madrasah-madrasah, laboratorium, dan perpustakaan serta memberikan insentif para guru. Rosulullah menjadikan pelajaran baca tulis sebagai tebusan tawanan perang badar. Kepedulian dan komitmen rosulullah yang sangat tinggi terhadap kegiatan kependidikan dan keilmuan benar-benar menjadi *uswah hasanah* bagi para sahabat dan pengikut beliau. Maka kalau semua pemimpin di dunia memiliki visi pendidikan dan kemauan politik (*political will*) seperti rosulullah, maka di mana-mana mutu pelayanan pendidikan akan cepat meningkat, karena terfasilitasi dengan baik, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan bermutu, yang mampu menjadi bagian dari pemecahan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat lingkungannya. Bukan sebaliknya, menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Tatkala khalifah Harun al-Rasyid (786-

809) merebut Ankara dan khalifah al-Makmun (814-833) meraih kemenangan atas kaisar romawi timur bernama Michel II, kedua pemimpin Islam tersebut tidak menuntut ganti rugi peperangan, kecuali penyerahan manuskrip-manuskrip kuno.

Kholifah Umar bin Khattab ra. Menugaskan tiga orang guru untuk mengajar baca tulis kepada penduduk kota Madinah, dengan gaji yang dikeluarkan dari *baitul mal*. Saat itu, pada abad ke-7, gaji yang diberikan khalifah Umar bin Khattab kepada ketiga orang guru tersebut masing-masing sebesar 15 dinar setiap bulannya (1 dinar = 4,25 gram emas). Pada masa khalifah al-Makmun dari bani Abbasiyah, berdiri lembaga ilmiah pertama di dunia yang dinamakan *darul hikmah*, pada waktu itu perpustakaan terbesar dan terlengkap di dunia. Kemudian diikuti oleh lembaga ilmiah kedua, yaitu lembaga ilmiah *an-nizhamiyah* yang menjadi cikal bakal perkembangan sistem pendidikan madrasah di seluruh dunia. Pada tahun 640 Hijriyah, khalifah al-Mustansir al-Abasi mendirikan lembaga pendidikan bernama *al-mustansiriyah*. Inilah lembaga pertama yang menjadi perintis adanya rumah sakit untuk mata kuliah kedokteran atau konsep *teaching hospital*.

Lebih lanjut M. Sirozi mengutip sebuah analisis dari Abdurrasyid (1994) tentang pendidikan pada masa Islam klasik dengan hasil kesimpulan dalam sejarah perkembangan Islam,

Institusi politik ikut mewarnai corak pendidikan yang dikembangkan. Keterlibatan para penguasa dalam kegiatan pendidikan waktu itu, menurut Rasyid, tidak hanya sebatas dukungan moral kepada para peserta didik, melainkan juga dalam bidang administrasi, keuangan dan kurikulum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu konstalasi politik. Peranan yang dimainkan oleh masjid-masjid dan madrasah-madrasah dalam mengokohkan kekuasaan politik para penguasa dapat di lihat dalam sejarah. Di lain pihak, ketergantungan pada uluran tangan para penguasa secara ekonomis, membuat lembaga-lembaga tersebut harus sejalan dengan nuansa politik yang berlaku. Di antara lembaga pendidikan Islam yang menjadi corong pesan-pesan politik, menurut Rasyid adalah madrasah Nizhamiyah di Baghdad.⁶⁵

⁶⁵ Madrasah Nizhamiyah didirikan oleh penguasa Bani Saljuk, Nizham Al-Mulk, seorang perdana menteri dari Alp Arselan dan Malik Syah Pada tahun 457 H, setengah abad setelah berdirinya Universitas Al-Azhar di Cairo. Bani Saljuk terkenal sangat fanatik terhadap madzhab sunni. Madrasah Nizhamiyah didirikan di setiap kota di Irak dan Khurasan, untuk mengikis paham syi'ah Zaidiyah yang dikembangkan oleh dinasti Buwaih sebelumnya dan dalam rangka menghadang paham Islamiyah yang dipropagandakan oleh dinasti Fatimiyah di Mesir. Selain itu, Tujuan pendirian madrasah oleh Nizham Al-Mulk adalah untuk mencetak birokrat-birokrat yang akan menduduki jabatan kenegaraan, atau paling tidak, melalui lembaga tersebut akan lahir warga negara yang mengerti akan nilai-nilai yang dianut oleh pemerintah. Singkat kata, madrasah Nizhamiyah merupakan instrumen kebijakan politik yang salah satu fungsi utamanya adalah untuk menanamkan doktrin kenegaraan yang memperkuat kerajaan.

Kedudukan politik di dalam Islam sama pentingnya dengan pendidikan. Tanpa otoritas politik, *syari'at* Islam sulit bahkan mustahil untuk ditegakkan. Kekuasaan adalah sarana untuk mempertahankan *syiar* Islam. Pendidikan bergerak dalam usaha menyadarkan umat untuk menjalankan *syari'at*. Umat tidak akan mengerti *syari'at* tanpa adanya pendidikan. Bila politik (kekuasaan) mengayomi dari atas, maka pendidikan melakukan pembenahan lewat arus bawah.

Kutipan di atas menegaskan bahwa hubungan antara politik dan pendidikan di dalam Islam tampak sedemikian erat. Perkembangan kegiatan-kegiatan kependidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan dukungan institusi-institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka.

Hal ini dapat dipahami, karena tujuan pemerintahan Islam, Menurut Abdul Ghaffar Aziz di dalam M. Sirozi, adalah “*menegakkan kebenaran dan keadilan*. Tujuan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan melaksanakan *syari'at*. *Syari'at* tidak akan berjalan bila umat tidak memahami ajaran Islam”.⁶⁶

Patronase Nizam Al-Mulk tidak hanya menyangkut masalah keuangan dan pengadaan sarana, tetapi juga kurikulum dan jabatan “professorship”, guru besar (Rasyid, 1994 hal.7-8).

⁶⁶ Pada periode Mekkah, rumah Arqam Ibn Abi Arqam berfungsi sebagai lembaga pendidikan pertama dalam bentuk yang sederhana, dimana

Menurut M. Sirozi, selain karena faktor religius bahwa agama Islam sangat menjunjung aktivitas kependidikan, perhatian besar para pemimpin Islam terhadap masalah pendidikan didorong oleh besarnya peran lembaga-lembaga pendidikan dalam penyampaian misi-misi politik.⁶⁷ Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideologi negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Sjalabi mencatat bahwa Khalifah Al-Makmun mempolitisasi *majelis munazharah* dalam rangka menyebarkan paham Mu'tazilah sebagai mazab resmi negara waktu itu melalui peristiwa Inquisisi, yaitu penyelidikan atau interogasi (*al-Mihna*) terhadap para ulama dan pejabat penting.⁶⁸

Kepada mereka ditanyakan apakah Al-Qur'an itu Qadim atau Hadis Dikutip dalam Rayid. Melalui inquisisi para ulama, pilar penopang lembaga pendidikan dan pengembangan

nabi mengajar sahabat-sahabatnya. Pada periode Madinah, aktivitas pendidikan berpusat di masjid-masjid. Pada periode tersebut Khalifah Umar Ibn Khattab memerintahkan Abu Musa Al-Asy'ari agar setiap suku mendirikan masjid untuk memperluas jaringan pendidikan Islam. Khalifah-khalifah Bani Umayyah, baik yang di Damaskus maupun di Spanyol berperan penting dalam membangun cakrawala pendidikan Islam (Sjalabi, 1973 hal. 94).

⁶⁷ Muhammad Sirozi, *Politik Pendidikan.....*, hal. 4

⁶⁸ Bila ditinjau dari sisi aqidah, inquisisi adalah usaha pemurnian pandangan masyarakat. Bagi golongan Mu'tazilah menganggap bahwa Al-Qur'an itu Qadim adalah kafir karena dengan demikian itu seseorang telah menjadikan yang Qadim ada dua. Kekufuran harus dihapus dari pandangan orang Islam. Pejabat negara dan para ulama yang mengatakan bahwa Al-Qur'an Qadim harus disingkirkan, karena mereka adalah termasuk orang kafir (Rasyid, 1994 hal. 18).

ilmu pengetahuan secara tidak langsung dipaksa menerima paham Mu'tazilah, ideologi resmi penguasa. Pendidikan Islam tidak hanya berjasa menghasilkan para pejuang yang militan dalam memperluas peta politik, tetapi juga para ulama yang berhasil membangun masyarakat yang sadar hukum. Seiring dengan perluasan peta politik dan penambahan pemeluk Islam, juga terjadi perkembangan lembaga (institusi) pendidikan dalam jumlah maupun varietasnya. Di dalam sejarah Islam tercatat bahwa pusat pendidikan yang pertama kali muncul adalah rumah Arqam Ibn Abi Arqam, yakni ketika Nabi berada di Makkah⁶⁹

Selanjutnya pada masa Bani Umayyah, lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut sudah lebih variatif dengan lahirnya Kuttab⁷⁰ dan dijadikan rumah-rumah pembesar kerajaan sebagai tempat belajar.

⁶⁹ Pada periode Makkah pusat-pusat pendidikan difokuskan di masjid-masjid. Masjid yang pertamakali didirikan adalah masjid Quba. Di masjid ini diadakan lingkaran-lingkaran belajar (Halaqah) sebagaimana di masjid Nabi di Mirbad Madinahal. Untuk menunjang proses pendidikan dan pengajaran di masjid ini, lalu dibangunlah al-Suffah (semacam beranda). Di Al-Suffah ini Rasulullah memberikan pelajaran kepada sahabat dan melatih beberapa orang diantara mereka untuk menjadi guru yang mampu mengajar beberapa pelajaran yang berlainan. Diantara para sahabat yang dilatih di Al-Suffah tersebut ialah Abu Abdullah Ibnu Rowahah, Ubadah Ibnu Shamit, dan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah" (Rasyid, 1994 hal. 25).

⁷⁰ Kuttab, menurut Al-Thibawi, merupakan fenomena yang berkembang pada awal abad ke-8 M di penghujung pemerintahan Bani Umayyah. Kuttab ini berfungsi sebagai pusat pendidikan anak-anak kecil,

Menurut Rasyid di dalam M. Sirozi menyimpulkan bahwa para penguasa Islam senantiasa terlibat langsung dalam persoalan pendidikan. Menurutnya ada dua Alasan utama mengapa para ulama sangat peduli dengan pendidikan. *Pertama*, karena Islam adalah agama yang totaliter *jam'i*, mencakup semua aspek kehidupan seorang muslim mulai dari makan dan minum, tatacara berumahtangga, urusan sosial kemasyarakatan, sampai pada ibadah semuanya diatur oleh *syari'at*. Untuk mengetahui bagaimana hidup yang Islami, seorang Muslim mesti terlibat dalam dunia pendidikan. *Kedua*, karena motivasi politik, sebab politik dan Agama sulit untuk dipisahkan dalam Islam. Para penguasa Muslim sering menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menanamkan paham-paham keagamaan. Inilah yang dilakukan oleh dinasti Buwaih, Fatimiyah dan Khalifah Al-Makmun.⁷¹

Dengan kekuasaan mereka menanamkan ideologi negara dengan tujuan lahirnya kesamaan ide antara penguasa dan masyarakat umum sehingga memudahkan pengaturan masalah-masalah kenegaraan. Ternyata fakta tersebut berbeda dengan Negara Indonesia sebagai Negara yang berazaskan pancasila dan UUD 1945.

didirikan untuk menghindari mereka dari mengotori masjid (Dalam Rasyid, 1994 hal. 26).

⁷¹ Muhammad Sirozi, *Politik Pendidikan.....*, hal.5-6

Dinamika Politik Pendidikan Islam di Indonesia

Sejarah mencatat bahwa sejak Zaman Pra Kemerdekaan (tahun 1900- menjelang 1945) Zaman pra kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah zaman di mana Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda yang berlanjut dengan pendudukan Jepang, sebab pada prinsipnya pendidikan Islam di Indonesia menurut catatan Haidar Putra Daulay telah berlangsung semenjak masuknya Islam ke kawasan ini.⁷² Tidak banyak perubahan-perubahan politik serta pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan Islam periode pra kemerdekaan yang dapat penulis tampilkan. Pembatasan ini dilakukan untuk melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah kolonial yang berdampak terhadap perkembangan pendidikan Islam baik langsung maupun tidak. Kebijaksanaan pemerintah Belanda dalam bidang pendidikan terutama yang terkait dengan pendidikan Islam dirasakan sangat diskriminatif dan merugikan umat Islam, amat jarang ditemukan kebijakan yang dikeluarkan tersebut menguntungkan secara langsung terhadap perkembangan pendidikan.

Setelah akhir abad 19 dan awal abad 20 penguasa kolonial memberikan layanan pendidikan dengan model

⁷² Haidar Putra Daulay, 2001. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya), cet. Ke-1, hal.1

persekolahan secara klasikal dan tidak memasukkan pendidikan Islam dalam sistem pendidikannya. Menurut Fasli Jalal dalam prakteknya model ini berorientasi kelas sosial, bersifat elitis dan diskriminatif serta secara terselubung lebih berorientasi pada kepentingan penguasa kolonial. Seirama dengan itu, Abuddin Nata berkomentar bahwa secara umum Belanda amat pelit dan diskriminatif dalam memberikan pendidikan bagi rakyat jajahannya, di samping itu Belanda juga sangat mencurigai dan tidak suka dengan keberadaan pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren-pesantren, madrasah dan sebagainya karena dianggap “sarang pemberontak”.⁷³

Pada akhirnya, pemerintahan Indonesia diawalisejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebagai sebuah negara yang independen, maka bangsa Indonesia kemudian menyusun sistem kehidupan berbangsa dan bernegaranya berdasar Pancasila dan UUD 1945. Di antara sistem kehidupan tersebut tersusunlah sistem pendidikan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia bagi seluruh rakyatnya.

⁷³ Usman Abu Bakar dan Surohim, 2005. *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam: Respon kreatif terhadap Undang-undang Sisdiknas*, (Yogyakarta : Safiria Insani Press), cet. Ke-1, hal. 70

Dalam rangka implementasi dasar negara UUD 1945, maka pemerintah Indonesia di masa itu yang kemudian di kenal dengan pererintahan orde lama di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno menyusun berbagai peraturan sebagai kebijakan pemerintah bagi pendidikan nasional ketika itu. Pendidikan Islam juga tak lepas dari kebijakan saat itu. Ketika awal kemerdekaan pendidikan Islam masih sangat sederhana, karena ketika itu pendidikan Islam masih didominasi oleh sistem pendidikan pesantren dan madrasah. Sekolah-sekolah Islam masih sedikit jumlahnya. Walaupun demikian, ternyata dunia mencatat dan sejarah membuktikan ada negara-negara yang memiliki ide dan prinsip bahwa pendidikan harus terpisah dari politik dan politik seharusnya berada di luar pendidikan.

Ide Non-political school

Meskipun hubungan atau keterkaitan antara politik dan pendidikan begitu kuat dan riil, tidak semua orang mengakui dan mendukung realitas tersebut. Banyak pihak yang resah dengan realitas tersebut dan menginginkan upaya-upaya perubahan untuk meminimalisasi atau mengikis elemen-elemen politik dalam dunia pendidikan. Mereka menginginkan agar pendidikan dan politik menjadi dua wilayah yang terpisah dan tidak berhubungan. Mereka percaya bahwa pemisahan antara politik dan pendidikan dapat dilakukan untuk membebaskan

lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai kepentingan politik penguasa. Kecenderungan tersebut memuncak pada tahun 1970-an, khususnya di Amerika Serikat (Wirt, Dalam Harman, 1974: ii).

Pada waktu itu ada keinginan untuk menciptakan dinding pemisah antara karakteristik sebuah sistem politik dengan kebijakan pendidikan. Kecenderungan itu berkaitan erat dengan ideologi dan praktik-praktik politik. Di berbagai negara, ada beberapa ilmuwan pendidikan dan politik yang mengabaikan aspek-aspek politik dari pendidikan dan berpendapat bahwa pendidikan dan politik perlu dipisahkan. Pandangan ini biasanya berangkat dari kekecewaan yang mendalam terhadap berbagai realitas politik, seperti praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh partai-partai politik pada akhir abad ke-19. Namun, karena minimnya kajian tentang persoalan ini, penjelasan tentang dasar-dasar pemisahan antara pendidikan dan politik di berbagai negara masih sulit ditemukan.

Apapun latar belakang dan tujuan kemunculannya, kecenderungan pemisahan dan pengintegrasian pendidikan dan politik merupakan persoalan penting yang perlu dicermati, baik oleh ilmuwan pendidikan maupun ilmuwan politik. Pemahaman terhadap karakteristik hubungan antara pendidikan dan politik adalah suatu prasyarat yang diperlukan untuk dapat

memahami politik pendidikan sebagai suatu bidang kajian akademik dan beberapa mitos yang mengitarinya.

Hingga tahun 1980-an, menurut catatan Harman di dalam M. Sirozi, dibanyak negara masih ada keyakinan yang meluas bahwa pendidikan dan politik adalah aktivitas yang terpisah dan tidak memiliki kaitan apa-apa. Para pemilik keyakinan ini bersikukuh bahwa pendidikan memang seharusnya terpisah dari politik. Keyakinan seperti ini telah mengaburkan pengertian *the politics of education* atau politik pendidikan dan tujuan, fokus, serta wilayah kajian politik pendidikan sebagai sebuah kajian bidang akademik. Di Amerika, Harman (1974: 3) memberi contoh, keyakinan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang terpisah dan tidak memiliki hubungan apapun juga sangat kuat. Selama bertahun-tahun sekolah-sekolah publik (*public schools*) di negara tersebut di tempatkan dalam sebuah *atmospher anti-political* dan *non-political*.

Ide tentang *non-political school* di Amerika mula-mula dikembangkan dan disebarluaskan oleh para administrator sekolah dan para pendidik profesional yang ingin melindungi pendidikan publik dari politik lokal dan nasional Amerika awal abad ke-19 yang berwatak korup dan kejam. Salah satu pionir pandangan ini, Thomas H. Eliot (1959) di dalam M. Sirozi, menjelaskan logika pandangannya, bahwa semua sistem

sekolah telah “dirusak oleh berbagai aspek politik yang masuk secara paksa, khususnya penggunaan *patronase* dalam pengangkatan (staf) dan penentuan kontrak-kontrak (kerja) dengan mengabaikan kemungkinan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak”. Menurut Bailey (1962) dan Rosenthal (1969) di dalam M. Sirozi (2005), berkembangnya ide pemisahan antara pendidikan dan politik di Amerika dilatarbelakangi oleh keinginan para praktisi pendidikan untuk mempertahankan otonomi profesional yang lebih besar bagi mereka, serta untuk melindungi kontinuitas program-program kependidikan mereka dari kepentingan para politikus dan pengaruh proses politik, seperti pemilihan umum.

Para pendukung *non-political school* yang kebanyakan terdiri dari para pelaksana dan praktisi pendidikan dengan sengaja menciptakan seperangkat mitos yang menggambarkan pendidikan sebagai suatu fungsi pemerintahan yang unik, yang harus dikeluarkan dari politik (*taken out of politics*) dan dijaga oleh para pendidik sebagai satu-satunya yang dapat mengamankan kepentingan publik. Roesco Martin, seorang ilmuwan politik lain yang sejalan dengan pandangan Eliot memandang bahwa infiltrasi dalam dunia pendidikan adalah sesuatu yang berbahaya. Menurut Martin (1962: 59-60) di dalam M. Sirozi, “pendidikan publik harus dipisahkan (dari politik) dan mendapat perlakuan khusus. Adalah berbahaya

bagi sekolah publik apabila dikaitkan dengan sektor publik lainnya, bahwa sekolah tidak ada urusan apa-apa dengan politik pada umumnya, bahwa sekolah adalah contoh utama dan kampiun demokrasi”. Selama bertahun-tahun doktrin yang dilakukan oleh Martin tersebut diterima secara luas oleh publik Amerika tanpa sikap kritis. Di Australia, keyakinan bahwa pendidikan dan politik merupakan hal terpisah memang tidak meluas seperti di Amerika, tetapi cukup mengganggu.

Perdebatan-perdebatan tentang pendidikan di kalangan politisi, pendidik, atau figur Australia sering membuat kesimpulan yang tak beralasan seperti ungkapan “*education is outside politics*” (pendidikan berada di luar politik) atau “*education should be taken out of politics altogether*” (pendidikan harus sepenuhnya keluar dari politik). Ungkapan-ungkapan tersebut, lanjut Harman, muncul secara alamiah dari mulut sejumlah orang dan kebenarannya jarang dipertanyakan. Selain menghambat pemahaman professional tentang relasi pendidikan dan politik, kata Harman, pandangan bahwa politik dan pendidikan merupakan dua hal terpisah juga menghambat penelitian tentang fungsi-fungsi dan aspek-aspek politik pendidikan.

Selain itu, tambahnya lagi, pandangan tersebut juga menimbulkan kebingungan tentang istilah-istilah seperti politik pendidikan (*politics of education*) dan politik dalam pendidikan

(*politics in education*). Bagi Harman, pandangan tersebut adalah pandangan tradisional sentimen komunitas yang menapikan kenyataan bahwa sejak awal pendidikan publik di Australia telah terjerembab ke dalam kehidupan politik.

Harman di dalam M. Sirozi, mengidentifikasi empat faktor utama yang memungkinkan munculnya keyakinan, pandangan dan sikap *non-political* di Australia.⁷⁴ *Pertama*, keyakinan tersebut mungkin bagian dari hasil konflik yang tajam antara gereja dan sekolah pada abad ke-19. *Kedua*, konflik tersebut memunculkan pandangan yang luas bahwa politik sektarian tidak boleh lagi mengganggu pendidikan, dan bahwa sistem sekolah pemerintah dan penarikan bantuan-bantuan dari sekolah-sekolah gereja harus terus berjalan. *Ketiga*, sistem pendidikan negeri yang sangat tersentralisasi mungkin telah menimbulkan keyakinan yang kuat di kalangan kepala sekolah dan guru-guru. Keyakinan bahwa pendidikan berada di luar politik telah menguat di kalangan pendidik profesional di Australia selama bertahun-tahun di bawah pengaruh para pendidik Amerika dan tulisan-tulisan tentang pendidikan Amerika. *Keempat*, salah satu pandangan populer orang Australia bahwa politik adalah sesuatu yang cenderung kotor dan tidak begitu terhormat karena berkaitan dengan ide tentang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan kurang

⁷⁴ Muhammad Sirozi, *Politik Pendidikan.....*, hal.24

baiknya gambaran tentang partai politik. Pandangan ini secara alami dan logis tidak menghendaki politik mengganggu sebuah aktivitas yang berkenaan dengan pembinaan generasi muda.

Namun demikian, menurut Harman di dalam M. Sirozi, pandangan bahwa pendidikan dan politik merupakan dua hal yang sama sekali terpisah, tidak mengandung kebenaran, baik di negara-negara industri seperti di Amerika dan Australia maupun di negara-negara berkembang.⁷⁵ Ia percaya bahwa di belahan dunia manapun, “politik dan pendidikan saling terkait dan saling memengaruhi”. “Keduanya”, lanjut Harman, adalah “dua aktivitas yang mendasar atau fundamental dalam semua masyarakat manusia”. Berusaha menemukan jenis masyarakat, apakah modern, demokratik, totaliter, sedang berkembang, atau primitif, di mana pendidikan dan politik tidak terkait dan tidak berinteraksi, tambah Harman, sama sekali adalah suatu usaha sia-sia.

Pendidikan menyangkut proses transmisi ilmu pengetahuan dan budaya, serta perkembangan keterampilan dan pelatihan untuk tenaga kerja dan politik berkenaan dengan praktik kekuasaan, pengaruh dan otoritas, serta berkenaan dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi nilai-nilai dan sumberdaya. Karena keduanya syarat dengan proses pengalokasian dan pendistribusian nilai-nilai

⁷⁵ Ibid., hal.25

dalam masyarakat, maka tidaklah sulit untuk memahami bahwa pendidikan dan politik adalah dua aktivitas yang akan terus terkait dan saling berinteraksi. Lembaga-lembaga atau agency yang menyelenggarakan aktivitas-aktivitas pada dua sektor kehidupan masyarakat ini akan saling memengaruhi, apapun karakteristik dan budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Hal ini terjadi dalam setiap masyarakat, apapun tingkat perkembangannya, sistem politiknya dan ideologinya.

Hubungan Politik dan Pendidikan Di Indonesia

Politik Pendidikan di Negara Indonesia merupakan bidang kajian yang relatif. Padahal politik pendidikan sering menjadi faktor yang sangat menentukan arah perkembangan pendidikan ditingkat mikro (kelembagaan) maupun makro (nasional dan internasional). Perkembangan kajian ini dipengaruhi beberapa hal antara lain; *sistem politik, perkembangan pendekatan penelitian, minat keilmuan, dan kultur akademik*. Sementara sistem politik sangat menentukan perkembangan kajian politik pendidikan, karena karakteristik sistem politik menentukan ketersediaan informasi dan perkembangan wacana politik pendidikan. Perkembangan pendekatan penelitian dalam disiplin ilmu politik dan ilmu pendidikan juga sangat menentukan perkembangan kajian politik pendidikan dalam suatu negara. Begitu pula minat

keilmuan sangat menentukan. Kajian politik pendidikan tidak akan berkembang apabila para ilmuwan politik tidak berminat terhadap dunia pendidikan dan sebaliknya, jika para ilmuwan pendidikan tersebut tidak berminat terhadap dunia politik bahkan semakin kritis dan otonom kultur akademik, maka akan semakin cepat dan berkembang kajian politik pendidikan.

Bila sebelumnya, manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat (sentralisasi), maka dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dikenal dengan istilah desentralisasi.

Pendidikan Indonesia memang kurang *meng-Indonesia*, kurang berjati diri/kurang berkarakter Indonesia, kurang membumi, kurang melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dan kurang mengakar pada kekayaan Indonesia. Dengan melihat rumusan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang bunyinya: *bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara*

yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional tersebut jelas belum sepenuhnya mengacu kepada Pancasila. Semestinya, tujuan pendidikan nasional harus mengacu pada Pancasila, yaitu mendidik manusia Indonesia agar beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, berbangsa, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial.⁷⁶

Menurut Swasono dalam bukunya "*Pendidikan Nasional Dan Pembangunan Karakter Bangsa*" bahwa pembangunan pendidikan harus bertitiktolak dari proses humanisasi, proses ditingkatkannya harkat martabat manusia, tumbuhnya harga diri, kemandirian, serta terjaganya kebahagiaan rakyat."⁷⁷

Sedangkan bagian yang paling esensial dalam politik pendidikan adalah kekuatan yang mengendalikan proses penyelenggaraan pendidikan, bagaimana pengendalian itu dilaksanakan dan ke arah mana kekuatan tersebut akan membawa agenda-agenda pengembangan dan mutu pendidikan. Menurut M. Sirozi dalam bukunya "*Konteks dan Kerangka Konseptual Kajian Politik Pendidikan*" mengatakan

⁷⁶ Sri Suprpto, 2013. "*Landasan Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan*". *Cakrawala Pendidikan* (Jurnal Ilmiah Pendidikan, Juni 2013, Thal.XXXII, No.2). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

⁷⁷ Sri-Edi Swasono, 2012. *Pendidikan Nasional dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Jakarta: Bappenas.

bahwa, politik pendidikan dikatakan baik manakala para penguasa memiliki visi pengembangan pendidikan yang jelas, realistis, dan terukur, memiliki kemauan politik (*political will*) untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, dan dengan penuh komitmen berupaya memanfaatkan dan atau menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mendorong dan memfasilitasi kemajuan pendidikan.⁷⁸ Mereka mendukung, mensubsidi, mengapresiasi dan mendanai berbagai aktivitas kependidikan semata untuk memajukan pendidikan. Mereka memiliki tekad dan komitmen yang tinggi serta kebijakan yang riil untuk mendorong kemajuan pendidikan. Mereka tidak menggunakan isu-isu kependidikan sebagai komoditi politik dan tidak pernah menomorduakan pendidikan dalam kebijakan-kebijakannya. Mereka selalu menempatkan pendidikan sebagai salah satu agenda atau prioritas utama dalam menjalankan kekuasaannya. Mereka menempatkan sektor pendidikan sebagai bagian inti dari perencanaan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Mereka memberikan otonomi dan ruang gerak seluas-luasnya kepada penyelenggara pendidikan untuk melakukan berbagai kreasi dan improvisasi dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan. Maka otonomi pendidikan

⁷⁸ M. Sirozi, 2013. *Konteks dan Kerangka Konseptual Kajian Politik Pendidikan*, (Palembang Noer Fikri Offset), hal. 78

memberikan peluang bagi sekolah/satuan pendidikan khususnya guru, untuk melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan konteks sekolah masing-masing. Hal ini dilakukan agar satuan pendidikan dapat mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan peserta didik sesuai lingkungannya.⁷⁹

Lebih lanjut M.Sirozi menjelaskan bahwa para penguasa memanfaatkan kekuasaan untuk pendidikan bukan sebaliknya, memanfaatkan pendidikan untuk tujuan kekuasaan.⁸⁰ Sebagai bukti, Indonesia di era reformasi, politik pendidikan telah melahirkan beberapa terobosan penting seperti menetapkan minimal 20% APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Salah satu langkah fundamental di era ini adalah ditetapkannya undang-undang nomor 20 tahun 2003, revisi undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 49 undang-undang nomor 20 tahun 2001 menegaskan, “dana pendidika selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)”. Era reformasi ini juga ditandai oleh beberapa langkah penting dan positif dalam bidang pendidikan, seperti

⁷⁹ Zainal Arifin, 2012. *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Diva Press), hal. 13-18

⁸⁰ *Ibid.*, hal.79

ditetapkannya undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang kemudian direvisi menjadi PP nomor 66 tahun 2010, dan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 78 tahun 2009 tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Namun tanpa bermaksud menapikan banyaknya praktik politik pendidikan yang baik dengan hasilnya yang juga baik, dan kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak praktik politik pendidikan yang buruk yang berdampak buruk pula terhadap kinerja sistem pendidikan nasional. Praktik-praktik buruk politik pendidikan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

Pertama, pendidikan dan kampanye politik. Seharusnya para politisi memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mengkampanyekan program-program pendidikan. Akan tetapi di Indonesia sebaliknya di mana para politisi berupaya sedapat mungkin memanfaatkan isu-isu kependidikan untuk kampanye politik, dalam rangka mendongkrak popularitas mereka meraih

kekuasaan politik; *Kedua*, politisasi peraturan perundang-undangan. Banyaknya penguasa yang ingin memanfaatkan berbagai peraturan perundang-undangan pendidikan untuk kepentingan politik; *Ketiga*, kerancuan peraturan perundang-undangan. Banyaknya kepentingan politik praktis yang masuk ke wilayah pendidikan juga mengakibatkan proses penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan sering tidak terkoordinir, sehingga sering terjadi tumpang tindih (*overlapping*), bertentangan (*conflicting*), dan inkonsisten sehingga kurang efektif dan sering menimbulkan mispersepsi dan konflik; *Keempat*, program berbasis proyek, tidak berbasis riset. Saratnya kepentingan politik dalam program-program kependidikan membuat program-program tersebut tidak dipersiapkan dengan baik; *Kelima*, politisasi pendanaan. Kewajiban mengalokasikan minimal 20% dari anggaran APBN dan APBD telah secara signifikan meningkatkan dana pendidikan. Tetapi efektifitas dana tersebut untuk pendidikan patut dipertanyakan; *Keenam*, birokratisasi manajemen. Semakin hari, manajemen lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, terutama yang berstatus negeri, tidak kreatif karena terkungkung oleh birokrasi yang ketat, baik dalam bidang administrasi pada umumnya maupun dalam bidang administrasi keuangan; *Ketujuh*, lemahnya *law enforcement*, banyaknya pertimbangan-pertimbangan politik

dalam penyelenggaraan pendidikan membuat pemerintah tidak dapat bersikap tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pendidikan.⁸¹

Dari pandangan penulis dinamika politik pendidikan Islam pada negara-negara maju dan berkembang di dunia termasuk di Indonesia, saling memengaruhi satu sama lain. Dapat di lihat dari perkembangan sains dan teknologi sebagai wujud keberhasilan politik pendidikan tersebut. Sedangkan di Indonesia walaupun masih ada praktek-praktek buruk politik pendidikan tetapi sudah ada upaya-upaya pembenahan. Seperti pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan untuk semua elemen pendidikan sementara pendidikan seperti Pendidikan Islam khususnya selalu melakukan pembenahan-pembenahan dari bawah dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam itu sendiri.

Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam

Prinsip berasal dari kata "*principle*" yang bermakna asal, dasar, prinsip sebagai dasar pandangan dan keyakinan, pendirian seperti berpendirian, mempunyai dasar atau prinsip yang kuat. Adapun dasar dapat diartikan asas, pokok atau pangkal (sesuatu pendapat aturan dan sebagainya). Dengan demikian prinsip dasar pendidikan Islam bermakna pandangan yang mendasar terhadap sesuatu yang menjadi sumber pokok

⁸¹ *Ibid.*, hal.101-109

sehingga menjadi konsep, nilai dan asas bangunan pendidikan Islam.

Achmadi menyatakan bahwa maksud dasar pendidikan ialah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan baik dalam rangka penyusunan teori, perencanaan maupun pelaksanaannya pendidikan. Karena kita berbicara pendidikan Islam, maka pandangan hidup yang mendasari seluruh kegiatan pendidikan ialah pandangan hidup Islami atau pandangan hidup muslim yang pada hakekatnya merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat transenden, universal, dan eternal. Dengan nilai-nilai itulah kedudukan pendidikan Islam baik secara normatif maupun konsepsional berbeda dengan ilmu pendidikan lainnya.

Adapun sumber nilai dalam Islam adalah al-Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Karena banyaknya nilai yang terdapat dalam sumber tersebut, maka dipilih dan diangkat beberapa di antaranya yang dipandang fundamental dan dapat merangkum berbagai nilai yang lain, yaitu tauhid, kemanusiaan, kesatuan umat manusia, keseimbangan, *rahmatan lil'alamin*. Dengan demikian, pendidikan Islam sangat ideal terutama dikarenakan memperhatikan kebersamaan, pengembangan diri, masyarakat, menggalakkan ilmu, dilakukan secara manusiawi, menyeluruh dan selalu berupaya meningkatkannya.

Prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam adalah aspek-aspek fundamental yang menggambarkan dasar dan tujuan pendidikan Islam sehingga ia membedakannya dengan pendidikan non-Islam. Prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam itu meliputi: *Pertama*, Pendidikan Islam adalah bagian dari proses rububiyah Tuhan; *Kedua*, Pendidikan Islam berusaha membentuk manusia seutuhnya; *Ketiga*, Pendidikan Islam selalu berkaitan dengan agama; *Keempat*, Pendidikan Islam merupakan pendidikan terbuka.

Maka dalam prinsip pendidikan Islam yang ditegakkan harus atas dasar yang sama dan berpangkal dari pandangan Islam secara filosofis terhadap jagad raya, manusia, masyarakat, ilmu pengetahuan dan akhlak. Pandangan Islam terhadap masalah-masalah tersebut, melahirkan berbagai prinsip dalam pendidikan Islam yang meliputi:

1. Prinsip Integral dan Seimbang

a. Prinsip Integral

Pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Keduanya harus terintegrasi secara harmonis. Dalam ajaran Islam, Allah adalah pencipta alam semesta termasuk manusia. Allah pula yang menurunkan hukum-hukum untuk mengelola dan melestarikannya. Hukum-hukum mengenai alam fisik disebut *sunatullah*, sedangkan

pedoman hidup dan hukum-hukum untuk kehidupan manusia telah ditentukan pula dalam ajaran agama yang disebut *dinullah* yang mencakup akidah dan syariah.

Dalam ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan, Allah memerintahkan agar manusia untuk membaca yaitu dalam Qs. Al-'Alaq ayat-1-5. Dan ditempat lain ditemukan ayat yang menafsirkan perintah membaca tersebut, seperti dalam Firman Allah Qs. Al-Ankabut:

ا تَلِ مَا اَوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

Artinya : Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Al-Qur'an). (QS. Al-Ankabut : 45)

Allah memberikan penjelasan bahwa Al-Qur'an yang harus dibaca. Ia merupakan ayat yang diturunkan Allah (ayat *tanziliyah, qur'aniyah*). Selain itu, Allah memerintahkan agar manusia membaca ayat Allah yang berwujud fenomena-fenomena alam (ayat *kauniyah, sunatullah*), salah satu ayatnya berbunyi :

قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

Artinya : "Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada dilangit dan dibumi"(QS. Yunus : 101)

Ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan agar manusia membaca Al-Qur'an (ayat-ayat *Al-Qur'aniyah*) dan fenomena alam (ayat *kauniyah*) tanpa memberikan tekanan terhadap salah satu jenis ayat yang dimaksud. Hal itu berarti bahwa pendidikan Islam harus dilaksanakan secara terpadu (integral)

b. Prinsip Seimbang

Pendidikan Islam selalu memperhatikan keseimbangan di antara berbagai aspek yang meliputi keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara ilmu dan amal, urusan hubungan dengan Allah dan sesama manusia, hak dan kewajiban. Keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat dalam ajaran Islam harus menjadi perhatian. Rasul diutus Allah untuk mengajar dan mendidik manusia agar mereka dapat meraih kebahagiaan kedua alam itu. Implikasinya, pendidikan harus senantiasa diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

وابتغ فيما اتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا

Artinya : “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi”. (Q.S Al-Qashas : 77)

Dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, pendidik harus memperhatikan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan yang relevan. Selain mentrasfer ilmu pengetahuan, pendidik perlu mengkondisikan secara bijak dan profesional agar peserta didik dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di dalam maupun di luar kelas.

2. Prinsip Bagian dari Proses Rububiyah

Al-Qur'an menggambarkan bahwa Allah adalah *Al-Khaliq*, dan *Rabb Al-Amin* (pemelihara semesta alam). Dalam proses penciptaan alam semesta termasuk manusia. Allah menampakkan proses yang memperlihatkan konsistensi dan keteraturan. Hal demikian kemudian dikenal sebagai aturan-aturan yang diterapkan Allah atau disebut *Sunnatullah*.

Sebagaiman Al-Kailani yang dikutip oleh Bukhari Umar dalam bukunya menjelaskan, bahwa peranan manusia dalam pendidikan secara teologis dimungkinkan karena posisinya sebagai makhluk ciptaan Allah, yang paling sempurna dan dijadikan sebagai *khalifatullah fi al-ardh*. Sebagai *khalifah*, manusia juga mengemban fungsi *rububiyah* Allah terhadap alam semesta termasuk diri manusia sendiri. Dengan perimbangan tersebut dapat dikatakan bahwa karakter hakiki pendidikan Islam pada intinya terletak pada fungsi *rububiyah* Allah secara praktis dikuasakan atau diwakilkan

kepada manusia. Dengan kata lain, pendidikan Islam tidak lain adalah keseluruhan proses dan fungsi *rubbubiyah* Allah terhadap manusia, sejak dari proses penciptaan sampai dewasa dan sempurna.

3. Prinsip Membentuk Manusia yang Seutuhnya

Manusia yang menjadi objek pendidikan Islam ialah manusia yang telah tergambar dan terangkum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Potret manusia dalam pendidikan sekuler diserahkan pada orang-orang tertentu dalam masyarakat atau pada seorang individu karena kekuasaannya, yang berarti diserahkan kepada angan-angan seseorang atau sekelompok orang semata.

Pendidikan Islam dalam hal ini merupakan usaha untuk mengubah kesempurnaan potensi yang dimiliki oleh peserta didik menjadi kesempurnaan aktual, melalui setiap tahapan hidupnya. Dengan demikian fungsi pendidikan Islam adalah menjaga keutuhan unsur-unsur individual peserta didik dan mengoptimalkan potensinya dalam garis keridhaan Allah. Prinsip ini harus direalisasikan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Pendidik harus mengembangkan baik kecerdasan intelektual, emosional maupun spiritual secara simultan.

4. Prinsip Selalu Berkaitan dengan Agama

Pendidikan Islam sejak awal merupakan salah satu usaha untuk menumbuhkan dan memantapkan kecenderungan tauhid yang telah menjadi fitrah manusia. Agama menjadi petunjuk dan penuntun ke arah itu. Oleh karena itu, pendidikan Islam selalu menyelenggarakan pendidikan agama. Namun, agama di sini lebih kepada fungsinya sebagai sumber moral nilai. Sesuai dengan ajaran Islam pula, pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu sebagai materi, atau keterampilan sebagai kegiatan jasmani semata, melainkan selalu mengaitkan semuanya itu dengan kerangka praktik (*'amaliyyah*) yang bermuatan nilai dan moral. Jadi, pengajaran agama dalam Islam tidak selalu dalam pengertian (ilmu agama) formal, tetapi dalam pengertian esensinya yang bisa saja berada dalam ilmu-ilmu lain yang sering dikategorikan secara tidak proporsional sebagai ilmu sekuler.

5. Prinsip Terbuka

Dalam Islam diakui adanya perbedaan manusia. Akan tetapi, perbedaan hakiki ditentukan oleh amal perbuatan manusia (Qs. Al-Mulk : 2), atau ketakwaan (Qs. Al-Hujrat : 13). Oleh karena itu, pendidikan Islam pada dasarnya bersifat terbuka, demokratis, dan universal. menurut Jalaludin yang dikutip oleh Bukhari Umar menjelaskan bahwa keterbukaan

pendidikan Islam ditandai dengan kelenturan untuk mengadopsi unsur-unsur positif dari luar, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakatnya, dengan tetap menjaga dasar-dasarnya yang original, yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist.

6. Prinsip Menjaga Perbedaan Individual

Perbedaan individual antara seorang manusia dengan orang lain dikemukakan oleh Al-Qur'an dan Hadist. Seperti dalam salah satu firman Allah yang berbunyi:

ومن آياته خلق السموت والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايت

للعلمين

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”. (QS. Ar-Rum : 22)

Perbedaan-perbedaan yang dimiliki manusia melahirkan perbedaan tingkah laku karena setiap orang akan berbuat sesuai dengan keadaanya masing-masing. Menurut Asy-Syaibani yang dikutip oleh Ramayulis menjelaskan bahwa

pendidikan Islam sepanjang sejarahnya telah memelihara perbedaan individual yang dimiliki oleh peserta didik.

7. Prinsip Pendidikan Islam adalah Dinamis

Pendidikan Islam menganut prinsip dinamis yang tidak beku dalam tujuan-tujuan, kurikulum dan metode-metodenya, tetapi berupaya untuk selalu memperbaharui diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam seyogyanya mampu memberikan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan zaman dan tempat dan tuntutan perkembangan dan perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang memotivasi untuk hidup dinamis.⁸²

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, Pendidikan Islam memiliki beberapa Landasan Prinsip-Prinsip Metodologis, sebagai berikut:

1. Prinsip Memberikan Suasana Kegembiraan

Prinsip ini dapat dijabarkan dari sabda Nabi Muhammad saw. Kepada sahabat beliau, yang diutus untuk melakukan dakwah kepada gubernur Romawi di Damaskus,

⁸² Ramayulis dan Samsul Nizar, 2009. *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia), hal. 100-104

yaitu Mu'azd Jabal dan Musal Al-Asy'ary, sebagaimana bunyi firman Allah SWT sebagai berikut:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (Al-Baqarah: 185)

2. Prinsip Memberikan Layanan dan Santunan Dengan Lembut

Dalam prinsip ini Allah SWT menuntun melalui firmanNya yang berbunyi :

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفرهم وشاورهم في الامر

Artinya : "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu". (Ali Imran: 159)

3. Prinsip Kebermaknaan Bagi Peserta Didik

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

ومنهم يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا

اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم

Artinya : “Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi): "Apakah yang dikatakannya tadi?" mereka Itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka”. (Q.S. Al Muhammad: 16)

4. Prinsip Komunikasi Terbuka

Guru mendorong manusia didik untuk membuka diri terhadap segala hal atau bahan–bahan pelajaran yang disajikan mereka, sehingga mereka dapat menyerapnya menjadi bahan apersepsi dalam pikirannya. Dalam kitab suci Al-Qur’an terdapat banyak firman Allah yang mendorong manusia untuk membuka hati dan pikirannya, perasaannya, pendengaran, dan penglihatannya untuk menyerap pesan-pesan yang difirmankan Allah kepada mereka, sehingga apa yang mereka serap sebagai pesan-pesan itu akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan-Nya.

5. Prinsip Pemberian Pengetahuan yang Baru

Minat dan perhatian anak didik harus diarahkan kepada bahan-bahan pengetahuan yang baru bagi mereka. Dalam ajaran Islam terhadap prinsip pembaharuan dalam belajar, baik tentang fenomena-fenomena alamiah maupun fenomena yang terdapat dalam diri mereka sendiri. Seperti studi tentang alam sekitar yang mengandung ilmu-ilmu baru. Firman Allah yang mendorong manusia untuk menciptakan ilmu-ilmu alam dan biologi serta psikologi tersebut dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

سنريهم آيتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على

كل شيء شهيد

Artinya : “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Al-Qur'an itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” (Q.S. Fusahilat: 53)

6. Prinsip Memberikan Model Prilaku yang Baik

Anak didik dapat memperoleh *suri tauladan* bagi prilakunya melalui pengamatan dan peniruan pada guru yang

tepat guna dalam proses belajar mengajar, misalnya seperti firman Allah :

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

وذكر الله كثيرا

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (Q.S. al-ahzab : 21)

Dari berbagai macam dinamika politik pendidikan Islam yang berjalan pada prinsip pendidikan Islam itu sendiri yang ada di dunia dan di Indonesia khususnya, tentu tidak terlepas dari tuntutan mutu pendidikan sebagai pencapaian tujuan dari pendidikan Islam.

Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Secara etimologi, mutu atau kualitas diartikan dengan kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan atau kemapanan. Sebab kualitas mengandung makna bobot atau tinggi rendahnya sesuatu. Jadi dalam hal ini kualitas pendidikan

adalah pelaksanaan pendidikan di suatu lembaga, sampai di mana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan.⁸³ Menurut Supranta kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik.⁸⁴ Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Guets dan Davis dalam bukunya Tjiptono menyatakan kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.⁸⁵ Kualitas pendidikan menurut Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.⁸⁶

Dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks “proses” pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (seperti bahan ajar: kognitif, afektif dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan

⁸³ *Jurnal Ilmu Pendidikan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Daerah Diseminasi* oleh A. Supriyanto, November 1997, Jilid 4, IKIP, 1997 hal. 225

⁸⁴ J. Supranta, 1997. *Metode Riset*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hal. 288

⁸⁵ Fandy Tjiptono, 1995. *Manajemen Jasa*, Edisi I Cet II, (Yogyakarta: Andi Offcet), hal. 51

⁸⁶ Ace Suryadi dan HAL.A.R Tilaar, 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya), hal. 159

kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Dengan adanya manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas atau di luar kelas, baik dalam konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkungan substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses belajar pembelajaran.

Kualitas dalam konteks “hasil” pendidikan mengacu pada hasil atau prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil test kemampuan akademis, misalnya ulangan umum, EBTA atau UN. Dapat pula prestasi dibidang lain seperti di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangibile*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan dan sebagainya.⁸⁷ Selain itu kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan

⁸⁷ Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Direktur Pendidikan Menengah dan Umum, April, 1999, hal. 4

dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

Jadi pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif. Pendidikan atau sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah yang berprestasi, sekolah yang baik atau sekolah yang sukses, sekolah yang efektif dan sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul dan bermutu itu adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah. Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan kuat.⁸⁸

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akan datang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk

⁸⁸ Abdul Chafidz, *Sekolah Unggul Konsepsi dan Problematikanya*, MPA No. 142, Juli 1998 hal. 39

meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang mampu menjadi pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang (harapan bangsa).

2. Standar atau Parameter Pendidikan yang Berkualitas

Standar/parameter adalah barometer yang digunakan untuk menilai atau mengukur sesuatu hal. Ini menjadi penting untuk kita ketahui, apalagi dalam rangka mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas. Kalau kita mengacu pada Peraturan Pemerintah PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Maka ada delapan Standar Nasional yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yaitu :⁸⁹

- a. Standar kompetensi lulusan, standar ini digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Meliputi, standar kompetensi lulusan minimal

⁸⁹ Peraturan Pemerintah (PP.) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab I, Pasal 1.

satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

- b. Standar isi, adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- c. Standar proses, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- e. Standar sarana dan prasarana, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

- f. Standar pengelolaan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- g. Standar pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- h. Standar penilaian pendidikan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Standar nasional pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.⁹⁰ Juga bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.⁹¹ Salah satu standar di atas yang paling penting untuk diperhatikan yaitu standar pendidik dan kependidikan. Di mana seorang pendidik harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

⁹⁰ *Ibid.*, pasal 3.

⁹¹ *Ibid.*, pasal 4.

serta pendidikan anak usia dini, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.⁹²

Ada empat standar kualitas pendidikan dalam urutan prioritasnya adalah sebagai berikut: guru (*teacher*), kurikulum (*curriculum*), atmosfer akademik (*academic atmosphere*), dan sumber keilmuan (*academic resource*).⁹³ Berikut ini uraian dari standar kualitas di atas :⁹⁴

a. Guru (*Teacher*)

Mutu pendidikan amat ditentukan kualitas dan komitmen seorang guru. Profesi guru menjadi tidak menarik di banyak daerah karena tidak menjanjikan kesejahteraan finansial dan penghargaan profesional. Oleh karena itu, dengan dirumuskannya jenjang profesionalitas yang jelas, maka kualitas guru-guru dapat dijaga dengan baik. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan penghargaan profesionalitas yang didapat dalam setiap jenjang tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab dalam membangun atmosfer akademik di dalam kelas. Atmosfer ini sebenarnya bertujuan untuk membentuk karakter siswa terutama berkaitan dengan nilai-nilai akademik utama, yaitu sikap ilmiah dan kreatif. Guru

⁹² *Ibid.*, pasal 28.

⁹³ [www.sigmetris.com / artikel=21.html](http://www.sigmetris.com/artikel=21.html), Standar Kualitas Pendidikan Metris By. Alexander Agung.

⁹⁴ *Ibid*

perlu menekankan nilai-nilai inti yang berhubungan dengan pengembangan sikap ilmiah dan kreatif dalam setiap tugas yang diberikan kepada siswanya, dalam membimbing siswa memecahkan suatu persoalan atau juga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Untuk dapat mengajar secara efektif, maka guru-guru akan ditraining secara kontinyu (bukan hanya sekali saja) dan terutama akan dibekali pengetahuan tentang cara mengajar yang baik dan bagaimana cara menilai yang efektif. Sehingga diharapkan guru tersebut dapat mengembangkan cara mengajarnya sendiri, dapat meningkatkan pengetahuan mereka sendiri dan juga dapat berkolaborasi dengan guru yang lain.

b. Kurikulum (*Curriculum*)

Kurikulum di sini bukan sekedar kumpulan aktivitas saja, ia harus koheren antara aktivitas yang satu dengan yang lain. Dalam kurikulum, juga harus diperhatikan bagaimana menjaga agar materi-materi yang diberikan dapat menantang siswa sehingga tidak membuat mereka merasa bosan dengan pengulangan-pengulangan materi saja. Tentu saja hal ini bukan berarti mengubah-ubah topik yang ada tetapi lebih kepada penggunaan berbagai alternatif cara pembelajaran untuk memperdalam suatu topik atau mengaplikasikan suatu topik pada berbagai masalah riil yang relevan. Kurikulum juga harus memuat secara jelas mengenai cara pembelajaran

(*learning*) dan cara penilaian (*assesment*) yang digunakan di dalam kelas. Cara pembelajaran yang dijalankan harus membuat siswa memahami dengan benar mengenai hal-hal yang mendasar. Pemahaman ini bukan hanya berdasarkan hasil dari pengajaran satu arah dari guru ke siswa, tetapi lebih merupakan pemahaman yang muncul dari keaktifan siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri dengan merangkai pengalaman pembelajaran di kelas dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.

c. Atmosfer Akademik (*Academic Atmosphere*)

Atmosfer akademik bertujuan untuk membentuk karakter siswa terutama berkaitan dengan nilai-nilai akademik utama yaitu sikap ilmiah dan kreatif. Atmosfer ini dibangun dari interaksi antar siswa, dari interaksi antara siswa dengan guru, interaksi dengan orang tua siswa dan juga suasana lingkungan fisik yang diciptakan. Guru memegang peran sentral dalam membangun atmosfer akademik ini dalam kegiatan pengajarannya di kelas dan berlaku untuk semua yang terlibat dalam sistem pendidikan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membangun sikap ilmiah dan kreatif ini dalam kegiatan operasional pendidikan sehari-harinya? Untuk ini kita perlu menyadari nilai-nilai inti yang harus ditanamkan ke semua komponen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan yang diselenggarakan. Sikap ilmiah

yang dimaksud adalah sikap yang menghargai hasil-hasil intelektual baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun orang lain, disamping kritis dalam menerima hasil-hasil intelektual tersebut. Sedangkan sikap kreatif di sini mempunyai maksud sikap untuk terus-menerus mengembangkan kemampuan memecahkan soal dan mengembangkan pengetahuan secara mandiri. Untuk membangun Sikap Ilmiah perlu ditanamkan nilai kejujuran (*honesty*), dan nilai kekritisian (*skeptics*). Sedangkan untuk membangun sikap kreatif perlu ditanamkan nilai ketekunan (*perseverence*), dan nilai keingintahuan (*curiosity*).⁹⁵ Selanjutnya nilai-nilai inti ini perlu diterjemahkan dalam berbagai kode etik yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional pendidikan sehari-hari, seperti larangan keras mencontek, dorongan untuk mengemukakan pendapat dan bertanya, penghargaan atas perbedaan pendapat, penghargaan atas kerja keras, dorongan untuk memecahkan soal sendiri, keterbukaan untuk dikoreksi dan seterusnya. Aktivitas-aktivitas ini selanjutnya harus dilakukan setiap hari dan terus dipantau perkembangan oleh mereka yang diberi kewenangan penuh.

⁹⁵⁾ *Ibid*

d. Sumber Keilmuan (*Academic Resource*)

Sumber Keilmuan disini adalah berupa prasarana dalam kegiatan pengajaran, yaitu buku, alat peraga dan teknologi. Semua hal ini harus dapat dieksploitasi dengan baik untuk mendukung setiap proses pengajaran dan juga dalam membangun atmosfer akademik yang hendak diciptakan. Apalagi pengajaran menganut pendekatan yang kongkrit, maka guru harus dapat menggunakan hal-hal yang umum di sekitar kita seperti: mata uang dan jam, sebagai alat peraga.

3. Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

a. Peningkatan Kualitas Guru

Guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Pada diri gurulah kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar yang luhur sebagai cita-cita pendidikan nasional dengan membentuk kepribadian sejahtera lahir dan batin, yang ditempuh melalui pendidikan agama dan pendidikan umum. Oleh karena itu, guru harus mampu mendidik di berbagai hal, agar ia menjadi seorang pendidik yang profesional. Sehingga mampu mendidik peserta didik dalam kreativitas dan kehidupan sehari-harinya. Untuk

meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pembelajaran, perlu ditingkatkan melalui cara-cara sebagai berikut:

1) Mengikuti Penataran

Menurut para ahli bahwa penataran adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing.⁹⁶ Sedangkan kegiatan penataran itu sendiri di tujukan:

- a) Mempertinggi mutu petugas sebagai profesinya masing-masing.
- b) Meningkatkan efisiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang optimal.
- c) Perkembangan kegairahan kerja dan peningkatan kesejahteraan.⁹⁷

Jadi penataran itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, keahlian dan peningkatan terutama pendidikan untuk menghadapi arus globalisasi.

⁹⁶ Juhur An Surya, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, (Jakarta: Rajawali Pres), hal 115

⁹⁷ *Ibid.*, hal 116

2) Mengikuti kursus-kursus Pendidikan

Hal ini akan menambah wawasan, adapun kursus-kursus biasanya meliputi pendidikan Arab dan Inggris serta computer.

3) Memperbanyak Membaca

Menjadi guru profesional tidak hanya menguasai atau membaca dan hanya berpedoman pada satu atau beberapa buku saja, guru yang profesional haruslah banyak membaca berbagai macam buku untuk menambah bahan materi yang akan disampaikan sehingga sebagai pendidik tidak akan kekurangan pengetahuan dan informasi yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat.

4) Mengadakan kunjungan kesekolah lain (studi komperatif)

Suatu hal yang sangat penting seorang guru mengadakan kunjungan antar sekolah sehingga akan menambah wawasan pengetahuan, bertukar pikiran dan informasi tentang kemajuan sekolah. Ini akan menambah dan melengkapi pengetahuan yang dimilikinya serta mengatai permasalahan-permasalahan dan kekurangan yang terjadi sehingga peningkatan pendidikan akan bisa tercapai dengan cepat.

5) Mengadakan hubungan dengan wali siswa

Mengadakan pertemuan dengan wali siswa sangatlah penting sekali, karena dengan ini guru dan orang tua akan

dapat saling berkomunikasi, mengetahui dan menjaga peserta didik serta bisa mengarahkan pada perbuatan yang positif. Karena jam pendidikan yang diberikan di sekolah lebih sedikit apabila dibandingkan jam pendidikan di dalam keluarga.

b. Peningkatan Materi

Dalam rangka peningkatan pendidikan maka peningkatan materi perlu sekali mendapat perhatian karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan membuat pengetahuan semakin luas. Hal ini akan memungkinkan peserta didik dalam menjalankan dan mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan baik dan benar. Materi yang disampaikan pendidik harus mampu menjabarkan sesuai yang tercantum dalam kurikulum. Pendidik harus menguasai materi dengan ditambah bahan atau sumber lain yang berkaitan dan lebih aktual dan hangat. Sehingga peserta didik tertarik dan termotivasi mempelajari pelajaran.

c. Peningkatan dalam Pemakaian Metode

Metode merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan, maka sebagai salah satu indikator dalam peningkatan kualitas pendidikan perlu adanya peningkatan dalam pemakaian metode. Peningkatan metode di sini, bukanlah menciptakan atau membuat metode baru, akan tetapi

bagaimana caranya penerapannya atau penggunaannya yang sesuai dengan materi yang disajikan, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan dalam proses belajar mengajar. Pemakaian metode ini hendaknya bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan dan jenuh atau monoton. Untuk itulah dalam penyampaian metode pendidik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Selalu berorientasi pada tujuan
- 2) Tidak hanya terikat pada suatu alternatif saja
- 3) Mempergunakan berbagai metode sebagai suatu kombinasi, misalnya: metode ceramah dengan tanya jawab.

Jadi usaha tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada peserta didik di era yang semakin modern.

d. Peningkatan Sarana

Sarana adalah alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.⁹⁸ Dari segi sarana tersebut perlu diperhatikan adanya usaha meningkatkan sebagai berikut:

⁹⁸ Roestiyah N.K, *Masalah Ilmu Keguruan*, (Jakarta: Bina Aksara), hal. 67

- 1) Mengerti secara mendalam tentang fungsi atau kegunaan media pendidikan
- 2) Mengerti penggunaan media pendidikan secara tepat dalam interaksi belajar mengajar
- 3) Pembuatan media harus sederhana dan mudah
- 4) Memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan dan isi materi yang akan diajarkan.

Semua sekolah, meliputi peralatan dan perlengkapan, sarana dan prasarana, dijelaskan dalam buku “Admitrasi Pendidikan” yang disusun oleh Tim Dosen IP IKIP Malang menjelaskan: sarana sekolah meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, contoh: gedung sekolah (*school building*), ruangan meja, kursi, alat peraga, dan lain-lainnya. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langung menunjang jalannya proses belajar mengajar atau pendidikan di sekolah, sebagai contoh: jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah dan semuanya yang berkenaan dengan sekolah.⁹⁹

e. Peningkatan Kualitas Belajar

Dalam setiap proses belajar mengajar yang dialami peserta didik selamanya lancar seperti yang diharapkan, kadang-

⁹⁹ Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan (Malang: FIP IKIP), hal. 135

kadang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar. Kendala tersebut perlu diatasi dengan berbagai usaha sebagai berikut:

1) Memberi Rangsangan

Minat belajar seseorang berhubungan dengan perasaan seseorang. Pendidikan harus menggunakan metode yang sesuai sehingga merangsang minat untuk belajar dan mempelajari baik dari segi bahasa maupun ekspresi dari wajah dengan memvariasikan setiap metode yang dipakai. Dari sini menimbulkan kecintaan terhadap bidang studi, sebab pendidik mampu memberikan rangsangan terhadap peserta didik untuk belajar, karena yang disajikan benar-benar mengenai atau mengarah pada diri peserta didik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya setelah peserta didik terangsang terhadap pendidikan maka pendidik tinggal memberikan motivasi secara kontinyu. Oleh karena itu pendidik atau lembaga tinggal memberikan atau menyediakan sarana dan prasarana saja, sehingga peserta didik dapat menerima pengalaman yang dapat menyenangkan hati para peserta didik sehingga menjadikan peserta didik belajar semangat.

2) Memberikan Motivasi Belajar

Motivasi adalah sebagai pendorong peserta didik yang berguna untuk menumbuhkan dan menggerakkan bakat peserta didik secara integral dalam dunia belajar, yaitu dengan diambil dari sistem nilai hidup peserta didik dan ditujukan kepada penjelasan tugas-tugas. Motivasi merupakan daya penggerak yang besar dalam proses belajar mengajar, motivasi yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa:

a) Memberikan penghargaan.

Usaha-usaha meyenangkan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi yang bagus, baik berupa kata-kata, benda, simbol atau berupa angka (nilai). Penghargaan ini bertujuan agar peserta didik selalu termotivasi untuk lebih giat belajar dan mampu bersaing dengan teman-temannya secara sehat, karena dengan itu pendidik akan mudah meningkatkan kualitas pendidikan.

b) Memberikan hukuman.

Pemberian hukuman ini bersifat mendidik artinya bentuk hukuman itu sendiri berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan.

c) Mengadakan kompetisi dan lomba.

Pengadaan ini dipergunakan untuk meningkatkan prestasi peserta didik untuk membantu peserta didik dalam pembentukan mental yang tangguh selain pembentukan pengetahuan. Untuk membantu proses pengajaran yang selalu dimulai dari hal-hal yang nyata bagi siswa.

Penutup

Pendidikan juga merupakan bagian dari masalah politik (*siyâsah*) yang diartikan sebagai *ri'âyah asy-syu'ûn al-ummah* (pengelolaan urusan rakyat) berdasarkan ideologi yang diemban negara. Faktor inilah yang menentukan karakter dan tipologi masyarakat yang dibentuknya. Kedudukan politik di dalam Islam sama pentingnya dengan pendidikan. Tanpa otoritas politik, *syari'at* Islam sulit bahkan mustahil untuk ditegakkan. Kekuasaan adalah sarana untuk mempertahankan syiar Islam. Pendidikan bergerak dalam usaha menyadarkan umat untuk menjalankan *syari'at*. Umat tidak akan mengerti *syari'at* tanpa adanya pendidikan. Menurut Rasyid (Rasyid, 1994: 15) di dalam M.Sirozi mengatakan; bila politik (kekuasaan) mengayomi dari atas, maka pendidikan melakukan pembenahan lewat arus bawah. Hubungan antara politik dan pendidikan di dalam Islam tampak sedemikian erat.

Perkembangan kegiatan-kegiatan kependidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan dukungan institusi-institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Namun demikian erat Islam tetap berjalan pada prinsip-prinsip dasar pendidikan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist yang meliputi di antaranya: Pendidikan Islam adalah bagian dari proses *rububiyah* Tuhan; Pendidikan Islam berusaha membentuk manusia seutuhnya; Pendidikan Islam selalu berkaitan dengan agama; Pendidikan Islam merupakan pendidikan terbuka.

Indonesia, setelah akhir abad 19 dan awal abad 20 penguasa kolonial memberikan layanan pendidikan dengan model persekolahan secara klasikal dan tidak memasukkan pendidikan Islam dalam sistem pendidikannya. Pada akhirnya, Pemerintahan Indonesia dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebagai sebuah negara yang independen, maka bangsa Indonesia kemudian menyusun sistem kehidupan berbangsa dan bernegaranya berdasar Pancasila dan UUD 1945. Di antara sistem kehidupan tersebut tersusunlah sistem pendidikan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia bagi seluruh rakyatnya.

Di Indonesia, Bila sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat (sentralisasi), maka dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Undang-undang tersebut berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan mutu/kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan di suatu lembaga, sampai di mana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP.) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ada delapan Standar nasional pendidikan yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Adapun upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat di tempuh dengan beberapa cara antara lain: peningkatan kualitas guru, peningkatan materi, peningkatan dalam pemakaian metode, peningkatan sarana, peningkatan kualitas belajar.

Referensi:

- An Surya, Jumhur. *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*. Rajawali Pres. Jakarta.
- Arifin, Zainal. 2012. *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*. Diva Press. Yogyakarta.
- Azra, Azyumardi. 2001, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru*, Kalimah. Jakarta.
- Chafidz, Abdul. 1998. Sekolah Unggul Konsepsi dan Problematikanya, MPA No. 142.
- Daulay, Haidar Putra. 2001. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.
- <http://www.sigmetris.com / artikel=21.html>, Standar Kualitas Pendidikan Metris By. Alexander Agung.
- Jurnal Ilmu Pendidikan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Daerah* Diseminasi oleh A. Supriyanto, November 1997, Jilid 4, IKIP, 1997.
- Peraturan Pemerintah (PP.) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab I, Pasal 1.
- Ramayulis dan Samsul Nizar. 2009, *Filsafat Pendidikan Islam*. Kalam Mulia. Jakarta.
- Roestiyah, N.K, 2015. *Masalah Ilmu Keguruan*, Bina Aksara, Jakarta.

- Sirozi, Muhammad. 2013. *konteks dan kerangka konseptual kajian politik pendidikan*. Palembang Noer Fikri Offset. Palembang.
- Sri-Edi Swasono. 2012. *Pendidikan Nasional dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Bappenas. Jakarta.
- Supranta, J, 1997 *Metode Riset*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suprpto, Sri. 2013. *Landasan Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. Cakrawala Pendidikan* (Jurnal Ilmiah Pendidikan, Juni 2013, Th.XXXII, No.2). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Surohim dan Usman Abu Bakar. 2005. *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam: Respon kreatif terhadap Undang-undang Sisdiknas*. Safiria Insani Press Yogyakarta.
- Suryadi, Ace. dan H.A.R Tilaar, 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang.
- Tilaar, H.A.R & Riant Nugroho.2012. *Kebijakan Pendidikan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tjiptono, Fandy, 1995. *Manajemen Jasa Edisi I Cet II*, Andi Offcet, Yogyakarta.
- Umaedi, 1999. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Direktur Pendidikan Menengah dan Umum.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi tersebut menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Politik pendidikan termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan yang diharapkan tentunya politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan.

Manusia menurut teori klasik yang dihubungkan dengan kiprahnya sebagai makhluk Tuhan merupakan jenis makhluk yang *symbolicism*, memiliki akal, intelek dan hati nurani. Oleh karena itu, manusia pun disebut sebagai *homo education*, *homo economicus*, *homo sapience*, *animal symbolicum* dan yang lebih populer lagi adalah *zoon politicon*.

Dalam konteks pendidikan politik, manusia sebagai *zoon politicon* dan *homo education* yang relevan dengan konsep-konsep politik pendidikan.

A. Politik Pendidikan

Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. *Politic* juga dapat diartikan segala urusan atau tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.¹⁰⁰

Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan merupakan tuntutan bagi pertumbuhan anak. Artinya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.¹⁰¹

Politik pendidikan adalah sebuah fenomena yang aspek formalnya diabaikan karena kita temui dalam konteks yang informal (*Political education is a phenomenon whose formal*

¹⁰⁰Hatamar, 2007. *Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press), hal.v

¹⁰¹Zurinal Z dan Wahdi Sayuti, 2006. *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: UIN Jakarta Press), hal.25

*aspect is neglected because we encounter it at a rather informal context).*¹⁰²

Menurut M. Sirozi, Politik pendidikan atau *The Politics of Education* merupakan kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara pencapaiannya. Kajian lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta ke mana perangkat tersebut diarahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan pola, kebijakan dan proses pendidikan serta berbagai asumsi, maksud dan *outcome* dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik. Kajian politik pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik negara dengan isu-isu praktis sehari-hari.¹⁰³

Maka, politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara. Pendidikan juga merupakan bagian kebutuhan mendasar manusia yang harus

¹⁰² [http://www.academicjournals.org/ERR.vol.10\(14\).pp.6](http://www.academicjournals.org/ERR.vol.10(14).pp.6) juni 2018, pukul.13.00

¹⁰³ M. Sirozi, *Politik Pendidikan.....*, hal.ix

dipenuhi oleh setiap manusia seperti halnya pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Pendidikan bagian dari masalah politik yang artinya sebagai pengelola urusan rakyat berdasarkan ideologi (pandangan hidup) yang diemban negara.¹⁰⁴ Dengan demikian, politik pendidikan dapat dipahami sebagai strategi pendidikan yang dirancang negara dalam upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) yang dicita-citakan.

Ada beberapa agenda yang perlu diperhatikan untuk menjadikan konsep menentukan arah dan masa depan politik pendidikan, di antaranya: *Pertama*, menghapus dikotomi dualisme penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus sejalan dengan Kementerian Agama dalam hal mutu, kualitas dan kemajuannya. Sehingga tidak ada lagi pandangan bahwa pendidikan keagamaan terkesan tidak bermutu dan terbelakang; *Kedua*, Peningkatan anggaran pendidikan; *Ketiga*, Pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan kuat untuk bisa membebaskan siswa dari biaya operasional pendidikan

¹⁰⁴ Husni Rahim, 2001. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu), hal.9

untuk tingkat sekolah dasar dan menengah; *Keempat*, perbaikan kurikulum. Pendidikan mesti diarahkan pada sistem terbuka dan multi makna serta pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Karena itu, kurikulum pendidikan harus mampu membentuk insan cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan memiliki kebebasan mengembangkan potensi diri; *Kelima*, Penghargaan kepada pendidik. Pemerintah harus lebih serius meningkatkan kualifikasi, profesionalisme dan kesejahteraan guru; *Keenam*, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta perluasan akses pendidikan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih berkonsentrasi menyediakan sarana prasarana sekolah khususnya daerah terpencil untuk memudahkan akses dan pemerataan pendidikan bagi warga negara dalam meningkatkan sumber daya manusia bangsa Indonesia.¹⁰⁵

B. Politik Pendidikan Negara dan Pemerintahan Indonesia

Menurut Harold J.Laski bahwa negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih angung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari

¹⁰⁵ Abdul Halim, 2005. *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press), hal.107

masyarakat.¹⁰⁶ Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat dan memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat sebagai pemegang seluruh kekuasaan politik dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan berdasarkan penugasan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat.¹⁰⁷

Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat juga di lihat dari sudut kepentingan politik. Dalam hal ini dibedakan terhadap kepentingan umum yang mencakup seluruh warga negara dan kepentingan khusus atau lokal.¹⁰⁸ Hubungan dengan pemerintah sangatlah penting antara keterampilan politik dan pengetahuan tentang bidang kebijakan bagi anggota kelompok agar mampu menyampaikan pesan terhadap dunia pendidikan.¹⁰⁹

Keterkaitan antara pendidikan dan politik berimplikasi pada semua dataran, baik pada dataran filosofis maupun dataran kebijakan. Di Indonesia, filsafat pendidikan nasional adalah artikulasi pedagogis dari nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pada dataran

¹⁰⁶ Azyumardi Azra, 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana), hal.42

¹⁰⁷ Abdul Muin Salim, 2002. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal.72

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal.73

¹⁰⁹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*,...hal. 47

kebijakan, sangat sulit memisahkan antara kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah di suatu negara dengan persepsi dan kepercayaan politik yang ada pada pemerintahan. Abernety dan Coombe menulis:

*“A government’s education policy reflects, and sometimes betrays, its view of society or political creed. The formulation of policy, being a function of government, is essentially part of the political process, as are the demands made on government by the public for its revision (kebijakan pendidikan suatu pemerintahan merefleksikan dan terkadang merusak pandangannya terhadap masyarakat atau keyakinan politik. Sebagai fungsi pemerintahan, formulasi kebijakan secara esensial merupakan bagian dari proses politik, sebagai tuntutan-tuntutan publik terhadap pemerintah untuk melakukan perubahan).”*¹¹⁰

Sejak pertengahan 1920-an sampai awal 1940-an, pemerintah kolonial telah menetapkan beberapa kebijakan politik yang sedikit banyaknya berkaitan dengan dunia pendidikan pada umumnya. Di antara kebijakan itu terdapat beberapa kebijakan politik yang berkaitan langsung dengan

¹¹⁰ M. Sirozi, *Politik Pendidikan*,...hal.12

lembaga pendidikan Islam. Pada umumnya kebijakan-kebijakan tersebut lebih bersifat merugikan bagi kelangsungan pendidikan Islam khususnya dan umat Islam pada umumnya. Beberapa kebijakan politik pemerintah kolonial tersebut adalah sebagai berikut:¹¹¹

1. Kebijakan membatasi kegiatan setiap aktivitas pendidikan yang bersifat politis dan melarang mereka melakukan segala sesuatu yang dianggap merugikan kepentingan politik pemerintah kolonial. Akibat pembatasan dan larangan ini, maka beberapa pengelola lembaga pendidikan Islam menegaskan bahwa lembaga mereka tidak mencampuri masalah-masalah politik.
2. Kebijakan pemerintah kolonial yang mewajibkan para siswa untuk mengikuti program wajib kerja (*heerendienst*) dan pembayaran pajak (*belasting*) bagi siswa sekolah partikelir yang tidak diakui pemerintah, termasuk siswa-siswa madrasah. *Heerendienst* adalah kewajiban bagi rakyat yang sudah dewasa (minimal usia 17 tahun) untuk bekerja bagi kepentingan pemerintah tanpa diberikan upah.
3. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan *mubaligh* dan guru-guru agama Islam memiliki surat izin dalam aktivitasnya.

¹¹¹ Ismail, 2014. *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta), hal. 396

Kebijakan politik pendidikan Indonesia secara umum dapat dibagi kedalam empat periode. *Pertama*, kebijakan politik pemerintahan pada masa Pra-kemerdekaan, *Kedua*, kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada masa orde lama, *Ketiga*, kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada masa orde baru, *Keempat*, kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada orde reformasi.¹¹²

1. Kebijakan Politik Pemerintahan Masa Pra-Kemerdekaan

Pada masa Pra-kemerdekaan kebijakan politik pemerintahan berada di tangan penjajah Belanda. Pada masa itu Belanda menerapkan politik diskriminatif terhadap rakyat jajahannya, terutama terhadap umat Islam. Hal ini baru berubah, setelah Belanda mendapatkan tekanan dari dunia internasional. Belanda mulai memberikan kesempatan secara terbatas kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk tenaga kerja yang akan dipekerjakan di pemerintahan Belanda.¹¹³

Belanda sangat mencurigai dan tidak suka akan keberadaan pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren-pesantren, madrasah-madrasah dan sebagainya.

¹¹² *Ibid*, hal.11

¹¹³ Abuddin Nata, 2003. *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Pranada Media), hal.12

Dalam keadaan demikian, maka politik pendidikan yang diterapkan umat Islam adalah bersikap non-kooperatif dengan Belanda. Umat Islam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan sistem sekolah, yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi Islam. Di lembaga tersebut diajarkan pengetahuan agama, pengetahuan umum, nasionalisme, patriotisme dan lain-lain.¹¹⁴

2. Kebijakan Politik Pemerintahan Masa Orde Lama

Pada masa ini, penekanan kebijakan pendidikan pada isu nasionalisasi dan ideologisasi. Penekanan pada ke dua bidang tersebut tidak lain karena masa tersebut masa krusial pasca kemerdekaan di mana banyak konflik yang mengarah pada separatisme dan terjadi *interplay* (tarik ulur) antara pihak yang sekuler dengan agamis.

Implikasi dari kebijakan politik pendidikan pada masa itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan berpatriot pancasila. Kebijakan politik tersebut sejatinya berupaya menjadi “win-win solution” dengan mengakomodasi semua kepentingan. Di sini terjadi pengakuan terhadap keanekaragaman baik budaya, seni, maupun agama. Pada dasarnya upaya membangun nasionalisme melalui pendidikan relatif berhasil, hanya saja

¹¹⁴ Made Pidarta, 2006. *Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 143

kurang diimbangi dengan kebijakan lain sehingga kemelut bernegara selalu ada dimasa tersebut.¹¹⁵

Pada masa ini politik pendidikan Islam lebih diarahkan pada upaya memperbaharui dan memperbanyak lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntutan zaman. Namun, kegiatan ini belum terlaksana sepenuhnya, mengingat Indonesia yang baru saja merdeka masih berada dalam keadaan labil dan mencari bentuk sesungguhnya. Selain itu adanya kekuatan ideologis yang memengaruhi situasi politik dan kebijakan pemerintah juga ikut memengaruhi politik pendidikan Islam pada masa itu. Pemerintah berada dalam tiga tekanan ideologi yaitu Ideologi nasionalis, komunis dan Islamis.¹¹⁶ Jadi, politik pendidikan Islam pada masa ini difokuskan pada upaya membendung faham komunis.

3. Kebijakan Politik Pemerintahan Masa Orde Baru

Dengan dikeluarkannya Undang-undang sistem pendidikan pada tahun 1989, berbeda dengan kebijakan di era orde lama. Kebijakan di era orde baru memberi penekanan pada sentralisasi dan birokrasisasi. Di masa ini jalur birokrasi sebagai sebuah kepanjangan tangan dari pusat

¹¹⁵ Muhammad Sirozi, 2004. *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: INIS Leiden), hal. 225

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 13

sangat kental. Orang-orang daerah didoktrin sedemikian rupa, sehingga menjadi kader-kader yang “*yes man*”, selalu patuh buta terhadap kepentingan pusat. Akibat yang terjadi dari kebijakan ini adalah matinya daya kritis, daya kreatif dan daya inovatif, yang ada hanyalah birokrat yang “*sediko dhawuh*”. Bahkan sistem pada masa ini berhasil membunuh idealisme. Orang-orang atau cendikia yang idealis, kritis, dan inovatif tiba-tiba memble ketika masuk pada jalur birokrasi.

Kuatnya intervensi terhadap sistem pendidikan nasional pada masa itu sangat mewarnai setiap aspek pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional pada masa orde baru, muatan kurikulumnya sempat dimanfaatkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Beberapa pelatihan di sekolah-sekolah atau institusi-institusi pendidikan pada umumnya lebih mengenalkan indoktrinasi ideologi penguasa. Praktek penataran P4 merupakan salah satu bukti riil dari indoktrinasi ideologi penguasa pada waktu itu.¹¹⁷

Di era ini pula terjadi penyeragaman-penyseragaman sehingga budaya daerah, dan kearifan lokal mengalami nasib yang tragis, bahkan banyak yang telah mati, yang

¹¹⁷ Mu'arif, 2008. *Liberalisasi Pendidikan, Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher), hal. 13

tersisa hanyalah seni dan budaya yang sifatnya mondial. Bahkan istilah Bhineka Tunggal Ika yang sejatinya bermakna berbeda-beda tetapi satu jua telah dimaknai menjadi sesuatu entitas yang seragam.

Ada beberapa karakteristik pemerintahan orde baru yang kurang kondusif bagi pengembangan pendidikan Islam, karakter tersebut antara lain:

- a) Pemerintahan orde baru adalah pemerintahan yang kuat dan dominan.
- b) Pemerintahan orde baru melengkapi dirinya dengan aparat keamanan represif serta aparat politik-ideologis untuk melestarikan dan mereproduksi kekuasaannya.
- c) Pemerintahan orde baru sejak awal mendapatkan dukungan dari kapitalisme internasional.

Kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan adalah:

- a) Melanjutkan program pemberantasan buta huruf.
- b) Melaksanakan pendidikan masyarakat agar memiliki kemampuan, mental, spiritual dan ketrampilan.
- c) Mengembangkan pendidikan luar sekolah.
- d) Pembinaan generasi muda
- e) Dilaksanakannya program orang tua asuh.

4. Kebijakan Politik Pemerintahan Masa Reformasi

Pemerintahan masa reformasi ditandai oleh semakin berkembangnya wacana demokrasi. Mahasiswa sudah memiliki kebebasan yang luar biasa. Mereka dapat merancang berbagai program sesuai dengan aspirasi yang berkembang.¹¹⁸

Kebijakan ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003. Di era reformasi ini penekanannya terletak pada desentralisasi dan demokratisasi. Kewenangan yang semula terletak di pusat dan berjalan secara *top-down* diubah dengan memberi kewenangan daerah yang lebih luas sehingga pola yang berjalan adalah *bottom-up*.¹¹⁹

Regulasi yang relatif longgar di era reformasi ternyata belum memberi angin segar bagi dunia pendidikan, bahkan banyak potensi untuk diselewengkan dengan mengambil dalih demokratisasi dan desentralisasi. Demokrasi telah menjadi kebebasan dan desentralisasi daerah telah menjadi keangkuhan daerah. Bahkan di era ini semakin jelas keterpurukan masyarakat miskin karena semakin sulit mengakses pendidikan tinggi. Lebih dari itu

¹¹⁸ Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia....*, hal. 90

¹¹⁹ Sam M Chan dan Tuti T Sam, 2006. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 17

implementasi kebijakan pendidikan yang demokratis dan mengedepankan potensi daerah semakin *dinafikan*. Sistem evaluasi yang masih terpusat, kekerasan dalam pendidikan dan banyak penyimpangan dalam proses pendidikan semakin memberi catatan buram bagi pendidikan di era reformasi ini.¹²⁰ Kebijakan politik yang paling disorot pada saat ini adalah kebijakan-kebijakan tentang otonomi daerah dalam bidang pendidikan, penerapan kurikulum yang silih berganti, hingga yang terbaru saat ini Kurikulum K13.

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang didesentralisasikan, sehingga banyak terdapat signal-signal adanya banyak masalah baru yang tampak. Di antaranya adalah tarik-menarik kepentingan untuk urusan guru serta saling lempar tanggung jawab untuk pembangunan gedung sekolah. Pengelolaan guru menjadi tarik-menarik, karena jumlahnya yang banyak, sehingga banyak kepentingan politik maupun ekonomi yang bermain di dalamnya.¹²¹

¹²⁰ Hasbullah, 2006. *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal. 85

¹²¹ Suhartono dan Suparlan, 2008. *Wawasan Pendidikan, Sebuah Pengantar Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), hal. 55

C. Sistem Pendidikan

Jika istilah sistem dikaitkan dengan pendidikan (sistem pendidikan), maka dapat mengandung makna “suatu kesatuan komponen yang terdiri dari unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama dan berhubungan antara satu dengan yang lain, pendidikan sebagai suatu sistem pastilah terdiri dari berbagai komponen atau unsur pendidikan.”¹²²

Pada saat ini sistem pendidikan (sekolah dalam segala bentuknya) berada dalam kompetisi pengembangan Iptek, terutama di bidang industri. Industri berusaha mendikte pendidikan agar bersedia menjadi sumber pemenuhan kebutuhan dunia industri. Hal demikian digambarkan oleh seorang ahli psikologi dan pendidikan pragmatis Amerika Serikat, Dr.Skinner bahwa pendidikan kita saat ini hanya dijadikan cabang dari teknologi ilmiah yang dipentingkan (*The Technology of Teaching*, 1968,p.17). Sistem pendidikan seperti diharapkan oleh masyarakat harus berfungsi sebagai pusat pembudayaan manusia yang mengarahkan kemajuan hidup yang sejahtera. Pendidikan menurut citra ahli iptek, akan berhasil, berdaya, tepat dan guna jika akan dijadikan sumber pengembangan iptek. Oleh karena itu, harus berproses secara teknologi untuk mencapai tujuan atau produk yang sejalan

¹²² Amirullah syarbini, 2014. *Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga*, (cet. Jakarta PT. Gramedia), hal. 4

dengan kemajuan industri teknologi. Nilai-nilai dari manapun sumbernya tidak dilibatkan dalam proses tersebut, karena iptek bebas dari nilai, baik moral maupun spiritual.

Institusi sekolah tetap berperan besar dalam proses pembudayaan masyarakat melalui teknologi. Dalam hal ini Skinner tetap mempertahankan keberadaan sekolah dalam proses modernisasi masyarakat dengan menekankan pendapatnya bahwa saat ini manusia berada di dalam kubu kehidupan revolusioner. Perhatian sebagian besar (ilmuwan) saat ini ke arah studi tentang manusia yang dipusatkan pada kepentingan kesejahteraan hidupnya. Pendidikan harus berperan aktif di dalamnya.

Sementara ilmuwan di bidang pendidikan lainnya seperti Ivan Illich, tidak lagi memandang institusi kependidikan (sekolah) diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat harus di *de-schooling* (jauh dari sekolah). Padahal masih terbukti bahwa masyarakat modern berada dalam tingkat hidup *post-industrial*, sedangkan sekolah menjadi *pusatnya pemberdayaan masyarakat*. Seperti harapan ilmuawan beraliran paham esensialisme sekolah sebagai *cultural homes* anak didik kita.

Pandangan ilmuwan kependidikan menunjukkan adanya perubahan dalam masyarakat tentang nilai-nilai yang membawa konflik ke dalam dunia pendidikan. Masing-masing melihat dari segi kelemahan dan kekuatan sekolah sebagai

lembaga pembudayaan masyarakat. Tedensi dari perubahan demikian, sumber dampaknya antara lain yang terpenting adalah kemajuan iptek modern. Perubahan lainnya adalah tuntutan hidup manusia yang semakin besar dan kompleks yang cenderung ke arah pragmatisme dan materialisme kehidupan.¹²³

Konsep sistem pendidikan nasional akan tergantung pada konsep tentang sistem, konsep tentang pendidikan, dan konsep tentang pendidikan nasional. Perlu pula disadari bahwa konsep mengenai pendidikan dan sistem pendidikan nasional tidak bisa semata-mata disimpulkan dari praktek pelaksanaan pendidikan yang terjadi sehari-hari di lapangan, melainkan harus dilihat dari segi konsepsi atau ide dasar yang melandasinya seperti yang biasanya tersurat dan juga tersirat dalam ketetapan Undang-undang Dasar, Undang-undang Pendidikan dan peraturan-peraturan lain mengenai pendidikan dan pengajaran.

Pengertian yang lebih jelas mengenai pendidikan, pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional dapat dijumpai dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini pendidikan didefinisikan sebagai "Usaha sadar dan terencana

¹²³ Muzayyin Arifin, 2014. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), cet.6, hal. 66-67

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (Pasal 1, ayat 1). Pendidikan nasional didefinisikan sebagai "pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. (pasal 1 ayat 2). Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah "keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional” (pasal 1 ayat 3). Jadi dengan demikian, sistem (pendidikan nasional dapat dianggap sebagai jaringan satuan-satuan pendidikan yang dihimpun secara terpadu dan dikerahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

D. Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Ideologi yang dipakai suatu negara akan memengaruhi ideologi yang dipakai oleh lembaga pendidikan, yang kemudian berkembang kepada paradigma pendidikan yang dianutnya. Pada dasarnya pendidikan berperan sangat strategis bagi pembangunan suatu bangsa. Seperti yang dikemukakan

olah John C. Bock (dalam Zamroni, 2002) bahwa peran pendidikan antara lain; (1) Memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, (2) Mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan dan mendorong perubahan sosial, (3) Untuk merasakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran lainnya merupakan fungsi ekonomi.¹²⁴

Berkaitan dengan peran pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan yaitu paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. menurut pengalaman negara-negara di barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, serta menanamkan sikap modern pada individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Sedangkan paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: (1)

¹²⁴ Zamroni, 2002. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*, (Jakarta: Bigraf Publishing), hal. 120

Mengembangkan kompetensi individu, (2) Kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan (3) Secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialisasi, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh jika bangsa menginginkan kemajuan.¹²⁵

Konsep kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering didengar, dikaji dan didiskusikan banyak kalangan. Menurut Abd. Halim Soebahar (2013) kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif dan dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan kebijaksanaan berkenan dengan suatu keputusan yang cenderung memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, karena alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan darurat dan sebagainya.¹²⁶

Menurut Munadi (2011) kebijakan pendidikan adalah keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah yang mempertimbangkan faktor-faktor yang

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 123

¹²⁶ Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 11

memengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada pendidikan yang meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga pendidikan, pengembangan keprofesionalan staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tak langsung dengan pendidikan.¹²⁷

Dari sini dapat dipahami bahwa kebijakan memiliki batasan-batasan tertentu sesuai dengan kebutuhan tertentu seperti anggaran, kurikulum, dan sebagainya. Katakanlah, jika sebuah negara terjadi perubahan tertentu, maka tentu hal tersebut disertai dengan adanya kebijakan pendidikan tertentu.

Dalam perspektif lain, batasan kebijakan pendidikan tentu saja mesti berpijak pada batasan tertentu, misalnya: (1) sesuai dengan falsafah bangsa dan negara, (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan pendidikan, serta (4) tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya yang sedang berkembang.

Di antara latar belakang perlunya kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut: *Pertama*, perintah Undang-undang Dasar 1945 dan atau Undang-undang. Misalnya mengenai fungsi dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah

¹²⁷ Agustinus Hermino, *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hal. 137

dalam pendidikan. Dalam pasal 10 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dijelaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 50 pada Undang-undang yang sama dijelaskan: (1) pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjawab menteri. (2) pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. (3) pemerintah pusat atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. (4) pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. (5) pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Kedua, prinsip dan sifat pendidikan yang adil dan merata. Dalam pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dijelaskan bahwa pendidikan

diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Seperti (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Atau seperti yang dijelaskan pada pasal 10 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Ketiga, perubahan politik, ekonomi, peta pendudukan dan pergeseran ideologi. Kebijakan pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, ekonomi, peta pendudukan dan dinamika global. Sekadar contoh, pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak kita temukan pembahasan secara detail tentang alokasi dana pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena adanya dinamika politik yang memberi efek terhadap pendidikan, maka terjadilah kebijakan baru dalam pendidikan. Hal ini bisa dibaca pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) poin (1) yang menjelaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran

pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Termasuk juga soal kewajiban belajar pada batas usia tertentu, di samping standar tenaga pendidik dalam level pendidikan tertentu. Semua itu muncul karena adanya kebutuhan yang meniscayakan adanya kebijakan tertentu seperti itu.

Guna meningkatkan kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

1. Memiliki tujuan pendidikan.

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

2. Memenuhi aspek legal-formal.

Kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

3. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan

untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

4. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

5. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindak lanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi secara mudah dan efektif.

6. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu

tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau di samping dan di bawahnya, serta daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

E. Praktek Pendidikan

Praktek pendidikan adalah seperangkat kegiatan bersama yang bertujuan membantu pihak lain agar mengalami perubahan tingkah laku yang diharapkan dan sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, aspek tujuan, aspek kegiatan proses dan aspek motivasi atau dorongan. Tujuan praktik pendidikan adalah membantu pihak lain mengalami perubahan tingkah laku fundamental yang diharapkan. Proses kegiatan merupakan seperangkat kegiatan sosial/bersama, usaha menciptakan peristiwa pendidikan dan mengarahkannya serta merupakan usaha secara sadar atau tidak sadar melaksanakan

prinsip-prinsip pendidikan. Sedangkan motivasi atau dorongan untuk melaksanakan praktek pendidikan muncul karena dirasakan adanya kewajiban untuk menolong orang lain.

Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya yakni: pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. Kegiatan di sekolah direncanakan dan dilaksanakan secara ketat dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan di luar sekolah, meski memiliki rencana dan program yang jelas tetapi pelaksanaannya relatif longgar dengan berbagai pedoman yang relatif fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Pelaksanaan pendidikan dalam keluarga dilaksanakan secara informal tanpa tujuan yang dirumuskan secara baku dan tertulis.

Dalam prakteknya, pendidikan Islam memiliki dua fungsi utama yaitu:

1. Sebagai pengembang potensi

Fungsi ini merupakan realisasi dari pengertian *tarbiyah al insya* (menumbuhkan atau mengaktualisasikan potensi). Asumsi tugas ini adalah bahwa manusia mempunyai sejumlah potensi atau kemampuan, sedangkan pendidikan

merupakan proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi peserta didik.¹²⁸

2. Pendidikan sebagai pewarisan daerah.

Tugas pendidikan selanjutnya adalah mewariskan nilai-nilai budaya Islami. Hal ini perlu karena kebudayaan Islam akan mati apabila nilai-nilai dan norma-norma tidak berfungsi dan belum sempat diwariskan kepada generasi berikutnya.¹²⁹

Dalam praktek sehari-hari pendidikan berperan besar dalam proses pembentukan karakter anak, terlebih lagi terhadap aspek potensi yang dimiliki oleh anak. Menjadi seorang guru merupakan tugas yang tidak mudah, karena apabila seorang guru membunuh potensi anak atau peserta didik, maka anak tersebut akan kehilangan potensi yang sebenarnya ada pada dirinya. Selain itu juga dalam prakteknya pengembangan potensi diri seorang guru membutuhkan dukungan-dukungan baik jiwa maupun secara materil agar tercapai suatu hasil yang sesuai dengan harapan.

Penutup

1. Konsep politik pendidikan dapat di lihat dari menentukan arah dan masa depan politik pendidikan, di antaranya:

¹²⁸ Bukhori Umar, 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah), hal. 69

¹²⁹ *Ibid*, hal 70

Pertama, menghapus dikotomi dualisme penyelenggaraan pendidikan. *Kedua*, Peningkatan anggaran pendidikan. *Ketiga*, Pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah. *Keempat*, perbaikan kurikulum. *Kelima*, Penghargaan kepada pendidik. *Keenam*, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta perluasan akses pendidikan.

2. Konsep Negara dan pemerintahan Indonesia dapat di lihat dari berbagai kebijakan-kebijakan yang telah diatur dalam sistem pendidikan.
3. Politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan.
4. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa.
5. Sistem pendidikan dapat mengandung makna “suatu kesatuan komponen yang terdiri dari unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama dan berhubungan antara satu dengan yang lain, pendidikan sebagai suatu sistem pastilah terdiri dari berbagai komponen atau unsur pendidikan.
6. Menurut Munadi (2011) kebijakan pendidikan adalah keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan

aktor di luar pemerintah yang mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada pendidikan yang meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga pendidikan, pengembangan keprofesionalan staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tak langsung dengan pendidikan.

Referensi:

- Azra, Azyumardi, 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana.
- Halim, Abdul, 2005. *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press
- Hasbullah, 2006. *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hatamar, 2007. *Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press.
- Hermino, Agustinus, *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utam.
- Ismail, 2014. *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik*, Yogyakarta: Idea Press.
- Mu'arif, 2008. *Liberalisasi Pendidikan, Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Nata, Abuddin, 2003. *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Pranada Media.
- Pidarta, Made, 2006. *Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahim, Husni, 2001. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.

- Salim, Abdul Muin, 2002. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sam M Chan dan Tuti T Sam, 2006. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sirozi, Muhammad, 2005. *Politik Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sirozi, Muhammad, 2004. *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: INIS Leiden.
- Soebahar, Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhartono dan Suparlan, 2008. *Wawasan Pendidikan, Sebuah Pengantar Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syarbini, Amirullah, 2014. *Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga*, Jakarta PT. Gramedia.
- Zurinal Z dan Wahdi Sayuti, 2006. *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: UIN Jakarta Press.

Bab 3

**PARADIGMA BARU PENDIDIKAN
SEBAGAI RESPON TUNTUTAN DAN
KEBUTUHAN MASYARAKAT
MILENIAL**

Oleh: Muhammad Latiep Efendi
Muhammad Rijal Anshori

ABSTRAK

Pendidikan adalah proses, proses perkembangan dan mempunyai tujuan serta manusia yang menjadi obyeknya. Tujuan proses perkembangan itu secara alamiah ialah kedewasaan dan kematangan berfikir. Potensi ini akan terwujud apabila pra-kondisi alamiah dan keadaan social manusia memungkinkan, misalnya: iklim, makanan, kesehatan, keamanan dan suhu politik yang berada pada titik normal. Maka adanya aktivitas dari lembaga-lembaga pendidikan merupakan jawaban manusia dari problema itu, karena sesungguhnya manusia mempunyai keyakinan dan kesimpulan bahwa melalui pendidikan seluruh potensi fiksi manusia bisa di aktualisasikan. Dalam ruang inilah pendidikan bagi hidup manusia menjadi sesuatu hal yang penting untuk membawanya pada kehidupan yang lebih bermakna.

Kata Kunci : Fungsi Pendidikan, Kebutuhan Global.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh tuhanNya sudah di bekali oleh potensi keilmiahannya masing-masing, potensi tersebut berupa akal yang menyertainya. Akal akan menuntun manusia menemukan hakekat dari sesuatu. Namun permasalahannya adalah bagaimana melatih dan mengembangkan potensi akal manusia agar dapat dipergunakan? Karena dalam praktek kehidupan sehari-hari, manusia tidak hanya butuh pengalaman saja (empirisme), tetapi membutuhkan juga semacam teori yang turut menyertai sebuah pengalaman itu sendiri.

Untuk mewujudkan idealitas tersebut perlu dibangun kekuatan pribadi-pribadi yang menjadi cikal bakal keluarga dan masyarakat. Mengingat pembangunan bangsa memerlukan individu dalam keluarga dan masyarakat yang saleh, yang layak memikul amanah yang dibebankan kepadanya, maka pembangunan pribadi menjadi sesuatu keniscayaan dan untuk mencapai harapan tersebut perlu adanya lembaga-lembaga pendidikan yang serius dan bertanggungjawab menangani masalah-masalah pendidikan, karena hal itu adalah alat dan instrumen yang terpenting dalam melaksanakan tugas pendidikan dan sosial demi kepentingan dan tujuan bangsa dan Negara dalam memperkuat dan menegakkan nilai-nilai kebenaran.

Kesalahan pribadi lahir dari ketakwaan yang bersifat individual dalam sikap religiusnya sedangkan kesalahan masyarakat lahir dari penanaman nilai-nilai ilmu dalam proses pendidikan yang bersifat kolektif, terstruktur dan terintegrasi. Lembaga pendidikan secara umum harus sama-sama memiliki kesadaran sejarah, kesadaran senasib dan seperjuangan, kesadaran tentang fakta social, kesadaran tentang keharusan melakukan perubahan melalui pendidikan sebagai perwujudan penerapan pembukaan Undang-undang dasar 1945 serta undang-undang turunannya yang mengatur tentang pendidikan dan kewajiban belajar.

The development of education in Indonesia has been influenced by religious or traditional principles, the interests of the ruling powers, and the spirit of sovereignty as a nation (Tilaar, 1995; Djojonegoro, 1996; Mestoko et al, 1985). In ancient times, education in the archipelago was delivered through apprenticeship within family and community settings. In the Dutch colonial era (16003-1942), education was aimed only at a particular group of people via school classification based on descent and social status. The selective stratification was intended to generate elite classes and obedient educated human resources. This reality raised awareness of nationalism. Since 1912, there have been various movements underlying the independent creation of a national education system. During

the Japanese invasion (1942-5), such discrimination was eliminated and Bahasa Indonesia started to be used as the medium of instruction. However, school was utilized as a training facility for militarymen and workers during World War II.

On August 17, 1945, Indonesia proclaimed its independence. Universal education was conducted to develop the sense of nationality around the supreme value of Pancasila, the five basic values of a sovereign state: a belief in the One and Only God; just and civilized humanity; the unity of Indonesia; democratic life led by wisdom of thoughts in deliberation amongst representatives of the people; and social justice for all people of Indonesia.

This rapid development encouraged the government to build educational infrastructure all over the country, along with a private-sector contribution to establish educational institutions. Up to the early 1960s, however, the orientation toward nationand character-building, and equal access to education, in the great straits due to 1) liberal democracy, the influence of communism and “guided democracy” entailing political instability, and 2) Dutch military aggression. In 1965, the “Old Order” regime decreed that the of education was to generate socialist citizens.

The “New order (1966-1993) purified such “deviant ideas” to generate “Pancasila-ist people for development”. Therefore, universal-education initiatives –six-year basic education (1984) and nine-year basic education (1994)-rapidly developed. Since the 1970s, the government has built tens of thousands of elementary schools in almost all villages. Considering education as human-capital investment, since the 1990s the government has constantly improved access to, and the quality and role of, education in promoting economic development.¹³⁰

Sejak masa perjuangan kemerdekaan, pendidikan di Indonesia menempati tempat yang strategis dalam kancah perebutan kemerdekaan. Tak dapat dipungkiri juga pendidikan di Indonesia menjadi titik start memupuk rasa nasionalisme. Pendidikan yang dimaksud di sini mempunyai makna yang umum, dalam artian kajian tentang nasionalisme di selenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta. Dalam masa proses itu, murni pendidikan dimaknai oleh peserta didik dan pemangku kebijakan sebagai sarana menuju kemerdekaan Indonesia dan merupakan alat strategis terlepas dari kungkungan penjajahan.

¹³⁰ Take from, Tatang Suratno, 2014, in “*The Education System in Indonesia At a Time Of Significant Changes*”

Sekilas masuk akal apa yang menjadi fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia saat itu, namun seiring berjalannya waktu dan silih bergantinya pemangku kebijakan, pendidikan *idealism* yang dulu terpatri dalam diri tokoh-tokoh pendidikan kini bergeser di era penerusnya. Ini ditandai dengan sistem pendidikan yang berkembang dan selalu diwarnai dengan pendidikan di Indonesia diselaraskan dengan tujuan politik dan kebijakan luar negeri Indonesia. Namun seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam sistem pendidikan di Indonesia selalu disandarkan pada nilai falsafah amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam setiap periode pemerintahan yang berkuasa, nilai falsafah pendidikan yang termaktub dalam UUD 1945 kemudian di tafsirkan dan di interprestasikan berbeda-beda. Dan ini menggiring system pendidikan di Indonesia masuk ke dalam ranah perpolitikan secara praktis dan menjadi agenda musiman setiap Pemilu, baik Pemilu Legislatif, Pilkada dan Pilpres.

PARADIGMA BARU DARI FUNGSI PENDIDIKAN

Berbicara mengenai fungsi pendidikan ada 2 pengertian yang dipahami dalam mendefinisikannya yaitu pengertian fungsi pendidikan secara umum dan fungsi pendidikan secara khusus. Fungsi Pendidikan secara umum adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak,

kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan atau dengan kata lain pendidikan berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang dijadikan landasannya.

Sedangkan pengertian fungsi pendidikan secara khusus dimaknai sebagai pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.

Mengutip dari jurnal ilmiah I Ketut Wisarja dan I Ketut Sudarsana dosen pascasarjana IHDN Denpasar, bahwa pendidikan sebagai salah satu alternatif normatif untuk memperoleh sebuah pengetahuan tidaklah terbantahkan, sedangkan di sisi lain definisi pendidikan menurut sebagian ahli patut dijadikan bahan perdebatan. Pendidikan sendiri tidak terlepas dari berbagai macam kritik sebagai bagian dari eksistensi perkembangan pendidikan. Mencoba memahami sebuah konsep tentang pendidikan, sering kali menjebak seseorang ke alur pendidikan secara pragmatis-fungsionalis, di mana pendidikan semata-mata hanya dilihat dari sudut pandang sejauh mana pendidikan itu bernilai guna. Selama ini kita terjebak pada fungsi pendidikan sebagai pemenuhan kebutuhan

kerja, bukannya sebagai material dasar untuk memperoleh pengetahuan yang sesungguhnya.

Lebih lanjut I Ketut memaparkan bahwa batasan nilai dan makna pendidikan itu sendiri seringkali dimaknai secara abstrak sehingga membentuk sebuah opini publik, bahwa pendidikan haruslah “legal formal” dan bersifat “netral”. Mungkin kita seharusnya secara bersama-sama memperbincangkan apa makna terdalam dari pendidikan itu sendiri? belum lagi kita berbicara mengenai siapa yang berhak memperolehnya? dan ukuran apa yang hendak dipakai dalam penggolongannya.

Batasan pendidikan pembahasannya akan memasuki wilayah ideologi apa yang dipakai pendidikan dengan berbagai nilai kajian (*subject matter*) yang terangkum di dalamnya. Pembicaraan tersebut akan lebih jelas dengan menampilkan berbagai contoh ideologi pendidikan yang berkembang dan kita pakai selama ini. Sekali lagi, kritik terhadap muatan-muatan ideologi pendidikan yang dimaksud tentu saja wajib diadakan secara kritis dan bebas sebagai bahan perbandingan.

Ideologi yang dimaksud terbagi dalam ideologi pendidikan yang bersifat konservatif, dengan beberapa paradigma yang termuat di dalamnya seperti fundamentalis, intelektualisme, dan konservatif. Sedangkan ideologi yang kedua yang bersifat liberal, dengan beberapa paradigma yang

ada di dalamnya seperti liberal, liberalsionis, dan anarkis. Penjabaran paradigma yang ditelurkan dari dua ideologi yang dimaksud tentu saja mempunyai daya refleksi yang begitu kuat pengaruhnya bagi permasalahan, pendidikan dewasa ini. Terlepas apakah memakai, menganut, dan menyebarkan ideologi yang dimaksud, ada persoalan yang jauh lebih esensial yang perlu kita sepakati sebagai bahan perdebatan lebih lanjut. Rasionalisasi pendidikan dari berbagai ideologi yang ditawarkan merupakan kemutlakan yang wajib dikritisi secara bebas dengan mencoba menawarkan wacana baru yang sifatnya bernilai lebih kearah pendekatan realisasi pengembalian ‘roh’ pendidikan yang sesungguhnya.¹³¹

I Ketut mencoba memberi pengantar tentang paradigma baru pendidikan di tinjau dari sisi ideologi. Pendidikan sebagai sarana transfer of knowlarge itu merupakan keniscayaan yang mungkin tidak diperdebatkan, namun dari sisi ideologi apalagi menyangkut konsep dan bentuk Negara, maka definisi dan penafsirannya akan berbeda. Jadi secara umum mengenai makna dari pendidikan sebagai sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan tidaklah dapat dipersalahkan. Konsepsi mengenai semua itu sudah merupakan ketentuan umum yang telah kita

¹³¹ I Ketut Wisatja dan I Ketut Sudarsanan, *Refleksi Kritis Pendidikan Konservatisme dan Liberalisme Menuju Paradigma Baru Pendidikan*, Jurnal Ilmiah IHDN Denpasar, 2017

sepakati bersama. Lain halnya dengan sebagian orang tertentu yang mempunyai asumsi sendiri tentang makna terdalam dari sebuah pendidikan, di mana pendidikan lebih dianggap sebagai “instrument” untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang sesungguhnya.

Pendidikan mempunyai peran yang vital dalam membangun sebuah peradaban suatu Negara. Peradaban manusia secara perlahan lahir dan berkembang seiring berkembangnya metode dan penerapan model pembelajarannya. Di dalam model pendidikan modern tidak bisa lepas dari sistem lain di luar dirinya, yaitu sistem politik. Keduanya adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di sebuah Negara. Menurut Prof. Sirozi dalam bukunya *Politik Pendidikan*, pendidikan dan politik keduanya sama-sama saling menunjang dan saling mengisi. Lebih lanjut bahwa lembaga-lembaga dan proses pendidikan mempunyai kontribusi yang penting dalam ikut membentuk perilaku politik masyarakat di Negara tersebut. Begitu pula sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu Negara itulah membawa dampak besar pada karakteristik pendidikannya.¹³²

¹³² M. Sirozi, *Politik Pendidikan; Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta, Rajawali Press, 2007), hal. 1

Fungsi pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan arah kebijakan nasional. Dalam Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, bahwa pasal 1 ayat 1 menyebutkan;

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

Secara normatif pendidikan bertujuan menggali dan mengembangkan potensi sikap spiritual, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian dalam pasal 3 secara eksplisit menjelaskan fungsi pendidikan nasional, yaitu:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”¹³³

Secara empirik pendidikan di Indonesia mengalami degradasi pemaknaan nilai-nilai pendidikan. Ketika komersialisasi dalam dunia pendidikan semakin merajalela, ketika pendidikan bukan menjadi milik semua orang, dan ketika pendidikan terbaik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memiliki kelebihan uang. Dampak terbesar yang dirasakan adalah, ketika materialisme seolah menjadi tujuan hidup.

Perlu ada sebuah terobosan dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang mampu memberikan pencerahan bagi peserta didik. Pendidikan yang lebih terbuka, terarah dan tidak hanya membahas soal teknis keilmuan semata, namun suatu pendidikan yang mampu memberikan rangsangan inspiratif bagi terjadinya perubahan karakter peserta didik. Layanan pendidikan alternatif yang diprogramkan di luar sistem persekolahan tersebut bisa berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal sistem persekolahan.¹³⁴

¹³³ Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dan pasal 3

¹³⁴ I Ketut Sudarsana, Jurnal Ilmiah : *Pemikiran Tokoh Pendidikan Dalam Buku Learning: Policies, Practices, And Programs (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan)*, IHDN Denpasar

Jadi fungsi pendidikan secara keseluruhan diikhtisarkan sebagai upaya proses pembelajaran nyata yang secara murni meliputi :

- a. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
- b. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat.
- c. Melestarikan kebudayaan.
- d. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.

Namun ada juga asumsi sebagian pakar pendidikan di lihat dari sisi sosiologi yang mengatakan bahwa fungsi pendidikan secara umumnya mempunyai 5 aspek fungsi, yaitu:

- a. Transmisi (pemindahan) kebudayaan.
- b. Memilih dan mengajarkan peranan sosial.
- c. Menjamin integrasi sosial.
- d. Sekolah mengajarkan corak kepribadian.
- e. Sumber inovasi sosial.

PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU LEMBAGA

Istilah “lembaga”, menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi” sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan dalam jurnal ilmiah Saharuddin adalah merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan,

dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.¹³⁵

Pengertian lain dari lembaga adalah “pranata”. Koentjaraningrat misalnya, lebih menyukai sebutan pranata, dan mengelompokkannya ke dalam 8 (delapan) golongan, dengan prinsip penggolongan berdasarkan kebutuhan hidup manusia. Kedelapan golongan pranata tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, yang disebut dengan kinship atau *domestic institutions*;
2. Pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu untuk mata pencaharian, memproduksi, menimbun, mengolah, dan mendistribusi harta dan benda, disebut dengan *economic institutions*. Contoh: pertanian, peternakan, pemburuan, feodalisme, industri, barter, koperasi, penjualan, dan sebagainya;
3. Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendudukan manusia supaya menjadi

¹³⁵ Sahamddin. 2001. *Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis*. Bahan Diskusi Tidak Diterbitkan Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia. hal. 1

anggota masyarakat yang berguna, disebut *educational institutions*;

4. Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta di sekelilingnya, disebut *scientific institutions*;
5. Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia menyatakan rasa keindahan dan untuk rekreasi, disebut *aesthetic and recreational institutions*;
6. Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib, disebut *religious institutions*;
7. Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara, disebut *political institutions*. Contoh dari institusi politik di Sini adalah pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, ketentaraan, dan sebagainya; dan
8. Pranata-pranata yang mengurus kebutuhan jasmaniah dari manusia, disebut dengan *somatic institutions*.¹³⁶

Dari pemahaman di atas dapat kita ambil kalimat sederhananya bahwa sekolah adalah sebuah lembaga atau

¹³⁶Koentjoroningrat, 1994. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama). hal. 16

pranata karena sudah memenuhi unsur-unsur sebagai lembaga atau pranata. Sebagai sebuah lembaga atau pranata, sekolah sangat setrategis sekali mengambil peranan dalam menerapkan arah politik dan kebijakan Negara yang sedang dijalankan. Sebagai lembaga yang efektif dalam membangun konsep paradigma berpolitik, sekolah dirancang dan diprogram sedemikian rupa agar peserta didik dapat menerima apa yang menjadi kebijakan penguasa.

Tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan dalam prosesnya mempunyai susunan perangkat pembelajaran yang di dalamnya mengandung unsur-unsur mata pelajaran, waktu, pendidik, peserta didik, evaluasi, target, tempat belajar, sarana dan prasarana penunjang serta peraturan-peraturan yang mengikat baik dari unsur penyelenggara pendidikan maupun dari pemangku kebijakan pendidikan. Unsur-unsur pendidikan di atas biasanya termaktub dalam sebuah kurikulum pendidikan. Berubah-ubahnya kurikulum membuktikan bahwa dunia pendidikan tidak terlepas dari kebijakan politik dalam pemerintahan.

Namun secara khusus lembaga pendidikan bukan hanya seperangkat kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah atau lembaga, lebih dalam Abdul Halim Subahar menjelaskan dalam bukunya *Wawasan Baru Pendidikan Islam*, ada lima

pusat pendidikan yang harus diperhatikan dalam membangun paradigma tujuan pendidikan, yaitu:

1. Keluarga sebagai pusat pendidikan;
2. Perguruan sebagai pusat pendidikan;
3. Rumah ibadah sebagai tempat pendidikan;
4. Masyarakat sebagai pusat pendidikan;
5. Media masa sebagai pusat pendidikan.¹³⁷

Dalam sudut pandang yang berbeda, sebuah lembaga organisasi dipandang sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat di dalamnya. Sondang P. Siagian misalnya, menyebutkan bahwa lembaga atau organisasi merupakan struktur yang memiliki jenjang hirarki jabatan manajerial, berbagai kegiatan operasional, komunikasi yang digunakan. serta hubungan antar satuan kerja.¹³⁸ Jadi, sangat wajar apabila sekolah sebagai lembaga mempunyai peran strategis dan vital dalam mewarnai dan menanamkan nilai-nilai keilmuan dan konsep kebijakan pemerintah.

¹³⁷ Abd. Halim Soebahar, 2002. *Wawasan Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta; Kalam Mulia), hal. 116-123

¹³⁸ Sondang P.Siagian, 1995. *Teori Pengembangan Organisasi*.(Jakarta: Bumi Aksara), hal. 11

Pendidikan Sebagai Lembaga dalam Memenuhi Tuntutan Kebutuhan Masyarakat Milenia

Berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan tentu tak terlepas dari kepuasan dari diri manusia. baik kepuasan jasmani maupun rohani. Sebagaimana kita pahami bahwa kebutuhan manusia semakin hari semakin berkembang, berfluktuasi dan meningkat. Oleh karena itu menyebabkan sebuah kelembagaan yang dibentuk dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan pasar. Donn Martindale dalam bukunya yang terkenal, “*Institutions, Organizations, and Mass Society*” menyebutkan terdapat beberapa fenomena yang dialami sebuah lembaga atau kelembagaan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia yang berkembang dan berfluktuatif tersebut, yaitu:

1. Stabilitas, yaitu suatu kondisi di mana sebuah lembaga atau institusi tetap stabil menjalankan adat istiadat, norma yang dianut bersama untuk memenuhi kebutuhan anggotanya walaupun kebutuhan manusia itu tetap berkembang dan berfluktuasi.
2. Konsistensi, yaitu adanya kebutuhan-kebutuhan yang begitu banyak, mengakibatkan masyarakat mengembangkan usahanya pada bidang lain untuk tujuan memenuhi kebutuhan sendiri. Pengembangan usaha yang dilakukan ini pada prinsipnya adalah usaha di sekitar

lingkungan masyarakat itu sendiri. Namun anggota lembaga ini tidak meninggalkan usaha utama mereka walaupun mereka telah mengembangkan usaha dan memiliki usaha yang baru. Artinya walaupun ada usaha baru yang dilakukan suatu warga dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, usaha utama tetap mereka laksanakan.

3. Kesempurnaan atau kelengkapan, yaitu peningkatan kebutuhan manusia itu akan ada limitnya atau batasnya. Dikatakan sempurna atau lengkap apabila suatu lembaga memberikan atau menyediakan kebutuhan sesuai dengan yang telah digariskan dan dibutuhkan. Bila lembaga ini telah melaksanakan tugasnya memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang telah digariskan maka dapat dikatakan lembaga ini telah mencapai taraf kesempurnaan.¹³⁹

Dalam ranah pendidikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan akan nilai-nilai keilmuan. lembaga pendidikan mencoba memperbaiki dan terus meng-*upgrade* pola dan struktur perkembangan pendidikan secara global. Lembaga pendidikan lokal berangkat dari kebudayaan dan kearifan lokal yang kemudian dikembangkan dan diarahkan menjadi kebudayaan nasional. Dari kebudayaan lokal itulah maka

¹³⁹ Martindale, Donn. *Institutions, Organizations, and Mass Society*, (New York: University of Minnesota. wae), hal. 133

pendidikan nasional itu berakar dan tumbuh dan kemudian melandasi dasar arah dan tujuan pendidikan nasional.

Untuk memahami kebutuhan pendidikan masyarakat secara lokal, nasional dan global hal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan masing-masing. Secara alamiah kebutuhan pendidikan pada tatanan lokal tentu berbeda dengan kebutuhan pada pendidikan nasional. Begitu juga kebutuhan pendidikan dalam masyarakat pada tatanan global tentu berbeda dengan arah kebijakan pendidikan nasional apalagi lokal. Hal inilah yang mencirikan perbedaan pendidikan di setiap masing-masing Negara.

Kebijakan pendidikan nasional tak terlepas dari kebutuhan masyarakat pada pendidikan lokal. Masyarakat lokal lebih menitikberatkan pada perkembangan moral (afektif) dan pengetahuan (kognitif), sedangkan keterampilan (psikomotorik) menempati urutan terakhir dari kebutuhan masyarakat lokal. Sedangkan pemerintah membuat formula akan kebutuhan pendidikan secara nasional dengan menggabungkan kebijakan nasional dan kebutuhan pendidikan lokal. Pemerintah membuat kebijakan pendidikan dalam kurikulum pendidikan dengan mencantumkan empat pilar pendidikan yaitu spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal itu pemerintah mencanangkan

kurikulum 2013 yang menitik beratkan pada pendidikan karakter.

Dalam jurnal ilmiah Azumardi Azra (2001) tentang Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti "*Membangun kembali anak Bangsa*", beliau menjabarkan bahwa usulan tentang pendidikan budi pekerti bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan sebelumnya pelajaran agama menjadi mata pelajaran wajib, dalam rencana pelajaran pada tahun 1947, yang ada hanyalah mata pelajaran "didikan budi pekerti" yang bersumber dari nilai-nilai tradisional. khususnya yang terdapat dalam cerita pewayangan. Sejak 1950 "UU No 41/ 1950 dan UU No 12/ 1954 tentang dasar-dasar pendidikan). Pendidikan agama masuk sebagai mata pelajaran fakultatif. Artinya, ia merupakan mata pelajaran optimal. yang boleh diambil atas keputusannya sendiri. Hal yang sama juga ditetapkan dalam Tap MPRS No. II/1960 dan Tap MPRS No. XXIII /1966 dengan penegasan. bahwa pendidikan agama diselenggarakan sejak dari SD sampai perguruan tinggi.¹⁴⁰

Lebih lanjut, Azumardi menjelaskan tentang kebijakan dan urgensi pendidikan karakter, bahwa krisis yang dihadapi bangsa Indonesia kelihatannya bukan hanya menyangkut lembaga sekolah atau dunia pendidikan umumnya dalam hal

¹⁴⁰ Azumardi Azra, 2001. *Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti "Membangun Lagi Anak Bangsa*, (Jakarta; IAIN Syarif Hidayatullah)

kualitas akademis lulusannya, tetapi juga dalam hal mentalitas, moral dan karakter. Moral dan etika, atau lebih tegas lagi karakter (*moral and character building*) peserta didik harus diperbaiki. Tidak ragu lagi keberhasilan dalam mendidik dan membentuk akhlak, moral, budi pekerti atau karakter peserta didik pada tingkat dasar dan menengah merupakan langkah paling fundamental dan dasariah dalam membentuk karakter bangsa nantinya.

Selain pendidikan karakter, pemerintah juga mengembangkan nilai-nilai lokal menjadi kebudayaan *unions*. Menurut Ahmad Ali Riyadi, dalam jurnal ilmiah “*Studi Islam dan Radikalismc Pendidikan dalam Konteks Masyarakat Majemuk*” yang mengutip pendapat Paulo Freire dkk, menjabarkan tentang rekayasa budaya. Menurutnya, salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa pendidikan adalah sebagai sebuah gagasan atau rekayasa yang menimbulkan budaya. Rekayasa budaya atau disebut dengan invasi kultural merupakan penyerbuan dengan bantuan sarana budaya terhadap kebudayaan lain, sehingga terjadi penaklukan budaya yang pada akhirnya mengalami proses pemalsuan kultural atau keterasingan terhadap budayanya sendiri.

Dari sini dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan merupakan sarana yang paling ampuh untuk pembentukan karakter pribadi seseorang serta propaganda nilai-nilai budaya

yang dianggap penting bagi penggagas. Setahap demi setahap orang akan mengalami penyerbuan kultural dengan mengoper budaya asing yang menyergap dirinya. Dengan demikian, seseorang tersebut tidak akan dapat menghayati budayanya sendiri. Tentu hal ini akan membawa akibat buruk dari rekayasa pendidikan, yakni: *pertama*, menjauhkan seseorang dari tradisi dan nilai-nilai budayanya sendiri; *kedua*, memunculkan rasa keterasingan terhadap hakekat diri sendiri, serta kondisi sosio budaya sendiri dan proses tidak mengenali jati dirinya sendiri, yang kemudian timbul rasa malu terhadap kekayaan budaya sendiri sebab dianggap inferior.¹⁴¹

The main point of debate is about modernisation of these institutions. The government's stance is that madrassa education would not be considered equal to school education unless it includes formal education and accommodates subjects like English, Mathematics, Science, Computer Science etc. In this connection the government has also made it clear that only those madrassas that comply with this formal course structure and academic curriculum (along with religious education) would be given the status of schools and their students would be considered equal to students of formal schools.

¹⁴¹ Kartini Kartono, 1997. "Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional", *Beberapa Kritik dan Sugesti*. (Jakarta: Pradya Paramita), hal. 132

In the recent announcement of the Maharashtra state government, two points need to be kept in mind. One, people with madrassa education usually get employed as imams, muezzins, religious priests etc and as such they are not able to get the desired monetary returns and also are unable to use their expertise to the fullest potential. Two, because of this education, a large section of the Muslim minority is not part of the mainstream and has to face a situation of unemployment. Because of a lack of formal education they are unable to find work in any other sector except those mentioned above. This does not mean that religious education should stop; rather it should happen simultaneously with formal education. Moreover, wherever there are avenues of formal education for Muslims, religious education should also be imparted. If religious schools have provisions for vocational training and formal education, those educated there can be employed in various sectors and will not remain backward anymore. According to all figures available, it is clear that minorities in India, especially the Muslim minority, have a much higher unemployment rate than others.

The Muslim intelligentsia is of the opinion that by focusing on the issue of modernisation of madr'assas, the government is deflecting opinion from the real issues and needs of Muslims in education. They opine that governments-

both central and state-need to have Muslim representation while making and implementing educational policies.

We cannot ignore the fact that about 95% of Muslim children go to formal (non-madrassa) schools. However, the opportunities and conveniences that should come as a result of such formal education are not available to them the way they should be. Talking about the progress oimadrassas is a convenient way for the government to put a veil on the discriminations faced by them in formal schools and the shortcomings of its own policies. There is also a feeling among Muslims that one of the reasons the government focuses so much on madrassas is because it remains unaware of the needs and objectives of educational institutions where Muslim students go.

Education is extremely important for human welfare, progress and cultural accomplishments. Education becomes easily accessible when it is free, and free education in the present day context of Muslims in India is given only through madrassas. Governmental schemes have remained unsuccessful in bringing education to all, particularly to the poor and marginalised communities. But religious madrassas have made education a reality for all sections of Muslims in villages as well as towns.¹⁴²

¹⁴² Shirin Dalvi, is a journalist and former editor of the Mumbai edition of *Awadhnama*, an Urdu Daily

Kemudian berbicara mengenai kebutuhan masyarakat global tentang pendidikan maka kita akan berbicara tentang interkoneksi antara manusia di mana komunikasi tidak hanya terjalin antara masyarakat desa dengan desa saja, tetapi komunikasi tersebut akan terjalin antara masyarakat lokal dengan masyarakat global.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13, Allah SWT berfirman :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujarat : 13)

Dalam konteks ayat di atas maka kebutuhan dasar dari masyarakat global adalah komunikasi. Interkoneksi yang terjalin antara masyarakat lokal dengan masyarakat global menghasilkan pertukaran informasi dan budaya.

Kemudian hal yang dibutuhkan masyarakat global dalam hal pendidikan adalah Pengerahan yang holistik dan

terintegrasi. Paradigma yang dibangun dari era globalisasi adalah kemudahan dan keefektifan proses pembelajaran. Dewasa ini apa yang dibutuhkan meralat global adalah kesiapan pada dunia kerja dalam memasuki era pasar bebas. Orang tidak lagi melihat kultur budaya suku tertentu melainkan melihat dari skill dan keterampilan yang ia punya. Maka kesiapan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sangat dibutuhkan pada era pasar bebas. Berbahagialah orang yang telah membekali diri dengan keterampilan dan pengetahuan. Pantaslah Allah SWT telah menegaskan dalam firmanNya QS. Al-Mujadilah ayat 11 :

“.....Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kenakan.” (QS. Al-Mujadilah : 11)

Jelaslah bahwa yang akan mendapat tempat dalam persaingan global adalah orang yang siap. Siap di sini mengandung makna telah mebekali diri dengan keilmuan yang matang, keterampilan yang memadai dan keimanan kepada Allah dengan keimanan yang sempurna.

Globalisasi dan era keterbukaan informasi pasti mempunyai dampak yang negatif bagi orang yang tidak siap menerimanya. Maka benarlah singgungan Allah dalam ayat di atas mengenai orang-orang yang akan mampu melewati era global dan kecanggihan teknologi, yaitu keimanan dan keilmuan. Kembali lagi ke tuntutan kebutuhan masyarakat global akan pendidikan bahwa hakekat pendidikan menurut Syed Ali Ashraf yang dikutip oleh Abd. Halim Soebahar, terletak pada pengalihan himpunan pengalaman dari suatu generasi ke generasi berikutnya, baik berupa tradisi, adat istiadat dan lain sebagainya, yang berkembang dalam masyarakat.¹⁴³

Begitu juga dengan pendidikan *kesetaraan Gender*. Islam sangat konsen di dalam masalah persamaan hak laki-laki dan perempuan. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak dan kewajiban sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Bercermin pada masalah kasus yang terjadi di belahan dunia Islam, terutama di Arab Saudi menjadi cerminan keterbatasan gerak dan hak kaum *Hawa* ini. Salah satu kutipan artikel yang mengangkat judul “*Progress Achieved In Social Change For Women*”, menjelaskan :

Moreover, it is stunning how the issues of women's rights in Saudi Arabia have become a dominant subject in

¹⁴³ Abd. Halim Soebahar....., hal. 151

Western media. Why are Saudi women such a hot topic? Saudi women's education and issues guarantee the author a high publishing rate. In addition, many non-academic materials promote stereotypical images of Saudi women as exotic and erotic. These kinds of books and articles exacerbate the lives of Saudi women in their own country, especially in as much as they need the support of the international community in order to challenge the power of some conservative religious scholars and old 'sexist' traditions. Part of the media war used against Saudi Arabia does not care about women's rights as much as they care about political hegemony over the resources of the 'Third World' including Saudi oil. Be that as it may, an education system must carry out a mission to implement open-mindedness and understanding. This would allow students and the next generation to be strong in facing the challenge of Western hegemony. Western values might not be suitable for Saudi people, just as the views of conservative religious scholars and old traditions that favour men would not be suitable. There are conservative religious ideologies on both counts. On one side (in the Saudi View) are powerful conservative religious scholars, and on the other is the Bush ideology, "you're either with us or against us." Both are extreme and both are causing problems. The Saudi education system and curricula needs to implement different strategies

for looking at the other people with whom we disagree. On a macro level, recent changes in the international arena have opened the door to changes that were not attainable in the recent past. Space is allowed in the Saudi press for honest reflection as never before. Saudi columnists are able to constructively criticise the system's performance in the health, education, and women's rights sectors. This is of itself a great relief for both men and women who have long felt deprived of freedom of speech. Both women and men are hopeful for signs of slow but steady change occurring in the country.

The future developmental plans must be able to tackle problems of increased economic demands, segregation of the sexes, limitations of women's jobs and the cultural and religious heritage (Huyette, 1985). If the country plans to survive this globalised era women's education in all fields should be a priority. Educated open-minded individual's' demands would bring changes and progress but to what extent? Is Saudi society ready for that change? Given the apparent variability in perspective of Educated open-minded individual's' who are seeking progress, and the attitudes of some conservative religious scholars and old traditions which resist any move forward it is difficult to predict. Until then

*women's issues will be at the centre of conflict between modernity and tradition.*¹⁴⁴

Jadi intinya walaupun pendidikan kita dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat global tetapi jangan sampai kehilangan esensi tujuan pendidikan. Inti pendidikan secara umum adalah memanusiakan manusia, agar manusia menemukan fitrahnya sebagai pemimpin di muka bumi ini. Pemimpin untuk memakmurkan dunia dan menjaga eksistensi manusia itu sendiri.

Penutup

Di tinjau dari ideologi pragmatis, fungsi pendidikan adalah sebagai pemenuhan kebutuhan kerja, bukannya sebagai material dasar untuk memperoleh pengetahuan yang sesungguhnya. Jika dimaknai secara abstrak pendidikan haruslah bersifat “legal formal” dan bersifat “netral”. Dan jika di tinjau dari konsep bernegara, makna fungsi pendidikan adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik

¹⁴⁴ Amani Hamdan, 2005. *Women And Education In Saudi Arabia: Chalenges And Achievements*, International Education Jurnal, University Of Western Ontario, Canada.

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Namun sayangnya, fungsi pendidikan mulai bergeser esensinya dari *transfer of knowledge* and *transfer of value* ke *knowledge for do*, dari penanaman nilai-nilai budaya, moral, keterampilan, pengetahuan dan spiritual menjadi pembekalan diri untuk dunia kerja dan persaingan global, maka secara perlahan hilanglah tradisi keilmuan yang arif dan budaya lokal yang samar. Seharusnya fungsi pendidikan bisa kita interpretasikan secara luas dengan kelebihan bonus demografis Indonesia menuju era globalisasi, digitalisasi, keterbukaan informasi dan pasar bebas.

Referensi:

- Azra. Azumardi, 2001. *Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti “Membangun kembali anak Bangsa*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Hamdan. Amani, 2005. *Women And Education In Saudi Arabia: Chalenges And Achievements, International Education Jurnal*, Canada: University Of Western Ontario.
- I Ketut Sudarsana, *Jurnal Ilmiah : Pemikiran Tokoh Pendidikan Dalam Buku Learning: Policies, Practices, And Programs (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan)*.
- IHDN Denpasar I Ketut Wisarja dan I Ketut Sudarsanan, 1997. *Refleksi Kritis Pendidikan Konservatisme Dan Liberalisme Menuju Paradigma Baru pendidikan, Jurnal Ilmiah IHDN Denpasar, 2017 Kartini Kartono, Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*, (Jakarta: Pradya Paramita).
- Koentjoroningrat. 1994. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Martindale, Donn. 1966. *Institutions, Organizations, and Mass Society*, (New York: University of Minnesota).
- Paulo Freire, dkk., 2002. *Menggugat Pendidikan; Fundamentalis, Konservatif Liberal dan Anarkis, penexj. Omi Intan Naomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saharuddin. 2001. *Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat MultiEtnis*. Bahan Diskusi Tidak Diterbitkan. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Shirin Dalvi, *is a journalist and former editor of the Mumbai edition of Awadhnama, an Urdu Daily.*


Siagian, Sondang P. 1995. *Teori Pengembangan Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Sirozi, Muhammad. 2007. *Politik Pendidikan; Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press).

Soebahar, Abd. Halim, 2002. *Wawasan Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta, Kalam Mulia).

Suratno, Tatang. 2014. *in "The Education System in Indonesia At a Time Of Significant Changes"*.

UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dan pasal 3



**PARADIGMA BARU SISTEM
PENDIDIKAN MODERN**

Oleh: Muhammad Sunadi

Dodi Irawan

A. PENDAHULUAN

Negara adalah satu bentuk masyarakat dengan anggota-anggotanya yang memiliki kesadaran sebagai suatu kelompok rakyat tertentu, yang memiliki daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan tertentu pula. Negara berkepentingan mengurus masalah pendidikan bagi warga negaranya. Sebab, perkembangan satu negara banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan dan kualitas keahlian rakyatnya. Karena itu perlu diadakan sistem persekolahan dan pendidikan yang teratur, maju atau progresif dan diurus oleh Negara.

Sistem pendidikan nasional memiliki keterhubungan dan ketergantungan dengan lingkungan atau sistem-sistem lainnya yang berada di dalam suprasistem. Sistem pendidikan nasional mengambil input dari lingkungan atau sistem-sistem lain yang ada di dalam suprasistemnya.

Era globalisasi merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan bahwa dunia ini sudah semakin mengecil. Kita tidak akan lagi bisa menyembunyikan kebobrokan atau

keadaan yang buruk dari suatu negara. Hal ini kemungkinan terjadi berkat kemajuan teknik informatika. Di dalam konteks informatisasi, dunia ini sudah menjadi satu, tidak ada lagi kotak-kotak yang membatasi wilayah satu dengan lainnya. Globalisasi ini memungkinkan untuk menjadi sebuah proses interaktif yang mengembangkan suatu kebudayaan dunia yang sama sehingga akan memunculkan suatu kebudayaan atau peradaban universal.

Bila mendengar kata pendidikan maka sebagian besar perhatian dan pikiran kita akan tertuju pada gedung sekolah/madrasah dengan segala aktivitas dan perangkat yang ada di dalamnya. Padahal sebenarnya pendidikan lebih luas dari apa yang ada dalam perhatian dan pikiran sebagian besar orang umumnya. Sejalan dengan itu Mudyahardjo mendefinisikan pengertian pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Dengan kalimat yang sederhana tapi memiliki arti yang luas dan sangat mendalam Kohnstamm mengemukakan bahwa pendidikan adalah pembentukan hati nurani. Pendidikan adalah upaya membina dan mengembangkan daya cipta, karsa, dan rasa manusia menuju ke peradaban manusia yang lebih luas dan tinggi yaitu manusia

yang berbudaya, definisi ini dikemukakan oleh Syafrudin Nurdin.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Dengan kata lain bahwa pendidikan dalam praktiknya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni pendidikan informal (keluarga), formal (sekolah), dan non formal (masyarakat). Sehingga sebenarnya keberhasilan pendidikan nasional sangat bergantung terhadap ketiganya. Dalam perjalanannya, sejak jaman klasik hingga modern, baik pendidikan formal, informal, maupun non formal banyak mendapatkan permasalahan sehingga belum sepenuhnya ketiga jalur pendidikan tersebut dalam mencapai seluruh tujuan yang telah ditetapkan, terutama pendidikan formal.

B. MAKNA PENDIDIKAN MODERN

Makna pendidikan merupakan sebuah mediasi bagi tercapainya transformasi nilai dan ilmu yang berfungsi untuk membentuk suatu peradaban manusia yang lebih baru meskipun pada sisi lain pendidikan juga merupakan salah satu wahana untuk mempertahankan tradisi. Sehingga ketika seorang mantan presiden Amerika Serikat mengatakan jika “*Our National Problem Come From Education*” karena pada kenyataannya Pendidikan itu akan senantiasa bersinggungan dengan upaya pengembangan dan pembinaan seluruh potensi manusia tanpa terkecuali.¹⁴⁵ Karena dengan pengembangan dan pembinaan seluruh potensi tersebut, pendidikan diharapkan dapat mengantarkan manusia pada suatu pencapaian tingkat kebudayaan yang menjunjung hakikat kemanusiaan manusia.

Sementara pendidikan yang berwawasan kemanusiaan memberikan pengertian bahwa pendidikan harus memandang manusia sebagai subyek pendidikan, bukan sebagai obyek yang memilah-milah potensi (*fitrah*) manusia. Artinya, pendidikan adalah suatu upaya memperkenalkan manusia akan eksistensi dirinya, baik sebagai diri pribadi yang hidup bersama hamba Tuhan yang terikat oleh hukum normatif (*syariat*) dan sekaligus sebagai *khalifah* di bumi.

¹⁴⁵ Suwendi, 2004. *Sejarah & Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hal. 98

Konsep pendidikan yang mengenyampingkan dasar-dasar tersebut, adalah pendidikan yang akan mencetak manusia-manusia tanpa kesadaran etik, yang pada akhirnya melahirkan cara pandang dan cara hidup yang tidak lagi konstruktif bagi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu perlu adanya konseptualisasi ilmu dalam pendekatan filsafat yang merupakan kerangka dasar dalam upaya memperjelas dan meluruskan cara pandang manusia, baik mengenai dirinya, alam lingkungan, maupun terhadap campur tangan Allah SWT.

Tidak akan ada orang yang membantah jika agama Islam itu sebagai agama yang sempurna telah memberikan pijakan yang jelas tentang tujuan dan hakikat pendidikan, yakni memberdayakan potensi fitrah manusia yang condong kepada nilai-nilai kebenaran dan kebajikan agar ia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba (QS. As-Syams: 8; QS. Adz Dzariyat: 56). Oleh karena itu, pendidikan berarti suatu proses membina seluruh potensi manusia sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa, berfikir dan berkarya, untuk kemaslahatan diri dan lingkungannya. Islam merupakan panduan dalam hidup manusia di dunia dan menuju kehidupan akhirat yang bukan sekedar agama seperti dipahami selama ini, tetapi meliputi seluruh aspek dan kebutuhan hidup manusia.

Ilmu dalam Islam meliputi semua aspek yang bisa disusun secara hirarkis dari benda mati, tumbuhan, hewan,

manusia hingga makhluk gaib dan puncak kegaiban. Susunan ilmu tentang banyak aspek ini bisa dikaji dari pemikiran Islam. Mengingat seluruh tradisi keagamaan dalam sejarah umat manusia mulai dari nabi Adam diklaim sebagai Islam dan seluruh alam natural dan humanitas sebagai ayat-ayat Tuhan, maka seluruh ilmu tentang hal ada, merupakan ilmu tentang ayat-ayat Tuhan dan Islam itu sendiri.

Sepanjang sejarah otentik Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi bersumber dari dua bentuk wahyu, yakni ayat-ayat Alqur'an dan ayat-ayat kauniyah (*sunnatullah*). Wahyu pada ranah pertama dipahami dengan menafsirkan teks secara eksplanatif, dan wahyu ranah kedua dipahami dengan melakukan deskripsi, eksplorasi dan eksperimental secara sistematis, lalu keduanya disatukan di dalam filsafat dengan segala tingkatannya. Al-Qur'an sendiri memberikan informasi tentang wahyu Tuhan yang telah diturunkan sejak masa Nabi Adam.

A. Munir Mul Khan (2002) dalam Suwendi menjelaskan bahwa diperkirakan masa Yunani yang memproduksi tradisi filsafat awal berlangsung sezaman dengan turunnya Zabur kepada Nabi Daud dan Taurot kepada Nabi Musa.¹⁴⁶ Dalam kesajarahannya, Islam pernah membuktikan diri sebagai umat yang memiliki peradaban gemilang dengan kemajuan ilmu

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 99

pengetahuan dan teknologi yang mengungguli kejayaan Eropa pada masa lalu. Islam telah mewariskan tokoh ilmuwan besar seperti Al Jabir, Al Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusydi, Al Kindi dan lainnya.

Oleh karenanya, keharusan kembali melihat khazanah dan etos keilmuan di masa lalu itu menjadi salah satu penekanan, mengingat khazanah pengetahuan Islam masa lalu yang kaya dengan semangat inklusivismenya dan juga kekayaan nuansa spiritual. Sayangnya, hal itu kurang mendapat apresiasi berimbang dalam dunia ilmiah akademik dewasa ini. Tekanan imperialisme epistemologi dari pengetahuan Barat Modern yang kini telah mewabah, dirasakan cukup kuat menjebak dan menggiring kehidupan intelektual dan akademik, secara perlahan-lahan tapi pasti mereka dapat melalaikan apa yang telah menjadi kekayaan intelektual umat Islam pada masa lalu.

Amin Abdullah (1995) menjelaskan, ada banyak sebab mengapa Islam belum mampu membangun kerangka paradigma yang lain untuk mengenyahkan imperialisme paradigma pengetahuan Barat Modern, di antaranya, apresiasi terhadap khazanah intelektual Islam lama, masih berkuat dan berputar-putar pada produk jadi ketimbang pada etos keilmuan terutama metodologi yang dikembangkan oleh para pemikir

muslim masa lalu.¹⁴⁷ Selain itu, membangun paradigma pengetahuan Islam yang terpadu akan mengalami kesulitan manakala masih terdapat sikap dikotomis di kalangan umat yang memisahkan ilmu-ilmu agama (*wilayah naqliyah*) dengan ilmu-ilmu umum (*wilayah 'aqliyah*).

Untuk itu diperlukan konseptualisasi ilmu dalam pendidikan, yang menawarkan adanya ilmu *naqliyah* yang melandasi semua ilmu *aqliyah*, sehingga diharapkan dapat mengintegrasikan antara akal dan wahyu, ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama dalam proses pendidikan. Sehingga, melalui upaya tersebut dapat merealisasikan proses memanusiaikan manusia sebagai tujuan pendidikan, yaitu mengajarkan, mengasuh, melatih, mengarahkan, membina dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam rangka menyiapkan mereka merealisasikan fungsi dan risalah kemanusiaannya di hadapan Allah SWT, yaitu mengabdikan sepenuhnya kepada Allah SWT dan menjalankan misi kekhalifahan di muka bumi, sebagai makhluk yang berupaya mengimplementasikan nilai-nilai *ilahiyyah* dengan memakmurkan kehidupan dalam tatanan hidup bersama dengan aman, damai dan sejahtera.

¹⁴⁷ Muhaimin, 2006. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hal. 146

Sementara Pendapat Alvin Tofler dalam bukunya *The Third Wave* (1980) yang bercerita tentang peradaban manusia, yaitu; (1) peradaban yang dibawa oleh penemuan pertanian, (2) peradaban yang diciptakan dan dikembangkan oleh revolusi industri, dan (3) peradaban baru yang tengah digerakan oleh revolusi komunikasi dan informasi. Perubahan terbesar yang diakibatkan oleh gelombang ketiga adalah, terjadinya pergeseran yang mendasar dalam sikap dan tingkah laku masyarakat (M.Irsyad Sudiro, 1995 : 2).

Salah satu ciri utama kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang adalah cepatnya terjadi perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Banyak paradigma yang digunakan untuk menata kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan organisasi yang pada waktu yang lalu sudah mapan, kini menjadi ketinggalan zaman (Djamaluddin Ancok, 1998: 5).

Secara umum masyarakat modern adalah masyarakat yang proaktif, individual, dan kompetitif. Masyarakat modern dewasa ini yang ditandai dengan munculnya pasca industri (*post industrial society*) seperti dikatakan Daniel Bell, atau masyarakat informasi (*information society*) sebagai tahapan ketiga dari perkembangan peradaban seperti dikatakan oleh Alvin Tofler, tak pelak lagi telah menjadikan kehidupan manusia secara teknologis memperoleh banyak kemudahan.

Tetapi juga masyarakat modern menjumpai banyak paradoks dalam menjalani kehidupannya.

Dalam bidang revolusi informasi, sebagaimana dikemukakan Donald Michael, juga terjadi ironi besar.¹⁴⁸ Semakin banyak informasi dan semakin banyak pengetahuan mestinya makin besara kemampuan melakukan pengendalian umum. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, semakin banyak informasi telah menyebabkan semakin disadari bahwa segala sesuatunya tidak terkendali. Karena itu dengan ekstrim Ziauddin Sardar (1988), menyatakan bahwa abad informasi ternyata sama sekali bukan rahmat.¹⁴⁹ Di masyarakat Barat, ia telah menimbulkan sejumlah besar persoalan, yang tidak ada pemecahannya kecuali cara pemecahan yang tumpul. Di lingkungan masyarakat kita sendiri misalnya, telah terjadi swastanisasi televisi, masyarakat mulai merasakan dampak negatifnya.

C. PARADIGMA PENDIDIKAN MODERN

Berpijak dari paradigma pendidikan tradisional tersebut, maka sudah waktunya dilaksanakan reformasi pendidikan ke arah yang lebih kondusif untuk terciptanya

¹⁴⁸ Majid Fakhry, 1997. *Sejarah Filsafat Islam; Sebuah Peta Kronologis*, (Bandung: Mizan Media Utama), hal. 218

¹⁴⁹ Armai Arif, 2002. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers), hal. 236

kualitas peserta didik yang berkualitas. Paradigma pendidikan holistik memandang pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh. Manusia dipandang sebagai kesatuan yang bulat, yakni kesatuan jasmani-ruhani, kesatuan melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya. Proses pendidikan yang seperti itu dapat ditemukan pada paradigma pembelajaran modern. Paradigma pembelajaran modern mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menanggapi peserta didik sebagai subyek bukan obyek;
2. Menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran yang bervariasi dan eksploratif, sehingga peserta didik lebih aktif.
3. Iklim belajar menyenangkan;
4. Fungsi pendidik bergeser dari sebagai pemberi informasi menuju sebagai fasilitator.
5. Materi yang dipelajari terkait dengan lingkungan kehidupan peserta didik, sehingga dapat di manfaatkan untuk memecahkan masalah kehidupan.
6. Peserta didik terbiasa mencari informasi dari berbagai sumber
7. Menggeser *teaching* menjadi *learning*.

D. PROBLEMATIKA PENDIDIKAN MODERN

Problematika pendidikan modern yang diidentifikasi dari berbagai sumber dapat kemukakan sebagai berikut:

1. Kemerostan Akhlak, dunia modern saat ini, termasuk di Indonesia ditandai oleh gejala yang benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Karena sudah menimpa golongan dewasa hingga pelajar/remaja. Selain itu Haidar juga mensinyalir masalah ini terjadi karena kurangnya pemberdayaan pendidikan budi pekerti, juga disebabkan empat faktor. Sedangkan Suwendi menyebut masalah ini dengan istilah krisis nilai karena berkaitan dengan sikap menilai suatu perbuatan, tentang baik buruk, etis dan tidak etis, benar dan salah, dan hal lain yang menyangkut etika individual dan sosial. Masalah pokok sistem pendidikan nasional yang pertama adalah menurunnya akhlak dan moral peserta didik. Kemudian diperparah lagi dengan dihapusnya mata pelajaran budi pekerti sejak kurikulum 1984 sehingga aspek-aspek yang berkaitan dengan budi pekerti menjadi kurang disentuh bahkan ada kecenderungan tidak ada sama sekali. Lebih dari itu juga terjadi pergeseran dari pendidikan keluarga ke pendidikan sekolah, artinya pendidikan sekolah merupakan tumpuan utama masyarakat.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Suyanto, 2006. *Dinamika Pendidikan Nasional, Dalam Percaturan Dunia Global*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah), hal. 184

- 2. Pembelajaran model Fragmented dan dikotomi,** misalnya, pada mata pelajaran agama, keterkaitan antar sub mata pelajaran agama belum tampak. Contoh sub mata pelajaran aqidah, akhlak, Al-Qur'an, dan al Hadits masing-masing diajarkan secara terpisah. Di samping itu juga terjadi dikotomi antara mata pelajaran agama dan umum, hal ini terjadi karena sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini pendidikan kita cenderung beorientasi ke Barat yang berpandangan hidup sekuler-materialistik di mana proses belajar mengajar tidak dihubungkan dengan Tuhan.
- 3. Cognitive oriented,** pendidikan di semua jenjang, sampai saat ini, masih mementingkan aspek kognitif, hal ini senada dengan konsep barat tentang spiritualisme yang intinya adalah daya dari intelektual. Sehingga pendidikan agamapun tidak ditujukan pada hati nurani, tetapi lebih cenderung pada ketajaman akal.¹⁵¹
- 4. Media massa kurang memprioritaskan pendidikan,** kekhawatiran masyarakat terhadap siaran televisi yang karena tidak memihak pada pemirsa sudah sangat memprihatinkan. Siaran televisi turut memberikan kontribusi terhadap maraknya kenakalan remaja. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian bahwa tayangan

¹⁵¹*Ibid.*, hal. 186

film televisi lebih banyak menunjukkan adegan-adegan anti sosial bila dibandingkan dengan adegan-adegan pro sosial.

5. Kesejahteraan guru masih minim, adalah sebuah fakta yang sulit dipungkiri dan memprihatinkan, seorang yang menggeluti profesi guru lebih dari 39 tahun ternyata gaji pokoknya lebih rendah dari calon pegawai BUMN yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Tilaar menyatakan bahwa kunci utama peningkatan kualitas pendidikan ialah mutu para gurunya. Dalam hal ini diperluka penghargaan yang wajar terhadap profesi guru sebagaimana di negara-negara industri maju.

6. Kualitas, Relevansi/Efisiensi Eksternal, Elitisme, dan manajemen, kualitas pendidikan kita relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara sekitar, hal ini terlihat dari besarnya dana pembangunan dalam bidang pendidikan. Relevansi juga mengkhawatirkan karena besarnya pengangguran lulusan pendidikan menengah dan tinggi, bahkan ada tendensi semakin tinggi pendidikan semakin besar kemungkinan untuk menganggur. Elitisme artinya adanya kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah menguntungkan kelompok masyarakat kecil atau yang justru mampu. Sedangkan masalah pada manajemen meliputi masalah perencanaan, pendanaan, dan efisiensi sistem.

E. FAKTA YANG ADA DI LAPANGAN.

Berikut ini akan disajikan fakta-fakta yang ada di lapangan yang merupakan perwujudan permasalahan yang dikemukakan di atas.

- 1. Kemosrotan Moral**, hal yang sangat mudah kita temui pada pendidikan formal adalah kecurangan yang dilakukan oleh para siswa pada saat ulangan atau ujian adalah pemandangan sehari-hari, bahkan ada yang berdalih membantu orangtua. Para guru juga tidak mau ketinggalan, pada saat pelaksanaan ujian nasional mereka berusaha berbuat curang dengan dalih membantu siswa. Bila hal ini dibiarkan maka akan menjadi budaya dan pada akhirnya merupakan benih bagi tumbuh suburnya kecurangan-kecurangan yang lebih besar, misalnya penyalahgunaan uang sekolah, keluyuran pada jam-jam belajar, tawuran antar pelajar, hingga kasus miras dan narkoba, hingga peringkat atas negara terkorup, ini menunjukkan betapa kemosrotan moral sudah menjadi budaya di negeri ini.¹⁵²
- 2. Pembelajaran model *Fragmented dan dikotomi***, telah tampak di depan kita, sangat jarang pembelajaran yang dilakukan pendidik dengan *integrated approach*. Artinya masing-masing guru sub bidang studi agama maupun antara

¹⁵² . Pidarta, Made, *Manajemen Pendidikan Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.124

guru agama, guru sains, guru bahasa, guru ilmu sosial, guru penjas, dan guru seni sibuk dengan materi mereka sendiri, tanpa mau merumuskan bersama pembelajaran yang terpadu yang bermuara pada pengembangan dan penyelamatan potensi siswa.

3. **Cognitive oriented**, sudah dimaklumi bahwa keberhasilan siswa dalam mengikuti ulangan atau menempuh ujian yang menjadi ukuran utama adalah skor perolehan dalam mengerjakan soal-soal ulangan atau ujian. Bahkan saat ini walaupun tidak menentukan kelulusan siswa, akan tetapi tetap dijadikan standar oleh sekolah lanjutan dan perguruan tinggi dalam merekrut input siswa atau mahasiswa.
4. **Media massa kurang memperhatikan pendidikan**, sulit dipungkiri bahwa media massa, terutama televisi dengan segala tanyangannya sangat jauh bahkan terkesan masa bodoh dengan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari waktu tayang dan materi yang ditayangkan. Tayangan kekerasan, mistis, perusakan dan pelecehan ajaran Islam sangat banyak ditemui mulai dari film kartun hingga sinetron.
5. **Kesejahteraan guru masih minim**, julukan guru sebagai pasukan berani utang, pangkat jendral bayaran kopral, dan Umar Bakri tidak asing lagi, bahkan isu terakhir guru yang lulus sertifikasi akan dibayar dengan standar “**Yen**”. Hal ini

menunjukkan betapa kesejahteraan guru masih minim, entah sampai kapan akan terjadi perubahan.¹⁵³

6. Kualitas, Relevansi/Efisiensi Eksternal, Elitisme, dan manajemen, faktanya terlihat pada peringkat SDM kita berada di bawah negara-negara tetangga, banyaknya lulusan yang tak siap pakai dan tak mampu menembus UMPTN, subsidi pendidikan untuk pendidikan dasar lebih kecil dari pada pendidikan tinggi yang *nota bene* mahasiswanya sebagian besar berasal dari golongan menengah ke atas.

F. SOLUSI YANG DITAWARKAN

Solusi yang ditawarkan berikut ini diuraikan secara berurutan sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya.

1. Masalah kemerosotan moral, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah melalui pemberdayaan pendidikan budi pekerti, serta keteladanan.
2. Masalah pembelajaran model *fragmented* dan dikotomi, solusi yang dapat ditawarkan adalah mengintegrasikan antar sub mata pelajaran agama, dan antara mata pelajaran agama dengan mata pelajaran umum selain agama. Sehingga

¹⁵³ A. Malik Fajar, 1998. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, (Jakarta: LP3NI), hal. 97

menghasilkan pembelajaran yang diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan.

3. Masalah *cognitive oriented*, solusi yang ditawarkan adalah penilaian yang integratif. Artinya siswa dinyatakan tuntas atau berhasil bila memenuhi kriteria kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal ini harus disadari dan dilakukan bukan sekedar jargon atau *lips service*.
4. Masalah media massa, yang satu ini memerlukan *political will* dari pemerintah, perhatian serius dari orang tua, dan dukungan yang kuat dari semua lapisan masyarakat agar media massa benar-benar menyadari dan tidak terlalu *profit oriented* tetapi juga harus sangat memperhatikan faktor-faktor edukatif.¹⁵⁴
5. Masalah minimnya kesejahteraan guru, hendaknya disadari oleh pemerintah, orang tua murid, dan masyarakat. Karena Ada ungkapan “*No welfare without development, no development without education, and no education without teacher*”, hal ini sulit untuk dipungkiri relevansinya dalam kehidupan suatu bangsa, sekaligus menunjukkan bahwa guru adalah ujung tombak kesejahteraan suatu bangsa.
6. Masalah Kualitas, Relevansi/Efisiensi Eksternal, Elitisme, dan manajemen dapat diatasi bila pemerintah, dunia

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 99

pendidikan, dan dunia usaha duduk semeja untuk merumuskan *link and match* yang sinergis.

G. KEDUDUKAN TEORI PENDIDIKAN MODERN DALAM ISLAM

Teori pengasuhan dan pendidikan modern berkembang sangat pesat di negara-negara barat. Seperti pengetahuan esakta dan teknik, ilmu pendidikan dan psikologi berkembang dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam memecahkan masalah-masalah dalam kehidupannya.¹⁵⁵

Berbeda dengan Sains dan teknologi yang bersifat eksak dan pasti, ilmu pendidikan hasil temuan manusia bersifat relatif karena pendidikan manusia itu tergantung kepada sistemnya. Produk karakter manusia seperti apa yang akan dihasilkan tergantung kepada sistem dan lingkungan yang membentuknya. Jadi ilmu pendidikan dan psikologi yang dihasilkan tentu akan tergantung bagaimana sistem dan nilai-nilai yang dianut oleh sistem tersebut. Dengan kata lain kita tidak bisa mengadopsi begitu saja teori pendidikan dan psikologi dari barat.

Tujuan pendidikan di dalam Islam adalah mendidik anak menjadi manusia yang sempurna baik intelektual,

¹⁵⁵<http://id.shvoong.com/social-sciences/1999249-pranata-pendidikan-pada-masyarakat-modern/#ixzz1pYWGUpnS>

emosional dan spiritual agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Teori yang dijamin benar di dalam pendidikan dan psikologi adalah Al-Qur'an dan Hadist, sehingga sebagai umat Islam kita harus merujuk pendidikan dan psikologi ini kepada dua sumber tersebut. Teori dari Al-Qur'an dan Hadist berisi teori dan metode yang bersifat umum, sehingga dalam tingkat teknis dan operasionalnya harus dikembangkan oleh manusia itu sendiri.

Teori pendidikan dan psikologi modern merupakan hasil usaha manusia yang bersifat ilmiah berdasarkan temuan, eksperimen serta pengalaman empiris yang didasari nilai-nilai manusia yang dianut pada suatu saat dan suatu tempat. Tentu saja sifatnya tidak absolut karena sistem yang membentuknya bersifat relatif sehingga bisa saja teori ini berubah dalam perjalanannya. Apa yang baik dan benar pada suatu waktu dan suatu tempat belum tentu benar di waktu dan tempat yang lain.

Tapi bukan berarti kita tidak boleh sama sekali menengok teori atau metoda pendidikan dan pembelajaran yang berkembang pesat dalam psikologi Modern, oleh karena Mengabaikan sama sekali temuan-temuan ilmiah membuat kita kehilangan kesempatan untuk mengoptimalkan tugas kita sebagai orang tua.¹⁵⁶ Tidak sedikit temuan-temuan ilmiah lebih

¹⁵⁶<http://id.shvoong.com/social-sciences/1999249-pranata-pendidikan-pada-masyarakat-modern/#ixzz1pYWGUpnS>

memudahkan kita menjalankan dalil-dalil wahyu (Al-Qur'an dan Hadist). Kadang dalil wahyu memberi panduan yang bersifat prinsip dan umum sehingga pengetahuan kita tentang psikologi modern dapat memudahkan kita menerapkannya pada tingkat teknis dan operasional..

Pada saat ini di mana arus informasi tidak dapat dibendung dan nyaris merambah tanpa batas maka kita tidak bisa sepenuhnya terisolasi dari pengaruh perkembangan teknologi dan informasi. Sehingga ada hal-hal yang bersifat global yang harus kita amati aspek pengaruh perkembangannya dalam dunia pendidikan. Tapi apakah semua teori dan temuan ilmiah harus kita ikuti? atau menunggu sampai teori modern itu terbukti kesalahannya sekian tahun mendatang? Yang kita perlukan adalah menguji apakah teori itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, jadi penakarnya adalah dua sumber tersebut karena Al-Qur'an dan Hadist pasti benar dan telah teruji dalam rentang sejarah yang panjang.

Contohnya Teori bahwa setiap remaja akan mengalami krisis indentitas, mencari jati diri, apakah benar demikian? ternyata kalau kita pelajari sejarah Islam yaitu pada zaman generasi Islam awal dan sesudahnya, anak-anak remaja Islam pada waktu itu telah tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan memiliki Ilmu dan tingkat kematangan yang tinggi menurut ukuran kita sekarang. Remaja waktu itu sudah memiliki

tanggung jawab yang tinggi pada diri, keluarga dan masyarakatnya, tidak terjadi krisis identitas pada mereka. Berbeda sekali dengan pemaparan teori krisis identitas pada remaja yang dipaparkan oleh para psikolog. Hal ini dapat dijelaskan karena sistem dan nilai-nilai yang dianut oleh Islam dan barat berbeda.

H. PENDIDIKAN MODERN DI INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER MASYARAKAT YANG ADILUHUNG

Pendidikan sebagai kegiatan pembelajaran memiliki keragaman sesuai dengan ragam komunitas manusia. Untuk itu pendidikan hanya ditemukan unsur universalnya. Keragaman pendidikan tersebut disebabkan perbedaan memberikan arti atau makna daripada pendidikan itu sendiri sebagai gejala sosial. Pendidikan merupakan sebuah investasi mahal yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik yang dapat memberikan lebih kepada negara dibandingkan meminta kepada negara. Sebelum meninjau lebih jauh tentang perbedaan corak di setiap negara alangkah baiknya kita tinjau landasan atau dasar pijakan pendidikan di beberapa negara yang menjadi batu pijakan kuat

bagi perkembangan pendidikan di negaranya masing-masing.¹⁵⁷

Pendidikan pada awal peradaban terletak pada bagaimana mempertahankan kehidupan dan mengelola alam bagi kehidupannya. Seiring berkembangnya peradaban dengan ditandai berkembangnya kelas sosial dan kasta berkembang pula hubungan dan organisasi sosial ekonomi kemasyarakatannya. Hubungan kemasyarakatan semakin kompleks dan berkembang dan timbul kelas dan kasta dalam masyarakat. Kelas dan kasta memainkan peranan penting dalam hubungan sosial dalam masyarakatnya. Ada tiga kelompok besar kasta dan kelas dalam masyarakat: 1) pendeta atau tokoh agama yang berfungsi menyiapkan ritual keagamaan yang membentengi Negara dari musuh baik musuh yang kelihatan maupun tidak kelihatan, 2) tentara yang berfungsi mempertahankan Negara dari musuh yang kelihatan dan menegakkan hukum dan peraturan, 3) orang biasa yang berfungsi bekerja menghasilkan baju, makanan, rumah, dan mencari kebutuhan hidup lainnya.

Peradaban kuno yang sering disebut peradaban *ras oriental* ini yang akan diambil adalah peradaban dari bangsa Turanian (Cina dan Mongolia), dan Hemitik (khususnya

¹⁵⁷

Modern.html

<http://salmanecha.blogspot.com/2009/11/Pendidikan>

Mesir).¹⁵⁸ Konsepsi oriental bagi pendidikan adalah mempersiapkan generasi muda mempersiapkan fisik dan mental untuk dapat mempertahankan dan memperoleh kebutuhan hidupnya. Pendidikan di Cina dilatarbelakangi oleh agama Konghucu. Tujuan pendidikan di Cina berpahamkan pada pengajaran konfusius. Pengajaran Konfusius menekankan pada hidup mulia. Pengikut Konfusius dalam mendidik dan mengajar menekankan pada lima hubungan mendasar, yaitu antara: 1) penguasa dan rakyat, 2) orang tua dan anak, 3) suami dan isteri, 4) saudara, 5) teman. Pendidikan di Cina yang disarankan oleh Konfusius adalah di rumah tangga dan keluarga. Pendidikan di Cina ditekankan pada tipe pelatihan dan pendidikan moral yakni pengajaran yang khusus melatih pada adat istiadat, tugas, dan adab kesopanan. Isi pengajaran di Cina berpahamkan pada Konfusius. Sedangkan pendidikan di Mesir bertujuan pada pengabdian pada dewa dan juga ditekankan pada perdagangan dan perindustrian. Sekolah militer bagi anak keturunan bangsawan dan juga dari keluarga tidak mampu. Isi pendidikan di Mesir adalah klasik dan kejuruan yang diperuntukan untuk perdagangan dan perindustrian. Sastra mengajarkan kebajikan. Peradaban Mesir tidak luput dari peran keahlian dan pengetahuan

¹⁵⁸ Toto Suharto, 2006. *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media), hal. 187

masyarakatnya. Pengajaran di Mesir bersifat tidak formal hanya sebatas bagaimana mereka dapat menjadi tukang perahu, pedagang, pengusaha, dan penggembala.

Pendidikan yang terpenting dari orangtuanya yang mengajarkan agama/keyakinan dan moral. Pendidikan formal baru dapat diperoleh saat anak berusia 3 tahun yang biasanya diajarkan oleh pendeta. Sekolah untuk membaca dan menulis saat anak berusia 5 tahun. Pendidikan sekolah tingkat atas saat anak berusia 17 tahun. Sekolah militer saat ada instruksi perang. Semua pengaturan atau pengorganisasian sekolah dikendalikan oleh pendeta.

Landasan Pendidikan di Indonesia yang dijelaskan secara panjang lebar oleh Syamsul Berau yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945. Undang - Undang Dasar 1945 adalah merupakan hokum tertinggi di Indonesia.Pasal - pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang - Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu pasal 31 dan Pasal 32. Yang satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Pasal 31 Ayat 1 berbunyi : Tiap - tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Dan ayat 2 pasal ini berbunyi: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajar Pasal 32 pada Undang-Undang Dasar berbunyi: Pemerintah

memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan nasional, yang diatur dengan Undang - Undang.

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁵⁹ Tidak semua pasal akan dibahas dalam tulisan ini. Yang dibahas adalah pasal-pasal penting terutama yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam serta sebagai acuan untuk mengembangkan pendidikan. Pertama-tama adalah Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 5. Ayat 2 berbunyi sebagai berikut : Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.”Selanjutnya Pasal 1 Ayat 5 berbunyi :

“Tenaga Pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.¹⁶⁰ Menurut ayat ini yang berhak menjadi tenaga kependidikan adalah setiap anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedang yang dimaksud dengan Pendidik tertera dalam pasal 27 ayat 6, yang

¹⁵⁹ <http://salmanecha.blogspot.com/2009/11/PendidikanModern.html>

¹⁶⁰ Haidar Putra. Daulay, 2004. *Pendidikan Islam Dalam Sisdiknas di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media), hal. 264

mengatakan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”.

3. Landasan Filsafat. Filsafat pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai keakar-akarnya mengenai pendidikan. Agar uraian tentang filsafat pendidikan ini menjadi lebih lengkap, berikut akan dipaparkan tentang beberapa aliran filsafat pendidikan yang dominan di dunia ini. Aliran itu ialah :1. Esensialis; 2. Parenialis; 3. Progresivis; 4. Rekonstruksionis; 5. Eksistensialis. Filsafat pendidikan Esensialis bertitik tolak dari kebenaran yang telah terbukti berabad-abad lamanya. Kebenaran seperti itulah yang esensial, yang lain adalah suatu kebenaran secara kebetulan saja. Tekanan pendidikannya adalah pada pembentukan intelektual dan logika. Filsafat pendidikan Parenialis tidak jauh berbeda dengan filsafat pendidikan Esensialis. Kalau kebenaran yang esensial pada esensialis ada pada kebudayaan klasik dengan *Great Booknya*, maka kebenaran Parenialis ada pada wahyu Tuhan. Tokoh filsafat ini ialah Agustinus dan Thomas Aquino. Demikian pula Filsafat Progresivisme mempunyai jiwa perubahan, relativitas, kebebasan, dinamika, ilmiah,

dan perbuatan nyata. Menurut filsafat ini, tidak ada tujuan yang pasti. Tujuan dan kebenaran itu bersifat relative. Apa yang sekarang dipandang benar karena dituju dalam kehidupan, tahun depan belum tentu masih tetap benar. Ukuran kebenaran ialah yang berguna bagi kehidupan manusia hari ini. Tokoh filsafat pendidikan Progresivis ini adalah John Dewey. Filsafat pendidikan Rekonstruksionis merupakan variasi dari Progresivisme, yang menginginkan kondisi manusia pada umumnya harus diperbaiki (Callahan, 1983). Mereka bercita-cita mengkonstruksi kembali kehidupan manusia secara total. Filsafat pendidikan Eksistensialis berpendapat bahwa kenyataan atau kebenaran adalah eksistensi atau adanya individu manusia itu sendiri.¹⁶¹ Adanya manusia di dunia ini tidak punya tujuan dan kehidupan menjadi terserap karena ada manusia. Manusia adalah bebas. Akan menjadi apa orang itu ditentukan oleh keputusan dan komitmennya sendiri.

- 4. Landasan Sejarah.** Sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang dapat didasari oleh konsep-konsep tertentu.

¹⁶¹

5. Sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum Negara Indonesia berdiri. Sebab itu sejarah pendidikan di Indonesia juga cukup panjang.

Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno, kemudian diteruskan dengan zaman pengaruh agama Hindu dan Budha, Pada waktu bangsa Indonesia berjuang merintis kemerdekaan ada tiga tokoh pendidikan sekaligus pejuang kemerdekaan, yang berjuang melalui pendidikan. Mereka membina anak-anak dan para pemuda melalui lembaganya masing-masing untuk mengembalikan harga diri dan martabatnya yang hilang akibat penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh pendidik itu adalah Mohamad Safei, Ki Hajar Dewantara, dan Kyai Haji Ahmad Dahlan (TIM MKDK, 1990).

Mohamad Syafei mendirikan sekolah INS atau *Indonesisch Nederlandse School* di Sumatera Barat pada Tahun 1926. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayutanam, sebab sekolah ini didirikan di Kayutanam. Maksud ulama Syafei adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Tokoh pendidik nasional berikutnya yang akan dibahas adalah Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sifat, sistem, dan metode pendidikannya diringkas ke dalam empat keemasan, yaitu asas Taman

Siswa, Panca Darma, Adat Istiadat, dan semboyan atau perlambang. Asas Taman Siswa dirumuskan pada Tahun 1922, yang sebagian besar merupakan asas perjuangan untuk menentang penjajah Belanda pada waktu itu. Tokoh ketiga adalah Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi Agama Islam pada tahun 1912 di Yogyakarta, yang kemudian berkembang menjadi pendidikan Agama Islam. Pendidikan Muhammadiyah ini sebagian besar memusatkan diri pada pengembangan agama Islam, dengan beberapa ciri seperti berikut (TIM MKDK, 1990). Asas pendidikannya adalah Islam dengan tujuan mewujudkan orang-orang muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat serta Negara. Ada lima butir yang dijadikan dasar pendidikan yaitu :

- a. Perubahan cara berfikir
- b. Kemasyarakatan
- c. Aktivitas
- d. Kreativitas
- e. Optimisme

6. Landasan Sosial Budaya, Sosial mengacu kepada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu secara alami, artinya aspek itu telah ada sejak manusia dilahirkan. Sama halnya dengan sosial, aspek budaya inipun

sangat berperan dalam proses pendidikan.¹⁶² Malah dapat dikatakan tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki unsur budaya. Materi yang dipelajari anak-anak adalah budaya, cara belajar mereka adalah budaya, begitu pula kegiatan-kegiatan mereka dan bentuk-bentuk yang dikerjakan juga budaya. *Sosiologi dan Pendidikan*; Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Proses sosial dimulai dari interaksi sosial dan dalam proses sosial itu selalu terjadi interaksi sosial. Interaksi dan proses sosial didasari oleh faktor-faktor berikut :1. Imitasi; 2. Sugesti; 3. Identifikasi; 4. Simpati. *Kebudayaan dan Pendidikan*; Kebudayaan menurut Taylor adalah totalitas yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat (Imran Manan, 1989) Hassan (1983).¹⁶³ Misalnya mengatakan kebudayaan berisi (1) norma-norma; (2) *folkways* yang mencakup kebiasaan, adat, dan tradisi; dan (3) *mores*. Sementara itu Imran Manan (1989) menunjukkan lima komponen kebudayaan sebagai berikut :1. Gagasan; 2.

¹⁶² Suyanto, 2006. *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global)*, PSAP Muham madiyah, (Jakarta), hal. 225

¹⁶³ <http://salmanecha.blogspot.com/2009/11/PendidikanModern.html>

Ideologi; 3. Norma; 4. Teknologi; 5. Benda. Agar menjadi lengkap, perlu ditambah beberapa komponen lagi yaitu: 1. Kesenian; 2. Ilmu; 3. Kepandaian. Kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: 1. Kebudayaan umum, misalnya kebudayaan Indonesia; 2. Kebudayaan daerah, misalnya kebudayaan Jawa, Bali, Sunda, Nusa Tenggara Timur dan sebagainya; 3. Kebudayaan populer, suatu kebudayaan yang masa berlakunya rata-rata lebih pendek dari pada kedua macam kebudayaan terdahulu.

7. Landasan Psikologi, Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa itu sendiri adalah roh dalam keadaan mengendalikan jasmani, yang dapat dipengaruhi oleh alam sekitar. Karena itu jiwa atau psikis dapat dikatakan inti dan kendali, kehidupan manusia, yang berada dan melekat dalam manusia itu sendiri. *Psikologi Perkembangan*; Ada tiga teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah: 1. Pendekatan pentahapan; perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu, pada setiap tahap memiliki ciri-ciri pada tahap-tahap yang lain; 2. Pendekatan diferensial; pendekatan ini memandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Atas dasar ini lalu orang-orang membuat kelompok-kelompok; 3. Pendekatan ipsatif. Pendekatan ini berusaha

melihat karakteristik setiap individu, dapat saja disebut sebagai pendekatan individual. Melihat perkembangan seseorang secara individual.

I. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI SISTEM PENDIDIKAN

Ada beberapa faktor utama yang menimbulkan perubahan sosial yang berpengaruh kepada perubahan sistem pendidikan yang ada di semua Negara. Faktor-faktor itu meliputi:

1. Urbanisasi dan perkembangan atau pembangunan kota-kota metropolitan;
2. Ledakan pertumbuhan penduduk besar;
3. Kemajuan pesat teknologi modern di semua bidang kehidupan;
4. Saling ketergantungan hidup antar Negara.

Meskipun dampaknya terhadap Negara-negara yang ada tidak selalu sama dalam proses perubahan sistem pendidikan, namun cepat atau lambat pengaruh dari faktor di atas akan memaksa masyarakat atau bangsa untuk berinisiatif menanggulangi semua problema yang timbul melalui proses inovasi (pembaruan) sistem pendidikan masing-masing. Frederich Harbison dan Charles A Myers dalam bukunya yang berjudul "*Education Manpower and Economic Growth Strategies*

of *Human Resource Development*” mengemukakan beberapa faktor-faktor yang memengaruhi sistem pendidikan adalah sebagai berikut.¹⁶⁴

1. Faktor historis

Menurut Harbison dan Mayer, faktor sejarah pertumbuhan masyarakat ditentukan oleh tiga hal yang saling berkaitan, yaitu pendidikan, kemampuan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Atas pembagian di atas, Harbison dan Mayer membagi Negara-negara di dunia ini menjadi empat tingkat pertumbuhan sebagai berikut:

- a. Negara yang belum berkembang;
- b. Negara-negara yang sebagian bidang kehidupannya telah mengalami kemajuan Negara- Negara yang sedang mengalami setengah kemajuan;
- c. Negara- Negara yang telah mengalami kemajuan.

2. Faktor geografis

Manusia atau bangsa hidup di suatu lingkungan alam tertentu yang berbeda-beda situasi dan kondisi alamiahnya. Maka berbeda pula tuntutan hidup akibat pengaruh faktor geografis, dan itu juga memengaruhi sistem pendidikan yang diperlukan di Negara-negara yang bersangkutan. Pengaruh tersebut terlihat dari dua aspek yaitu:

- a. Aspek klimatologis atau iklim;

¹⁶⁴ Arifin, *Ilmu Perbandingan Pendidikan.....*, hal. 108-133

b. Aspek lingkungan alam dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Nicholas Hans membedakan adanya tiga kelompok Negara yang berbeda iklimnya yaitu:

a. Negara-negara belahan bumi bagian utara yang beriklim dingin

b. Negara-negara di sekitar laut tengah yang beriklim sedang

c. Negara-negara yang terletak di khatulistiwa (garis equator) atau yang berdekatan dengannya yang beriklim panas.

3. Faktor kehidupan ekonomi

Faktor ekonomi sangat erat kaitannya dengan faktor geografis, sebab pembangunan ekonomi suatu Negara bergantung pada faktor geografis, oleh karena faktor geografis mengandung sumber kekuatan baik yang berupa modal materil maupun modal dasar mental spiritual penduduknya.

Sesungguhnya pembangunan di bidang ekonomi merupakan refleksi dari kombinasi antara sumber kemampuan manusia alam sekitar dan sistem kemasyarakatan serta kebudayaannya. Kombinasi dari ketiga unsur ini sangat bertumpu pada faktor geografis di mana proses kehidupan sehari-hari manusia berada dalam lingkungannya.

4. Politik Negara

Antara ekonomi dan politik hampir tak dapat dipisahkan, karena pembangunan ekonomi memerlukan politik yang stabil, sedang stabilitas politik juga memerlukan stabilitas ekonomi, satu sama lain saling pengaruh-memengaruhi dan saling memperkuat.

Bilamana dalam suatu Negara kehidupan politiknya sedang kacau, mustahil dapat diciptakan suatu keseimbangan yang serasi di dalam sistem pendidikan. Politik Negara merupakan kompas yang harus dijadikan pedoman dalam langkah-langkah pengelolaannya.

5. Faktor kehidupan agama

Agama yang dipeluk oleh rakyat suatu Negara menduduki tempat penting dalam sistem kehidupan masyarakat. Mengingat peranan dan pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat di suatu Negara, maka jika dikaitkan dengan sistem pendidikan yang dikembangkan dalam suatu masyarakat, dapat menimbulkan dampak seperti, di Negara yang menindas kehidupan beragama secara mutlak menguasai sistem pendidikan.

6. Faktor kesukuan

Pengaruh kesukuan di beberapa Negara terhadap sistem pendidikan menyebabkan timbulnya pemisahan dan perpecahan kehidupan masyarakat atau bangsa ke dalam

golongan-golongan yang saling berkonfrontasi antara satu sama lain. Di beberapa Negara seperti Amerika perbedaan warna kulit menyebabkan pemisahan sistem pendidikan yang dapat menimbulkan sentimen rasialis.

7. Tingkat kemajuan peradaban

Setiap Negara atau bangsa di dunia ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam membangun dirinya sendiri untuk mencapai tingkat kemajuan peradaban bangsa itu sendiri. Namun ada tiga faktor utama yang menjadi modal dasar kemajuan itu yaitu:

- a. Kemampuan manusia sendiri
- b. Tingkat pendidikan
- c. Pertumbuhan sistem kelembagaan masyarakat.

Penutup

Perlu kita ketahui bersama bahwa mendidik budi pekerti bukanlah mengajar. Mendidik budi pekerti ialah menanamkan apa yang dimaksud oleh pendidikan budi pekerti itu sehingga menjadi dasar atau mendarah daging (menjadi kebiasaan) bagi siapa saja yang dididik. Tentu saja cara mendidik itu tidak seperti mengajar. Tidak cukup hanya dengan memberi pengertian (nasihat) tentang kebaikan dan kejahatan atau dengan larang dan perintah saja. Jika cara mendidik seperti itu, alangkah mudah dan cepatnya proses

mendidik. Padahal, mendidik yang benar tidak cukup dengan cara semacam itu. Nasihat yang disampaikan kepada orang-orang atau anak-anak yang tidak disertai dengan amalan (pimpinan dan pembawanya) ibarat perintah berjalan kepada orang buta (belum tahu jalan), yang artinya belum mampu menunjukkan jalan, tentu saja hal ini akan sulit berhasil.

Sistem pendidikan nasional memiliki keterhubungan dan ketergantungan dengan lingkungan atau sistem-sistem lainnya yang berada pada di dalam supra sistem. Sistem pendidikan nasional mengambil input dari lingkungan atau sistem-sistem lain yang ada di dalam supra sistemnya. Era globalisasi merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan bahwa dunia ini sudah semakin mengecil. Kita tidak akan lagi bisa menyembunyikan kebobrokan atau keadaan yang buruk dari suatu negara. Hal ini kemungkinan terjadi berkat kemajuan teknik informatika. Di dalam konteks informatisasi, dunia ini sudah menjadi satu, tidak ada lagi kotak-kotak yang membatasi wilayah satu dengan wilayah lainnya.

Internasionalisasi pendidikan berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menembus batas negara melalui jaringan kerjasama, pembukaan cabang lembaga yang berbasis di suatu negara lain, atau pembukaan akses siswa/mahasiswa domestik ke lembaga pendidikan internasional. Hal ini bukan hanya terjadi secara konvensional

dalam bentuk berdirinya suatu lembaga pendidikan, melainkan juga secara virtual melalui jaringan internet

Referensi:

- Arif, Armai. 2002. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers.
- Chan, Sam M. Sam, Tuti T. 2006. *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Daulay, Haidar Putra. 2004. *Pendidikan Islam Dalam Sisdiknas di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Fajar, H.A. Malik. 1998. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, Jakarta: LP3NI.
- Muhaimin, 2006. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulyasa, E. 2006. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abuddin. 2007. *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Suwendi. 2004. *Sejarah & Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suyanto. 2006. *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global)*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Tilaar, H.A.R. 2006. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Toto, Suharto. 2006. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Medida.
- Walidin, Warul. 2005. *Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern*, Yogyakarta: Taufiqiyah Sa'adah Banda Aceh & Suluh Press.
- Sam, M. Chan, Tuti T.Sam. 2006. *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Majid, Fakhry. 1997. *Sejarah Filsafat Islam; Sebuah Peta Kronologis*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Pidarta, Made. 2004. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2006. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bab 4

Gambaran Pendidikan di Indonesia

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memperhatikan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum* Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang

sama Indonesia hanya berpredikat sebagai *follower* bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Memasuki abad ke-21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Perasan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar.

Salah satunya adalah memasuki abad ke- 21 gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain.

Saat ini yang kita rasakan adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain.

Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Primary Years Program* (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program* (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Diploma Program* (DP).

Bisa dikatakan bahwa setiap negara atau bangsa selalu menyelenggarakan pendidikan demi cita-cita nasional bangsa yang bersangkutan. Beranjak dari sinilah nantinya dikenal pendidikan nasional yang didasarkan kepada filsafat bangsa dan cita-cita nasionalnya.

Pendidikan nasional merupakan pelaksanaan pendidikan suatu negara yang berdasarkan kepada sosial,

psikologis, ekonomis, dan politis, di mana dengan jalan pendidikan tersebut ditunjukkan untuk membentuk ciri khusus atau watak bangsa yang bersangkutan, yang sering juga disebut dengan kepribadian nasional.¹⁶⁵

Pendidikan adalah suatu keseluruhan karya insani yang terbentuk dari bagaian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sehingga mencapai kualitas hidup yang diharapkan. Pendidikan sebagai suatu sistem sosial, merupakan sistem terbuka yang terbatas pada sistem yang memperoleh masukan dari lingkungan dan memberikan hasil transformasinya kepada lingkunganya.

Komponen-komponen sistem pendidikan meliputi:¹⁶⁶ 1) Tujuan dan prioritas, berfungsi memandu kegiatan-kegiatan sistem pendidikan; 2) Siswa atau peserta didik, berfungsi dalam proses perubahan kualitas tingkah laku seperti yang diharapkan oleh sistem pendidikan; dan 3) Menejemen, yang berfungsi untuk merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan dan menilai sistem pendidikan.

Jadi, pendidikan sebagai sistem berada bersama, terikat, dan tertentu di dalam suprasistemnya. Berarti membangun

¹⁶⁵ Fuad Ihsan, 2003. *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 17

¹⁶⁶ Made Pidarta, 2007. *Landasan Kependidikan*, (Jakarta: RINEKA CIPTA), hlm 30.

suatu lembaga pendidikan baru atau memperbaiki lembaga pendidikan lama, tidak dapat memisahkan diri dari suprasistem tersebut.

Bagi suatu masyarakat, hakikat pendidikan diharapkan mampu berfungsi menunjang kelangsungan kemajuan hidupnya, agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk tata prilaku lainnya bagi generasi muda. Tiap masyarakat selalu berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai coraknya masing-masing priode zamannya kepada generasi muda melalui pendidikan atau secara khusus melalui interaksi sosial. Dengan demikian fungsi pendidikan tidak lain adalah sebagai proses sosialisasi.¹⁶⁷

Proses pembelajaran pada dasarnya mengantar para pelajar untuk memulai belajar, jadi tidak menjadikan para pelajar pandai karena mereka harus menjadikan diri mereka sendiri untuk pandai sesuai dengan kemampuan intelektual yang ada pada mereka. Jadi, pembelajaran merupakan proses yang terbatas dan penanaman nilai-nilai tidak langsung dilaksanakan pada proses pembelajaran.

¹⁶⁷ Hasbullah, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada). hal. 123.

Seseorang mulai mendapatkan pendidikan sejak memperoleh pengalaman dalam lingkungannya, terutama lingkungan keluarga di mana anak dilahirkan dalam keadaan lemah tidak berdaya. Kelangsungan dalam proses hidupnya sangat tergantung kepada pertolongan orang tuanya atau orang yang menyusui dan mengasuhnya. Anak yang dalam keadaan lemah tidak berdaya tersebut, sebenarnya telah menyimpan beberapa potensi pembawaan yang serba memungkinkan untuk ditumbuhkan dan dikembangkan bagi kelangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia terdapat beberapa landasan yang digunakan dengan tujuan apa yang dicita-citakan dapat terealisasi dengan baik, di antara landasan pendidikan di Indonesia antara lain:¹⁶⁸

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakekat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah pokok; apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan dan sebagainya.

¹⁶⁸Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 232-233

2. Landasan sosiologis

Secara sosiologis pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri.

3. Landasan Kultural

Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan diwariskan dan dikembangkan dengan jalan pendidikan dan sebaliknya bentuk, ciri-ciri dan pelaksanaan pendidikan ditentukan oleh kebudayaan masyarakat di mana proses pendidikan itu berlangsung.

4. Landasan Psikologis

Pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Pemahaman terhadap perkembangan kepribadian akan sangat bermanfaat untuk pendidikan, utamanya dalam membantu setiap peserta didik mengembangkan/mematangkan intelektualnya, spiritualnya dan emosionalnya.

5. Landasan Ilmiah dan Teknologis

Pendidikan serta IPTEK mempunyai kaitan yang sangat erat, sebab pendidikan sangat berperan dalam pewarisan dan pengembangan IPTEK. Perkembangan IPTEK dan masyarakat harus diakomodir dan direspon positif oleh lembaga pendidikan.

6. Landasan Yuridis

Landasan yuridis atau kebijakan pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lainnya.

7. Landasan Religius

Pendidikan yang ada di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari faktor agama, oleh karena itulah lembaga pendidikan banyak yang bercorakkan agama seperti contohnya adalah pesantren.

Kelembagaan Jenjang Program Pendidikan

Lembaga pendidikan umum dan kejuruan terdiri dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan umum merupakan program pendidikan yang lebih mengutamakan perluasan pengetahuan dan pendidikan keterampilan peserta didik yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.¹⁶⁹ Sedangkan kejuruan merupakan pendidikan

¹⁶⁹ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 2001. *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta) hal. 198.

yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan Dasar: diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan menengah.

Pendidikan dasar memiliki jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar juga menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Periode pendidikan dasar ini adalah selama 6 tahun. Di akhir masa pendidikan dasar, para siswa diharuskan mengikuti dan lulus dari Ujian Nasional (UN). Kelulusan UN menjadi syarat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya (SMP/MTs)

Pendidikan Menengah: Adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan kejuruan, pendidikan menengah luar biasa, kedinasan dan keagamaan. Fungsi pendidikan menengah adalah untuk mempersiapkan peserta didik melanjutkan dan meluaskan pendidikan dalam dunia kerja dan pendidikan tinggi.

Pendidikan Tinggi: Adalah jenjang pendidikan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

Sedangkan bila dilihat dari sisi kelembagaannya, sistem pendidikan Indonesia memiliki kelembagaan sebagai berikut:¹⁷⁰

1. Lembaga pendidikan keluarga

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertamanya mendapatkan didikan dan bimbingan.

2. Lembaga pendidikan sekolah

Pada dasarnya pendidikan di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga, yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Di samping itu, kehidupan sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak.

- a. Pendidikan Dasar

1. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

¹⁷⁰ Mulyasa, 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hal. 54

2. SMP/MTS

b. Pendidikan Menengah

1. SMA dan Kejuruan

2. Madrasah Aliyah

c. Pendidikan Tinggi

1. Akademik

2. Institut

3. Sekolah Tinggi

4. Universitas

3. Lembaga pendidikan di masyarakat

Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini, telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas.

Lembaga pendidikan yang dalam istilah UU Nomor 2 Tahun 1989 disebut jalur pendidikan luar sekolah ini, bersifat fungsional dan praktis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja peserta didik yang berguna bagi usaha memperbaiki taraf hidupnya.

Peserta Didik, Tenaga Kependidikan, Sumber Daya Kependidikan, dan Kurikulum

1. Peserta Didik

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan non formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

Peserta didik juga dikatakan sebagai seseorang yang belum dewasa yang sengaja dididik untuk menjadi lebih baik dan diharapkan dapat mengembangkan bakatnya, sehingga pendidik dapat menuntun agar lebih mendalam lagi di bidang bakat anak tersebut.¹⁷¹

2. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan

¹⁷¹Abraham, 2012. *Problematika Pendidikan di Indonesia*, diambil dari: <https://abraham4544.wordpress.com/umum/problematika-pendidikan-di-Indonesia/>

pendidikan. Pengelola satuan pendidikan, pemilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan.¹⁷²

3. Sumber Daya Kependidikan

Sumber daya kependidikan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga. Selain itu, fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya menjadi sarana penunjang kebutuhan pencapaian tujuan.

4. Kurikulum

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan keserasiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan IPTEK serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

Tantangan Pendidikan di Indonesia

Pembangunan pendidikan yang sudah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka telah memberikan hasil yang cukup

¹⁷²Meilani, Masalah Pendidikan di Indonesia, <https://meilankasim.wordpress.com/2009/03/08/makalah-masalah-pendidikan-di-Indonesia/>.

mengagumkan sehingga secara umum kualitas sumberdaya manusia Indonesia jauh lebih baik. Namun dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, kita masih ketinggalan jauh, oleh karena itu, upaya yang lebih aktif perlu ditingkatkan agar bangsa kita tidak menjadi tamu terasing di Negeri sendiri terutama karena terjajah oleh budaya asing dan terpaksa menari di atas irama gendang orang lain.

Upaya untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan IPTEK, serta bermoral dan berbudaya bukanlah suatu pekerjaan yang relatif ringan. Hal ini disebabkan dunia pendidikan kita masih menghadapi berbagai masalah internal yang cukup mendasar dan bersifat kompleks. Kita masih menghadapi sejumlah masalah yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

Rendahnya kualitas pada jenjang sekolah dasar sangat penting untuk segera diatasi karena sangat berpengaruh terhadap pendidikan selanjutnya, ada beberapa masalah internal pendidikan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya pemerataan kesempatan belajar (*equity*) disertai banyaknya peserta didik yang putus sekolah, serta banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini identik dengan ciri-ciri kemiskinan.

2. Rendahnya mutu akademik terutama penguasaan ilmu pengetahuan alam (IPA), matematika, serta bahasa terutama bahasa Inggris padahal penguasaan materi tersebut merupakan kunci dalam menguasai dan mengembangkan iptek.
3. Rendahnya efisiensi internal karena lamanya masa studi melampaui waktu standar yang sudah ditentukan.
4. Rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan yang disebut dengan relevansi pendidikan, yang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga terdidik yang cenderung terus meningkat. Secara empiris kecenderungan meningkatnya pengangguran tenaga terdidik disebabkan oleh perkembangan dunia usaha yang masih didominasi oleh pengusaha besar yang jumlahnya terbatas dan sangat mengutamakan efisiensi (padat modal dan padat teknologi). Dengan demikian penambahan kebutuhan akan tenaga kerja jauh lebih kecil dibandingkan penambahan jumlah lulusan lembaga pendidikan.
5. Terjadi kecenderungan menurunnya akhlak dan moral yang menyebabkan lunturnya tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, seperti terjadinya tawuran pelajar dan kenakalan remaja. Dalam hal ini pendidikan agama menjadi sangat penting menjadi landasan akhlak dan moral serta budi pekerti yang luhur perlu diberikan kepada peserta

didik sejak dini. Dengan demikian, hal itu akan menjadi landasan yang kuat bagi kekokohan moral dan etika setelah terjun ke masyarakat. Masalah-masalah diatas erat kaitanya dengan kendala seperti keadaan geografis, demografis, serta sosio-ekonomi besarnya jumlah penduduk yang tersebar diseluruh wilayah geografis Indonesia cukup luas. Kemiskinan juga merupakan salah satu kendala yang memiliki hubungan erat dengan masalah pendidikan. Rendahnya mutu kinerja sistem pendidikan tidak hanya disebabkan oleh adanya kelemahan menejemen pendidikan tingkat mikro lembaga pendidikan, tetapi karena juga menejemen pendidikan pada tingkat makro seperti rendahnya efisiensi dan efektivitas pengolahan sistem pendidikan. Sistem dan tata kehidupan masyarakat tidak kondusif yang turut menentukan rendahnya mutu sistem pendidikan di sekolah yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya mutu peserta didik dan lulusannya. Kebijakan dan program yang ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, harus di rumuskan secara spesifik karena fenomena dan penyebab timbulnya masalah juga berbeda-beda di seluruh wilayah Indonesia.¹⁷³

¹⁷³ Eti Rochaety, dkk., *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 64-65

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu: 1) Rendahnya sarana fisik; 2) Rendahnya kualitas guru; 3) Rendahnya kesejahteraan guru; 4) Rendahnya prestasi siswa; 5) Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan; 6) Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan; dan 7) Mahalnya biaya pendidikan.

Sistem pendidikan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai supra sistem. Pembanguana sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Hubungan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai supra sistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks.

Artinya suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial

budaya dan ekonomi masyarakat disekitarnya, dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut maka penanggulangan masalah pendidikan juga sangat kompleks, menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak.

Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu: 1) Bagaimana semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan; dan 2) Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat.¹⁷⁴ Sedangkan menurut Umar Tirtarahardja dan La Sulo, pertama mengenai masalah pemerataan, dan yang kedua adalah masalah mutu, relevansi, dan juga efisiensi pendidikan.¹⁷⁵ Seperti telah dikemukakan di atas, pada bagian ini akan dibahas empat masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesempatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya.

¹⁷⁴ Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, tt).

¹⁷⁵ Umar Tirtarahardja dan La Sulo, 2005. *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hal. 226

1. Masalah Pemerataan Pendidikan

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.

Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga Negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat di tampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Pada awalnya, Undang-Undang No 4 tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada bab XI pasal 17 berbunyi:

*“Tiap-tiap warga Negara republik Indonesia mempunyai hak yang sama diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu dipenuhi”.*¹⁷⁶

¹⁷⁶ *Ibid.*, hal 227-229

Selanjutnya dalam kaitannya dengan wajib belajar Bab VI pasal 10 ayat 1 menyatakan: ”*semua anak yang berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun*” ayat 2 menyatakan: “*belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari menteri agama yang dianggap telah memenuhi kewajiban belajar*”.

Landasan yuridis pemerataan pendidikan tersebut sangat penting, sebagai landasan pelaksanaan upaya pemerataan pendidikan guna mengejar ketertinggalan kita sebagai akibat penjajahan. Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting sebab jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada SD, maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajauan melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia baik mereka itu nantinya berperan sebagai produsen maupun konsumen. Dengan demikian mereka tidak terbelakang dan menjadi penghambat pembangunan.

Oleh karena itu, dengan melihat tujuan yang terkandung di dalam upaya pemerataan pendidikan tersebut yaitu menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, maka setelah upaya pemerataan pendidikan

terpenuhi, mulai diperhatikan juga upaya pemerataan mutu pendidikan. Hal ini akan dibicarakan pada butir tentang masalah mutu pendidikan.

Khusus pendidikan formal atau pendidikan persekolahan yang berjenjang dan tiap-tiap jenjang memiliki fungsinya masing-masing maupun kebijaksanaan memperoleh kesempatan pendidikan pada tiap jenjang itu diatur dengan memperhitungkan faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif serta relevansi yang selalu ditentukan proyeksinya secara terus menerus dengan saksama.

Pada jenjang pendidikan dasar, kebijaksanaan penyediaan memperoleh kesempatan pendidikan didasarkan atas pertimbangan faktor kuantitatif, karena kepada seluruh warga Negara perlu diberikan bekal dasar yang sama. Pada jenjang pendidikan menengah dan terutama pada jenjang pendidikan yang tinggi, kebijakan pemerataan didasarkan atas pertimbangan kualitatif dan relevansi, yaitu minat dan kemampuan anak, keperluan, tenaga kerja, dan keperluan pengembangan masyarakat, kebudayaan, ilmu, dan teknologi.

Agar tercapai keseimbangan antara faktor minat dengan kesempatan memperoleh pendidikan, perlu diadakan penerangan yang seluas-luasnya mengenai bidang-bidang pekerjaan dan keahlian dan persyaratannya yang dibutuhkan

dalam pembangunan utamanya bagi bidang-bidang yang baru dan langka.

2. Masalah Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen terhadap calon luaran, dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya jika luaran tersebut terjun kelapangan kerja penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes unjuk kerja. Lazimnya masih dilakukan pelatihan dan pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja dilapangan, dan berkarya.

Jadi mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluaranya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pertanyaanya adalah: apakah keluaran dari sistem pendidikan menjadikan pribadi yang bertakwa, mandiri, anggota masyarakat yang sosial yang bertanggung jawab. Dengan kata lain keluaran ini mewujudkan diri sebagai manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan membangun lingkungannya. Kualitas luaran seperti tersebut adalah *nurturant effect*. Meskipun disadari bahwa hakikatnya produk dengan ciri-ciri seperti itu tidak semata-

mata hasil dari sistem pendidikan itu sendiri. Masalahnya adalah cara pengukuran mutu produk tersebut tidak mudah. Dan pada umumnya hanya dengan mengasosiasikan dengan hasil belajar yang sering dikenal dengan ujian yang tersentralisasi seperti UN.

Padahal hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika tidak terjadi belajar secara optimal akan menghasilkan skor hasil ujian yang baik maka hampir dapat dipastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah semu. Berarti pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Selanjutnya kelancaran pemrosesan pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, dan juga masyarakat sekitar.

3. Masalah Efisiensi Pendidikan

Pada hakikatnya masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan, terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia. Efisiensi artinya dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi, sistem pendidikan yang efisien ialah dengan tenaga dan dana yang terbatas dapat di hasilkan

sejumlah besar lulusan yang berkualitas tinggi. Oleh sebab itu, keterpaduan pengelolaan pendidikan harus tampak di antara semua unsur dan unit, baik antar sekolah negeri maupun swasta, pendidikan sekolah maupun luar sekolah, antara lembaga dan unit jajaran departemen pendidikan dan kebudayaan.

Para ahli banyak mengatakan bahwa sistem pendidikan sekarang ini masih kurang efisien. Hal ini tampak dari banyaknya anak yang *drop-out*, banyak anak yang belum dapat pelayanan pendidikan, banyak anak yang tinggal kelas, dan kurang dapat pelayanan maksimal bagi anak-anak yang lemah maupun yang luar biasa cerdas dan genius.

Oleh karena itu, harus berusaha untuk menemukan cara agar pelaksanaan pendidikan menjadi efisien. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi.

Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah: 1) Bagaimana tenaga kependidikan difungsikan; 2) Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan; 3) Bagaimana pendidikan diselenggarakan; dan 4) Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga.

Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga kependidikan. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Pada masa 5 tahun terakhir ini jatah pengangkatan setiap tahunnya hanya sekitar 20 % dari kebutuhan tenaga lapangan. Sedangkan persediaan tenaga siap diangkat lebih baik daripada kebutuhan di lapangan. Dengan demikian berarti lebih dari 80% tenaga yang tersedia tidak segera difungsikan. Ini terjadi *kemubadziran* yang terselubung, karena biaya investasi pengadaan tenaga tidak segera terbayar kembali melalui pengabdian. Dan tenaga kependidikan khususnya guru tidak disiapkan untuk berwirausaha.

Masalah penempatan guru, khususnya guru bidang penempatan studi, sering mengalami kepincangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Suatu sekolah menerima guru baru dalam bidang studi yang sudah cukup atau bahkan sudah kelebihan, sedang guru bidang studi yang dibutuhkan tidak diberikan karena terbatasnya jatah pengangkatan sehingga ditempatkan di daerah sekolah-sekolah tertentu seorang guru bidang studi harus merangkap mengajarkan bidang studi di luar kewenangannya, meskipun persediaan tenaga yang direncanakan secara makro telah mencukupi kebutuhan, namun mengalami masalah penempatan

karena terbatasnya jumlah yang dapat diangkat dan sulitnya menjaring tenaga kerja yang tersedia di daerah terpencil.

Masalah pengembangan tenaga kependidikan di lapangan biasanya terlambat, khususnya pada saat menyongsong hadirnya kurikulum baru. Setiap pembaharuan kurikulum menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksana lapangan. Dapat dikatakan umumnya penanganan pengembangan tenaga pelaksana di lapangan sangat lambat. Padahal proses pembekalan untuk dapat siap melaksanakan kurikulum baru sangat memakan waktu. Akibatnya terjadi kesenjangan antara saat direncanakan berlakunya kurikulum dengan saat mulai dilaksanakan sehingga pendidikan berlangsung kurang efisien dan kurang efektif.¹⁷⁷

4. Masalah Relevansi Pendidikan

Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan pembangunan nasional setara kebutuhan perorangan, keluarga, dan masyarakat, baik dalam jangka pendek, maupun dalam jangka panjang. Pendidikan merupakan faktor penunjang bagi pembangunan ketahanan nasional.

Oleh sebab itu, perlu keterpaduan di dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dengan pembangunan nasional

¹⁷⁷ *Ibid.*, hal. 234-235

tersebut. Sebagai contoh pendidikan di sekolah harus di rencanakan berdasarkan kebutuhan nyata dalam gerak pembangunan nasional, serta memperhatikan ciri-ciri ketenagaan yang diperlukan sesuai dengan keadaan lingkungan di wilayah-wilayah lingkungan tertentu.

Telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan alumni yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional.

Alumni pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa. Baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan alumni yang dapat mengisi semua sektor pembangunan baik yang aktual maupun yang potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi.

Sebenarnya kriteria relevansi seperti yang dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang pekerjaan yang ada antara lain sebagai berikut: 1) Status lembaga

pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya; 2) Sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan alumni siap pakai yang ada ialah siap kembang; dan 3) Peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratannya yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedia.

Dari beberapa macam masalah pendidikan tersebut masing-masing dikatakan teratasi jika pendidikan: 1) Dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya semua warga Negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan; 2) Dapat mencapai hasil yang bermutu artinya: perencanaan, pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan; 3) Dapat terlaksana secara efisien artinya: pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan; dan 4) Produknya yang bermutu tersebut relevan, artinya: hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.¹⁷⁸

Pada dasarnya pembangunan dibidang pendidikan tentu menginginkan tercapainya pemerataan pendidikan dan pendidikan yang bermutu sekaligus. Ada dua faktor yang dapat dikemukakan sebagai penyebab mengapa pendidikan yang bermutu belum dapat diusahakan pada saat demikian, yaitu:

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal. 237-240

Pertama: gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan pengerahan dana dan daya. *Kedua:* kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, pengerahan tenaga pendidik yang kurang kompeten, kurikulum yang belum mantap, sarana yang tidak memadai.

Meskipun demikian pemerataan pendidikan tidak dapat diabaikan karena upaya tersebut, terutama pada saat suatu bangsa sedang memulai membangun mempunyai tujuan ganda, yaitu di samping tujuan politis juga tujuan pembangunan yaitu memberikan bekal dasar kepada warga Negara agar dapat menerima informasi dan memiliki pengetahuan dasar untuk mengembangkan diri sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam uraian tersebut tampak bahwa masalah pemerataan berkaitan erat dengan masalah mutu pendidikan.

Bertolak dari gambaran tersebut terlihat juga kaitannya dengan masalah efisiensi. Karena kondisi pelaksanaan pendidikan tidak sempurna, maka dengan sendirinya pelaksanaan pendidikan dan khususnya proses pembelajaran berlangsung tidak efisien. Hasil pendidikan belum dapat diharapkan relevan dengan kebutuhan masyarakat pembangunan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Solusi Pemecahan Problematika Pendidikan di Indonesia

1. Solusi Masalah Pemerataan Pendidikan

Banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, langkah-langkah ditempuh melalui cara konvensional dan cara inovatif.

Cara konvensional antara lain: 1) Membangun gedung sekolah seperti SD inpres dan atau ruangan belajar; dan 2) Menggunakan gedung sekolah untuk *double shift* (sistem bergantian pagi dan sore). Sehubungan dengan itu yang perlu digalakkan, utamanya untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya.

Cara Inovatif antara lain, Sistem pamong (pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru) atau in-pact sistem, sistem tersebut dirintis di solo dan didiseminasikan ke beberapa provinsi dengan kriteria: 1) SD kecil pada daerah terpencil; 2) Sistem guru kunjung; 3) SMP terbuka; 4) Kejar paket A dan b; dan 5) Belajar jarak jauh, seperti di universitas terbuka.¹⁷⁹

¹⁷⁹ *Ibid.*, hal. 231

2. Solusi Masalah Mutu, Efisiensi dan Relevansi Pendidikan¹⁸⁰

Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan menysasar pada perbaikan kualitas komponen pendidikan serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik, dan menghasilkan hasil pendidikan.

Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan non fisik, personalia, dan manajemen. Sebagai berikut: a) Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi; b) Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut; c) Penyempurnaan kurikulum; d) Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar; e) Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran; f) Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran; dan g) Kegiatan pengendalian mutu.¹⁸¹

¹⁸⁰ Mustofa Rembagy, *Pendidikan Trasformatif*, Yogyakarta:Teras, 2010), hal. 222.

¹⁸¹ *Ibid.*, hal. 233-234

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Berkembangnya Masalah Pendidikan

Permasalahan pokok pendidikan sebagaimana telah diutarakan di atas merupakan masalah pembangunan mikro, yaitu masalah-masalah yang berlangsung di dalam sistem pendidikan sendiri. Masalah mikro tersebut berkaitan dengan masalah makro pembangunan, yaitu masalah di luar sistem pendidikan, sehingga harus diperhitungkan dalam memecahkan masalah mikro pendidikan. Masalah makro ini meliputi masalah perkembangan internasional, masalah demografi, masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta masalah perkembangan regional. Masalah-masalah makro yang merupakan faktor-faktor yang memengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, yaitu:¹⁸²

1. Perkembangan Iptek dan Seni

Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan IPTEK. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sebagai contoh hubungan antara pendidikan dan IPTEK, misalnya sering suatu teknologi baru yang digunakan suatu

¹⁸² Zamroni, 2001. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing), hal. 49-50

proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru lantaran perubahan persyaratan kerja, dan mungkin juga penguraian jumlah tenaga kerja atau jam kerja, kebutuhan bahan-bahan baru, sistem pelayanan baru, sampai pada berkembangnya gaya hidup baru, kondisi tersebut minimal bisa memengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya, bahkan mungkin rumusan baru tunjangan pendidikan, otomatis juga sarana-sarana penunjangnya seperti sarana laboratorium dan ketenangan.

Semua perubahan tersebut tentu juga membawa masalah dalam skala nasional yang tidak sedikit memakan biaya. Contoh di atas memberikan gambaran pengaruh tidak langsung IPTEK terhadap sistem pendidikan. Di samping pengaruh tidak langsung juga banyak pengaruh yang langsung dalam sistem pendidikan dalam berbagai bentuk macam inovasi atau pembaruan dengan aksentuasi tujuan yang bermacam-macam pula. Ada yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan guru dan gedung sekolah seperti sistem Pamong dan SMP terbuka, pengadaan guru relatif cepat seperti dengan program diploma, perlindungan terhadap profesi guru seperti program akta mengajar. Hampir setiap inovasi mengundang masalah. *Pertama*, karena belum ada jaminan bahwa inovasi itu pasti membawa hasil; *Kedua*, pada dasarnya orang merasa ragu dan gusar jika menghadapi hal baru. Masalahnya ialah

bagaimana cara memperkenalkan suatu inovasi agar orang menerimanya. Setiap inovasi mengandung dua aspek yaitu aspek konsepsional (memuat ide, cita-cita, dan prinsip-prinsip) dan aspek struktur operasional (teknik pelaksanaannya).

Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia, secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Melalui kesenian manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi (mencipta) yang bersifat orisinal (bukan tiruan) dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Di lihat dari segi tujuan pendidikan yaitu terbentuknya manusia seutuhnya. Aktivitas kesenian mempunyai andil yang besar karena dapat mengisi pengembangan dominan afektif khususnya emosi yang positif dan konstruktif serta keterampilan di samping domain kognitif yang sudah digarap melalui program/bidang studi yang lain. Di lihat dari segi lapangan kerja, dewasa ini dunia seni dengan segenap cabangnya telah mengalami perkembangan pesat dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat.¹⁸³

2. Laju Pertumbuhan Penduduk.

Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu: a) Pertambahan Penduduk; dan b) Penyebaran Penduduk. Dengan bertambahnya jumlah

¹⁸³ Sardjan Kadir dan Umar Ma'sum, 1982. *Pendidikan di Negara Sedang Berkembang*, (Surabaya: Usaha Nasional), hal. 191-192

penduduk maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan beserta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah, yang berarti bahwa beban pembangunan nasional menjadi bertambah.

Pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya usia rata-rata dan penurunan angka kematian, mengakibatkan berubahnya struktur kependudukan, yaitu proporsi penduduk usia sekolah dasar menurun, sedangkan proporsi penduduk usia sekolah lanjutan, angkatan kerja, dan penduduk usia tua meningkat berkat kemajuan bidang gizi dan kesehatan.

Dengan demikian terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjutan cenderung lebih meningkat dibanding dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar. Sebagai akibat lanjutan, permintaan untuk lanjutan keperguruan tinggi juga meningkat, khusus untuk penduduk usia tua yang jumlahnya meningkat perlu disediakan pendidikan non formal.

Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah yang padat penduduk, terutama di kota-kota besar dan ada pula daerah yang penduduknya sedikit yaitu daerah pedalaman khususnya di daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan dan di pulau-pulau. Sebaran penduduk seperti digambarkan itu menimbulkan kesulitan dalam

penyediaan sarana pendidikan. Sebagai contoh adalah dibangunnya SD kecil untuk melayani kebutuhan akan pendidikan di daerah terpencil pada pelita V, di samping SD yang reguler. Belum lagi kesulitan dalam hal penyediaan dan penempatan guru.¹⁸⁴

3. Aspirasi Masyarakat

Dua dasa warsa terakhir ini aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan, hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan, kesemuanya ini memengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Pendidikan dianggap memberi jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Gejala yang timbul ialah membanjirnya pelamar pada sekolah-sekolah. Arus pelajar menjadi meningkat. Di kota-kota, di samping pendidikan formal mulai bermunculan beraneka ragam pendidikan non formal.

Beberapa hal yang tidak dikehendaki antara lain ialah seleksi penerimaan siswa pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi kurang objektif, jumlah murid dan siswa perkelas melebihi yang semestinya, jumlah kelas setiap sekolah membengkak, diadakannya kesempatan belajar bergilir pagi dan sore dengan pengurangan jam belajar, kurang sarana belajar, kekurangan guru, dan seterusnya.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hal. 192-193

4. Keterbelakangan Budaya dan Sarana Kehidupan.

Keterbelakangan budaya adalah istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat (yang menganggap dirinya sudah maju) kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaannya pasti dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik. Sesungguhnya tidak ada kebudayaan yang secara mutlak statis, apalagi mandeg, tidak mengalami perubahan. Sekurangnya bagian unsur-unsurnya yang berubah jika tidak seluruhnya secara utuh.

Perubahan kebudayaan terjadi karena ada penemuan baru dari luar maupun dari dalam lingkungan masyarakat sendiri. Kebudayaan baru itu baik bersifat material seperti peralatan-peralatan pertanian, rumah tangga, transportasi, telekomunikasi, dan yang bersifat non material seperti paham atau konsep baru tentang keluarga berencana, budaya menabung, penghargaan terhadap waktu, dan lain-lain.

Keterbelakangan budaya terjadi karena: a) Letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat (misal terpencil); b) Penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendik masyarakat; c) Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut.

Sehubungan dengan faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya umumnya dialami oleh: a) Masyarakat daerah terpencil; b) Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis; dan c) Masyarakat yang kurang terdidik. Masalahnya ialah bahwa kelompok masyarakat yang terbelakang budayanya tidak ikut berperan serta dalam pembangunan sebab mereka kurang memiliki dorongan untuk maju. Jadi inti permasalahannya ialah menyadarkan mereka akan ketertinggalannya, dan bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan, dan bagaimana sistem pendidikan dapat melibatkan mereka. Jika sistem pendidikan dapat menggapai masyarakat terbelakang kebudayaannya berarti melibatkan mereka untuk berperan serta dalam pembangunan.¹⁸⁵

Penutup

Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Pendidikan adalah suatu keseluruhan karya insani yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam membantu

¹⁸⁵ *Ibid.*, hal. 194-195

terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sehingga mencapai kualitas hidup yang diharapkan.

Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia memiliki beberapa landasan yang digunakan yaitu: 1) Landasan Filosofis; 2) Landasan sosiologis; 3) Landasan Kultural; 4) Landasan Psikologis; 5) Landasan Ilmiah dan Teknologis; 6) Landasan Yuridis; dan 7) Landasan Religius.

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran. Pada umumnya hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu: 1) Rendahnya sarana fisik; 2) Rendahnya kualitas guru; 3) Rendahnya kesejahteraan guru; 4) Rendahnya prestasi siswa; 5) Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan; 6) Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan; dan 7) Mahalnya biaya pendidikan.

Banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, langkah-langkah ditempuh melalui cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional antara lain: 1) Membangun gedung sekolah seperti SD inpres dan atau ruangan belajar; dan 2) Menggunakan gedung sekolah untuk *double shift* (sistem bergantian pagi dan sore).

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Berkembangnya Masalah Pendidikan adalah: 1) Perkembangan Iptek Dan Seni; 2) Laju Pertumbuhan Penduduk; 3) Aspirasi Masyarakat; dan 4) Keterbelakangan Budaya serta Sarana Kehidupan.

Referensi:

- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ihsan, Fuad. 2003. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kadir, Sardjan dan Umar Ma'sum. 1982. *Pendidikan di Negara Sedang Berkembang*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mulyasa. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pidarta, Made. 2007. *Landasan Pendidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: RINEKA CIPTA.
- Rembagy, Mustofa. 2010. *Pendidikan Transformatif*. Yogyakarta: Teras.
- Rochaety, Eti, dkk. 2006. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syafaruddin. Tt. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tirtarahardja, Umar dan La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Zamroni. 2001. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

**SISTEM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ISLAM**

(Fakta Tantangan dan Arah Baru)

Oleh: Muhammad Saiful Amin dan Triyono

Abstract

As an agent of civilization and social change, Islamic education in an atmosphere of modernization and globalization demanded to play a role in a dynamic and proactive. Its presence is expected to contribute meaningful and positive change for the improvement and advancement of the Muslim civilization, both on theoretical and practical intellectual terrain. Islamic education is not merely a process of transformation of moral values to shield themselves from negative access globalization and modernization. But the most urgent is how the moral values that have been inculcated through Islamic education is able to take an active role as a generator that has a liberatory power of social pressure and the crush of cultural backwardness, ignorance, economic and poverty in the midst of rapid social mobility. Islamic education is education that is not limited by the institutional environment of Islam or by the

study of certain sciences, and based on purely Islamic experience. Yet it reaches all aspects of the knowledge, experience, and aspirations of the Muslim community. So the basic view that became the starting point of science PAI is the theoretical-practical aspects in all fields of science related to existing problems and that will exist in society. Problems in society continue to grow without stagnation. Therefore, PAI as an anticipative solution to prepare not only morally but the spirit of struggle to compete to develop science. Because modern times now want the dynamics of life to flow very swiftly.

Keyword: *Islamic Education, Islamic educational challenges, new direction*

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan warisan peradaban Islam dan sekaligus aset bagi pembangunan pendidikan nasional. Sebagai warisan, pendidikan Islam merupakan amanat sejarah untuk dipelihara dan dikembangkan oleh umat Islam dari masa ke masa. Sedangkan sebagai aset, pendidikan Islam yang tersebar di berbagai wilayah ini membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menata dan mengelolanya, sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Dalam kedua perspektif di atas, pendidikan Islam di Indonesia

selalu menjadi lahan pengabdian kaum muslimin dan sekaligus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya, Menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma Islam. Pengertian pendidikan Islam terdiri dari *tarbiyah* (pemeliharaan, asuhan), *ta'lim* (pengajaran), dan *ta'dib* (pembinaan budi pekerti). Hubungan ketiganya itulah yang merupakan pendidikan Islam, baik formal maupun non formal. Pendidikan hendaklah ditujukan ke arah tercapainya keserasian dan keseimbangan pertumbuhan pribadi yang utuh lewat berbagai latihan yang menyangkut kejiwaan, intelektual, akal, perasaan dan indra.

Inti pendidikan Islam adalah motivasi keimanan kedalam pribadi muslim secara utuh untuk menjadi *insan kamil*. Al-Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber nilai pendidikan Islam, sebagai media untuk merealisasikan fungsi muslim *khalifatullah fil ardhi*.

Proses pendidikan yang berakar dari kebudayaan, berbeda dengan praksis pendidikan yang terjadi dewasa ini yang cenderung mengalienasikan proses pendidikan dari kebudayaan. Kita memerlukan suatu perubahan paradigma (*paradigma shift*) dari pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat

Indonesia. Cita-cita era reformasi tidak lain ialah membangun suatu masyarakat madani Indonesia. Oleh karena itu, arah perubahan paradigma baru pendidikan Islam diarahkan untuk terbentuknya masyarakat madani Indonesia tersebut.

Suatu usaha pembaharuan pendidikan hanya bisa terarah dengan mantap apabila didasarkan pada konsep dasar filsafat dan teori pendidikan yang mantap. Filsafat pendidikan yang mantap hanya bisa dikembangkan di atas dasar asumsi-asumsi dasar yang kokoh dan jelas tentang manusia (hakekat) kejadiannya, potensi-potensi bawaannya, tujuan hidup dan misinya di dunia ini baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, hubungan dengan lingkungan dan alam semesta dan akhirnya hubungan dengan Maha Pencipta. Teori pendidikan yang mantap hanya dapat dikembangkan atas dasar pertemuan antara penerapan atau pendekatan filsafat dan pendekatan empiris. Sehubungan dengan itu konsep dasar pembaharuan pendidikan Islam adalah perumusan konsep filsafat dan teoritis pendidikan yang didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tentang manusia dan hubungannya dengan lingkungan dan menurut ajaran Islam.

Masalah pendidikan Islam di Indonesia, jika didiskusikan, secara garis besar terbagi ke dalam dua tingkatan, yaitu makro dan mikro. Pada level pertama, pendidikan Islam bersentuhan dengan sistem pendidikan nasional dan faktor-

faktor eksternal lain. Sedangkan pada level kedua, pendidikan Islam dihadapkan kepada tuntutan proses pendidikan yang efektif sehingga menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi. Berbagai persoalan dari kedua level di atas pada prinsipnya mendorong kepada perubahan arah pendidikan Islam, mengingat tantangan kontemporer dan tantangan masa depan yang berbeda dengan tantangan masa lalu. Dalam tulisan berikut akan dikemukakan secara sekilas latar belakang dan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sebagai wawasan untuk melakukan perubahan, pembahasan tentang fakta tantangan pendidikan Islam kemudian arah baru perkembangan pendidikan Islam sebagai penegasan dari visi dan strategi pembinaan pendidikan Islam di Indonesia.

B. Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam

Berdasarkan pada undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun rumusan tentang Pendidikan Nasional dapat pemakalah kemukakan pendapat Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan Nasional di Indonesia

serta diangkat oleh pemerintah sebagai Bapak pendidikan, menyatakan sebagai berikut:” *Pendidikan nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan peri-kehidupan yang dapat mengangkat derajat Negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia diseluruh dunia*”. Dengan demikian nampak erat sekali hubungan antara seorang nasionalisme dengan keyakinan hidup kebangsaan. Hal ini akan dihayati bagi orang yang menyatakan diri dengan hidup bangsanya dan merasa terikat dengan benang sutera kecintaan yang halus dan suci dengan bangsanya.¹⁸⁶

Karakteristik pendidikan nasional:

1. Dari segi dasar, pendidikan Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Dari segi fungsinya, pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.
3. Dari segi tujuan, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman

¹⁸⁶ <http://tulisan377.blogspot.co.id/2013/05/pendidikan-Islam-dalam-sistem.html>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2018

dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan.

4. Dari kesempatan yang diberikan, dalam pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan
5. Dari segi penyelenggaraan, pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan faktor pendidikan luar sekolah
6. Dari segi tenaga kependidikan, sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa kependidikan meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pemilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar
7. Dari segi kurikulum, sistem pendidikan nasional mengatakan bahwa kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuai dengan lingkungan.¹⁸⁷

Persepsi keilmuan kita saat ini tentang arti pendidikan, mengandung implikasi yang lebih komprehensif ketimbang arti

¹⁸⁷ Djamiludin, 1999. *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaa Setia), hal. 91-94

pengajaran, pendidikan biasa didefinisikan sebagai “usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”. Jelas di sini, pendidikan mencakup proses kegiatan pengajaran di samping bimbingan dan latihan. Lebih diorientasikan ke masa depan yang mana fenomenanya tak lain adalah penerimaan betapa pentingnya penguasaan dan pemanfaatan serta pengendalian kemajuan iptek bagi pembangunan bangsa.¹⁸⁸

Sedangkan tentang batasan Pendidikan agama lebih ditekankan pada proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan ke dalam diri anak didik. Mengingat pendidikan agama pada hakikatnya bertujuan membentuk pribadi yang beriman dan bertaqwa sebagai elan vitalnya kehidupan lahiriah dan bathiniyah manusia Indonesia seutuhnya. Jika dengan pengertian tersebut, proses kependidikan agama menanamkan atau mempribadikan tata nilai keagamaan. Dalam hal ini Islam yang mengacu kepada keimanan dan ketaqwaan (sebagai pondasi dasar yang tak tampak atau rahasia) yang berdaya dorong memotivasi proses kegiatan perilaku yang tampak, yang mewujudkan dalam *akhlaqul karimah* di bidang kehidupan

¹⁸⁸ Muzayyin Arifin, 2003. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), hal. 205

termasuk iptek. Di sisi lain dan antara kedua sisi tersebut senantiasa saling berinteraksi.¹⁸⁹

Kajian historis seperti yang diungkapkan terdahulu bahwa pendidikan Islam di Indonesia, telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pendidikan itu pada tahap awal terlaksana atas adanya kontrak antara pedagang atau mubaligh dengan masyarakat sekitar, bentuknya lebih mengarah kepada pendidikan informal. Setelah berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia maka pendidikan Islam tersebut berada di bawah tanggung jawab kerajaan Islam. Dan pendidikan tidak hanya berlangsung dilanggar-langgar atau masjid, tetapi ada yang dilaksanakan di lembaga pendidikan pesantren.¹⁹⁰

Masuknya kaum penjajah barat, memisahkan pendidikan Islam, dengan pendidikan Barat. Pendidikan Barat berada pada jalur binaan pemerintah dengan fasilitas yang memadai, sedangkan pendidikan Islam terlepas dari tanggung jawab pemerintah kolonial. Kenyataannya membuat ada dua generasi yang berbeda orientasinya: *pertama*, pendidikan Islam yang ketika itu dilaksanakan di pesantren orientasinya keakhiratan; *kedua*, pendidikan Barat orientasinya adalah keduniaan. Sebetulnya perbedaan yang mencolok bukan hanya

¹⁸⁹ *Ibid.*, hal. 205

¹⁹⁰ Haidar Putra Daulay, 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hal. 159-160

terletak kepada perbedaan kedua orientasi itu, tetapi lebih dari itu pemerintah kolonial Belanda tidak menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian dari perhatian mereka. Tidak memasukkan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan kolonial Belanda, bukan hanya itu bahkan pendidikan agama pun tidak diberikan di sekolah-sekolah pemerintah.¹⁹¹

Dasar pendidikan yang paling utama adalah Pancasila dan UUD 1945, dasar pendidikan ini secara tidak langsung mengharuskan kita untuk menyelenggarakan proses pendidikan nasional yang konsisten dan secara integralistik menuju ke arah pencapaian tujuan akhir. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas unggul yang berkembang dan tumbuh di atas pola kehidupan yang seimbang antara *lahiriah* dan *bathiniyah*. Jalan menuju tujuan tersebut adalah tidak lain adalah melalui proses pendidikan yang berorientasi kepada hubungan tiga arah yaitu hubungan anak didik dengan Tuhannya, dengan masyarakatnya dan dengan alam sekitarnya.

1. Hubungan dengan Tuhannya menghendaki adanya konsepsi ketuhanan yang telah mapan dan secara pasti dijabarkan dalam bentuk norma-norma *ubudiyah mahdzah* yang wajib ditaati oleh anak didik secara *syar'i*.
2. Hubungan dengan masyarakatnya memerlukan norma-norma dan aturan-aturan yang mengarahkan proses

¹⁹¹ *Ibid.*, hal. 160

hubungan antara sesama manusia bersifat lentur dalam konfigurasi rentangan tata nilainya, tapi tidak melanggar atau merusak prinsip-prinsip dasarnya yang absolut, dalam arti tidak *cultural relativistic*. Seluruh lapangan hidup manusia adalah merupakan arena di mana hubungan sosial dari interpersonal terjadi sepanjang hayat, termasuk lapangan hidup iptek.

3. Hubungan dengan alam sekitarnya menuntut adanya kaidah-kaidah yang mengatur dan mengarahkan kegiatan manusia didik dengan bekal ipteknya dalam penggalian, pemanfaatan, dan pengolahan kekayaan yang menjejalkan kesadaran terhadap bahaya arus balik sanksi alam, akibat pengurasan habis-habisan terhadap kekayaan alam melebihi kapasitas alamiahnya.¹⁹²

Metode sebagai salah satu sarana penting dalam proses pendidikan agama juga harus dikaji dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan perkembangan jiwa anak didik/remaja agar mampu memungkinkan dirinya dalam arena kompetisi kehidupan modern di mana di dalamnya penuh tantangan dan pertentangan nilai-nilai *etik-sekularistik* dan nilai *sosialistik religius* atau nilai-nilai *relativisme cultural* yang berubah-ubah dengan nilai-nilai absolutisme agama yang konstan dan stabil. Metode pendidikan yang hanya menitikberatkan pada

¹⁹² *Ibid.*, hal. 210

kemampuan verbalistik harus diubah menjadi kemampuan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang merentang antara yang paling wajib atau halal sampai kepada hal yang paling terlarang (haram) dalam 5 kategorinya. Metode pendidikan agama yang menggunakan pendekatan kognitif, afektif, dan psikomotorik sendiri yang satu sama lain terpisah berdiri sendiri dalam mengembangkan potensi keagamaan perlu dilakukan modifikasi dengan mengintegrasikan ketiga-tiganya ke dalam satu pola kemampuan mengamalkan dalam perilaku yang mengacu kepada kebutuhan pembangunan masyarakatnya.¹⁹³

Pendidikan agama selain harus menginternalisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai keagamaan yang berpusat pada kemampuan efektif emosional, sehingga sumber kekuatan keimanan dan ketuhanan bermukim di dada (di hati), Pendidikan agama juga harus dapat menggerakkan intelektualitas yang berpusat di dalam rasio (di kepala) sehingga mampu mengembangkan kemampuan kognitif untuk menggali kebenaran adanya Tuhan beserta ajaran-ajarannya dari kandungan ciptaan-Nya yang terjabar dalam fenomena alamiah (*kauniah*). Dari kedua pusat kemampuan inilah, manusia didik dapat mencapai *makrifat* kepada Allah Swt dan

¹⁹³ M Arifin, 1995. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 88

atas kedua pusat kemampuan tersebut terjadi proses interaktif yang seimbang menuju ke arah terbentuknya perilaku lahiriah yang mengacu kepada orientasi kehidupan yang *hasanah dunia ukhrawi*.

Metode yang diperlukan untuk mendorong kedua kemampuan tersebut berkembang adalah metode yang bersifat motivatif dan persuasif terhadap minat dan perhatian manusia didik untuk memikirkan (merefleksikan) dan merasakan makna-makna yang terkandung dalam gejala kauniah sebagai ciptaan Allah SWT. Minat dan perhatian tersebut dapat ditumbuhkan melalui proses dialogis antara manusia didik dengan pendidik agama, bukan melalui metode verbalistik (menghafal bahan pelajaran) atau metode pidato, ceramah seperti yang masih dipraktikkan oleh kebanyakan guru agama di dunia Islam sekarang.

Untuk mengembangkan pikiran dan perasaan manusia didik dalam proses kependidikan agama itu, perlu didesain model kurikulum yang dinamis dalam substansi/materi, menggerakkan pendidik dan manusia didik yang secara politik-politiknya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Subtansi/materi pelajaran lebih dipusatkan pada permasalahan kehidupan sosio-kultural masa kini yang perspektif ke arah masa depan, yang mendorong minat dan

perhatian manusia didik untuk mengkonsepkan tujuan dan nilai-nilainya yang inheren dengan tuntunan Allah.

2. Posisi pendidikan, harus mampu menciptakan situasi komunitas yang dialogis yang mengandung interdependency antara dirinya dengan manusia didik.
3. Manusia didik dalam proses belajar-mengajar aktif melakukan komunikasi yang dialogis dengan pendidik, teman sebaya dan alam sekitarnya.

Model kurikulum yang diuraikan secara singkat di atas memang memerlukan formulasi yang kritis terhadap kurikulum pendidikan agama yang telah ada sekarang yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan PPSI yang berorientasi kepada dan efisiensi dan efektifitas belajar mengajar.¹⁹⁴

C. Tantangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi

Pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia jangka panjang dan mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia dan bekal hidup di akhirat kelak. Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang pada hakikatnya berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta memungkinkan

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal. 137-138.

para warganya mengembangkan diri baik aspek jasmaniyah maupun rohaniyah. Pendidikan itu bertugas mempersiapkan generasi anak-anak bangsa sejak kecil melalui berbagai lembaga pendidikan agar mampu menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya di kemudian hari sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Namun pendidikan anak dibidang ilmu dan teknologi, perlu diimbangi dengan pendidikan agama, sebagai alat kendali yang menentukan arah dan kehidupan mereka dalam menentukan harkat dan martabat mereka sepanjang masa secara utuh, seimbang, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat.

Isu penting dalam “pendidikan Islam” di era global sekarang muncul sejalan dengan isu masyarakat yang sedang dan terus berubah. Di antaranya timbul tuntunan masyarakat di era modern dan zaman teknologi canggih ini terhadap penguatan sistem pendidikan. Semua sistem pendidikan dituntut harus lebih maju dan dapat mengakomodasikan kebutuhan masyarakat modern, tidak saja tuntutan terhadap peningkatan kualitas kurikulum tetapi juga tuntutan dalam kemajuan memfasilitasi pendidik, peserta didik, manajemen, sarana dan prasarana pendidikan dsb. Penyertaan teknologi canggih sudah menjadi kemestian, agar dapat mengikuti perkembangan. Sementara lingkungan pendidikan (keluarga, masyarakat dan sekolah) sering kalah cepat berubah dibanding perubahan global yang demikian cepat dan menantang. Kalau

tantangan itu tidak bisa dirubah menjadi peluang justru berbalik menjadi hambatan karena terjebak dengan konflik-konflik dan pengaruh-pengaruh negatif global dan teknologi canggih mengambil bentuk dalam kehidupan termasuk di lingkungan sekolah.

Globalisasi sebagai lingkungan strategis pendidikan Islam, isu pentingnya masih didominasi triple-t (3-t) era global yakni telekomunikasi, transportasi dan *tourism*. Isu lain tantangan dan peluang era global terhadap pendidikan, dapat dilihat dari perspektif analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Treaths*). Sebenarnya kemajuan yang dibawa triple-t globalisasi yang berbasis ilmu, informasi dan teknologi modern tadi sebenarnya menantang untuk maju baik kemajuan di lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekolah. Namun ketika tantangan itu tidak bisa dirubah menjadi peluang misalnya memajukan sistem pendidikan (kurikulum, pendidik, peserta didik, manajemen, sarana dan prasarana, lingkungan pendidikan dll), maka ketika itu pula tantangan berubah menjadi kendala, hambatan bahkan menjadi ancaman.

Tantangan globalisasi merupakan suatu kondisi kekinian sebagai akibat dari modernisasi. Kondisi tersebut harus dihadapi dan dilalui agar tercapai suatu keberhasilan. Tantangan tidak harus dimaknai sebagai sesuatu yang membuat

sulit, atau kadang menghambat sesuatu yang ingin dicapai, tetapi tantangan adalah penggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah.

Mastuhu mengemukakan, beberapa tantangan yang dihadapi dunia pendidikan masa kini, yaitu globalisasi, kompleksitas, turbulence, dinamika, akselerasi, keberlanjutan dari yang kuno ke yang modern, koneksitas, konvergensi, konsolidasi, rasionalisme, paradoks global, dan kekuatan pemikiran.¹⁹⁵

Selanjutnya, Rahim mengemukakan bahwa secara eksternal masa depan pendidikan Islam dipengaruhi oleh tiga isu besar, yaitu globalisasi, demokratisasi, dan liberalisme Islam.¹⁹⁶ Daulay menyebut globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dekadensi moral sebagai tantangan pendidikan Islam masa kini dan masa depan.¹⁹⁷ Sedangkan Wahid mengemukakan, tantangan pendidikan Islam yang harus dihadapi di era global ini adalah kebodohan, kebobrokan moral, dan hilangnya karakter muslim.¹⁹⁸

¹⁹⁵ Mastuhu, 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hal. 275

¹⁹⁶ Husni Rahim, 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hal. 14

¹⁹⁷ Haidar Putra Daulay, 2004. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media), hal. 139

¹⁹⁸ Marzuki Wahid, 2011. *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi*, (Bandung: Pustaka Hidayah), hal. 60

Keempat pakar di atas berbeda dalam mengidentifikasi tantangan pendidikan Islam karena berbeda sudut pandang yang digunakan. Mastuhu melihatnya dalam perspektif perubahan sosial, Rahim mengamati menurut tinjauan politik, Daulay melihatnya dalam sudut pandang perkembangan iptek, dan Wahid melihatnya dari sudut pandang etika.

Menurut Zubaedi,¹⁹⁹ ketika globalisasi dihadapkan dengan pendidikan Islam, maka muncul dua implikasi sekaligus, yakni peluang dan ancaman. Sebagai peluang, globalisasi di satu sisi akan memudahkan pendidikan Islam untuk mengakses berbagai informasi secara cepat, juga memudahkan pendidikan Islam untuk menyebarkan produk-produk keilmuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya sebagai ancaman, ternyata globalisasi tidak hanya memengaruhi tatanan kehidupan pada tataran makro, tetapi juga mengubah tata kehidupan pada level mikro, yaitu terhadap ikatan kehidupan sosial masyarakat. Globalisasi memicu fenomena disintegrasi sosial, hilang nilai-nilai tradisi, adat-istiadat, sopan santun, dan penyimpangan sosial lainnya.

Merujuk kepada berbagai pendapat di atas, penulis memilah dan merumuskan tiga tantangan utama untuk dibahas.

¹⁹⁹ Zubaedi, 2012. *Isu-Isu Baru dalam Diskursus Filsafat Pendidikan Islam dan Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 54

Ketiga tantangan ini dianggap memiliki pengaruh paling krusial terhadap pendidikan Islam. Adapun tantangan yang lainnya adalah implikasi yang lahir dari adanya ketiga tantangan utama tersebut.

1. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pendidikan Islam saat ini sedang ditantang konstrubusinya terhadap pembentukan peradaban dan budaya modern yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Pada dimensi ini, pendidikan Islam mengalami kemunduran fungsi (degradasi fungsional) karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada aspek moral spiritual. Terdapat banyak pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan Islam tidak terlalu fokus memprioritaskan aspek yang bersifat praktis dan pragmatis, seperti penguasaan teknologi. Akibatnya, pendidikan Islam tidak mampu bersaing pada level kebudayaan di tingkat global.

Secara makro kondisi pendidikan Islam saat ini sudah ketinggalan zaman. Tertinggal karena kalah berpacu dengan perkembangan dan perubahan sosial budaya. Tertinggal sebab alumni yang dihasilkan kalah bersaing dalam penguasaan ipteks. Ipteks dengan beragam kemajuan yang dibawanya bersifat fasilitatif terhadap kehidupan manusia. Artinya, ipteks

memberi fasilitas kemudahan bagi manusia, tetapi juga dapat merugikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam memandang perkembangan ipteks sebagai tantangan yang harus dihadapi dan dikuasai, sehingga generasi muslim tidak tertinggal oleh kebudayaan yang berkembang. Pada konteks ini ada dua hal yang penting untuk dipikirkan, yaitu:

- a. bagaimana supaya perkembangan ipteks tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam;
- b. bagaimana pendidikan Islam dapat berkontribusi bagi kemajuan ipteks di masa depan.

2. Demokratisasi

Demokratisasi merupakan isu lain yang memengaruhi pendidikan Islam Indonesia. Dede Rosyada²⁰⁰ menjelaskan, bahwa tuntutan demokratisasi pada awalnya ditujukan pada sistem politik negara sebagai antitesis terhadap sistem politik yang otoriter. Selanjutnya perkembangan tuntutan ini mengarah kepada sistem pengelolaan berbagai bidang termasuk bidang pendidikan.

²⁰⁰ Dede Rosyada, 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana).

Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang menghargai akan potensi individu. Artinya, bahwa setiap bentuk homogenisasi masyarakat adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup demokrasi. Sehingga, menurut Tilaar²⁰¹, dalam bidang pendidikan semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, juga memiliki kewajiban yang sama dalam membangun pendidikan nasional yang berkualitas. Demokratisasi pendidikan membuka ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam pendidikan, walaupun di satu sisi ini berpotensi melahirkan komersialisasi pendidikan, terutama oleh kelompok pengusaha pendidikan yang berusaha meraup keuntungan melalui bisnis pendidikan. Demokratisasi pendidikan Islam menghendaki sistem pendidikan yang bersifat sentralistik, seragam, dan dependen, untuk beralih mengembangkan sistem pendidikan yang lebih otonom, beragam, dan independen.

3. Dekadensi moral

Revolusi teknologi berakibat pada pergeseran nilai dan norma budaya. Pada lazimnya, nilai-nilai budaya dari pihak yang lebih dominan dalam penguasaan ipteks akan cenderung berposisi dominan pula dalam interaksi kultural yang terjadi.

²⁰¹ HAR Tilaar, 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. (Magelang: Tera Indonesia).

Dalam konteks ini, Hasbi Indra²⁰² menjelaskan bahwa budaya Barat telah memperlihatkan superioritasnya terhadap budaya Islam. Produk teknologi seperti TV, parabola, telepon, VCD, DVD, internet, dan lain-lain dapat membuka hubungan dengan dunia luar sehingga wawasan masyarakat terbuka. Namun, lewat media tersebut dapat pula disaksikan pornografi, film-film, sinetron yang menawarkan gaya hidup bebas dan juga kekerasan, yang secara moral bertentangan dengan nilai Islam.

Berdasarkan uraian di atas, jelas tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan dalam segala bentuk, baik bersifat personal maupun global bisa terjadi dalam hitungan waktu yang relatif sangat singkat. Hal ini merupakan tantangan yang mutlak dijawab oleh pendidikan Islam melalui strategi yang tepat.

Menghadapi tantangan globalisasi seperti yang dikemukakan di atas, pendidikan Islam perlu melakukan langkah-langkah strategis dengan membenahi beberapa persoalan internal. Persoalan internal yang dimaksud adalah: (1) persoalan dikotomi pendidikan; (2) tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam; (3) persoalan kurikulum atau materi. Ketiga persoalan tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain.

a. Menyelesaikan persoalan dikotomi

²⁰² Hasbi Indra, 2005. *Pendidikan Islam Melawan Globalisasi*, Cet. II (Jakarta: Rida Mulia), hal. 72

Persoalan dikotomi ilmu agama dan ilmu umum melahirkan dualisme pendidikan, yaitu pendidikan Islam dan pendidikan umum. Dikotomi dan dualisme merupakan persoalan lama yang belum terselesaikan sampai sekarang. Seiring dengan itu berbagai istilah pun muncul untuk membenarkan pandangan dikotomis tersebut. Misalnya, adanya fakultas umum dan fakultas agama, sekolah umum dan sekolah agama. Dikotomi itu menghasilkan kesan bahwa pendidikan agama berjalan tanpa dukungan ipteks, dan sebaliknya pendidikan umum hadir tanpa sentuhan agama.

Pendidikan Islam harus menuju pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Fazlur Rahman²⁰³ menawarkan satu pendekatan untuk menyelesaikan persoalan dikotomi pendidikan yaitu dengan menerima pendidikan sekuler modern sebagaimana yang berkembang di dunia Barat dan mencoba untuk mengisinya dengan konsep-konsep kunci tertentu dari Islam.

Ahmad Syafi'i Ma'arif²⁰⁴ mengatakan bila konsep dualisme dikotomik berhasil diselesaikan, maka dalam jangka panjang sistem pendidikan Islam akan berubah

²⁰³ Fazlur Rahman, 1985. *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, terj. Ahsin Mohammad, *Islam dan Modernitas*, (Yogyakarta: Pustaka), hal. 160

²⁰⁴ Ahmad Syafi'i Maarif, 1991. "Pemikiran tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia," dalam Muslih Usa, ed., *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), hal. 150

secara keseluruhan, mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Pendidikan Islam melebur secara integratif dengan pendidikan umum. Peleburan bukan hanya dalam bentuk satu departemen saja, tetapi lebur berdasarkan kesamaan rumusan filosofis dan pijakan epistemologisnya.

Upaya integrasi keilmuan di Indonesia dapat dilihat dengan perubahan kelembagaan perguruan tinggi Islam dari insitut menjadi universitas. Pada level madrasah dan pondok pesantren upaya ini diwujudkan dengan memasukkan mata pelajaran umum dalam kurikulum.

b. Revitalisasi tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam perlu mendisain ulang tujuan dan fungsinya. Menurut Azyumardi Azra terdapat beberapa model pendidikan Islam di Indonesia:²⁰⁵

- 1) Pendidikan Islam mengkhususkan diri pada pendidikan keagamaan saja untuk mempersiapkan dan melahirkan ulama-mujtahid yang mampu menjawab persoalan-persoalan aktual atau kontemporer sesuai dengan perubahan zaman.
- 2) Pendidikan Islam yang mengintegrasikan kurikulum dan materi-materi pendidikan umum dan agama, untuk

²⁰⁵ Azyumardi Azra, 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hal. 71-72

mempersiapkan intelektual Islam yang berpikir secara komprehensif, contohnya madrasah.

- 3) Pendidikan Islam meniru model pendidikan sekuler modern dan mengisinya dengan konsep-konsep Islam, contohnya sekolah Islam.
- 4) Pendidikan Islam menolak produk pendidikan Barat. Hal ini berarti harus mendisain model pendidikan yang betul-betul orisinal dari konsep dasar Islam dan sesuai dengan lingkungan sosial-budaya Indonesia.
- 5) Pendidikan agama tidak dilaksanakan di sekolah-sekolah tetapi dilaksanakan di luar sekolah. Artinya, pendidikan agama dilaksanakan di rumah atau lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Model tersebut dapat dipilih untuk diterapkan yang penting sejalan dengan kebutuhan masyarakat muslim. Pada intinya, menurut Nata²⁰⁶, pendidikan Islam harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang dapat berpikir kritis dengan fokus dan tidak hanya sebagai penerima informasi global, tetapi juga harus memberikan bekal kepada peserta didik agar dapat mengolah, menyesuaikan, dan mengembangkan segala hal yang diterima melalui arus

²⁰⁶ Abuddin Nata, 2003. *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bogor: Kencana), hal. 78

informasi tersebut, yakni manusia yang kreatif dan produktif.

c. Reformasi kurikulum atau materi

Materi pendidikan Islam terlalu didominasi masalah-masalah yang bersifat normatif, ritual dan eskatologis. Malik Fajar²⁰⁷ menjelaskan, materi pendidikan Islam disampaikan dengan semangat ortodoksi keagamaan, tanpa ada peluang untuk melakukan telaah secara kritis. Pendidikan Islam tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari, kecuali hanya sedikit aktivitas verbal dan formal yang bersifat ritual.

Berdasarkan pengembangan keilmuan, dari berbagai problem yang muncul di atas, jelas tidak bisa direspon hanya dengan ilmu-ilmu yang selama ini ada di lembaga pendidikan Islam, seperti fiqih, ilmu kalam, tasawuf, aqidah akhlak, dan tarikh. Ilmu-ilmu tersebut perlu kembangkan sehingga mampu menjawab persoalan aktual, misalnya masalah lingkungan hidup, *global warming*, pencemaran limbah beracun, penggundulan hutan, gedung pencakar langit, polusi udara, dan problem sosial, antara lain: banyaknya pengangguran, penegakan hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan sebagainya.

²⁰⁷ A. Malik Fajar, 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan), hal. 5

Dalam konteks ini, materi pendidikan Islam secara garis besar diarahkan pada dua dimensi, yakni: (1) dimensi vertikal berupa ajaran ketaatan kepada Allah Swt. dengan segala bentuk artikulasinya; (2) dimensi horizontal berupa pengembangan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam atau lingkungan sosialnya. Dimensi yang kedua ini dilakukan dengan mengembangkan materi pendidikan yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tiga hal yang dikemukakan di atas merupakan tawaran desain pendidikan Islam yang perlu diupayakan untuk membangun pendidikan Islam yang bermutu di tengah kehidupan global yang kompetitif. Ketiga hal tersebut masih membutuhkan unsur lain sebagai pendukung, seperti sumber daya kependidikan yang berkualitas, pendanaan yang memadai, dan lingkungan sosial yang kondusif.

D. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam

Secara normatif, Islam telah memberikan landasan kuat bagi pelaksanaan pendidikan.

Pertama, Islam menekankan bahwa pendidikan merupakan kewajiban agama di mana proses pembelajaran dan

transmisi ilmu sangat bermakna bagi kehidupan manusia.²⁰⁸ *Kedua*, seluruh rangkaian pelaksanaan pendidikan adalah ibadah kepada Allah.²⁰⁹ Sebagai sebuah ibadah, maka pendidikan merupakan kewajiban individual sekaligus kolektif, *Ketiga*, Islam memberikan derajat tinggi bagi kaum terdidik, sarjana maupun ilmuwan.²¹⁰ *Keempat*, Islam memberikan landasan bahwa pendidikan merupakan aktivitas sepanjang hayat (*long life education*) atau bahkan sebagaimana Hadist Nabi tentang menuntut ilmu dari sejak buaian ibu sampai liang kubur. *Kelima*, konstruksi pendidikan menurut Islam bersifat dialogis, inovatif dan terbuka dalam menerima ilmu pengetahuan baik dari Timur maupun Barat. Itulah sebabnya Nabi Muhammad tidak alergi untuk memerintahkan umatnya menuntut ilmu walau ke negeri Cina.

Namun, pendidikan Islam di era sekarang dihadapkan kepada perubahan yang mendasar, terutama mempersiapkan

²⁰⁸ QS. *Al-Alaq*: 1-5. Perintah ini harus dimaknai seluas-luanya dan sedalam-dalamnya dengan makna perintah untuk melakukan observasi, eskplorasi ilmu, eksperimentasi, kajian, studi, analisis, penelitian, riset, penulisan ilmu secara komprehensif.

²⁰⁹ QS. *Al-Mujadalah*: 11 dan QS. *Nahl*: 43.

²¹⁰ Dalam konteks ini, pelaksanaan pendidikan dikenal oleh para pakar pendidikan tidak hanya pendidikan formal berupa sekolah atau madrasah tetapi ada istilah pendidikan seumur hidup yaitu sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Lebih detailnya lihat dalam Redja Mudyahardjo, 2002. *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 169.

manusia yang nantinya akan berintegrasi dengan masyarakat yang berasal dari berbagai macam latar belakang budaya dan agama serta multi talenta ilmu pengetahuan. Dan yang paling utama adalah membangun moralitas manusia modern dalam menggapai peradaban madani. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari sebuah proses pendidikan Islam tersebut, ada dua hal sebagai “*grand project*” dalam membangun pendidikan Islam yang mampu menjadi tameng era modern.

1. Pendidikan Islam Transformatif

Transformasi dalam bahasa Inggris ialah *transform* yang berartikan merubah bentuk atau rupa, *transformation* merupakan perubahan bentuk atau penjelmaan.²¹¹ Pendidikan berada di tengah-tengah masyarakat yang terus menerus mengalami perubahan. Perubahan pada masyarakat terjadi secara berkesinambungan dan berjalan relatif cepat. Perubahan yang terjadi pada masyarakat lebih cepat dari pada perubahan yang terjadi pada pendidikan, sehingga terjadi gap/kesenjangan, jurang pemisah yang cukup tajam antara masyarakat dan pendidikan. Upaya untuk mempersempit jurang pemisah tersebut, pendidikan harus melakukan perubahan dan pembaharuan. Transformasi

²¹¹ Peter Salim, 1996. *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press), hal. 2099

pendidikan akan berjalan dengan baik dan tepat jika dilakukan secara komprehensif.²¹²

Transformasi pendidikan dimaknai sebagai proses perubahan secara terus-menerus menuju kemajuan. Kata “Kemajuan” ditandai dengan karakter, budaya, dan prestasi. Pendidikan Islam dikatakan maju jika mampu bersaing dengan sekolahan modern. Pada pertengahan tahun 1970-an, lembaga pendidikan Islam pada umumnya relatif jauh tertinggal dari sekolah modern. Pada tahun 1980-an muncul beberapa lembaga pendidikan Islam yang mulai berkembang. Pada tahun 1990-an mulai banyak lembaga pendidikan Islam yang mengalami kemajuan. Kemudian pada tahun 2000-an sudah mulai banyak sekolah Islam yang mampu bersaing dengan sekolah negeri non-Islam.

Pendidikan merupakan sarana paling strategis untuk membesarkan dan mengembangkan warga negara untuk memiliki keadaban, yang merupakan ciri dan paling pokok dari masyarakat madani. Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan sebagai markas penyimpanan kekuatan luar biasa yang memiliki akses ke seluruh aspek kehidupan, memberikan informasi yang paling berharga mengenai pegangan hidup di masa depan di dunia, serta membantu generasi muda atau

²¹² Sutrisno & Suyatno, 2015. *Pendidikan Islam di Era Peradaban Modern*, (Jakarta: Prenada Media Group).

peserta didik dalam mempersiapkan kebutuhan yang esensial untuk menghadapi perubahan.

Transformasi pendidikan memiliki arah dan tujuan keluar dari kemelut dan problematika internal maupun eksternal yang di hadapi oleh pendidikan meskipun demikian dengan transformasi pendidikan pada suatu kompleksitas bukanlah berarti akhir dari segala-galanya karena kehidupan itu dinamis, maka transformasi itu juga terjadi secara *kontinu*. Transformasi pendidikan bisa dianggap berhasil bilamana problematika yang dihadapi dapat dipecahkan secara tuntas, setelah itu berhadapan dengan problem yang lain di Indonesia, beberapa tahun terakhir UGM menduduki peringkat 18 sebagai perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara. Namun pada tahun ini predikat tersebut telah di geser oleh ITB. Itu berarti bahwa kondisi pendidikan selalu berkembang dan *Open ended*.

Pemikiran pembaharuan selama ini belum mampu atau belum dapat sepenuhnya keluar dari idealisasi kejayaan pemikiran Islam masa lampau yang *hegemonik*. Sementara di sisi lain, pendidikan Islam juga “dipaksa” untuk dapat menerima tuntutan perubahan masa kini dengan orientasi yang sangat praktis.²¹³ Katakan saja, dari aspek historis, realisme tersebut acap kali menimbulkan dualisme dalam polarisasi pemikiran sistem pendidikan Islam, sehingga agenda pembaharuan yang digulirkan

²¹³ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif.....*, hal. 5

seakan berfungsi hanya sekedar tambal-sulam, kurang terencana dan sistemik, terkesan seadanya saja. Maka tidak mengherankan jika masih saja menemukan kinerja sistem pendidikan Islam yang masih tradisional, karena tetap baju lama (*the old fashion*) sementara di sisi lain menemukan sistem yang materialistik-sekularistik.²¹⁴ Seperti yang kita alami saat ini pendidikan Islam dihadapkan dengan berbagai persoalan reformasi, globalisasi, teknologi informasi, demokratisasi pendidikan, plural dan multikultural, persoalan gender, persoalan kekerasan dalam pendidikan, persoalan korupsi, terorisme, dan masih banyak lagi, yang menuntut rekonstruksi pemikiran pembaharuan secara serius untuk menghadapi masalah tersebut.

Pendidikan perlu diperbaharui dengan visi baru untuk mewujudkan masyarakat Indonesia baru, yaitu suatu masyarakat madani Indonesia. Tetapi untuk menuju pembentukan masyarakat madani dengan ciri dan karakteristik masyarakat tersebut, diperlukan penataan pendidikan diorientasikan untuk mampu menghasilkan manusia Indonesia yang berpengetahuan (*knowledges*) luas, memiliki keterampilan dan kecakapan (*skill*), *berakhlakul karimah*, memiliki kemampuan spiritual dan moral yang tinggi, taat hukum, demokratis, ber peradaban, moderat,

²¹⁴ Hujair AHAL. Sanaky, 2015. *Pembaharuan pendidikan Islam (Paradigma, Tipologi dan Pemetaan Menuju Masyarakat Madani di Indonesia)*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara).

mandiri (*independent*), bertanggung jawab (*responsible*), profesional, dan reformis. Bila demikian diperlukan kemampuan melakukan perubahan dengan mendesain ulang konsep filosofi yang jelas dan baku, visi dan misinya, tujuan, kurikulum dan materi, proses pendidikan, pengelolaan dan fungsi lembaganya agar dapat memenuhi tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat madani.²¹⁵

Pendidikan memiliki peran sangat strategis dalam mendukung dan bahkan mempercepat pembentukan masyarakat madani. Dengan demikian pendidikan gaya lama yang hanya berorientasi pada aspek intelektual perlu diperbaharui dengan sistem pendidikan yang dapat mengembangkan segenap potensi peserta didik secara optimal. Pendidikan yang diharapkan adalah mampu mengembangkan dan membangun suatu masyarakat *baladun thayibatun warabbun ghofur* (bangsa yang aman, sejahtera, dan ada dalam ampunan Allah) bagi seluruh penghuninya. Hal ini berarti posisi pendidikan merupakan bagian dari proses memasyarakatkan nilai-nilai dengan kebudayaannya yang konkret. Sistem nilai yang ingin diwujudkan tidak lepas dari konfigurasi nilai yang terdapat dalam kebudayaan dan proses pendidikan bagi umat manusia. Fungsi pendidikan merupakan bagian dari proses memasyarakatkan nilai-nilai tersebut sebagai kekuatan utama dalam komunikasi sosial untuk mengimbangi laju

²¹⁵ *Ibid.*, hal. 12

perubahan masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, setiap sumbangsih pemikiran dan upaya pembaharuan pendidikan perlu disambut dengan baik serta apresiasi yang mendalam, agar kondisi pendidikan kita mampu bersaing serta tidak tertinggal jauh oleh pendidikan-pendidikan negara lain.

a. Penerapan Pendidikan Transformatif pada Lembaga Pendidikan

Sekolah Unggul

Sekolah unggul adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (*output*) pendidikannya. Keunggulan dalam keluaran yang dimaksud meliputi kualitas dasar (daya pikir, daya kalbu, dan daya fisik) dan penguasaan ilmu pengetahuan, baik yang lunak (ekonomi, politik, sosiologi, dsb.) maupun yang keras (matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi) termasuk penerapannya yaitu teknologi (konstruksi, manufaktur, komunikasi, dsb.).

Secara umum, sekolah unggul memiliki keunggulan-keunggulan dalam input (siswa dan masukan instrumental), proses belajar mengajar, dan output (hasil belajar) yang ditunjukkan oleh kepemilikan kecerdasan majemuk (*multiple intelligences*). Sperry (1981) membagi kecerdasan majemuk menjadi: 1) otak kiri lebih cenderung berpikir *logic, sequential, linear, analytic, reasoning, explicit*, dan *calculation*; 2) otak

kanan cenderung berpikir *intuition, images, visual, spatial, creative, holistic, colour, dan emotion*.²¹⁶

Warga sekolah memahami, menghayati, dan mempraktekkan sekolah sebagai sistem sehingga hasil kerja sekolah disadari sebagai hasil upaya kolektif warga sekolah. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi sehingga dibutuhkan *teamwork* yang kompak, cerdas, dan dinamis. Sekolah memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap prestasi belajar siswanya, profesionalisasi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi fokus perhatian, proses belajar mengajar yang efektif menjadi fokus perhatian sekolah, kepemimpinan dan manajemen sekolah sangat professional, sekolah mempertanggungjawabkan hasil belajar kepada publik (akuntabilitas), sekolah memiliki komunitas belajar yang kuat, jaminan mutu merupakan komitmen warga sekolah terhadap publik yang ditunjukkan oleh kualitas desain, pelaksanaan, dan evaluasi rencana pengembangan sekolah (RPS), Sekolah menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan (partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dsb.), Visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah dimiliki bersama oleh warga sekolah, sekolah menerapkan organisasi belajar .

²¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 101

Sekolah unggul bertujuan untuk menghasilkan keluaran pendidikan yang memiliki keunggulan-keunggulan dalam: 1) kualitas dasar yang meliputi daya pikir, daya kalbu, dan daya pisik; 2) kualitas instrumental yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan (lunak dan keras termasuk terapannya yaitu teknologi, kemampuan berkomunikasi, dsb., dan (3) kemampuan bersaing dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain.²¹⁷

Selain itu, sekolah unggul juga ditujukan untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan/kompetensi kunci untuk menghadapi era regionalisasi/globalisasi, yaitu: 1) memiliki kemampuan dasar yang kuat dan luas; 2) mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data dan informasi; 3) mampu mengkomunikasikan ide dan informasi. Pengembangan sekolah unggul harus dilakukan secara kolektif sehingga perlu melibatkan *stakeholders* dalam pendidikan, baik politikus, birokrat (terutama dinas pendidikan kabupaten/kota), akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, orangtua siswa, dsb.

b. Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah

Kepemimpinan merupakan proses di mana seorang individu memengaruhi sekelompok individu untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif,

²¹⁷ *Ibid.*, hal. 122

seorang kepala sekolah harus dapat memengaruhi seluruh warga sekolah yang dipimpinnya melalui cara-cara yang positif untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Secara sederhana kepemimpinan transformasional dapat diartikan sebagai proses untuk merubah dan mentransformasikan individu agar mau berubah dan meningkatkan dirinya, yang didalamnya melibatkan motif dan pemenuhan kebutuhan serta penghargaan terhadap para bawahan.²¹⁸

Terdapat empat faktor untuk menuju kepemimpinan tranformasional, yang dikenal sebutan 4 I, yaitu : *idealized influence*, *inspirational motivation*, *intellectual stimulation*, dan *individual consideration*.

- 1) *Idealized influence*: kepala sekolah merupakan sosok ideal yang dapat dijadikan sebagai panutan bagi guru dan karyawannya, dipercaya, dihormati dan mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan sekolah.
- 2) *Inspirational motivation*: kepala sekolah dapat memotivasi seluruh guru dan karyawannya untuk memiliki komitmen terhadap visi organisasi dan mendukung semangat team dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan di sekolah.
- 3) *Intellectual Stimulation*: kepala sekolah dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi di kalangan guru

²¹⁸ *Ibid.*, hal. 123

dan stafnya dengan mengembangkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah untuk menjadikan sekolah ke arah yang lebih baik.

4) *Individual consideration*: kepala sekolah dapat bertindak sebagai pelatih dan penasihat bagi guru dan stafnya.

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, Northouse (2001),²¹⁹ menyimpulkan bahwa seseorang yang dapat menampilkan kepemimpinan transformasional ternyata dapat lebih menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang efektif dengan hasil kerja yang lebih baik. Oleh karena itu, merupakan hal yang amat menguntungkan jika para kepala sekolah dapat menerapkan kepemimpinan transformasional di sekolahnya.

Karena kepemimpinan transformasional merupakan sebuah rentang yang luas tentang aspek-aspek kepemimpinan, maka untuk bisa menjadi seorang pemimpin transformasional yang efektif membutuhkan suatu proses dan memerlukan usaha sadar dan sungguh-sungguh dari yang bersangkutan. Northouse (2001) memberikan beberapa tips untuk menerapkan kepemimpinan transformasional, yakni sebagai berikut:

1) Berdayakan seluruh bawahan untuk melakukan hal yang terbaik untuk organisasi.

²¹⁹ Syaiful Sagala, 2007. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta), hal. 22

- 2) Berusaha menjadi pemimpin yang bisa diteladani yang didasari nilai yang tinggi.
- 3) Dengarkan semua pemikiran bawahan untuk mengembangkan semangat kerja sama.
- 4) Ciptakan visi yang dapat diyakini oleh semua orang dalam organisasi.
- 5) Bertindak sebagai agen perubahan dalam organisasi dengan memberikan contoh. bagaimana menggagas dan melaksanakan suatu perubahan.
- 6) Menolong organisasi dengan cara menolong orang lain untuk berkontribusi terhadap organisasi.

2. Pendidikan Humanistik Islami

Humanisme (kemanusiaan), dalam kamus umum diartikan sebagai “sebuah sistem pemikiran yang berdasarkan pada berbagai nilai, karakteristik, dan tindak tanduk yang dipercaya terbaik bagi manusia, bukannya pada otoritas supernatural manapun”. Definisi paling jelas tentang Humanisme ini dikemukakan oleh Corliss Lamont yang menyatakan bahwa humanisme meyakini bahwa alam merupakan jumlah total dari realitas, bahwa materi-energi dan bukan pikiran yang merupakan bahan pembentuk alam semesta, dan bahwa entitas supernatural sama sekali tidak ada.

Dari definisi humanisme di atas, nampak sekali para humanis menganggap bahwa manusia adalah segala pusat aktivitas dengan meninggalkan peran Tuhan dalam kehidupannya. Hal ini berbeda dengan Islam yang meyakini ada kekuatan lain pada diri manusia yaitu pencipta alam ini.

Dalam Islam, yang dimaksud dengan humanisme adalah memanusiaikan manusia sesuai dengan tugas sebagai khalifah Allah di atas bumi. Dalam menyebutkan manusia ini Al-Qur'an menggunakan empat term yang memiliki arti yang berbeda sesuai dengan konteks yang dimaksud Al-Qur'an, antara lain:

- a. *Basyar* (بشر), digunakan untuk menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk biologis. Sebagaimana tertuang dalam surat Ali Imron ayat 47 yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang telah menjadikan Maryam memiliki anak sementara tidak ada seorangpun yang mempergaulinya.
- b. *Al-Nas* (الناس), untuk menjelaskan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial, seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal.
- c. *Bani Adam* (بنی آدم), untuk menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk rasional, seperti di dalam surat al-Isra' ayat

70 yang menjelaskan bahwa Allah akan memuliakan manusia dan memberikan sarana, prasarana baik di darat maupun di lautan. Ini menunjukkan bahwa manusia berpotensi melalui akalnyanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

- d. *Al-Insan* (الانسان), untuk menjelaskan bahwa manusia itu sebagai makhluk spiritual. Seperti dalam surat Al-Dzariyat ayat 56, yang menjelaskan bahwa manusia dan jin diciptakan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk menyembah kepada-Nya.²²⁰

Istilah “pendidikan humanistik-Islami” mencakup dua konsep pendidikan yang ingin diintegrasikan, yakni pendidikan humanistik dan pendidikan Islam. Dalam pengintegrasian dua konsep pendidikan ini dimaksudkan juga untuk mengurangi kelemahannya. Pendidikan humanistik yang menekankan kemerdekaan individu diintegrasikan dengan pendidikan religius (Islam) agar dapat membangun kehidupan sosial yang menjamin kemerdekaan dengan tidak meninggalkan nilai ajaran agama. Kemerdekaan individu dalam pendidikan humanistik-Islami dibatasi oleh nilai ajaran Islam. Nilai-nilai agama diharapkan menjadi pendorong perwujudan nilai-nilai kemanusiaan. Pemisahan antara kedua konsep tersebut akan

²²⁰ Arbayah, 2013. *Journal Model Pembelajaran Humanistik*, (Dinamika Ilmu Vol 13. No. 2, Desember), hal. 214

menyebabkan tidak terwujudnya nilai-nilai humanisme Islam dalam sistem pendidikan.

Dalam Islam, pemikiran pendidikan humanistik bersumber dari misi utama kerasulan Muhammad, yaitu memberikan rahmat dan kebaikan kepada seluruh umat manusia dan alam semesta (Q.S. Saba'/34: 28 dan al-Anbiya'/21: 107). Spirit ayat inilah yang mengilhami pemikiran pendidikan yang dikembangkan menjadi pendidikan humanistik. Pendidikan Islam yang dibangun atas dasar sifat dan karakteristik dan nilai-nilai humanisme disebut pendidikan humanistik-Islami. Pemikiran ini merupakan sebuah hasil interpretasi atau ijtihad para cendekiawan muslim ahli pendidikan tentang upaya mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar humanisme Islam. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara konsep pendidikan Islam dan makna dasar humanisme (humanitas) yang berarti pendidikan bagi manusia.

Pendidikan humanistik dalam Islam didefinisikan oleh Rahman sebagai “proses pendidikan yang lebih memperhatikan aspek potensi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk religius, *'abdullah* dan *khalifatullah*, serta sebagai individu yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengembangkan

potensi-potensinya”.²²¹ Pendidikan humanistik-Islami akan merealisasikan tujuan humanisme Islam, yaitu keselamatan dan kesempurnaan manusia karena kemuliaannya.²²² Sistem pendidikan ini akan membentuk peserta didik menjadi ‘*abdullah* dan *khalifatullah* sebagai manusia mulia. Pemikiran pendidikan humanistik memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Allah dengan fitrah-fitrah tertentu. Hal ini ditandai dengan kepemilikan hak hidup dan hak asasi manusia.

Pengembangan potensi ini hanya mungkin terwujud bila pelaksanaan pendidikan didasarkan pada prinsip humanisme, yaitu terlindunginya nilai-nilai hidup, harkat, dan martabat manusia. Perlindungan ini berfungsi untuk menjamin potensi anak didik supaya bisa teraktualisasi secara maksimal. Pendidikan humanistik dalam Islam berupaya memahami kebenaran, kebaikan universal, dan aktualisasi diri lebih jauh ke kehidupan spiritual (dimensi vertikal), di samping memahami realitas dan permasalahan kehidupan manusia (dimensi horizontal) dalam kehidupan bersama.

²²¹ Abdurrahman Mas’ud, 2002. *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media), hal. 135

²²² Bandingkan dengan Ali Syari’ati, *Humanisme: antara Islam dan Mazhab Barat*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hal. 39

Dimensi vertikal ini sejalan dengan pemikiran perenialisme yang menekankan pendidikan sisi rasio (akal) manusia.²²³ Pengembangan akal berfungsi untuk mengontrol nafsu yang mengajak kepada perbuatan jahat. Pandangan ini membawa kepada perbaikan akhlak dan perubahan karakter, di samping perolehan ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan Islam, akhlak lebih dipentingkan daripada ilmu. Pandangan inilah yang menjadi jiwa humanisme Islam. Akan tetapi, dalam membangun kebaikan akhlak itu sering menyebabkan otoritas guru yang berlebihan sehingga mengakibatkan anak terkekang dan tidak bisa kreatif. Pendidikan keagamaan klasik cenderung memiliki tujuan untuk membangun karakter atau akhlak mulia sebagai misi utama diutusny rasul.

Dengan demikian, pendidikan humanistik-Islami adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai humanisme Islam, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Berdasarkan itulah prinsip-prinsip pendidikan humanistik Islami dapat dirumuskan, yaitu:

a. Pendidikan sebagai Proses Humanisasi

Dalam Islam, pendidikan humanistik dimaksudkan sebagai proses pendidikan yang menekankan pengembangan potensi peserta didik supaya teraktualisasi secara optimal sehingga menjadi manusia *rabbani* yang mampu berperan

²²³ Knight, *Issues and Alternatives.....*, hal. 93

sebagai *'abdullah* (hamba Allah) sekaligus sebagai *khalifatullah* (wakil Tuhan) di muka bumi. Sebagai *khalifah*, manusia memiliki keinginan bebas untuk diwujudkan, memiliki kemampuan berfikir dan memahami, imajinasi, kreasi, dan bertindak untuk mengembangkan kehidupannya di dunia. Adapun status *'abdullah* menunjukkan manusia memiliki kesediaan untuk mengabdikan kepada Tuhan dan kerendahan hati terhadap sesama manusia.

Atas dasar itulah, humanisme menjadi bagian integral dari ajaran Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah pendidikan humanis. Di sinilah nampak upaya pendidikan Islam sebagai institusi agama yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai, harkat, dan martabat manusia. Semua itu membawa kedamaian, persamaan, persaudaraan, keadilan, dan pembebasan manusia sehingga terbentuk masyarakat global yang menebarkan rahmat bagi kehidupan (*rahmah li al-'alamin*). Pendidikan humanistik-Islami membawa misi ajaran tersebut.

b. Pendidikan sebagai Proses Liberasi

Tujuan liberasi adalah pembebasan manusia dari kekejaman kemiskinan dan keangkuhan teknologi. Tujuan ini akan menjadikan satu rasa dengan si miskin yang ditindas oleh kekuatan ekonomi raksasa. Pendidikan humanistik-Islami berupaya membebaskan manusia dari

kemiskinan, kebodohan, dan kebutaan spiritual yang menjadi musuh humanisme. Kemiskinan tidak hanya mendorong pengingkaran pemenuhan hidup manusia yang kesejahteraan material, tetapi juga menghambat pemenuhan kebutuhan intelektual dan spiritual. Adapun kebodohan mendorong manusia tidak bisa berpikir kreatif dan kritis dalam memecahkan masalah hidupnya. Sikap fatalistik, menyerah terhadap penderitaan sebagai nasib yang harus diterima, merupakan bentuk kebodohan.

Pendidikan humanistik yang menekankan kemerdekaan individu diintegrasikan dengan pendidikan religius (Islam) agar dapat membangun kehidupan sosial yang menjamin kemerdekaan dengan tidak meninggalkan nilai ajaran agama.²²⁴ Kemerdekaan individu dalam pendidikan humanistik-Islami dibatasi oleh nilai ajaran Islam. Nilai-nilai agama diharapkan menjadi pendorong perwujudan nilai-nilai kemanusiaan. Pemisahan antara kedua konsep tersebut akan menyebabkan tidak terwujudnya nilai-nilai humanisme Islam dalam sistem pendidikan.

c. Pendidikan sebagai Proses Transendensi

Adapun transendensi (menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian) ditujukan untuk menambahkan dimensi

²²⁴ Bandingkan dengan Kuntoro, “*Sketsa Pendidikan Humanis Religius*”, hal. 5.

transendental dalam hidup manusia. Pola hidup hedonis, materialis, dan budaya yang negatif harus dibersihkan dengan mengingat kembali dimensi spiritual yang menjadi fitrah manusia.²²⁵ Pemikiran pendidikan humanistik dalam Islam bertolak dari nilai-nilai spiritual. Pemenuhan kebutuhan manusia seperti aktualisasi diri, harga diri, sosial, keamanan, dan material diletakkan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah.

3. Aplikasi Humanistik dalam Pendidikan di Indonesia

Mengenai aplikasi psikologi humanistik dalam pendidikan, Bagian ini berisi informasi tentang bagaimana para psikologi humanistik berupaya menggabungkan keterampilan dan informasi kognitif dengan segi-segi afektif, nilai-nilai dan perilaku antar pribadi. Sehubungan dengan itu akan dibicarakan tiga macam program, yaitu: *Confluent Education*, *Open Education* dan *Cooperative Learning*.

a. Confluent Education

Cooperative Learning adalah pendidikan yang memadukan atau mempertemukan pengalaman-pengalaman afektif dengan belajar kognitif di dalam kelas. Hal ini merupakan cara yang bagus sekali untuk melibatkan para

²²⁵ Kuntowijoyo, 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, ed. A.E. Priyono (Bandung: Mizan), hal. 289.

siswa secara pribadi di dalam bahan pelajaran. Sebagai contoh misalnya, guru bahasa Indonesia memberikan tugas kepada para siswa untuk membaca sebuah novel, katakanlah misalnya tentang “keberanian”, sebuah novel perang. Melalui tugas itu, siswa-siswa tidak hanya diharapkan memahami isi bacaan tersebut dengan baik tetapi juga memperoleh kesadaran antar pribadi yang lebih baik dengan jalan membahas pengertian-pengertian mereka sendiri mengenai keberanian dan rasa takut.²²⁶

b. *Open Education*

Open Education adalah proses pendidikan terbuka. Menurut Walberg dan Tomas (1972), *Open Education* itu memiliki delapan kriteria, yaitu:

- 1) Kemudahan belajar tersedia, artinya berbagai macam bahan yang diperlukan untuk belajar tersedia, para siswa bergerak bebas di sekitar ruangan, tidak dilarang berbicara, tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan.
- 2) Penuh kasih sayang, hormat, terbuka dan hangat, artinya menggunakan bahan buatan siswa, guru menangani masalah-masalah tingkah laku dengan jalan berkomunikasi secara pribadi dengan siswa yang bersangkutan, tanpa melibatkan kelompok.

²²⁶ Mohammad Ali, 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Bandung: Pedagogiana), hal. 65

- 3) Mendiagnosa peristiwa-pristiwa belajar, artinya siswa-siswa memeriksa pekerjaan mereka sendiri, guru mengamati dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
- 4) Pengajaran, yaitu pengajaran individual, tidak ada tes ataupun buku kerja.
- 5) Penilaian, wujudnya: guru membuat catatan, penilaian secara individual, hanya sedikit sekali diadakan tes formal.
- 6) Mencari kesempatan untuk pertumbuhan profesional, artinya guru menggunakan bantuan orang lain, guru bekerja dengan teman sekerjanya.
- 7) Persepsi guru sendiri, artinya guru mengamati semua siswa untuk memantau kegiatan mereka.
- 8) Asumsi tentang para siswa dan proses belajar, artinya suasana kelas hangat dan ramah, para siswa asyik melakukan sesuatu.

Meskipun pendidikan terbuka memberikan kesempatan kepada para siswa untuk bergerak secara bebas di sekitar ruangan dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri, namun bimbingan guru tetap diperlukan.²²⁷

c. *Cooperative Learning*

Cooperative Learning atau belajar kooperatif (kelompok) merupakan fondasi yang baik untuk

²²⁷ Walberg dan Tomas (1972), *Open Education*.

meningkatkan dorongan berprestasi siswa. Menurut Slavin (1980) *Cooperative Learning* mempunyai tiga karakteristik:

- 1) Siswa bekerja dalam tim-tim belajar yang kecil (4-6 orang anggota), komposisi ini tetap selama berminggu-minggu.
- 2) Siswa didorong untuk saling membantu dalam mempelajari bahan yang bersifat akademik atau dalam melakukan tugas kelompok.
- 3) Siswa diberi imbalan atau hadiah atas dasar prestasi kelompok.²²⁸

4. Kurikulum Humanis

Kurikulum sebagai sebuah rencana, proses dan tujuan harus diarahkan pada kepentingan *stakeholder* dalam hal ini yang akan dibahas adalah guru dan siswa.²²⁹

a. Kurikulum Humanis diarahkan pada Guru.

Guru adalah aspek terpenting dalam sebuah proses pendidikan. Tanpa guru proses pendidikan tidak bisa berjalan, jadi guru adalah tokoh kunci bagi suatu kurikulum. Kurikulum yang diarahkan pada kepentingan dan menjadikan guru sebagai tokoh kunci menjadi syarat utama bagi keberlanjutan organisasi sekolah. Pendidikan yang

²²⁸ Slavin (1980) *Cooperative Learning*.

²²⁹ (Ronald C. Doll) dari (Kamus Webster 1955) *Pengertian Kurikulum Secara Epistemologi dan Secara Terminologi*.

humanis adalah pendidikan yang mampu mengakomodasi semua kepentingan *stakeholder* dalam dunia pendidikan. Inilah pendidikan humanis yang penulis tafsirkan sebagai kurikulum pendidikan yang diarahkan untuk kepentingan semua komponen pendidikan, yang tidak hanya berorientasi pada humanisme siswa tetapi juga pada para guru.

Salah seorang tokoh dan ulama besar Islam Imam al-Ghazali dalam bukunya “*Ihya Ulumuddin*”, mengatakan bahwa antara guru dan murid harus memiliki akhlak, akhlak guru adalah menghargai murid sebagai manusia yang perlu bimbingan dan arahan sedangkan murid menghormati guru untuk memperoleh ilmu dan hikmah.²³⁰

Guru yang baik menurut teori ini adalah: Guru yang memiliki rasa humor, adil, menarik, lebih demokratis, mampu berhubungan dengan siswa dengan mudah dan wajar. Ruang kelas lebih terbuka dan mampu menyesuaikan pada perubahan. Sedangkan guru yang tidak efektif adalah guru yang memiliki rasa humor yang rendah, mudah menjadi tidak sabar, suka melukai perasaan siswa dengan koment yang menyakitkan, bertindak agak otoriter, dan kurang peka terhadap perubahan yang ada.

b. Kurikulum Humanis diarahkan pada Siswa

²³⁰ Imam Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin*, Menghidupkan Ajaran Agama.

Pendapat Freud tentang pendidikan humanis tidak selamanya benar dan juga tidak sepenuhnya salah. Namun kita harus melihat kapan kurikulum pendidikan yang bersifat humanis ini akan diarahkan. Berdasarkan analisa penulis terhadap salah satu bukunya yang berjudul Politik Pendidikan: “Kebudayaan Kekuasaan dan Kebebasan”, terlihat bahwa arus utama pemikirannya diarahkan pada kritiknya terhadap prakek pendidikan yang dilakukan oleh gereja yang tidak memberikan ruang yang representative bagi perkembangan pemikiran keagamaan. Pola pendidikan yang bersifat doktrinasi oleh gereja ini mengundang berbagai kritikan yang tidak hanya datang dari seorang Paulo Freire tetapi juga berbagai tokoh-tokoh lain seperti Erich Fromm dalam bukunya *The Heart of Man*.²³¹

Kebebasan yang diusung dalam pendidikan humanis adalah kebebasan yang bebas nilai. Kebebasan dalam segala aspek kehidupan. Ketika seorang guru menegur siswa malah siswa mengejek dan mengolok-olok sang guru. Dan bahkan yang tragisnya lagi ketika para murid memukul gurunya itu pun dianggap sebagai kebebasan yang wajar. Apakah pendidikan humanis yang seperti inilah yang diharapkan oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika ketimuran?

²³¹ Erich Fromm dalam bukunya *The Heart of Man*.

Hampir semua buku yang pernah penulis baca, kecenderungan pemikiran dewasa ini mengarah pada kritik terhadap guru. Dan hampir tidak ada buku yang membahas bagaimana seharusnya siswa berakhlak dan beretika terhadap gurunya kecuali buku-buku yang berbau agama. Hal inilah yang menimbulkan ketimpangan yang luar biasa jauhnya antara apa yang harus dilakukan oleh guru dan bagaimana seharusnya siswa bersikap, sehingga wajah pendidikan menjadi carut marut tanpa konsep dan arah yang jelas. Pendidikan humanis yang bagaimanakah yang menjadi solusi bagi bangsa Indonesia?

Pendidikan bertujuan untuk mengajar, memanusiakan, dan mengarahkan anak didik agar mencapai akhir sempurna. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pendidikan humanis yang di pelopor oleh “Barat” mampu memenuhi tuntutan tersebut? Sedangkan menurut Yamin Pendidikan adalah gambaran umum atas apa yang harus dijalankan, sedangkan kurikulum merupakan wilayah konsep dan teknik yang sudah menjadi sebuah konstruksi sebuah praktek pendidikan.²³²

Kurikulum pendidikan humanis adalah pola pendidikan yang menghargai murid sebagai manusia yang bebas. Bebas dari campur tangan politik pemerintah, bebas dari kekangan

²³² A. Sudiarta dan Muhal. Yamin, 2010. Hal. 155-156

guru dan bebas segala-galanya. Kurikulum pendidikan humanis bertujuan agar dalam proses pembelajaran menjadikan siswa dan menempatkan siswa sebagai manusia yang bebas. Bebas menentukan dan bebas melakukan. Termasuk kebebasan tidak ikut pelajaran, dan mimbar kebebasan-kebebasan yang yang lain. Apapun yang dilakukan oleh siswa dalam pandangan pendidikan bersifat humanis itu dapat dibenarkan sepanjang tidak mengekang hak siswa sebagai individu yang bebas dan siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan mengatur pribadinya sendiri serta bertanggungjawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin atau etika yang berlaku. Oleh karena itu, alternatif yang ditawarkan dalam pola pendidikan humanis yang positif untuk pengembangan siswa yaitu dengan adanya kolaborasi pendidikan karakter dan pendidikan yang berbasis akhlak.

Penutup

1. Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya, Menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma Islam, kejiwaan, intelektual, akal, perasaan dan indra. Inti pendidikan Islam adalah motivasi keimanan ke dalam pribadi muslim secara utuh untuk

menjadi insan kamil. Al-Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber nilai pendidikan Islam, sebagai media untuk merealisasikan fungsi muslim *khalifatullah fil ardhi*.

2. Persepsi keilmuan kita saat ini tentang arti pendidikan, mengandung implikasi yang lebih komprehensif ketimbang arti pengajaran, pendidikan biasa didefinisikan sebagai “usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang”. Jelas di sini, pendidikan mencakup proses kegiatan pengajaran di samping bimbingan dan latihan. Pendidikan lebih diorientasikan ke masa depan yang mana fenomenanya tak lain adalah penerimaan betapa pentingnya penguasaan dan pemanfaatan serta pengendalian kemajuan iptek bagi pembagunan bangsa. Sedangkan tentang batasan pendidikan agama lebih ditekankan pada proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan ke dalam diri anak didik. Mengingat pendidikan agama pada hakikatnya bertujuan membentuk pribadi yang beriman dan bertaqwa sebagai jalan vitalnya kehidupan *lahiriah* dan *bathiniyah* manusia Indonesia seutuhnya.
3. Globalisasi menyebabkan penduduk dunia berbaur dan menyatu dalam pergaulan yang lintas batas dan lintas budaya. Bidang-bidang kehidupan pun dibuat saling terkait

satu sama lain. Globalisasi melahirkan saling ketergantungan, sekaligus menghadirkan persaingan di semua lini kehidupan. Ada tiga tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek, demokratisasi, dan dekadensi moral. Ketiga tantangan tersebut membawa pengaruh besar dalam semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Perkembangan dan kemajuan iptek prinsipnya berpotensi melemahkan daya mental spiritual. Permasalahan baru yang harus segera dipecahkan oleh pendidikan Islam adalah dehumanisasi pendidikan dan netralisasi iptek dari nilai-nilai agama. Pendidikan Islam ditantang untuk membuktikan kemampuannya dalam penguasaan iptek, sekaligus kesanggupannya dalam mengendalikan dampak negatif dari iptek. Menghadapi tantangan modernitas, pendidikan Islam harus melakukan langkah strategis dengan terlebih dahulu membangun paradigma keilmuan yang integratif sebagai jawaban terhadap dikotomi ilmu. Lembaga-lembaga pendidikan Islam juga mendesain ulang fungsinya dengan memilih model pendidikan yang relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pilihan yang paling tepat adalah mengadaptasi model pendidikan modern (Barat) dalam sistem pendidikan Islam. Pilihan ini bukan berarti sekularisasi atau westernisasi, tetapi pilihan ini tetap

meniscayakan nilai-nilai Islam terpelihara dalam aktivitas pendidikan Islam. Tahap selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mereformasi kurikulumnya agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi kompetisi global.

4. Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan arah baru pengembangan pendidikan Islam antara lain dengan mengembangkan:
 - a. Pendidikan transformatif, yaitu proses perubahan secara terus-menerus menuju kemajuan. Kata “Kemajuan” ditandai dengan karakter, budaya, dan prestasi. Pendidikan Islam dikatakan maju jika mampu bersaing dengan sekolahan modern.
 - b. Pendidikan humanistik-Islami, yaitu pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai humanisme Islam, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Pola pendidikan humanis yang positif untuk pengembangan peserta didik bisa evisien untuk diterapkan apabila ada kolaborasi dengan pendidikan karakter dan pendidikan yang berbasis akhlak.

Referensi:

A. Sudiarja dan Muh. Yamin, 2010.

Abdurrahman Mas'ud, 2002. *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Gama Media).

Arbayah, 2013. *Journal MODEL PEMBELAJARAN HUMANISTIK*. (Dinamika Ilmu Vol 13. No. 2, Desember).

Arifin, Muzayyin, 2003. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara).

Arifin, M, 1995. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Azra, Azyumardi, 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. (Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu).

Daulay, Haidar Putra. 2004. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*. (Cet. 1; Jakarta: Kencana).

Daulay, Haidar Putra, 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka).

Djamaludin, 1999. *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaa Setia).

- Fajar, A. Malik. 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. (Bandung: Mizan).
- Hujair, AH. Sanaky, 2015. *Pembaharuan pendidikan Islam (Paradigma, Tipologi dan Pemetaan Menuju Masyarakat Madani di Indonesia)*. Kaukaba Dipantara. Yogyakarta.
- Imam Ghazali. *Ihya Ulumuddin, Menghidupkan Ajaran Agama*.
- Indra, Hasbi. 2005. *Pendidikan Islam Melawan Globalisasi*. (Cet. II; Jakarta: Rida Mulia).
- Knight, *Issues and Alternatives*.
- Kuntowijoyo, 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, ed. A.E. Priyono (Bandung: Mizan).
- Lavin, 1980. *Cooperative Learning*.
- Maarif, Ahmad Syafi'i, 1991. "Pemikiran tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia," dalam Muslih Usa, ed., *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*. (Yogyakarta: Tiara Wacana).
- Mastuhu, 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. (Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu).
- Mohammad Ali, 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Bandung: Pedagogiana).
- Nata, Abuddin, 2003. *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Bogor: Kencana).

- Peter, Salim, 1996. *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta,; Modern English Press).
- Rahim, Husni, 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu).
- Rahman, Fazlur, 1985. *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, terj. Ahsin Mohammad, *Islam dan Modernitas*. (Yogyakarta: Pustaka).
- Redja Mudyahardjo, 2002. *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Rosyada, Dede, 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. (Cet. 1; Jakarta: Kencana).
- Sutrisno & Suyatno, 2015. *Pendidikan Islam di Era Peradaban Modern*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syaiful Sagala, 2007. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta).
- Tilaar, HAR. 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Tera Indonesia.
- Wahid, Marzuki, 2011. *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi*. (Bandung: Pustaka Hidayah).
- Walberg dan Tomas, 1972. *Open Education*.
- Zubaedi, 2012. *Isu-Isu Baru dalam Diskursus Filsafat Pendidikan Islam dan Kapita Selektta Pendidikan Islam*. (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Bab 5

**PENDIDIKAN MULTIKULTURAL:
SOLUSI KEBERAGAMAN DI
INDONESIA**

Oleh: Naili Fauziah, Elma Fuadah dan
Nurul Haibah Maghfuroh

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis. Kemajemukan sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kemajemukan ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: perspektif horizontal dan vertikal. Dalam perspektif horizontal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, dan budayanya. Sedangkan dalam perspektif vertikal, kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, dan tingkat sosial budayanya. Kemajemukan inilah yang kemudian memunculkan semboyan *Bhineka Tunggal Ika*.²³³

Fenomena kemajemukan ini bagaikan pisau bermata dua, satu sisi memberi dampak positif, yaitu kita memiliki kekayaan khasanah budaya yang beragam, akan tetapi sisi lain

²³³ Dede Rosyada, 2014. *Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*, Jurnal Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei

juga dapat menimbulkan dampak negatif, karena terkadang justru keberagaman ini dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat yang pada gilirannya dapat menimbulkan instabilitas baik secara keamanan, sosial, politik maupun ekonomi.

Indonesia sebagai negara multi etnis, multi kultur dan multi agama tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera. Keanekaragaman ini di satu sisi merupakan berkah, karena keberagaman itu sesungguhnya merefleksikan kekayaan khasanah budaya. Indonesia adalah laboratorium yang sangat lengkap dan menjanjikan untuk meneliti di bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Namun di sisi lain, keberagaman juga berpotensi besar untuk tumbuh subur konflik, terutama jika keberagaman tersebut tidak mampu dikelola dengan baik. Karena itu, menjadi penting pengembangan pendidikan multikultural, sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap keberagaman, dan yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional. Dalam hal ini, sekolah harus mendesain proses pembelajaran, mempersiapkan kurikulum

dan desain evaluasi, serta mempersiapkan guru yang memiliki persepsi, sikap dan perilaku multikultural, sehingga menjadi bagian yang memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap multikultural para siswanya.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Gagasan dasar ini diperjelas dengan ayat ke-6 pasal 4 yaitu bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.²³⁴

Untuk membangun masyarakat yang mengakui dan menghargai perbedaan diperlukan proses pendidikan. Di sinilah letak pentingnya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif. Dan pendidikan multikultural itu hendaknya merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai multikultur itu sendiri dalam institusi pendidikan. Dalam konteks seperti ini, peranan guru dan sekolah menjadi sangat penting.

²³⁴Depag RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta: Depag RI, 2006), hal. 9

A. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI SOLUSI KEBERAGAMAN DI INDONESIA

1. Konsep Dasar Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural merupakan suatu gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa. Sebagai sebuah gerakan pembaharuan, istilah pendidikan multikultural masih dipandang asing bagi masyarakat umum, bahkan penafsiran terhadap definisi maupun pengertian pendidikan multikultural juga masih diperdebatkan di kalangan pakar pendidikan.

Hernandez sebagaimana dikutip Tilaar mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan.²³⁵ Sedangkan Sleeter dan Grant sebagaimana dikutip Zamroni, mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik memberikan

²³⁵ HAR Tilaar, 2004. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan nasional*, (Jakarta: Grasindo), hal. 180

kritik dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan dan diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan.²³⁶

Menurut James A Banks : “*Multicultural education is a reform designed to make some major changes in the education of students. Multicultural education theorists and researchers believe that many school, college, and university practices related to race and ethnicity are harmful to students and reinforce many of the ethnic stereotype and discriminatory practices in U.S. society*”.²³⁷ (Pendidikan multikultural adalah reformasi yang dirancang untuk membuat perubahan besar dalam pendidikan siswa. Pakar dan peneliti pendidikan multikultural percaya bahwa banyak praktik sekolah, perguruan tinggi, dan universitas yang terkait dengan ras dan etnis berbahaya bagi siswa dan memperkuat banyak stereotip etnis dan praktik diskriminatif dalam masyarakat AS). Jadi pada saat itu gerakan pendidikan multikultural merupakan sebuah gerakan untuk mereformasi lembaga-lembaga pendidikan agar memberikan peluang yang sama kepada setiap orang, tanpa melihat asal-usul etnis, budaya, dan jenis kelaminnya, untuk sama-sama memperoleh pengetahuan,

²³⁶ Zamroni, 2011. *PendidikanDemokrasipadaMasyarakatMultikultural*. (Yogyakarta: Gavin KalamUtama), hal. 144

²³⁷ James A Banks dan Banks, C.A.M. (Eds), 2001. *Handbook of Research on Multicultural Education*, (New York: MacMillan), hal. 173

kecakapan (*skills*), dan sikap yang diperlukan untuk bisa berfungsi secara efektif dalam negara-bangsa dan masyarakat dunia yang beragam etnis dan budaya.

Pengertian multikultural secara luas mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus.²³⁸ Pendapat lain mengenai pendidikan multikultural dikemukakan M. Ainul yakin bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan menggunakan perbedaan-perbedaan kultur yang ada pada peserta didik, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas social, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi lebih efektif dan mudah.²³⁹

Pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman etnik dan budaya dari masyarakat suatu bangsa, sebagaimana dikatakan Rudolfo Stavenhagen:

Religious, linguistic, and national minoritas, as well as indigenous and tribal peoples were often subordinated, sometimes forcefully and against their will, to the interest

²³⁸ Sutarno, 2007. *Pendidikan Multikultural*, (Kalimantan Selatan: Dinas Pendidikan dan FKIP Unlam), hal. 57

²³⁹ Ainul Yaqin, 2005. *Pendidikan Multikultural; Cross-Cultural Under standing untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media), hal. 25

*of the state and the dominant society. While many people...had to discard their own cultures, langues, religions and traditions, and adapt to the alien norms and customs that were consolidated and reproduced through national institutions, including the educational and legal system.*²⁴⁰

Rudolfo menjelaskan bahwa Agama, bahasa, dan nasional minoritas, begitu juga masyarakat adat dan suku minoritas seringkali disubordinasi kadang-kadang dengan paksa dan bertentangan dengan keinginan mereka, untuk kepentingan negara dan masyarakat yang dominan. Sementara banyak orang harus membuang budaya, bahasa, agama, dan tradisi mereka sendiri dan beradaptasi dengan norma-norma dan kebiasaan asing yang dikonsolidasikan dan direproduksi melalui lembaga-lembaga nasional, termasuk sistem pendidikan dan hukum.

Jadi, konsep dasar dari Pendidikan multikultural adalah sebuah pendidikan yang merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Hal ini dapat

²⁴⁰ Rudolfo Stavenhagen, 1996. *“Education for a Multicultural World”*, in JasqueDelors, et al. *Learning The Treasure Within*, (Paris: UNESCO), hal. 15

diartikan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya, seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama. Intinya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memberikan penekanan terhadap proses penanaman cara hidup yang saling menghormati, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi.

Menurut James A. Banks, pendidikan multikultural adalah cara memandang realitas dan cara berpikir, dan bukan hanya konten tentang beragam kelompok etnis, ras, dan budaya. Secara spesifik, Banks menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat dikonsepsikan atas lima dimensi, yaitu:²⁴¹

- a. Integrasi konten (*content Integration*); pemaduan konten menangani sejauh mana guru menggunakan contoh dan konten dari beragam budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep, prinsip, generalisasi serta teori utama dalam bidang mata pelajaran atau disiplin mereka.
- b. Proses penyusunan pengetahuan (*the knowledge construction process*); sesuatu yang berhubungan dengan sejauh mana guru membantu siswa paham, menyelidiki, dan untuk menentukan bagaimana asumsi budaya yang

²⁴¹ James A. Banks, 2002, *An introduction to Multicultural Education*, (Boston-London: Allyn and Bacon Press), hal. 14

tersirat, kerangka acuan, perspektif dan prasangka di dalam disiplin memengaruhi cara pengetahuan disusun di dalamnya.

- c. Pedagogi kesetaraan (*an equity paedagogy*); pedagogi kesetaraan ada ketika guru mengubah pengajaran mereka ke cara yang akan memfasilitasi prestasi akademis dari siswa dari berbagai kelompok ras, budaya, dan kelas sosial. Termasuk dalam pedagogi ini adalah penggunaan beragam gaya mengajar yang konsisten dengan banyaknya gaya belajar di dalam berbagai kelompok budaya dan ras.
- d. Pelibatan peserta didik dalam budaya sekolah dan struktur sosial yang memberdayakan (*training pasrticipation in an empowering school culture and social structure*); praktik pengelompokan dan penamaan partisipasi olah raga, prestasi yang tidak proporsional, dan interaksi staf, dan siswa antar etnis dan ras adalah beberapa dari komponen budaya sekolah yang harus diteliti untuk menciptakan budaya sekolah yang memberdayakan siswa dari beragam kelompok, ras, etnis dan budaya.
- e. Mengurangi prasangka (*prejudice reduction*); dimensi ini fokus pada karakteristik dari sikap rasial siswa dan bagaimana sikap tersebut dapat diubah dengan metode dan materi pengajaran.

Untuk itu, para guru yang memberikan pendidikan multibudaya harus memiliki keyakinan bahwa perbedaan budaya memiliki kekuatan dan nilai, sekolah harus menjadi teladan untuk ekspresi hak-hak manusia dan penghargaan untuk perbedaan budaya dan kelompok, keadilan dan kesetaraan sosial harus menjadi kepentingan utama dalam kurikulum, sekolah dapat menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan karakter (yaitu nilai, sikap, dan komitmen) untuk membantu siswa dari berbagai latar belakang, sekolah bersama keluarga dan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang mendukung multibudaya.

Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya pendidikan multikultural:

- a. Faktor geografis, faktor ini sangat memengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Maka dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda maka akan terdapat perbedaan dalam masyarakat (multikultural).
- b. Pengaruh budaya asing, mengapa budaya asing menjadi penyebab terjadinya multikultural, karena masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan akan terpengaruh *mind set* mereka dan menjadikan perbedaan antara mereka.

c. Kondisi iklim yang berbeda, kondisi lingkungan pun memengaruhi keberagaman kehidupan masyarakatnya, hal ini disebabkan perbedaan pola penghidupan, mata pencaharian, tatanan sosial dan kemasyarakatan.

Frederich harbison dan Charles A. Myers dalam bukunya yang berjudul “*Education Manpower and Economic Growth Stategis of Human Resource Development*” mengemukakan beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya sistem pendidikan adalah sebagai berikut:²⁴²

a. Faktor historis (*Historical factors*)

Menurut harbison dan mayer, *the historical factor of the growth of society is determined by three interrelated matters, namely education, human capacity and economic growth* (faktor sejarah pertumbuhan masyarakat ditentukan oleh tiga hal yang saling berkaitan, yaitu pendidikan, kemampuan manusia dan pertumbuhan ekonomi). Atas pembagian di atas, harbison dan mayer membagi Negara-negara di dunia ini menjadi empat tingkat pertumbuhan sebagai berikut:

1) Negara yang belum berkembang (*an undeveloped country*)

²⁴²Arifin, *IlmuPerbandinganPendidikan*, (Jakarta:Golden Terayon Press, 2003),hal.108-133

- 2) Negara-negara yang sebagian bidang kehidupannya telah mengalami kemajuan (*countries where some areas of life have progressed*)
- 3) Negara-negara yang sedang mengalami setengah kemajuan (*countries that are experiencing half progress*)
- 4) Negara-negara yang telah mengalami kemajuan (*Countries that have made progress*)

b. Faktor geografis (*Geographical factors*)

Manusia atau bangsa hidup di suatu lingkungan alam tertentu yang berbeda-beda situasi dan kondisi alamiahnya. Maka berbeda pula tuntutan hidup akibat pengaruh faktor geografis, dan itu juga memengaruhi sistem pendidikan yang diperlukan di Negara-negara yang bersangkutan. Pengaruh tersebut terlihat dari dua aspek yaitu:

- 1) Aspek klimatologis atau iklim
- 2) Aspek lingkungan alam dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Nicholas Hans membedakan adanya tiga kelompok Negara yang berbeda iklimnya yaitu:

- 1) Negara-negara belahan bumi bagian utara yang beriklim dingin
- 2) Negara-negara di sekitar laut tengah yang beriklim sedang

3) Negara-negara yang terletak di khatulistiwa (garis equator) atau yang berdekatan dengannya yang beriklim panas.

c. Faktor kehidupan ekonomi (*Economic life factor*)

Faktor ekonomi sangat erat kaitannya dengan faktor geografis, sebab pembangunan ekonomi suatu Negara bergantung pada faktor geografis, oleh karena faktor geografis mengandung sumber kekuatan baik yang berupa modal materil maupun modal dasar mental spiritual penduduknya. Sesungguhnya pembangunan di bidang ekonomi merupakan refleksi dari kombinasi antara sumber kemampuan manusia alam sekitar dan sistem kemasyarakatan serta kebudayaannya. Kombinasi dari ketiga unsur ini sangat bertumpu pada faktor geografis di mana proses kehidupan sehari-hari manusia berada dalam lingkupnya.

d. Politik Negara (*State Politics*)

Antara ekonomi dan politik hampir tak dapat dipisahkan, karena pembangunan ekonomi memerlukan politik yang stabil, sedang stabilitas politik juga memerlukan stabilitas ekonomi, satu sama lain saling pengaruh-memengaruhi dan saling memperkuat. Bilamana dalam suatu Negara kehidupan politiknya sedang kacau, mustahil dapat diciptakan suatu keseimbangan yang serasi di dalam sistem

pendidikan. Politik Negara merupakan kompas yang harus dijadikan pedoman dalam langkah-langkah pengelolaannya.

e. Faktor kehidupan agama (*Factor of religious life*)

Agama yang dipeluk oleh rakyat suatu Negara menduduki tempat penting dalam sistem kehidupan masyarakat. Mengingat peranan dan pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat di suatu Negara, maka jika dikaitkan dengan sistem pendidikan yang dikembangkan dalam suatu masyarakat, dapat menimbulkan dampak seperti di Negara yang menindas kehidupan beragama secara mutlak menguasai sistem pendidikan.

f. Faktor kesukuan (*Tribal factors*)

Pengaruh kesukuan di beberapa Negara terhadap sistem pendidikan menyebabkan timbulnya pemisahan dan perpecahan kehidupan masyarakat atau bangsa ke dalam golongan-golongan yang saling berkonfrontasi antara satu sama lain. Di beberapa Negara seperti Amerika perbedaan warna kulit menyebabkan pemisahan sistem pendidikan yang dapat menimbulkan sentimen rasialis.

g. Tingkat kemajuan peradaban (*The degree of civilization's progress*)

Setiap Negara atau bangsa di dunia ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam membangun dirinya sendiri untuk mencapai tingkat kemajuan peradaban bangsa

itu sendiri. Namun ada tiga faktor utama yang menjadi modal dasar kemajuan itu yaitu:

- 1) Kemampuan manusia sendiri
- 2) Tingkat pendidikan
- 3) Pertumbuhan sistem kelembagaan masyarakat.

Faktor-faktor di luar sistem pendidikan yang memiliki pengaruh kuat terhadap penyelenggaraan pendidikan tersebut oleh Issac Leon Kandel disebut sebagai *intangibile factors*, seperti latar belakang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, ideologi, agama, sejarah, pandangan hidup, keyakinan, orientasi nilai serta pemikiran-pemikiran hasil keputusan dari beberapa konferensi internasional tentang pendidikan. Faktor-faktor *intangibile* tadi penting untuk dipelajari selain mempelajari sistem pendidikan yang ada dalam suatu negara-bangsa. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk lebih bisa mengerti dan memahami tentang potret penyelenggaraan sistem pendidikan dalam suatu negara-bangsa tersebut.²⁴³

2. Urgensi Pendidikan Multikultural

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam masyarakat yang berbeda seperti agama, suku, ras,

²⁴³ Arif Rohman, 2010. *Pendidikan Komparatif*, (Yogyakarta: LaksbangGrafika), hal. 55

kebudayaan, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk. Dalam kehidupan yang beragam seperti ini menjadi tantangan untuk mempersatukan bangsa Indonesia menjadi satu kekuatan yang dapat menjunjung tinggi perbedaan dan keragaman masyarakatnya.

Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan multikultural yang ditanamkan kepada anak-anak lewat pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Seorang guru bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan terhadap anak didiknya dan dibantu oleh orang tua dalam melihat perbedaan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun pendidikan multikultural bukan hanya sebatas kepada anak-anak usia sekolah tetapi juga kepada masyarakat Indonesia pada umumnya lewat acara atau seminar yang menggalakkan pentingnya toleransi dalam keberagaman menjadikan masyarakat Indonesia dapat menerima bahwa mereka hidup dalam perbedaan dan keragaman.

Menurut Gibson, sebagaimana dikutip Djohar, menyatakan bahwa masa depan bangsa memiliki kriteria khusus yang ditandai oleh hiper kompetisi, suksesi revolusi teknologi serta dislokasi dan konflik sosial, menghasilkan keadaan yang non-linier dan sangat tidak dapat diperkirakan dari keadaan masa lampau dan masa kini. Masa depan hanya

dapat dihadapi dengan kreativitas, meskipun posisi keadaan sekarang memiliki peranan penting untuk memicu kreativitas. Keadaan ini mestinya dapat mendorong kita untuk memiliki desain pendidikan masa depan yang memungkinkan peserta didik dan pelaku praksis pendidikan dapat mengaktualisasikan dirinya. Sebagai bangsa dengan beragam kultur memiliki resistensi yang tinggi terhadap munculnya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesivitas sosial masyarakat.²⁴⁴

Selain itu terdapatnya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan agama juga menjadi penyebab diperlukannya pendidikan multikultural. Salah satu faktor penyebab kegagalan pendidikan agama adalah karena praktik pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif, dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan konatif-volutif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Atau dalam praktiknya, pendidikan agama berubah menjadi pengajaran agama sehingga tidak mampu membentuk pribadi Islami. Pendidikan agama banyak dipengaruhi oleh budaya Barat yang lebih mengutamakan pengajaran daripada pendidikan moral. Padahal intisari pendidikan agama justru terletak pada pendidikan moral.

²⁴⁴Djohar, 2003. *Pendidikan Strategik, Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: LESFI), hal. 85

Pendidikan agama yang berlangsung selama ini banyak bersikap menyendiri. Pendidikan agama harus berjalan bersama-sama dan bekerja sama dengan program pendidikan non agama sebagai relevansi terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, beberapa kelemahan lain yaitu:²⁴⁵

- a. Dalam bidang teologi ada kecenderungan mengarah kepada faham fatalistik. Bidang akhlak hanya berorientasi pada urusan sopan santun dan belum dipahami sebagai keseluruhan pribadi manusia beragama. Bidang ibadah diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan kurang ditekankan sebagai proses pembentukan kepribadian. Dalam bidang hukum cenderung dipelajari sebagai tata aturan yang tidak akan berubah sepanjang masa, dan kurang mamahami dinamika dan jiwa hukum Islam.
- b. Selanjutnya agama Islam cenderung diajarkan sebagai dogma dan kurang mengembangkan rasionalitas serta kecintaan pada kemajuan ilmu pengetahuan.
- c. Orientasi mempelajari Al-Qur'an juga masih cenderung pada kemampuan membaca teks, belum mengarah pada pemahaman arti dan penggalian makna.

²⁴⁵Muhaimin, 2002. *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya mengefektifkan Pendidikan agama di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hal. 88-89

- d. Pendekatan masih cenderung normatif, dalam arti pendidikan agama menyajikan norma-norma yang sering kali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai hidup dalam keseharian
- e. Kurikulum pendidikan agama Islam yang dirancang sekolah lebih menawarkan minimum kompetensi atau informasi yang membuat guru PAI sering kali terpaku padanya dan menghilangkan semangat untuk memperkaya kurikulum dengan pengalaman belajar yang bervariasi
- f. Guru PAI kurang berupaya menggali berbagai metode yang mungkin bisa dipakai untuk pendidikan agama sehingga pelaksanaan pembelajaran cenderung monoton
- g. Keterbatasan sarana prasarana yang mengakibatkan pengelolaan cenderung seadanya. Pendidikan agama seringkali kurang diberi prioritas dalam hal fasilitas.
- h. Tidak tertibnya penyusunan dan pemilihan materi-materi pendidikan agama sehingga sering ditemukan hal-hal prinsipil yang mestinya dipelajari lebih awal tetapi justru terlewatkan. Bahkan masyarakat menilai bahwa beragama yang benar identik dengan mazhab fiqih yang benar dan diakui oleh mayoritas.

Menurut Amin Abdullah, beberapa kelemahan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah yaitu:²⁴⁶

- a. Pendidikan agama lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata serta amalan ibadah praktis
- b. Pendidikan agama kurang konsen terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri anak didik lewat berbagai cara, media, dan forum
- c. Metodologi pendidikan agama berjalan secara konvensional-tradisional dan lebih menekankan hafalan-hafalan teks keagamaan
- d. Dalam sistem evaluasi, bentuk-bentuk soal ujian agama Islam menunjukkan prioritas utama pada kognitif

Orientasi semacam ini menyebabkan terjadinya keterpisahan dan kesenjangan antara ajaran agama dan realitas perilaku pemeluknya. Oleh karena itu diperlukan reorientasi dalam pembelajaran agama dengan cara mempelajari Islam untuk mengetahui bagaimana cara beragama yang benar, dan

²⁴⁶ M. Amin Abdullah, 2000. *“Problem Epistemologis-Metodologis Pendidikan Islam,”* dalam Abdul MunirMulkhan, *Religiositas Iptek*, (Yogyakarta: PustakaPelajar), hal. 65

mempelajari Islam sebagai sebuah pengetahuan. Untuk membentuk pendidikan yang mampu menghasilkan manusia yang memiliki kesadaran pluralis-multikultural diperlukan rekonstruksi pendidikan sosial keagamaan untuk memperteguh dimensi kontrak sosial keagamaan dalam pendidikan agama.

Berkaitan dengan tantangan modernitas yang semakin kompleks terutama dengan pluralitas dan multikulturalitas, perlu dilakukan beberapa hal, yaitu:²⁴⁷

- a. Selain memberikan uraian tentang ilmu-ilmu keIslaman klasik, anak didik perlu juga diperkenalkan dengan persolan-persoalan modernitas yang amat kompleks sebagaimana dihadapi umat Islam sekarang ini. Pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang saat ini berkembang juga penting untuk diperkenalkan
- b. Pengajaran ilmu-ilmu keIslaman tidak seharusnya selalu bersifat doktrinal, melainkan perlu dikedepankan uraian dimensi historis dari doktrin-doktrin keagamaan tersebut.
- c. Pengajaran yang dulunya hanya bertumpu pada teks/*nash* perlu diimbangi dengan telaah yang cukup mendalam dan cerdas terhadap konteks dan realitas, mengingat bahwa *nash* itu terbatas, sedangkan kejadian-kejadian yang dialami umat manusia selalu berkembang.

²⁴⁷ Ngainun dan Achmad Sauqi, 2011. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), hal. 181

- d. Dalam era pluralitas iman yang semakin mencuat dan menguat, diskursus yang melakukan telaah secara akademik filosofis terhadap *khazanah* intelektual Islam klasik, khususnya tasawuf, sangat diperlukan untuk mengimbangi telaah yang bersifat doktrinal dari cabang keilmuan kalam. Pelaksanaan pendidikan Islam kontemporer sering dikritik lantaran terlalu banyak menekankan pada aspek kognitif anak didik dan kurang memberikan tekanan pada aspek afektif dan psikomotorik
- e. Pendidikan agama Islam era modernitas tidak lagi memadai jika hanya terfokus pada pembentukan moralitas individual yang saleh, namun kurang begitu peka terhadap moralitas publik.

Adapun pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia yaitu sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, peserta didik diharapkan tidak meninggalkan akar budayanya, dan pendidikan multikultural sangat relevan digunakan untuk demokrasi yang ada seperti sekarang.²⁴⁸

- a. Sarana alternatif pemecahan konflik

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diakui dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam

²⁴⁸ Brian Fay, *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach* (Oxford: Blackwell, 1996) hal. 203

unsur sosial dan budaya. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial-budaya. Struktur kultural masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan sumber perpecahan. Saat ini pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya.

Pada kenyataannya pendidikan multikultural belum digunakan dalam proporsi yang benar. Maka, sekolah dan perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat mengembangkan kurikulum pendidikan multikultural dengan model masing-masing sesuai dengan otonomi pendidikan atau sekolahnya sendiri. Model-model pembelajaran mengenai kebangsaan memang sudah ada. Namun, hal itu masih kurang untuk dapat menghargai perbedaan masing-masing suku, budaya maupun etnis. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai konflik dari realitas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Hal ini berarti bahwa pemahaman mengenai toleransi di masyarakat masih sangat kurang.

Maka, penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil apabila terbentuk pada diri setiap peserta didik sikap toleransi, tidak bermusuhan, dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Perubahan yang diharapkan adalah pada terciptanya kondisi yang nyaman, damai, toleran dalam kehidupan masyarakat, dan tidak selalu muncul konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan SARA.

b. Agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya

Selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, pendidikan multikultural juga signifikan dalam upaya membina peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya yang ia miliki sebelumnya, saat ia berhubungan dengan realitas sosial-budaya di era globalisasi. Pertemuan antar budaya di era globalisasi ini bisa menjadi ‘ancaman’ serius bagi peserta didik. Untuk menyikapi realitas tersebut, hendaknya peserta didik diberikan pengetahuan yang beragam. Sehingga peserta didik tersebut memiliki kemampuan global, termasuk kebudayaan, dengan beragamnya kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri, peserta didik perlu diberi pemahaman yang luas tentang banyak budaya, agar siswa tidak melupakan asal budayanya.

Tantangan dalam dunia pendidikan kita, saat ini sangat berat dan kompleks. Maka, upaya untuk mengantisipasinya harus dengan serius dan disertai solusi konkret. Jika tidak ditanggapi dengan serius terutama dalam bidang pendidikan yang bertanggung jawab atas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka, peserta didik tersebut akan kehilangan arah dan melupakan asal budayanya sendiri. Sehingga dengan pendidikan multikultural itulah, diharapkan mampu membangun Indonesia yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Karena keanekaragaman budaya dan ras yang ada di Indonesia itu merupakan sebuah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan.

c. Sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional

Pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting apabila dalam memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan ukuran dan tingkatan tertentu.

Pengembangan kurikulum berdasarkan pendidikan multikultural dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:²⁴⁹

²⁴⁹NgainunNaimdanAchmadSauqi,*Ibid.*, hal. 198-199

- 1) Mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku secara serentak seperti sekarang menjadi filosofi pendidikan yang sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan.
- 2) Harus merubah teori tentang konten (*curriculum content*) yang mengartikannya sebagai aspek substantif yang berisi fakta, teori, generalisasi, menuju pengertian yang mencakup nilai moral, prosedur, proses, dan keterampilan (*skills*) yang harus dimiliki generasi muda.
- 3) Teori belajar yang digunakan harus memperhatikan unsur keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
- 4) Proses belajar yang dikembangkan harus berdasarkan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam situasi yang positif. Dengan cara tersebut, perbedaan antar individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan siswa terbiasa untuk hidup dengan keberanekaragaman budaya.
- 5) Evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan.

d. Menuju masyarakat Indonesia yang Multikultural

Inti dari cita-cita reformasi Indonesia adalah mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis, dan ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintah

yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial serta rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia.

Corak masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika bukan hanya merupakan keanekaragaman suku bangsa saja melainkan juga menyangkut tentang keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Eksistensi keberanekaragaman tersebut dapat terlihat dari terwujudnya sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi antar kebudayaan satu sama lain.

Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lain yang relevan.

Dari paparan tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan multikultural menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk di implementasikan dalam praksis pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan multikultural dapat berfungsi sebagai sarana alternatif

pemecahan konflik. Melalui pembelajaran yang berbasis multikultur, siswa diharapkan tidak tercerabut dari akar budayanya, dan rupanya diakui atau tidak pendidikan multikultural sangat relevan di praktekan di alam demokrasi seperti saat ini.

Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam memang merupakan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk mengolah bagaimana ragam perbedaan tersebut justru dapat dijadikan aset, bukan sumber perpecahan. Di era globalisasi ini pendidikan multikultural memiliki tugas ganda, yaitu selain menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya tersebut, juga harus menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar yang masuk ke negeri ini.

Pendidikan multikultural juga dapat dimanfaatkan untuk membina siswa agar tidak tercerabut dari akar budayanya, sebab pertemuan antar budaya di era globalisasi ini bisa jadi dapat menjadi ancaman serius bagi anak didik kita. Dalam kaitan ini siswa perlu diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan.

2. Tujuan Pendidikan Multikultural

Berikut akan dijabarkan tujuan dilaksanakannya pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu:²⁵⁰

a. Pengembangan Literasi Etnis dan Budaya

Mempelajari tentang latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, sumbangan, peristiwa kritis, individu yang berpengaruh, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis mayoritas dan minoritas.

b. Perkembangan Pribadi

Menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif, dan kebanggaan pada identitas pribadinya yang berkontribusi pada perkembangan pribadi siswa, yang berisi pemahaman yang lebih baik tentang diri yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keseluruhan prestasi intelektual, akademis, dan sosial siswa.

c. Klarifikasi Nilai dan Sikap

Merupakan langkah kunci dalam proses melepaskan potensi kreatif individu untuk memperbarui diri dan masyarakat untuk tumbuh-kembang lebih lanjut.

d. Kompetensi Multikultural

Dengan mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antar pribadi, pengambilan perspektif,

²⁵⁰ Choirul Mahfud, 2009. *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: PustakaPelajar), hal. 9

analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang dan kerangka berpikir alternatif, dan menganalisa bagaimana kondisi budaya memengaruhi nilai, sikap, harapan, dan perilaku.

e. Kemampuan Keterampilan Dasar

Untuk memfasilitasi pembelajaran dalam melatih kemampuan keterampilan dasar dari siswa yang berbeda secara etnis dengan memberi materi dan teknik yang lebih bermakna untuk kehidupan dan kerangka berpikir dari siswa yang berbeda secara etnis.

f. Persamaan dan Keunggulan Pendidikan

Tujuan persamaan multikultural berkaitan erat dengan tujuan penguasaan keterampilan dasar, namun lebih luas dan lebih filosofis. Untuk menentukan sumbangan komparatif terhadap kesempatan belajar, pendidik harus memahami secara keseluruhan bagaimana budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan pendidikan.

g. Memperkuat Pribadi untuk Reformasi Sosial

Tujuan terakhir dari Pendidikan multikultural adalah memulai proses perubahan di sekolah yang pada akhirnya akan meluas ke masyarakat. Tujuan ini akan melengkapi penanaman sikap, nilai, kebiasaan dan keterampilan siswa sehingga mereka menjadi agen perubahan sosial (*social change agents*) yang memiliki komitmen yang tinggi

dengan reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan (*disparities*) etnis dan rasial dalam kesempatan dan kemauan untuk bertindak berdasarkan komitmen ini. Untuk melakukan itu, mereka perlu memperbaiki pengetahuan mereka tentang isu etnis di samping mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan, keterampilan tindakan sosial, kemampuan kepemimpinan, dan komitmen moral atas harkat dan persamaan.

h. Memiliki Wawasan Kebangsaan/Kenegaraan yang Kokoh

Mengetahui kekayaan budaya bangsa akan menumbuhkan rasa kebangsaan yang kuat. Rasa kebangsaan itu akan tumbuh dan berkembang dalam wadah negara Indonesia yang kokoh. Untuk itu Pendidikan Multikultural perlu menambahkan materi, program dan pembelajaran yang memperkuat rasa kebangsaan dan kenegaraan dengan menghilangkan etnosentrisme, prasangka, diskriminasi dan stereotipe.

i. Memiliki Wawasan Hidup yang Lintas Budaya dan Lintas Bangsa sebagai Warga Dunia.

Hal ini berarti individu dituntut memiliki wawasan sebagai warga dunia (*world citizen*). Namun siswa harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal, harus diajak berpikir tentang apa yang ada di sekitar lokalnya. Mahasiswa diajak berpikir secara internasional dengan mengajak mereka untuk

tetap peduli dengan situasi yang ada di sekitarnya *act locally and globally*.

j. Hidup Berdampingan secara Damai

Melihat perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai persamaan akan akan menumbuh sikap toleran terhadap kelompok lain dan pada gilirannya dapat hidup berdampingan secara damai.

Sedangkan menurut Sudarminta, tujuan pendidikan multikultural sebagai berikut: 1) mengadakan gerakan reformasi pendidikan guna mengusahakan agar keragaman latar belakang budaya, ras, etnik, agama dan gender peserta didik dapat memperkaya budaya bangsa dan tidak menjadi sumber konflik ataupun diskriminasi sosial; 2) membantu individu memperoleh pemahaman diri yang lebih mendalam dengan melihat dirinya dari perspektif budaya lain sehingga tumbuh pengenalan, saling pengertian, bersikap toleran dan hormat terhadap individu dari budaya lain yang berbeda dengan dirinya; 3) mengintegrasikan muatan multikultural dalam kurikulum yang ada sehingga dampak negatif dari dominasi budaya dan etnik tertentu dalam kurikulum yang sudah ada dapat dihindarkan; 4) mengurangi prasangka negatif dan sentimen kesukuan, etnik, budaya, gender dan keagamaan di sekolah dan di masyarakat; 5) menunjang terciptanya

masyarakat yang lebih demokratis, adil, damai dan sejahtera secara merata; 6) mengembangkan nasionalisme baru yang menekankan kesatuan dalam kebhinekaan; 7) mengurangi derita dan diskriminasi etnik tertentu dan kelompok ras tertentu karena ciri-ciri budaya mereka yang dianggap tidak selaras dengan budaya arus utama; 8) menyadarkan semua akan pentingnya kebudayaan dalam pendidikan dan bahwa ilmu pengetahuan dikonstruksi secara sosial dan kultural.²⁵¹

3. Fungsi Pendidikan Multikultural

The National Council for Social Studies (Gorski, 2001) mengajukan sejumlah fungsi yang menunjukkan pentingnya keberadaan dari pendidikan multikultural. Fungsi tersebut adalah:²⁵²

- a. Memberi konsep diri yang jelas.
- b. Membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya.
- c. Membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat.
- d. Membantu mengembangkan pembuatan keputusan (*decision making*), partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan (*citizenship skills*)

²⁵¹ J.Sudarminta, 2011. *Pendidikan Multikultural: Pengertian, Sejarah, Tujuan, Persoalan Pokok dan Relevansinya untuk Indonesia*. (Yogyakarta), hal. 5

²⁵² Sutarno....., hal. 61

e. Mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa.

B. METODE DAN PENDEKATAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Sebagai sebuah konsep yang harus dituangkan ke dalam sistem kurikulum, biasanya pendidikan multikultural secara umum digunakan metode dan pendekatan (*method and approaches*) yang beragam. Adapun metode yang dapat digunakan dalam pendidikan multikultural adalah sebagai berikut:

1. Metode Kontribusi

Dalam penerapan metode ini peserta didik diajak berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain. Metode ini antara lain dengan menyertakan peserta didik memilih buku bacaan bersama, melakukan aktivitas bersama. Mengapresiasikan even-even bidang keagamaan maupun kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Pembelajar bisa melibatkan pelajaran atau pengalaman yang berkaitan dengan peristiwa ini. Namun perhatian juga diberikan kepada kelompok-kelompok etnik baik sebelum dan sesudah event agar signifikan budaya dan sejarah peristiwa bisa dieksplorasi secara mendalam.

2. Metode Pengayaan

Materi pendidikan, konsep, tema dan perspektif bisa ditambahkan dalam kurikulum tanpa harus mengubah struktur aslinya. Metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang berbeda kultur atau agamanya. Penerapan metode ini, misalnya adalah dengan mengajak peserta didik untuk menilai atau menguji dan kemudian mengapresiasi cara pandang masyarakat tetapi pembelajar tidak mengubah pemahamannya tentang hal itu, seperti pernikahan, dan lain-lain.

3. Metode Transformatif

Metode ini secara fundamental berbeda dengan dua metode sebelumnya. Metode ini memungkinkan peserta didik melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya, etnik dan agama secara kritis. Metode ini memerlukan pemasukan perspektif-perspektif, kerangka-kerangka referensi dan gagasan-gagasan yang akan memperluas pemahaman peserta didik tentang sebuah ide.

Metode ini dapat mengubah struktur kurikulum, dan memberanikan peserta didik untuk memahami isu dan persoalan dari beberapa perspektif etnik dan agama tertentu. Misalnya, membahas konsep “makanan halal” dari agama atau kebudayaan tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat. Metode ini menuntut peserta

didik mengolah pemikiran kritis dan menjadikan prinsip kebhinekaan sebagai premis dasarnya.

4. Metode Pembuatan Keputusan dan Aksi Sosial

Metode ini mengintegrasikan metode transformasi dengan aktivitas nyata di masyarakat, yang pada gilirannya bisa merangsang terjadinya perubahan sosial. Peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami dan membahas isu-isu sosial, tapi juga melakukan sesuatu yang penting berkaitan dengan hal itu.

Metode ini memerlukan peserta didik tidak hanya mengeksplorasi dan memahami dinamika ketertindasan tetapi juga berkomitmen untuk membuat keputusan dan mengubah sistem melalui aksi sosial. Tujuan utama metode ini adalah untuk mengajarkan peserta didik berpikir dan kemampuan mengambil keputusan untuk memberdayakan mereka dan membantu mereka *sense* (merasakan) kesadaran dan kemujaraban berpolitik.

Merancang pendidikan dalam tatanan masyarakat yang penuh dengan permasalahan antar kelompok seperti di Indonesia memang tidaklah mudah. Hal ini ditambah sulit lagi jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat rasis. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan multikultural diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan

masyarakat yang toleran. Adapun untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sejumlah pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa dilakukan di dalam pendidikan kultural adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Historis

Pendekatan ini mengandaikan bahwa materi yang diajarkan kepada peserta didik dengan menengok kembali ke belakang. Maksudnya agar peserta didik mempunyai kerangka berpikir yang komplit sampai ke belakang untuk kemudian merefleksikan untuk masa sekarang atau mendatang. Dengan demikian materi yang diajarkan bisa ditinjau secara kritis dan dinamis.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini mengandaikan terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya atau datangnya di masa lampau. Dengan pendekatan ini materi yang diajarkan bisa menjadi aktual, bukan karena dibuat-buat tetapi karena senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi, dan tidak bersifat indoktrinasi karena kerangka berpikir yang dibangun adalah kerangka berpikir kekinian. Pendekatan ini bisa digabungkan dengan metode kedua, yakni metode pengayaan.

3. Pendekatan Kultural

Pendekatan ini menitikberatkan kepada otentisitas dan tradisi yang berkembang. Dengan pendekatan ini peserta didik bisa melihat mana tradisi yang otentik dan mana yang tidak.

4. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologis perseorangan secara tersendiri dan mandiri. Artinya masing-masing peserta didik harus dilihat sebagai manusia mandiri dan unik dengan karakter dan kemampuan yang dimilikinya. Pendekatan ini menuntut seorang pendidik harus cerdas dan pandai melihat kecenderungan peserta didik sehingga ia bisa mengetahui metode-metode mana saja yang cocok untuk digunakan.

5. Pendekatan Estetik

Pendekatan estetik pada dasarnya mengajarkan peserta didik untuk berlaku sopan dan santun, damai, ramah, dan mencintai keindahan. Sebab segala materi kalau hanya didekati secara doktrinal dan menekan adanya otoritas-otoritas kebenaran maka peserta didik akan cenderung bersikap kasar. Sehingga mereka memerlukan pendekatan ini untuk mengapresiasi segala gejala yang terjadi di masyarakat dengan melihatnya sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang bernilai seni dan estetis.

6. Pendekatan dengan Perspektif Gender

Pendekatan ini mencoba memberikan penyadaran kepada peserta didik untuk tidak membedakan jenis kelamin karena sebenarnya jenis kelamin bukanlah hal yang menghalangi seseorang untuk mencapai kesuksesan. Dengan pendekatan ini, segala bentuk konstruksi sosial yang ada di sekolah yang menyatakan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki bisa dihilangkan.

Keenam pendekatan ini sangat memungkinkan bagi terciptanya kesadaran multikultural di dalam pendidikan dan kebudayaan dan tentu saja, tidak menutup kemungkinan berbagai pendekatan yang lainnya, selain enam yang disebutkan tadi di atas, sangat mungkin untuk diterapkan. Agar terwujudnya pendidikan multikultural di Indonesia.

Pendekatan tersebut juga harus diselaraskan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Masyarakat adalah kumpulan manusia atau individu-individu yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama serta diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual dan kepribadian individu peserta didik. Sebab, masyarakat merupakan tempat yang penuh alternatif dalam upaya

memperkaya pelaksanaan proses pendidikan berbasis multikultural.

Untuk itu, setiap anggota masyarakat memiliki peranan dan tanggung jawab moral terhadap terlaksananya proses pendidikan multikultural. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pendidikan. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam dunia pendidikan merupakan satu hal yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa kini dan di masa yang akan datang.²⁵³

C. PELUANG DAN TANTANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

1. Peluang Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural merupakan sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Pelaksanaan pendidikan multikultural dalam struktur sekolah adalah dengan tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan jenis kelamin. Kesenjangan tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya dan miskin, penduduk di perkotaan dan pedesaan. Fasilitas pelayanan pendidikan di

²⁵³ Choirul Mahfud....., hal. 196.

daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan yang masih terbatas menyebabkan sulitnya anak-anak terutama anak perempuan untuk mengakses layanan pendidikan.²⁵⁴ Perbedaan kultural dapat dijadikan obyek dan alasan untuk melakukan diskriminasi oleh kelompok dominan/mayoritas terhadap kelompok minoritas.²⁵⁵

Rochiati menjelaskan bahwa, tantangan dunia pendidikan dalam perspektif global salah satunya adalah pemahaman pendidikan multikultural yang tidak rasis. Dunia pendidikan dalam era global harus memahami isu-isu dan permasalahan global seperti: keanekaragaman budaya, politik, ekonomi, sosial, konflik dan perdamaian, ketergantungan antar bangsa di dunia, masalah HAM, masalah lingkungan.²⁵⁶ Masuknya kebudayaan (baik produk budaya seperti pakaian, dan nilai-nilai atau norma-norma) akan memengaruhi gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif dan hidonisme. Pengaruh yang disebarkan oleh berbagai media teknologi akan sangat besar terhadap budaya dan perilaku sosial masyarakat.²⁵⁷

²⁵⁴ Dodi Nandika, 2010. *Pendidikan di Tengah Gelombang Perubahan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia), hal. 6-7

²⁵⁵ AinulYaqin....., hal. 21

²⁵⁶ Rochiati Wiriadmadja, 2002. *Pendidikan Sejarah di Indonesia: Perspektif Lokal, Nasional dan Global*, (Bandung: Historia Utama Pres), hal. 278

²⁵⁷ Ali Maksum, 2011. *Pluralisme dan Multikulturalisme, Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing), hal. 312

Munculnya gagasan multikulturalisme telah memberikan peluang bagi kebangkitan etnik dan kebudayaan lokal di Indonesia Pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur. Karena itulah yang terpenting dalam pendidikan multikultural adalah seorang pendidik tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran yang diajarkan. Lebih dari itu, seorang pendidik harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme atau menanamkan nilai-nilai keberagaman pada siswa. Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengharagai perbedaan, sehingga nantinya perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan. Sikap saling toleransi inilah yang nantinya akan menjadikan keberagaman yang dinamis, kekayaan budaya yang menjadi jati diri bangsa yang patut untuk dilestarikan.

Kesadaran multikulturalisme dapat berkembang dengan baik apabila ditanamkan sejak awal terhadap generasi muda melalui lembaga pendidikan. Untuk itu dipandang sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural di

Indonesia terutama agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan karena suku, ras, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat diimplementasikan baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya.

2. Tantangan Pendidikan Multikultural

Anita Lie menuturkan bahwa pendidikan multikultural dalam era globalisasi khususnya dalam pendidikan formal di Indonesia menghadapi tiga tantangan mendasar, yaitu: *Pertama*, Fenomena Homogenisasi yang terjadi dalam dunia pendidikan akibat tarik ulur antara keunggulan dan keterjangkauan. Para siswa tersegregasi dalam sekolah-sekolah sesuai latar belakang sosio-ekonomi, agama, dan etnisitas. Sekolah berafiliasi agama merasa enggan menerima siswa tidak seagama. Lalu terjadi pengelompokan anak berdasar agama, kelas sosio-ekonomi, dan suku. Tiap hari anak-anak bergaul dan berinteraksi hanya dengan teman segolongan; *Kedua*, kurikulum yang masih berdasarkan status ekonomi sosial, kultur lokal dan geografis, seperti bahan-bahan pelajaran yang mengandung bias (kelas, gender, etnis, agama, dan suku); *Ketiga*, Kelayakan dan kompetensi guru di

Indonesia pada umumnya masih di bawah standar apalagi untuk mengelola pembelajaran multikulturalisme. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pendidikan multikultural banyak pekerjaan rumah yang harus digarap mulai dari rancangan integrasi kurikulum, standardisasi buku dan materi, pengembangan materi dan kurikulum, pengembangan profesional dan pelatihan guru, rancangan kegiatan, dan evaluasi.²⁵⁸

Pendidikan multikultural dapat dilaksanakan dengan baik jika memperhatikan berbagai aspek, seperti: kurikulum multikultural, tenaga pengajar (guru), proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan multikultural.

a. Kurikulum Multikultural

Model kurikulum yang dapat digunakan dalam pendidikan multikultural mencakup kurikulum yang "resmi" dan "*the hidden curriculum*", yakni kurikulum yang tidak tertulis dan terencana, tetapi proses internalisasi nilai, pengetahuan dan keterampilan justru terjadi di kalangan peserta didik. Dalam kurikulum resmi, pendidikan multikultural sebaiknya diintegrasikan dengan semua mata pelajaran dan kegiatan lintas kurikulum. Sebaliknya,

²⁵⁸ <http://www.kompas.com>. Anita Lie, *Mengembangkan Model Pendidikan Multikultural*. Diakses pada tanggal 12 Mei 2018

wawasan multikulturalisme tidak dimasukkan sebagai beban tambahan sebagai mata pelajaran baru dalam kurikulum yang sudah dirasakan amat berat oleh guru dan peserta didik.

Dewasa ini, memasukkan isu tentang pendidikan multikultural dalam kurikulum pembelajaran dirasa sangat penting, sebagaimana yang diungkapkan oleh Henry A Giroux: “*a multicultural curriculum must be develop in public schools and institution of higher education, contexts that serve to figure relations between school, teachers, students, and the wider community*”.²⁵⁹ (Kurikulum multikultural harus dikembangkan di sekolah umum dan institusi pendidikan tinggi, konteks yang menyajikan bagaimana bentuk hubungan antara sekolah, guru, siswa, dan masyarakat luas).

Oleh karena itu, model kurikulum multikultural harus dapat mengintegrasikan proses pembelajaran nilai, pengetahuan dan keterampilan "hidup" dalam masyarakat yang multikultural, seperti: terampil bernegosiasi, mengemukakan dan menghadapi perbedaan, konflik, *cooperative learning* dan *problem solving*. Muatan nilai,

²⁵⁹ Henry A. Giroux, 1997. *Pedagogy and Politics of Hope: Theory, Culture, and Schooling*, (USA.: HarperCollins Publisher, Inc), hal. 251

pengetahuan dan keterampilan ini dapat dirancang sesuai dengan tahap perkembangan anak dan jenjang pendidikan. Muatan-muatan nilai multikultural perlu dirancang dalam suatu strategi proses pembelajaran yang mendorong terjadinya internalisasi nilai-nilai.

b. Tenaga Pengajar (Guru)

Pengembangan kurikulum dengan pendekatan multikultural haruslah didahului oleh sosialisasi yang baik, agar para tenaga pengajar (guru) dapat mengembangkan kurikulum dalam bentuk silabus dan rencana pembelajaran, proses belajar di kelas dan evaluasi yang sesuai dengan prinsip multikultural. Hal ini disebabkan penentu utama keberhasilan pendidikan multikultural adalah guru. Untuk itu, guru harus paham dengan karakteristik pendidikan multikultural sehingga dapat mengembangkan kurikulum multikultural dalam kegiatan belajar yang menjadi tanggung jawabnya.

Seorang guru yang mengajar melalui pendekatan multikultural harus fleksibel, karena untuk mengajar dalam multikultural seperti Indonesia, pertimbangan perbedaan budaya adalah hal penting yang harus menjadi perhatian guru. Faktor-faktor seperti: membangun keberagaman di sekolah, menghargai keragaman bahasa, membangun sikap *sensitive gender*, membangun pemahaman kritis terhadap

ketidakadilan dan perbedaan status sosial, membangun sikap anti diskriminasi etnis, menghargai perbedaan kemampuan dan menghargai perbedaan umur harus dikemas dalam ranah pembelajaran dan kesadaran di sekolah, sehingga tercipta suatu paham untuk memahami dan menerima segala perbedaan yang ada pada setiap individu peserta didik dan pada akhirnya peserta didik diharapkan mampu memiliki karakter kuat untuk bersikap demokratis, pluralis, dan humanis.

c. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dikembangkan harus menempatkan peserta didik pada kenyataan sosial di sekitarnya. Artinya, proses belajar yang mengandalkan peserta didik untuk belajar secara kelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi kompetitif yang positif. Dengan cara ini, perbedaan antar individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan peserta didik terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, ekonomi, intelektual. Proses belajar yang dapat dikembangkan misalnya: *cooperative learning, problem solving*.

d. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat

evaluasi yang digunakan tidak hanya mengukur hasil belajar (*achievement*), tetapi secara lengkap memberi informasi yang lebih jelas tentang proses pembelajaran. Mengintegrasikan kegiatan pengukuran hasil belajar dengan keseluruhan proses pembelajaran seperti kinerja, portopolio, pedoman observasi, pedoman wawancara, rating scale, skala sikap, cek-list, kuesioner dan lain sebagainya sebagai alat penilaian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran yang menggunakan pendekatan multikultural.

Menurut Orstein dan Hunkins, konten pembelajaran multikultural (*curriculum materials*) perlu merancang desain isi dan teknik pembelajaran yang relevan. Beberapa orientasi penting untuk dipertimbangkan mendesain isid an proses pembelajaran multikultural adalah.²⁶⁰

- a. *Introducing materials that are multiracial, multiethnic, nonsexist* (Memperkenalkan materi yang multiras, multietnis, nonseks)
- b. *Teaching values that promote cultural diversity and individuality* (Mengajarkan nilai-nilai yang mempromosikan keragaman budaya dan individualitas)

²⁶⁰ Allan C.Orsteindan Francis P. Hunkins, 1998. *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, Third Edition*, (USA: Allyn& BaconCompany), hal. 365-368

- c. *Incorporating various cultural and ethnic activities in the classroom and school-community program*
(Menggabungkan berbagai kegiatan budaya dan etnis di kelas dan sekolah-program komunitas)
- d. *Encouraging multiculturalism and multi dialects*
(Mendorong multikulturalisme dan multi dialek)
- e. *Emphasizing multicultural teacher education program*
(Menekankan program pendidikan guru multikultural).

Dalam konteks desain pembelajaran, ada beberapa aspek yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan. Aspek tersebut antara lain:²⁶¹

- a. Istilah pendidikan pluralis-multikultural dapat digunakan pada tingkat deskriptif dan normatif yang menggambarkan isu-isu pendidikan berkaitan dengan masyarakat yang pluralis-multikultural
- b. Konsep pendidikan pluralis-multikultural dapat diwujudkan dalam kurikulum, namun perlu dirumuskan strategi dan mata pelajaran yang harus ditempuh, dan metode penyampaiannya
- c. Perlu peta persoalan dan kendala yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pluralis-multikultural

²⁶¹ Choirul Mahfudz....., hal. 34

- d. Perlu melakukan studi komparasi terhadap negara-negara dengan persoalan pluralis dan multikulturalitas yang kompleks
- e. Konsep, model, dan strategi pengembangan pendidikan agama berwawasan pluralis-multikultural.
- f. Prinsip dasar dalam pengembangan model pembelajaran pluralis-multikultural:²⁶²
- g. Pendidikan pluralis-multikultural sebaiknya dimulai dari aspek yang paling kecil, yaitu diri sendiri
- h. Pendidikan pluralis-multikultural hendaknya dikembangkan agar pembelajar tidak mengembangkan sikap etnosentris
- i. Pendidikan pluralis-multikultural dikembangkan secara integratif, komprehensif, dan konseptual
- j. Pendidikan pluralis-multikultural harus menghasilkan sebuah perubahan, bukan saja pada materi kurikulum, tetapi juga pada praktik pembelajaran dan struktur sosial dalam sebuah kelas
- k. Pendidikan pluralis-multikultural lebih menekankan pada aspek afektif dan kognitif dengan cara membangun dan mengembangkan keterkaitan isu atau masalah dalam keseharian yang dihadapi anak didik di lingkungan sempit maupun dalam lingkungan dengan skala yang lebih luas.

²⁶² Ngainun Naimdan Achmad Sauqi....., hal. 219.

D. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Pendidikan multikultural dapat dirumuskan sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia serta pengurangan atau penghapusan jenis prasangka atau *prejudice* untuk suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Pendidikan multikultural juga dapat dijadikan instrument strategis untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya. Melalui pendidikan multikultural kita dapat memberi seluruh siswa-tanpa memandang status sosio-ekonomi; gender; orientasi seksual; atau latar belakang etnis, ras atau budaya-kesempatan yang setara untuk belajar di sekolah. Pendidikan multibudaya juga didasarkan pada kenyataan bahwa siswa tidak belajar dalam kekosongan, budaya mereka memengaruhi mereka untuk belajar dengan cara tertentu.

Paul C. Gorski berpendapat bahwa : *Multicultural education is a progressive approach for transforming education that holistically critiques and responds to discriminatory policies and practices in education. It is grounded in ideals of social justice, education equity, critical pedagogy, and dedication to providing educational experiences in which all students reach their full potentials as learners and as socially aware and active beings, lokally, nationally, and*

globally. (Pendidikan multikultural adalah pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan yang secara holistik mengkritik dan merespon kebijakan dan praktik diskriminatif dalam pendidikan. Hal ini didasarkan pada cita-cita keadilan sosial, pemerataan pendidikan, pedagogi kritis, dan dedikasi untuk memberikan pengalaman pendidikan di mana semua siswa mencapai potensi penuh mereka sebagai pelajar dan sebagai makhluk yang sadar dan aktif secara sosial, lokal, nasional, dan global).²⁶³

Pendidikan multikultural merupakan suatu proses transformasi yang tentunya membutuhkan waktu panjang untuk mencapai maksud dan tujuannya. Menurut Zamroni disebutkan beberapa tujuan yang akan dikembangkan pada diri siswa dalam proses pendidikan multikultural, yaitu:²⁶⁴

1. Siswa memiliki kemampuan berpikir kritis atas apa yang telah dipelajari.
2. Siswa memiliki kesadaran atas sifat syak wasangka atas pihak lain yang dimiliki, dan mengkaji mengapa dan dari mana sifat itu muncul, serta terus mengkaji bagaimana cara menghilangkannya

²⁶³ Paul C. Gorski, 2010. “*The Challenge Of Defining ‘Multi cultural Education’*”, www.edchange.org/multicultural/initial.html. Diakses 20 Juni 2018

²⁶⁴ Zamroni, 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*, (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama), hal 126.

3. Siswa memahami bahwa setiap ilmu pengetahuan bagaikan sebuah pisau bermata dua: dapat dipergunakan untuk menindas atau meningkatkan keadilan sosial.
4. Para siswa memahami bagaimana mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan.
5. Siswa merasa terdorong untuk terus belajar guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya.
6. Siswa memiliki cita-cita posisi apa yang akan dicapai sejalan dengan apa yang dipelajari.
7. Siswa dapat memahami keterkaitan apa yang dilakukan dengan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat-berbangsa.

Oleh karenanya praktek pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar multikultural. Prinsip fleksibilitas pendidikan multikultural juga disarankan oleh Gay (2002) sebagaimana dikutip Zamroni, dikatakan bahwa amat keliru kalau melaksanakan pendidikan multikultural harus dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah atau monolitik. Sebaliknya, dia mengusulkan agar pendidikan multikultural diperlakukan sebagai pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Pendidikan multikultural juga dapat diberlakukan sebagai alat bantu untuk menjadikan warga

masyarakat lebih memiliki toleran, bersifat inklusif, dan memiliki jiwa kesetaraan dalam hidup bermasyarakat, serta senantiasa berpendirian suatu masyarakat secara keseluruhan akan lebih baik, manakala siapa saja warga masyarakat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki bagi masyarakat sebagai keutuhan.²⁶⁵ Bahkan Gay merekomendasikan agar pembelajaran perlu memberi kesempatan bagi siswa untuk mempelajari bagaimana suatu kultur masyarakat bisa berperan dalam upaya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warganya.

Dalam pandangan Zamroni, pendidikan multikultural diusulkan untuk dapat dijadikan instrument rekayasa sosial lewat pendidikan formal, artinya institusi sekolah harus berperan dalam menanamkan kesadaran hidup dalam masyarakat multikultural dan mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi untuk mewujudkan kebutuhan serta kemampuan bekerjasama dengan segala perbedaan yang ada.

Sekolah harus dipandang sebagai suatu masyarakat, masyarakat kecil; artinya, apa yang ada di masyarakat harus ada pula di sekolah. Perspektif sekolah sebagai suatu masyarakat kecil ini memiliki implikasi bahwa siswa dipandang sebagai suatu individu yang memiliki karakteristik

²⁶⁵*Ibid*, hal. 150

yang terwujud dalam bakat dan minat serta aspirasi yang menjadi hak siswa. Pada level sekolah, dengan adanya berbagai perbedaan yang dimiliki masing-masing individu, maka sekolah harus memperhatikan: a) setiap siswa memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda-beda, termasuk kebutuhan personal dan sosial, b) kebutuhan vokasi dan karier, c) kebutuhan psikologi dan perkembangan moral spiritual.

Dari perspektif hasil pembelajaran, pendidikan multikultural memiliki tiga sasaran yang dikembangkan pada diri setiap siswa: *Pertama*, pengembangan identitas kultural yakni merupakan kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan suatu etnis tertentu. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan kelompok etnis dan menimbulkan kebanggaan serta percaya diri sebagai warga kelompok etnis tertentu; *Kedua*, hubungan interpersonal, yakni kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain, dengan senantiasa mendasarkan pada persamaan dan kesetaraan, serta menjauhi sifat syak wasangka dan stereotip; *Ketiga*, memberdayakan diri sendiri, yakni suatu kemampuan untuk mengembangkan secara terus menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural.

Pendidikan multikultural juga sangat relevan dengan pendidikan demokrasi di masyarakat plural seperti Indonesia,

yang menekankan pada pemahaman akan multi etnis, multi ras, dan multikultur yang memerlukan konstruksi baru atas keadilan, kesetaraan dan masyarakat yang demokratis.

Menurut Higbee dkk yang dikutip oleh Abdurrahmansyah, dari varian desain pembelajaran yang biasa dikembangkan, terdapat satu desain yang telah terbukti efektif untuk pembelajaran multikultural, yakni *Integrated Multicultural Instructional Model* (IMID). Model pembelajaran ini terdiri atas empat sisi yang saling terhubung, yakni *pertama*, aspek penegasan terhadap konsep pembelajaran dari sisi proses dan langkah-langkah yang dipersiapkan pengajar; *kedua*, aspek materi ajar yang mengacu pada konsep *integrated curriculum*; *ketiga*, pengembangan *class room management* sehingga peserta didik dimungkinkan untuk didorong aktif dan terlibat dalam pembelajaran secara aktif; *keempat*, aspek pemilihan pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Pendekatan humanistik menjadi sisi penting dalam pembelajaran ini, selain tidak boleh mengabaikan pandangan sosial *constructivism*.²⁶⁶

Selain desain pembelajaran, peran seorang guru sangat menentukan keberhasilan tujuan pembelajaran pendidikan

²⁶⁶ Abdurrahmansyah, 2017. *Pendidikan Multukultural dalam Desain Kurikulum dan Pembelajaran Keagamaan Islam*, (Jurnal Madania: Vol. 21, No. 1 Juni).

multikultural ini. Menurut Bennett yang dikutip oleh Abdurrahmansyah menegaskan bahwa selain guru, sistem di dalam sekolah harus terlibat secara kuat dalam membangun budaya multikultural di sekolah, yaitu: peserta didik, guru, orang tua, administrator dalam sistem sekolah tersebut. Harus dipastikan adanya suasana lingkungan belajar yang mendukung interaksi yang positif, kurikulum multikultural itu sendiri, harapan dan keinginan guru yang kuat, dukungan layanan petugas tata usaha, serta sistem pelatihan guru yang baik.²⁶⁷

Semua hal tersebut di atas akan sangat mendukung terwujudnya pendidikan multikultural di Indonesia apabila faktor-faktor pendukung tersebut dapat diintegrasikan dengan baik dalam bentuk sebuah proses pembelajaran. Keberagaman di Indonesia tidak akan lagi menjadi sebuah masalah perpecahan, akan tetapi menjadi sebuah kekayaan bangsa yang harus dipelihara dan dijaga dengan baik oleh semua pihak.

Penutup

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat majemuk. Kemajemukan ini, di satu sisi merupakan berkah, karena kemajemukan itu sesungguhnya merefleksikan kekayaan khasanah budaya. Namun di sisi lain, kemajemukan juga berpotensi besar untuk tumbuh suburnya konflik, terutama

²⁶⁷ *Ibid.*,

jika keberagaman tersebut tidak mampu dikelola dengan baik. Pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan tersebut secara kreatif dan hendaknya mampu melakukan internalisasi nilai-nilai multikultur itu sendiri dalam institusi pendidikan.

Konsep pendidikan multikultural di antaranya terdiri dari lima dimensi: (1) Integrasi konten, (2) Proses penyusunan pengetahuan, (3) Mengurangi prasangka, (4) Pedagogi kesetaraan dan (5) pelibatan peserta didik dalam budaya sekolah dan struktur sosial yang memberdayakan. Adapun faktor yang melatar belakangi munculnya pendidikan multikultural ini adalah: (1) geografis (2) budaya (3) iklim (4) ekonomi (5) Politik Negara (6) kehidupan agama (7) Faktor kesukuan (8) Tingkat kemajuan peradaban.

Sedangkan urgensi pendidikan multikultural adalah: (1) Sarana alternatif pemecahan konflik, (2) Agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya, (3) Sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional, dan (4) Menuju masyarakat Indonesia yang Multikultural. Sedangkan metode yang digunakan adalah: Metode Kontribusi, Metode Pengayaan, Metode Transformatif dan Metode Pembuatan Keputusan dan Aksi Sosial.

Pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang

berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur. Melalui pendidikan multikultural kita dapat memberi pengetahuan kepada seluruh siswa-tanpa memandang status sosio-ekonomi; gender; orientasi seksual; atau latar belakang etnis, ras atau budaya-kesempatan yang setara untuk belajar di sekolah. Pendidikan multibudaya juga didasarkan pada kenyataan bahwa siswa tidak belajar dalam kekosongan, budaya mereka memengaruhi mereka untuk belajar dengan cara tertentu.

Referensi:

- Abdullah, M. Amin. 2000. "Problem Epistemologis- Metodologis Pendidikan Islam," dalam Abdul Munir Mul Khan, *Religiositas Iptek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrahmansyah. 2017. *Pendidikan Multukultural dalam Desain Kurikulum dan Pembelajaran Keagamaan Islam*. Jurnal Madania: Vol. 21, No. 1 Juni 2017.
- Arifin. 2003. *Ilmu Perbandingan Pendidikan*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Banks, James A. 2002. *An introduction to Multicultural Education*. Boston-London: Allyn and Bacon Press.
- Banks, James A dan Banks, C.A.M. (Eds). 2001. *Handbook of Research on Multicultural Education*. New York: MacMillan.
- Depag RI. 2006. *Undang-undang dan Peraturan Pememrintah RI tentang Pendidikan*. Jakarta: Depag RI.
- Djohar. 2003. *Pendidikan Strategik, Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: LESFI.
- Fay, Brian. 1996. *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach* Oxrofd: Backwell.
- Giroux, Henry A. 1997. *Pedagogy and Politics of Hope: Theory, Culture, and Schooling*. USA.: HarperCollins Publisher, Inc.

- Gorski, Paul C. 2010. "The Challenge Of Defining 'Multicultural Education'". www.edchange.org/multicultural/initial.html. Diakses 20 Juni 2018.
- Mahfud, Choirul. 2009. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maksum, Ali. 2011. *Pluralisme dan Multikulturalisme, Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Muhaimin. 2002. *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya mengefektifkan Pendidikan agama di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naim, Ngainun dan Achmad Sauqi. 2011. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nandika, Dodi. 2010. *Pendidikan di Tengah Gelombang Perubahan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Orstein, Allan C. dan Francis P. Hunkins. 1998. *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*. Third Edition. USA: Allyn & Bacon Company.
- Rohman, Arif. 2010. *Pendidikan Komparatif*. Yogyakarta: LaksbangGrafika.
- Rosyada, Dede. 2014. *Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional, Jurnal Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014*.

- Stavenhagen, Rudolfo. 1996. "Education for a Multicultural World". in JasqueDelors, et al. *Learning The Treasure Within*. Paris: UNESCO.
- Sudarminta, J. 2011. *Pendidikan Multikultural: Pengertian, Sejarah, Tujuan, Persoalan Pokok dan Relevansinya untuk Indonesia*. Yogyakarta.
- Sutarno. 2007. *Pendidikan Multikultural*. Kalimantan Selatan: Dinas Pendidikan dan FKIP Unlam.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Wiriatmadja, Rochiati. 2002. *Pendidikan Sejarah di Indonesia; Perspektif Lokal, Nasional dan Global*. Bandung: Historia Utama Pres.
- Yaqin, Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural; Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Zamroni. 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
- <http://www.kompas.com>. Anita Lie, *Mengembangkan Model Pendidikan Multikultural*

Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag: Lahir di Cambai-Kepulauan Bangka Belitung, 13 Juli 1973. Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang. Penulis lainnya merupakan Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang Angkatan 2017, yaitu: **Apriadi:** Lahir di desa Ibul tanggal 10 Oktober 1989, bekerja sebagai Guru di MA Muhammadiyah 1 Palembang; **Abas:** Lahir di Jatimulyo tanggal 20 Desember 1981, sebagai Guru Negeri Sipil di MAN 2 Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan; **Dodi Irawan:** Lahir di Palembang pada tanggal 07 Agustus 1987, sebagai guru di MTs As-Sanadiyah Palembang; **Elma Fu'adah:** Lahir di Sriwangi tanggal 21 Desember 1992, sebagai guru di MTs Subulussalam 01 OKU Timur; **Evi Erianti:** Lahir di Sungai Balak pada tanggal 28 Juni 1983, mengajar di MTs Al-Ittifaqiah Ogan Ilir; **Femi Asmiyanti:** Lahir di Pangkal Pinang 28 Juni 1986, sebagai Guru PNS di MTs Miftahul Jannah Banyuasin; **Fahruroji:** Lahir di Srimulyo pada tanggal 06 Mei 1986, sebagai Kepala Madrasah di MI Nurul Huda Srimulyo OKU Timur; **Ita Pramita:** Lahir di Tebing Abang, 18 September 1991, sebagai guru di MIN 1

Palembang; **Ledy Nanda:** Lahir di Palembang pada tanggal 21 Juli 1990, bertugas di MI Negeri 1 Palembang; **Muhammad Latief Efendi:** Lahir di Pematang pada tanggal 28 Juni 1981, bertugas sebagai Guru PNS di MAN 1 Ogan Komering Ulu; **M. Rizal Ansori:** Lahir di OKU Timur pada tanggal 05 Desember 1984, sebagai Kepala Madrasah Raudhatul Istiqomah Lirboyo Surabaya, Madang Suku III OKU Timur Sumatera Selatan; **M. Saiful Amin:** Lahir di OKU Timur tanggal 17 Desember 1983, sebagai guru di MI Nurul Huda Banuayu OKU Timur; **Muhammad Sunadi:** Lahir di Pahang Asri tanggal 10 Juli 1979, sebagai Kepala Madrasah MI Al-Ikhlash Pemetung Basuki OKU Timur; **Muhammad Sutikno:** Lahir di Karang Jadi tanggal 10 Oktober 1984, bertugas di MTs Al-Mustofa Nusa Tenggara Timur; **Naili Fauziah:** Lahir di Padang Panjang tanggal 09 September 1982, sebagai guru PNS di MTs Negeri Padang Panjang Sumatera Barat; **Nurul Haibah Maghfuroh:** Lahir di Bantul tanggal 28 Februari 1984, bertugas di MA Al-Iftifaqiah Indralaya Ogan Ilir; **Tri Yono:** Lahir di Margomulyo tanggal 04 Oktober 1984, sebagai guru di MTs Mambul Ulum OKU Timur.